



PEMERINTAH KOTA MADIUN

# RANCANGAN TEKNOKRATIK



RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH  
DAERAH

# (RPJMD)

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	- 1 -
1.1.Latar Belakang .....	- 1 -
1.2.Dasar Hukum .....	- 3 -
1.3.Hubungan Antar Dokumen.....	- 8 -
1.3.1.Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RPJMN .....	- 8 -
1.3.2.Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	- 8 -
1.3.3.Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kota Madiun.....	- 8 -
1.3.3.1.Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RKP Kota Madiun .....	- 10 -
1.3.3.2.Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah .....	- 11 -
1.4.Maksud dan Tujuan .....	- 11 -
1.5.Sistematika Penulisan .....	- 12 -
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	- 14 -
2.1.Aspek Geografi dan Demografi .....	- 14 -
2.1.1.Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	- 14 -
2.1.2. Kondisi Topografi.....	- 19 -
2.1.3.Kondisi Geologi.....	- 19 -
2.1.4.Kondisi Hidrologi .....	- 20 -
2.1.5.Kondisi Klimatologi .....	- 22 -
2.1.6.Kondisi Geografi.....	- 22 -
2.1.6.1 Persentase Pemanfaatan Ruang (RTRW) .....	- 22 -
2.1.6.2 Alih Fungsi Lahan.....	- 23 -
2.1.6.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	- 24 -
2.1.6.4 Indeks Risiko Bencana.....	- 27 -
2.1.6.5 Indeks Ketahanan Pangan .....	- 28 -
2.1.7. Kondisi Demografi.....	- 28 -
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	- 32 -
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi .....	- 32 -
2.2.1.1.Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	- 32 -
2.2.1.2.Indeks Gini .....	- 39 -
2.2.1.3.Tingkat Kemiskinan.....	- 41 -
2.2.1.4.Tingkat Pengangguran Terbuka .....	- 45 -
2.2.1.5.Indeks Pembangunan Manusia .....	- 47 -
2.2.1.6.Rata-Rata Lama Sekolah .....	- 51 -
2.2.1.7.Harapan Lama Sekolah.....	- 53 -

2.2.1.8. Umur Harapan Hidup.....	- 55 -
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	- 57 -
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat .....	- 57 -
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender .....	- 57 -
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	- 60 -
2.3.1. Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah .....	- 60 -
2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto .....	- 60 -
2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.....	- 67 -
2.3.1.3. Indeks Ekonomi Inklusif.....	- 69 -
2.3.2. Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) .....	- 69 -
2.3.2.1. Pendidikan.....	- 69 -
2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	- 70 -
2.3.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	- 72 -
2.3.4. Fokus Iklim Investasi .....	- 73 -
2.3.4.1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban .....	- 73 -
2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah.....	- 73 -
2.3.5. Proyeksi Kondisi Makro Daerah .....	- 81 -
2.3.5.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi .....	- 81 -
2.3.5.2. Proyeksi Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2025-2029 .....	- 82 -
2.3.5.3. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2025-2029 .....	- 82 -
2.3.5.4. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2025-2029.....	- 83 -
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	- 83 -
2.5. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	- 150 -
2.5.1. Analisis Proyeksi Kependudukan.....	- 150 -
2.5.1.1. Berdasarkan Total Penduduk.....	- 151 -
2.5.1.2. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	- 152 -
2.5.1.3. Berdasarkan Kelompok Umur .....	- 153 -
2.5.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar .....	- 156 -
2.5.2.1. Rumah/Tempat Tinggal.....	- 156 -
2.5.2.2. Air Bersih.....	- 158 -
2.5.2.3. Energi/Listrik.....	- 163 -
2.5.2.4. Persampahan.....	- 166 -
2.5.2.5. Fasilitas Kesehatan .....	- 168 -
2.5.2.6. Fasilitas Pendidikan.....	- 172 -
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>- 178 -</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	- 179 -
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....	- 179 -
3.1.1.1. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah.....	- 180 -
3.1.1.2. Kinerja Realisasi Belanja Daerah .....	- 187 -
3.1.1.3. Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah .....	195

3.1.2 Neraca Daerah.....	- 198 -
3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan.....	- 205 -
3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah.....	- 206 -
3.2.2. Realisasi dan Proyeksi dari belanja daerah.....	- 214 -
3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	- 224 -
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>- 227 -</b>
4.1 Permasalahan.....	- 227 -
4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	- 227 -
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	- 230 -
4.1.2.1. Urusan Wajib Dasar.....	- 230 -
4.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	- 231 -
4.1.2.3. Urusan Pilihan.....	- 232 -
4.1.2.4. Penunjang Urusan Pemerintahan.....	- 233 -
4.2 Isu strategis.....	- 233 -
4.2.1 Isu Internasional.....	- 233 -
4.2.2 Isu Nasional.....	- 235 -
4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.....	- 235 -
4.2.2.2. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.....	- 239 -
4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur.....	- 240 -
4.2.4. Isu Strategis Kota Madiun.....	- 250 -
4.2.5. Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis Kota Madiun.....	- 263 -
<b>BAB V REKOMENDASI .....</b>	<b>- 269 -</b>
5.1 Sasaran Utama Visi Madiun Maju Mendunia : Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan.....	- 269 -
5.2 Perwujudan Kota Madiun Sejahtera 2045 pada Periode Sasi Tahun 2025-2029.....	- 272 -
5.3 Tema dan Arah Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.....	- 277 -
5.4 Rekomendasi Kebijakan.....	- 279 -
5.5 Arah Pembangunan Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043.....	- 281 -
5.6 Indikasi Program Unggulan.....	- 286 -
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>- 290 -</b>
6.1 Pedoman Transisi.....	- 290 -
6.2 Kaidah Pelaksanaan.....	- 292 -

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023 .....	15 -
Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun .....	15 -
Tabel 2. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun.....	19 -
Tabel 2. 4 Ketaatan Terhadap RTRW, 2019-2023.....	23 -
Tabel 2. 5 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020-2023.....	23 -
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	29 -
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023.....	30 -
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019-2023.....	31 -
Tabel 2. 9 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, Tahun 2019-2023 .....	36 -
Tabel 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023.....	36 -
Tabel 2. 11 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	42 -
Tabel 2. 12 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	44 -
Tabel 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	47 -
Tabel 2. 14 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur.....	49 -
Tabel 2. 15 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2008-2023.....	63 -
Tabel 2. 16 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2008-2023 .....	66 -
Tabel 2. 17 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2018-2021.....	69 -
Tabel 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%).....	74 -
Tabel 2. 19 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023.....	75 -
Tabel 2. 20 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	78 -
Tabel 2. 21 Perkembangan Komponen IPM Kota Madiun Tahun 2010-2023 .....	80 -
Tabel 2. 22 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2023 .....	84 -
Tabel 2. 23 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023-	84 -
Tabel 2. 24 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2019 – 2023 .....	86 -
Tabel 2. 25 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	91 -
Tabel 2. 26 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 – 2023 .....	94 -
Tabel 2. 27 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	95 -
Tabel 2. 28 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	95 -
Tabel 2. 29 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	96 -
Tabel 2. 30 Jumlah Kasus KLB Kota Madiun Tahun 2022-2024.....	98 -
Tabel 2. 31 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	98 -
Tabel 2. 32 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	99 -
Tabel 2. 33 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	100 -

Tabel 2. 34 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	- 101 -
Tabel 2. 35 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 .....	- 102 -
Tabel 2. 36 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun Tahun 2023 .....	- 112 -
Tabel 2. 37 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 .....	- 114 -
Tabel 2. 38 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023.....	- 116 -
Tabel 2. 39 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman Tahun 2019-2023.....	- 118 -
Tabel 2. 40 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2021 dan 2023 .....	- 119 -
Tabel 2. 41 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2019-2023 .....	- 120 -
Tabel 2. 42 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023 .....	- 122 -
Tabel 2. 43 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2023 .....	- 123 -
Tabel 2. 44 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 .....	- 124 -
Tabel 2. 45 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	- 129 -
Tabel 2. 46 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	- 131 -
Tabel 2. 47 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2022-2023.....	- 132 -
Tabel 2. 48 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	- 133 -
Tabel 2. 49 Persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2019-2023 .....	- 133 -
Tabel 2. 50 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2021-2023.....	- 134 -
Tabel 2. 51 Data Layanan Pertanahan Tahun 2019- 2023 .....	- 134 -
Tabel 2. 52 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Tahun 2019- 2023 .....	- 135 -
Tabel 2. 53 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2023 .....	- 136 -
Tabel 2. 54 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	- 138 -
Tabel 2. 55 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	- 139 -
Tabel 2. 56 Intensitas Bencana di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	- 142 -
Tabel 2. 57 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2021-2023.....	- 143 -
Tabel 2. 58 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2023.....	- 144 -
Tabel 2. 59 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan Kota Madiun, Tahun 2019-2023 .....	- 146 -
Tabel 2. 60 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, Tahun 2019-2023.....	- 146 -
Tabel 2. 61 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina Tahun 2023 .....	- 147 -
Tabel 2. 62 Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2023 .....	- 147 -
Tabel 2. 63 Pelayanan Kepegawaian Tahun 2019-2023.....	- 148 -
Tabel 2. 64 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023.....	- 148 -
Tabel 2. 65 Capaian Pelayanan Statistik Tahun 2019-2023 .....	- 149 -
Tabel 2. 66 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 .....	- 149 -
Tabel 2. 67 Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	- 150 -
Tabel 2. 68 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun .....	- 152 -
Tabel 2. 69 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin.....	- 153 -

Tabel 2. 70	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun berdasarkan Kelompok Umur .....	154 -
Tabel 2. 71	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Madiun .....	157 -
Tabel 2. 72	Standar Kebutuhan Domestik .....	159 -
Tabel 2. 73	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kota Madiun .....	162 -
Tabel 2. 74	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kota Madiun .....	162 -
Tabel 2. 75	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Madiun berdasarkan Standar Pelayanan PLN.....	165 -
Tabel 2. 76	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Madiun .....	165 -
Tabel 2. 77	Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan .....	167 -
Tabel 2. 78	Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan TPS, TPA, dan Mobil Sampah Kota Madiun Berdasarkan SNI.....	167 -
Tabel 2. 79	Proyeksi Persampahan di Kota Madiun.....	167 -
Tabel 2. 80	Sarana Kebutuhan Kesehatan .....	169 -
Tabel 2. 81	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Kota Madiun..	170 -
Tabel 2. 82	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Madiun.....	170 -
Tabel 2. 83	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Posyandu di Kota Madiun.....	171 -
Tabel 2. 84	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kota Madiun .....	172 -
Tabel 2. 85	Kebutuhan Ruang Kelas .....	173 -
Tabel 2. 86	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Madiun .....	174 -
Tabel 2. 87	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kota Madiun.....	175 -
Tabel 2. 88	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun .....	175 -
Tabel 2. 89	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Madiun .....	176 -
Tabel 2. 90	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Madiun .....	177 -
Tabel 3. 1	Realisasi dan Anggaran Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 .....	185 -
Tabel 3. 2	Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 .....	193 -
Tabel 3. 3	Realisasi dan Anggaran Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2024	196
Tabel 3. 4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun, Tahun 2019-2023.....	199 -
Tabel 3. 5	Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2019-2022 .....	203 -
Tabel 3. 6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2026 .....	211 -
Tabel 3. 7	Realisasi Belanja Tahun 2020-2023, Anggaran Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.....	220 -
Tabel 3. 8	Rincian Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2026 .....	225 -
Tabel 4. 1	Isu Strategis Pembangunan Nasional dan Tantangan Pembangunan.....	235 -
Tabel 4. 2	Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Kota Madiun .....	263 -
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 .....	272 -
Tabel 5. 2	Sasaran Indikator Makro Daerah pada Periodesasi Tahun 2025-2029.....	272 -
Tabel 5. 3	Arah Kebijakan Periode I (2025-2029) RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045.....	272 -

Tabel 5. 4 Transformasi dan Arah Pembangunan Periode I (2025-2029) RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045.....	- 278 -
Tabel 5. 5 Keterkaitan sasaran strategis, strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas.....	- 287 -

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun .....	14 -
Gambar 2. 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	24 -
Gambar 2. 3 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	25 -
Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	26 -
Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun Tahun 2019-2023 ..	26 -
Gambar 2. 6 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2019-2023.....	28 -
Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2019-2023.....	29 -
Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir di Kota Madiun, Tahun 2019-2023.....	30 -
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022.....	31 -
Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Madiun, Tahun 2019-2023.....	32 -
Gambar 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2002-2023 .....	34 -
Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 .....	35 -
Gambar 2. 13 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 .....	38 -
Gambar 2. 14 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2008-2023.....	40 -
Gambar 2. 15 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2023 .....	43
Gambar 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023.....	46 -
Gambar 2. 17 IPM Kota Madiun Tahun 2002-2023.....	48 -
Gambar 2. 18 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023.....	50 -
Gambar 2. 19 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2002-2023.....	52 -
Gambar 2. 20 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2010-2023,.... .....	54 -
Gambar 2. 21 Umur Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2002-2023.....	56 -
Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023..... .....	58 -
Gambar 2. 23 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun Tahun 2018-2022..... .....	58 -
Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Madiun Tahun 2018-2022 -	59 -
Gambar 2. 25 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022..... .....	60 -
Gambar 2. 26 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun, Tahun 2002-2023 .....	61 -
Gambar 2. 27 Kontribusi 5 Sektor / Kategori Terbesar PDRB ADHB Tahun 2008- 2023.....	64 -
Gambar 2. 28 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2002-2023.. .....	68 -
Gambar 2. 29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2002-2023.....	71 -
Gambar 2. 30 Realisasi Investasi Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	73 -
Gambar 2. 31 Tingkat Inflasi di Kota Madiun Tahun 2002-2023 .....	77 -
Gambar 2. 32 Kondisi Jalan di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	78 -
Gambar 2. 33 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 -2029 .....	81 -
Gambar 2. 34 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2023 – 2029 .....	82 -
Gambar 2. 35 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025-2029 .....	82 -
Gambar 2. 36 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun 2025-2029.....	83 -

Gambar 2. 37 Perkembangan Indikator IPM Tahun 2019-2023 .....	85 -
Gambar 2. 38 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	95 -
Gambar 2. 39 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023 .....	96 -
Gambar 2. 40 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kota Madiun..... Tahun 2019-2023.....	97 -
Gambar 2. 41 Capaian Presentase Pelayanan Ibu Hamil, Tahun 2019-2023.....	98 -
Gambar 2. 42 Perkembangan Desa Siaga Tahun 2019-2023 .....	100 -
Gambar 2. 43 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019-2023 .-	127 -
Gambar 2. 44 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	141 -
Gambar 2. 45 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	141 -
Gambar 2. 46 Piramida Penduduk Tahun 2029 .....	155 -
Gambar 3. 1 Struktur APBD .....	180 -
Gambar 3. 2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	181 -
Gambar 3. 3 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	182 -
Gambar 3. 4 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	182 -
Gambar 3. 5 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	183 -
Gambar 3. 6 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	184 -
Gambar 3. 7 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	188 -
Gambar 3. 8 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	189 -
Gambar 3. 9 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	189 -
Gambar 3. 10 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	190 -
Gambar 3. 11 Perkembangan Belanja Modal Kota Madun Tahun 2019-2024 .-	190 -
Gambar 3. 12 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	191 -
Gambar 3. 13 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2019-2024 .....	192 -
Gambar 3. 14 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah) .....	195
Gambar 3. 15 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	206 -
Gambar 3. 16 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2020-2029 .....	207 -
Gambar 3. 17 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	208 -
Gambar 3. 18 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2020-2026 .....	209 -
Gambar 3. 19 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	210 -
Gambar 3. 20 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	214 -
Gambar 3. 21 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	215 -
Gambar 3. 22 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	215 -

Gambar 3. 23 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	- 216 -
Gambar 3. 24 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2020-2029 .....	- 217 -
Gambar 3. 25 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2020-2029.....	- 218 -
Gambar 3. 26 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2020-2029 .....	- 219 -
Gambar 3. 27 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2020-2029 (miliar Rupiah) .....	- 224 -
Gambar 4. 1 Megatren Global 2045 .....	- 235 -
Gambar 4. 2 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029.....	- 240 -
Gambar 5. 1 Target sasaran Visi RPJPD Kota Madiun 2025-2029 .....	- 269 -
Gambar 5. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 2002-2023-	270 -
Gambar 5. 3 Target pertumbuhan ekonomi Kota Madiun Tahun 2025-2029 ..-	271 -
Gambar 5. 4 Keterkaitan Sasaran Visi, Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dan Isu Strategis .....	- 275 -
Gambar 5. 5 Perumusan Rangkaian Kerja .....	- 277 -

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi di tingkat lokal. Dalam kerangka ini, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi landasan yang esensial untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam memajukan wilayah tersebut. Salah satu dokumen penting yang perlu dirumuskan adalah Rancangan Teknokratik Pembangunan Daerah dalam hal ini Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029) adalah dokumen perencanaan daerah yang dibuat untuk jangka waktu lima Tahun. Dokumen ini disusun oleh pemerintah daerah menggunakan pendekatan teknokratik sepenuhnya sebelum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi dan perubahan rancangan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Madiun merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045. Berdasarkan hal tersebut, target dan tujuan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJPD Kota Madiun. Terdapat sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Madiun sebagai berikut:

1. terwujudnya kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan secara merata berstandar internasional;
2. terwujudnya kualitas dan pemerataan pendidikan berstandar global;
3. terwujudnya ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju;
4. terwujudnya kualitas sarana dan prasarana yang berkelanjutan dalam mendorong pembangunan dan transformasi secara berkelanjutan;
5. terwujudnya produktivitas daerah melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan;
6. terciptanya perekonomian hijau yang merata;

7. terwujudnya transformasi digital di berbagai bidang kehidupan;
8. terwujudnya integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan dengan regional dan nasional;
9. terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan);
10. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang integratif, efisien, dan responsif berbasis *smart-city*;
11. terciptanya stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat; dan
12. terciptanya stabilitas ekonomi makro daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan sasaran pokok di atas maka pembangunan selama 20 Tahun kedepan harus fokus. Seluruh daerah otonom diharapkan dapat memfokuskan pada upaya pembangunan sesuai prioritas pemerintah pusat. Melalui konsep ini, pemerintah pusat memberikan arahan yang mengakomodasi keberagaman setiap daerah dan memastikan fokus pembangunan tersebut. Pemetaan sasaran pokok tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Madiun 2025-2029.

Rancangan teknokratik RPJMD berfungsi sebagai dasar penyusunan RPJMD dan belum terkait secara khusus dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah pemilihan kepala daerah selesai dan kepala daerah terpilih, visi, misi, dan janji politiknya diimplementasikan ke dalam Visi, Misi, dan program kerja daerah, kemudian Rancangan Teknokratik RPJMD diubah menjadi Dokumen RPJMD lengkap yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanaannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target Tahunan dalam RKPD, dan target Renstra diturunkan menjadi target Tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya target pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Madiun-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal's* (TPB/SDGs);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pariwisata;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1. Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RPJMN**

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang berhubungan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, target-target nasional yang ditetapkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang memerlukan dukungan Kota Madiun juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029.

#### **1.3.2. Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur**

Hubungan antara Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029, dilakukan dengan mengidentifikasi Sasaran Pembangunan serta Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur guna menjadi panduan dalam perumusan arah pembangunan Kota Madiun. Adapun tujuan dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
2. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. mewujudkan pemerintahan yang baik; dan
5. mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Arah Kebijakan Tahun 2025:

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

#### **1.3.3. Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kota Madiun**

RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 dengan visi pembangunan jangka panjang daerah, yaitu Madiun Maju Mendunia: Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Pada tahap ini, Arah Kebijakan untuk perencanaan pembangunan periode Tahun 2025-2029 adalah penguatan pondasi transformasi Kota Madiun, yang meliputi:

1. peningkatan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
2. peningkatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan;
3. peningkatan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai *buffer* perekonomian;
4. peningkatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi;
5. peningkatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata;
6. peningkatan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
7. peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan;
8. peningkatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
9. penguatan transformasi pelayanan publik yang integratif, responsif, dan inovatif berbasis *smart-city* melalui birokrasi yang efektif dan efisien;
10. peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
11. peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis *smart-city* yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan;
12. peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif; dan
13. peningkatan pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD, maka hubungan antara Rancangan Teknokratis RPJMD dengan RPJPD dan RTRW sangat erat. Mengingat RTRW sebagai landasan dalam mengimplementasikan arah kebijakan dalam bentuk program kegiatan yang mengacu pada RTRW. Adapun arah kebijakan untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam RTRW tersebut antara lain sebagai berikut:

1. pemantapan dan pengembangan peran pusat kegiatan skala regional secara berhierarki sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah Daerah dan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. pembangunan dan pemerataan sistem prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional dan fungsi daerah sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat;
3. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian pada kawasan lindungan yang berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat;
4. pemanfaatan kawasan budi daya yang mendukung pemantapan fungsi daerah sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri strategis, pelayanan umum dan pusat koleksi regional;
5. peningkatan ketahanan ruang untuk mengarungi resiko bencana; dan
6. meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

#### **1.3.3.1. Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan RKPD Kota Madiun**

RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan Tahunan. Penyusunan RKPD tidak hanya berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, tetapi juga pada RKP, program strategis nasional RKPD Provinsi Jawa Timur, dan pedoman penyusunan RKPD.

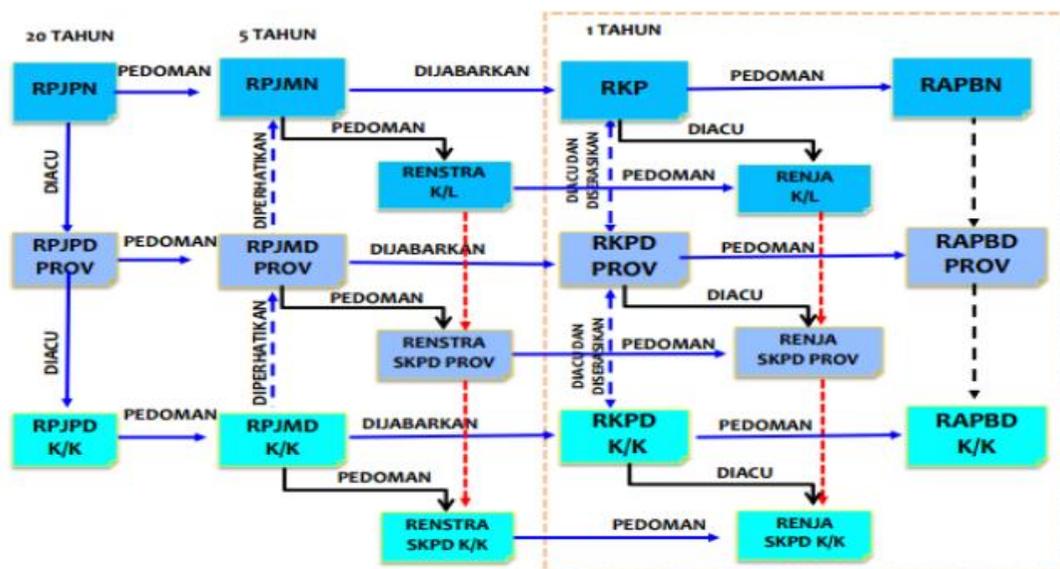
RKPD mengacu pada RPJMD dalam hal penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, dan program perangkat daerah serta lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

### 1.3.3.2. Hubungan Antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk periode lima Tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima Tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra-PD, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272, mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Madiun dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lain**

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan informasi awal tentang data dan informasi pembangunan daerah, termasuk kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD ini disusun sepenuhnya dengan pendekatan teknokratik, sehingga dapat memberikan gambaran obyektif mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis kepada para pemangku kepentingan pembangunan Kota Madiun.

Tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 yaitu:

1. sebagai pedoman dan informasi awal kepala para calon kepala daerah untuk menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas agar sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang relevan dengan kondisi empiris daerah;
2. sebagai informasi yang penting bagi masyarakat, sebagai dasar untuk menentukan pilihan berdasarkan kualitas Visi, Misi dan Program Prioritas para Calon kepala daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat;
3. untuk menyiapkan penyusunan dokumen RPJMD Kota Madiun lebih awal, sehingga menjamin terlaksananya penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. sebagai rujukan Perangkat Daerah untuk persiapan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan proyeksi kerangka pendanaan daerah.

### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

### BAB V REKOMENDASI

Bab ini berisi rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan periodisasi pertama RPJPD Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043.

### BAB VI PENUTUP

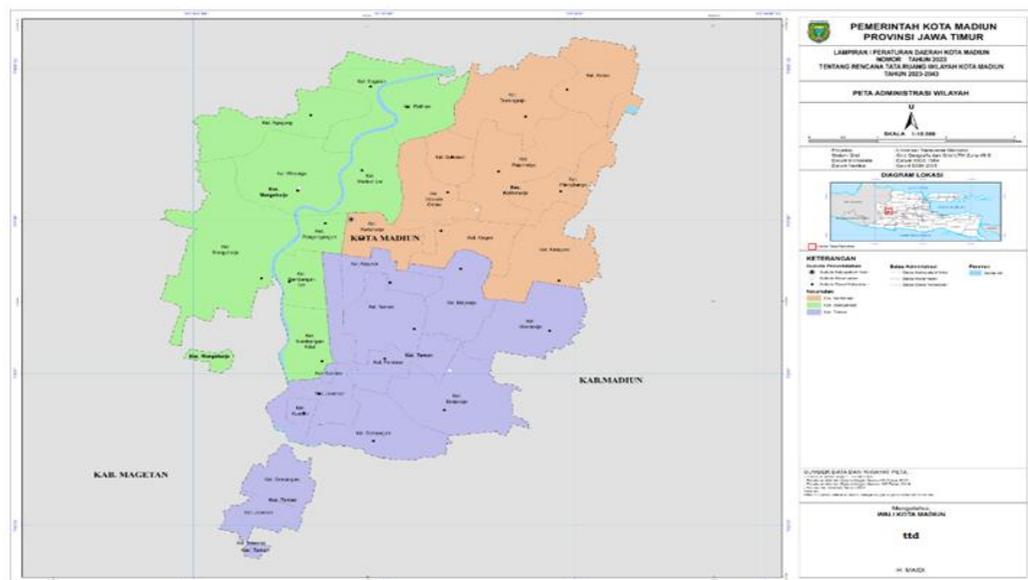
## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan kota tersebut sebagai pusat berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



**Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun**  
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Wilayah Kota Madiun berada di daerah dataran dengan bagian tengah terletak di ketinggian 63 meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di ketinggian 67 meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis berada pada titik koordinat  $7^{\circ} 35' 43.690''$  LS -  $7^{\circ} 40' 49.826''$  LS dan  $111^{\circ} 29' 46.553''$  BT -  $111^{\circ} 33' 5.272''$  BT. Tahun 2023, Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara di antara  $20^{\circ}\text{C}$  hingga  $35^{\circ}\text{C}$ , dengan curah hujan di Kota Madiun rata-rata mencapai 320 mm per Tahun. Berdasarkan data RTRW Kota Madiun Tahun 2023, Kota Madiun memiliki luas wilayah  $36,13 \text{ km}^2$ . Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak ke Ibu Kota (Km)
1.	Manguharjo	12,48	34,56	2,9
2.	Taman	12,21	33,79	4,4
3.	Kartoharjo	11,44	31,65	2,6

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023 - 2043

Berdasarkan tabel 2.1, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kota Madiun adalah Kecamatan Manguharjo dengan luas sebesar  $12,48 \text{ km}^2$ . Kecamatan Taman dengan luas sebesar  $12,21 \text{ km}^2$ . Sementara itu, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar  $11,44 \text{ km}^2$ . Salah satu faktor yang menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan adalah jarak kecamatan ke ibu kota kecamatan. Kecamatan Kartoharjo memiliki jarak terpendek dari kecamatan ke ibu kota yaitu sejauh 2,6 km, sedangkan kecamatan Taman memiliki jarak terjauh dari kecamatan ke ibu kota dengan jarak 4,4 km.

**Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman

No.	Kecamatan	Kelurahan
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngengong
		Pangonganan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023 - 2043

Kota Madiun memiliki 3 kecamatan dengan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam sembilan (9) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara keseluruhan memiliki 27 kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- b. sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- c. sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun; dan
- d. sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63 m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di atas permukaan laut dan menurun hingga 63 mdpl.

Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun berada di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari daerah sekitarnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 m, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m-500 m.

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.

Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90 cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang Tahun di Kota Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter.

Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah.

Sumber air tanah dan air permukaan tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai Sono yang dijadikan sebagai saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

Sistem saluran air daerah perkotaan di Kota Madiun terdiri dari dua (2) jenis, yaitu sistem saluran air makro dan mikro dengan total 41 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan, dengan terdapat 11 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir. Lokasi rumah pompa tersebut diantaranya Rumah pompa Bok Malang (1 Unit); Rumah pompa Patihan (1 Unit); Rumah pompa Prajurit (1 Unit); Rumah pompa Rejomulyo (1 Unit); Rumah pompa Belakang STM Negeri 1 (1 Unit); Rumah pompa Pandan (4 Unit *Hydrolic Pump*); Rumah pompa Pancasila (2 Unit *Hydrolic Pump*); Rumah pompa Cempedak (1 Unit); Rumah pompa belakang Bluder Cokro (1 Unit); Rumah pompa Kasuari 1 (1 Unit *Hydrolic Pump*); Rumah pompa Kasuari 2 (1 Unit).

Pada kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2024, berdasarkan data BPS Kota Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,9°C-30,2°C. Rata-rata suhu udara di Kota Madiun sebesar 30 °C. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2022 kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan Februari sebesar 15 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Agustus yang hanya sebesar 5 m/detik. Kelembaban udara tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari, April, September, Oktober, November sebesar 100%. Kelembaban terendah juga terjadi di Bulan September yaitu sebesar 37%. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir masuk kategori menengah yang berkisar antara 101–300 mm/bulan. Kota Madiun memiliki curah hujan tertinggi pada Bulan November yaitu sebesar 665 mm.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun mempunyai curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian, jumlah air di permukaan.

### 2.1.2. Kondisi Topografi

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63 m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di atas permukaan laut dan menurun hingga 63 m di atas permukaan laut. Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas permukaan laut.

Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2° atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

**Tabel 2. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun**

No.	Kecamatan	Ketinggian (meter dpl)
1.	Taman	77
2.	Kartoharjo	68
3.	Manguharjo	76

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Kondisi (*state*) topografi yang datar di wilayah Kota Madiun memberikan dampak (*impact*) terhadap kecepatan aliran permukaan yang rendah sehingga potensi terjadi genangan air tinggi. Sebaliknya dengan topografi yang datar potensi terjadi proses pasokan air tanah (*recharge water*) yang besar, sehingga ketersediaan air tanah dangkal dapat terjadi keberlanjutan. Kota Madiun berada di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari daerah sekitarnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 m, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

### 2.1.3. Kondisi Geologi

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi.

Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90 cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Wilayah Kota Madiun sebagian besar termasuk dalam zona pusat depresi Jawa (zona Solo), yang ditempati oleh batuan gunung api kuarter. Pada bagian selatan dari zone Solo merupakan lajur pegunungan selatan Jawa Timur dan bagian wilayah utaranya termasuk di dalam rangkaian pegunungan Kendeng. Sementara itu, Berdasarkan peta hidrogeologi Yogyakarta (Jawa), komposisi litologi dan kelolosannya, untuk wilayah Kota Madiun didominasi oleh struktur tanah aluvium endapan sungai yang umumnya tersusun oleh material berbutir halus (lempung, lanau, diselingi pasir) atau lempung pasir. Tingkat kelulusan sedang sampai rendah. Wilayah Kota Madiun bagian utara merupakan tanah aluvium endapan rawa dan danau yang tersusun terutama oleh lempung yang kedap air.

Berdasarkan peta tersebut, wilayah Kota Madiun bagian utara didominasi oleh akuifer dengan produktifitas sedang sampai tinggi dengan penyebaran luas. Tinggi pisometri air tanah di atas atau dekat air tanah, debit sumur bisa mencapai lebih dari 10-50 liter/detik, terutama wilayah Madiun bagian utara.

#### **2.1.4. Kondisi Hidrologi**

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang Tahun di Kota Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18 persen wilayah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai Sono yang dijadikan sebagai saluran. irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah sepanjang Tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari.

Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo.

Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun.

Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).

Hasil kajian Tahun 2021 tentang Pemetaan Kondisi Air Tanah di Kota Madiun Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa muka air tanah di Kota Madiun mempunyai ketinggian antara 58,18 m dpal-72,12 m dpal. Berdasarkan pada ketinggian muka air tanah dangkal maka pola aliran air tanah dangkal di Kota Madiun, di setiap wilayah Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Taman, aliran air tanah dari arah Tenggara menuju Barat Laut, yang mempunyai hulu di Kelurahan Demangan, Banjarejo, Manisrejo mengalir ke arah Kelurahan Nambangan Kidul dan Nambangan Lor yang berakhir di aliran Sungai Madiun. Pola aliran air tanah akan berubah arah selatan menuju ke utara mulai dari Kelurahan Kejuron. Gradien hidrolis (perbedaan tinggi permukaan air tanah) homogen dan terjadi secara gradual;
2. Wilayah Kecamatan Kartoharjo, arah aliran air tanah dari selatan menuju ke utara yang dimulai dari Kelurahan Kartoharjo, Klegen dan Kanigoro yang berakhir di Kelurahan Tawangrejo dan Kelun. Gradien hidrolis (perbedaan tinggi permukaan air tanah) heterogen, sebelah

selatan mempunyai gradien hidrolik yang tinggi, sedangkan bagian utara mempunyai gradien hidrolik yang rendah; dan

3. Wilayah Kecamatan Manguharjo, arah aliran air tanah dangkal mempunyai 2 (dua) pola yaitu: (a) Sebelah barat Sungai Madiun mempunyai arah aliran air tanah dari barat ke timur dari Kelurahan Ngegong dan Manguharjo mengarah ke Kelurahan Winongo, dengan gradien hidrolik yang sedang dan (b) Sebelah timur Sungai Madiun arah alirannya dari tenggara menuju barat laut serta dari selatan mengalir ke utara, dengan gradien hidrolik yang tinggi.

#### **2.1.5. Kondisi Klimatologi**

Kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kota Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,20°C-34,2°C. Rata-rata suhu udara di Kota Madiun sebesar 31,4 °C. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2023 kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 20 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Juni yang hanya sebesar 4 m/detik. Kelembaban udara tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Desember sebesar 100%. Kelembaban terendah juga terjadi di Bulan Juni yaitu sebesar 95%. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun Tahun 2023 yang tercatat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan curah hujan, dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret 471,8 m<sup>3</sup>/bulan dan curah hujan terendah 0 m<sup>3</sup>/bulan terjadi pada Bulan Agustus, September, Oktober. Keberadaan curah hujan ini akan memberikan *impact* terhadap air tanah dan air permukaan (sungai).

Rata-rata curah hujan yang berkisar 144,06 m<sup>3</sup>/bulan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, curah hujan bulanan Kota Madiun dapat dikatakan termasuk dalam kategori menengah karena berada pada rentang 100-300 mm/bulan.

#### **2.1.6. Kondisi Geografi**

##### **2.1.6.1 Persentase Pemanfaatan Ruang (RTRW)**

Kegiatan pembangunan dapat dilakukan sejalan dengan keseimbangan pembangunan wilayah dan perencanaan pembangunan Daerah, jika ketaatan terhadap RTRW tinggi karena ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator yang penting. Ditemukan bahwa ketaatan RTRW menunjukkan angka 100% dari Tahun 2019 hingga

Tahun 2023. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Maka, pembangunan yang telah direncanakan di masa depan dapat dilaksanakan.

Tabel 2. 4 Ketaatan Terhadap RTRW, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKPJ Tahun 2019-2023

#### 2.1.6.2 Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan pasar. Setiap Tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan review Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian, dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Terdapat peningkatan luas lahan nonpertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari Tahun 2020 hingga Tahun 2021 yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 2. 5 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020-2023

PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Luas lahan non-pertanian (Ha)	2.375	2.383	2.571	2.576,61
Luas lahan pertanian (Ha)	1.085	1.078	890	884

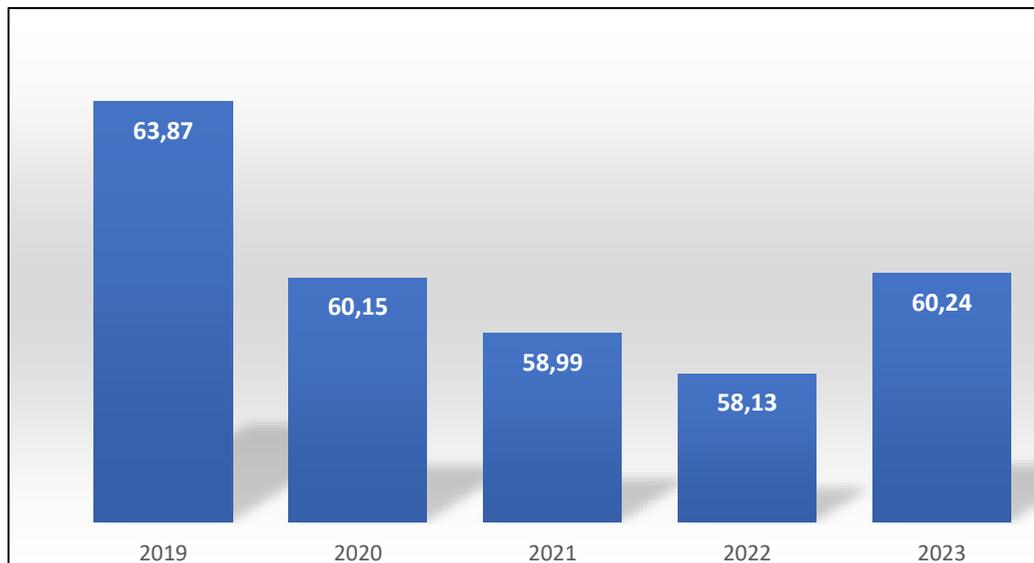
Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non-pertanian di Kota Madiun yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan nonpertanian di Kota Madiun. Berdasarkan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021, lahan nonpertanian ini digunakan untuk pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran, pendidikan, makan, dan fasilitas umum. Luas lahan pertanian juga mengalami penurunan walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat

berkaitan dengan luasan lahan non-pertanian yang meningkat sebagai dampak dari alih fungsi lahan yang terjadi secara nyata.

### 2.1.6.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 2. 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

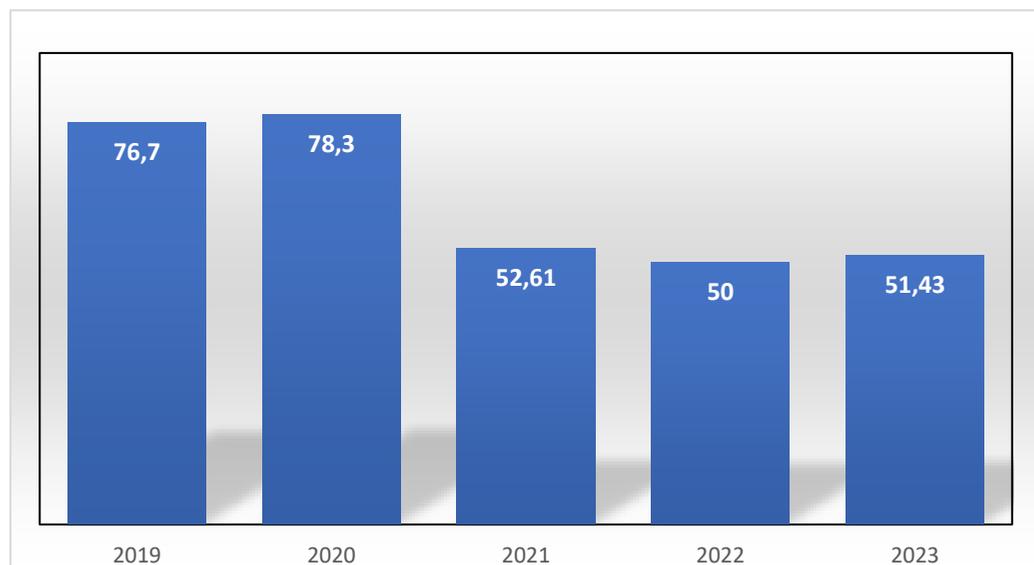
Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berdasarkan data di atas terus menunjukkan penurunan setiap Tahun, namun Tahun 2023 mengalami kenaikan. Tahun 2019, nilai IKLH adalah sebesar 63,87.

Tahun 2020, IKLH mengalami penurunan menjadi sebesar 60,15. Pada Tahun 2021, IKLH terus menurun menjadi sebesar 58,99, hingga Tahun 2022 menjadi 58,13. Terjadi peningkatan nilai IKLH pada Tahun 2023 menjadi sebesar 60,24. Terjadi fluktuatif pada nilai dari parameter penghitungan IKLH yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

#### a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut.

Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sampel air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan dari 76,7 menjadi 78,30. Namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 50. Pada Tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Air mengalami tren kenaikan kembali menjadi sebesar 51,43.

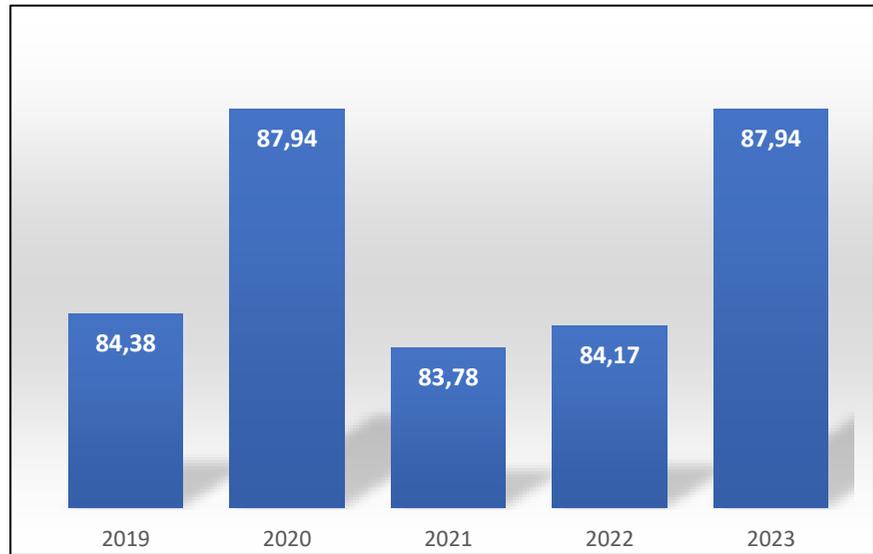


Gambar 2. 3 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) di udara. Penghitungan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem.

Pada Tahun 2019-2020 nilai Indeks Kualitas Udara terus mengalami peningkatan hingga menjadi 87,94 di Tahun 2020. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 83,78 namun dapat kembali meningkat dan memiliki tren positif hingga Tahun 2023 dengan nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 87,94.



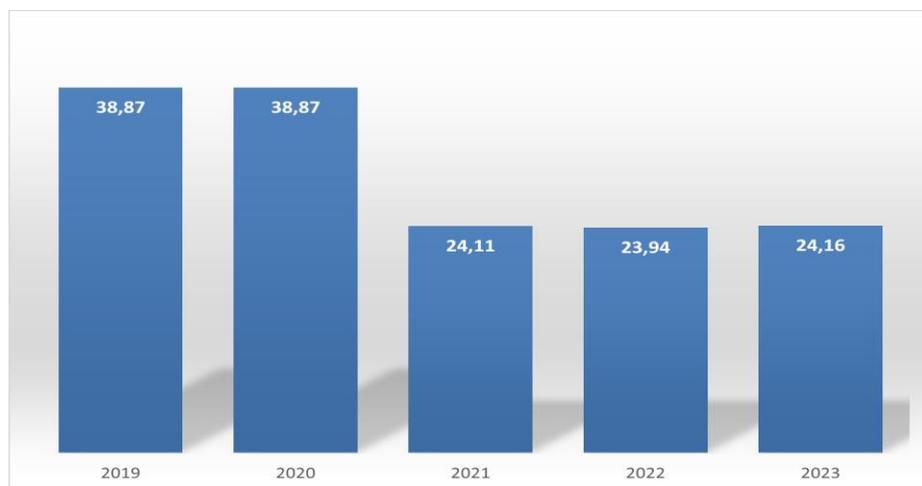
Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperoleh berdasarkan perhitungan ruang terbuka hijau dan lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota, dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat.

Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olah raga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, Daerah penyangga industri, sempadan saluran udara tegangan tinggi, sempadan sungai, dan sempadan mata air.



Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

Luas tutupan lahan di Kota Madiun sebesar 5,91 km<sup>2</sup> atau 17,79% dari total luas wilayah Kota Madiun 33,23 km<sup>2</sup>. Namun, angka tersebut belum memenuhi syarat ketentuan sebesar 30%. Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 38,87. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan mulai Tahun 2021 menggunakan perhitungan baru. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 menjadi 24,11 dan Tahun 2022 sebesar 23,94. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan 24,16. menjadi sebesar 24,16. Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa wilayah Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

#### 2.1.6.4 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun yakni bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Sedang kelas risiko bencana pada kategori sedang yakni tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun; dan
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

Adapun capaian Indeks Risiko Bencana Kota Madiun cenderung menurun dari Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 nilai Indeks Risiko Bencana Kota Madiun sebesar 130,84 dan pada akhir Tahun 2023 sebesar 108,85 (LKPJ Kota Madiun Tahun 2019-2023)

### 2.1.6.5 Indeks Ketahanan Pangan

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 (empat) pilar yaitu:

1. Ketersediaan pangan (produksi dan import);
2. Cadangan pangan;
3. Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
4. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun sampai dengan Tahun 2023 sebesar 85,32 (sumber: Badan Pangan Nasional, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warganya.

### 2.1.7. Kondisi Demografi



**Gambar 2. 6 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2019-2023**

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

Berdasarkan data Proyeksi Tim Penyusun, jumlah penduduk Kota Madiun pada Tahun 2022 sebanyak 201.760 jiwa. Selama periode Tahun 2019-2023, laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,15%. Akan tetapi, pada Tahun 2020 hingga 2021 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan secara terus menerus masing-masing sebesar -0,079%, -4,05%, dan kembali mengalami kenaikan di Tahun 2022 sebesar 0,15%.

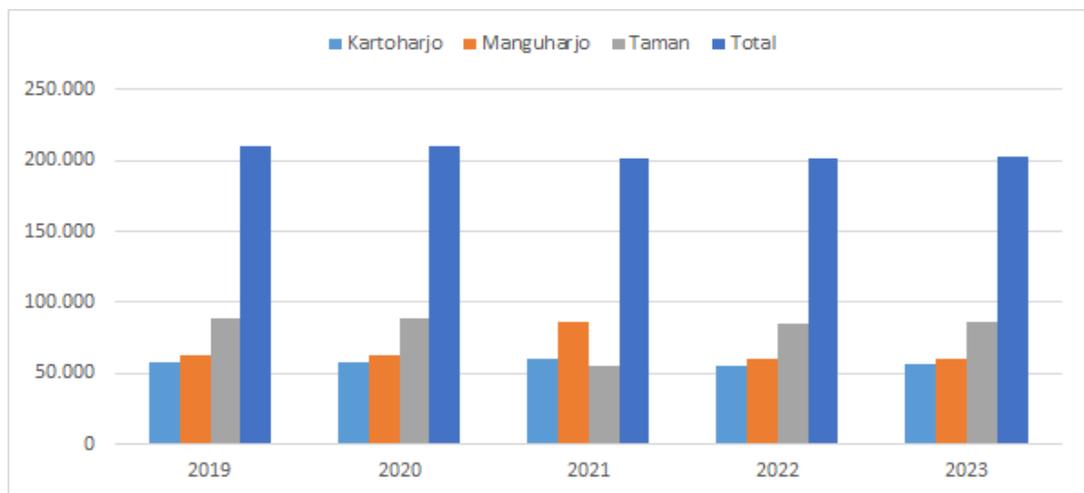
Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kartoharjo	57.748	57.668	55.458	55.866	56.036
2	Manguharjo	63.017	62.884	59.988	60.167	60.359
3	Taman	89.350	89.398	86.006	85.727	86.149
	<b>Total</b>	<b>210.115</b>	<b>209.950</b>	<b>201.452</b>	<b>201.760</b>	<b>202.544</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2023

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2023

Sebagaimana termuat pada tabel 2.31 dan gambar 2.13 di atas, Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019-2023 cenderung merata pada setiap kecamatan. Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Manguharjo, dan terakhir berada pada Kecamatan Kartoharjo.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Kota Madiun didominasi dengan penduduk berlatar belakang pendidikan terakhir SLTA, yaitu sebesar 71.389 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 573 jiwa; D-III 6.301 jiwa; S-1 22.104 jiwa; S-2 1.546 jiwa, dan S-3 54 jiwa.

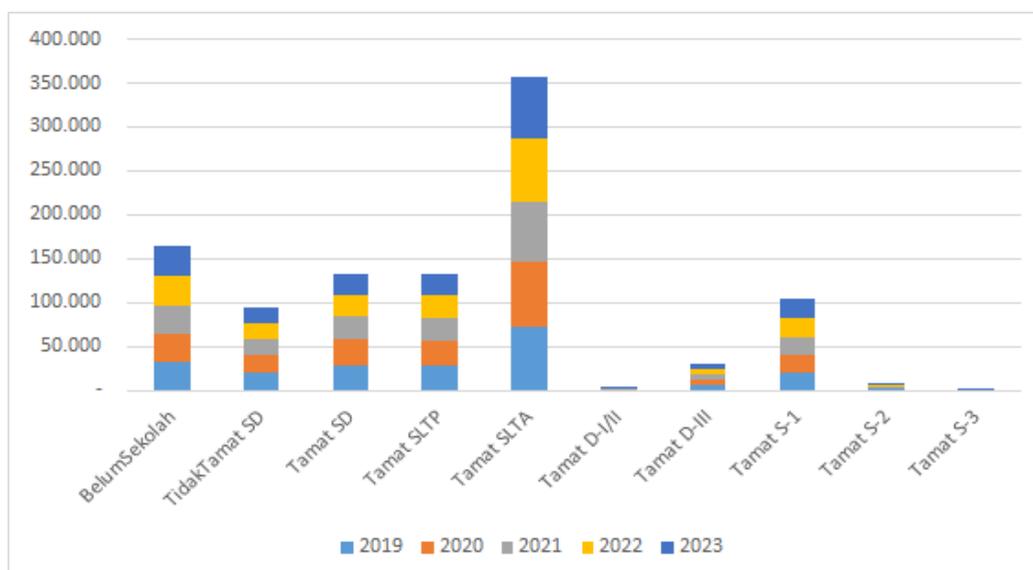
Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	31.374	32.261	33.177	33.495	33.332
Tidak Tamat SD;	19.887	19.801	18.906	18.483	17.872
Tamat SD;	29.266	28.262	26.006	24.843	24.327
Tamat SLTP;	28.787	28.230	26.027	25.314	25.046
Tamat SLTA;	73.045	73.126	69.421	70.350	71.389
Tamat D-I/II;	498	502	519	553	573
Tamat D-III;	5.761	5.875	5.770	6.033	6.301
Tamat S-1;	20.071	20.442	20.170	21.152	22.104
Tamat S-2;	1.391	1.412	1.415	1.490	1.546
Tamat S-3.	35	39	41	47	54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2023

Adapun grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir di Kota Madiun, Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2023

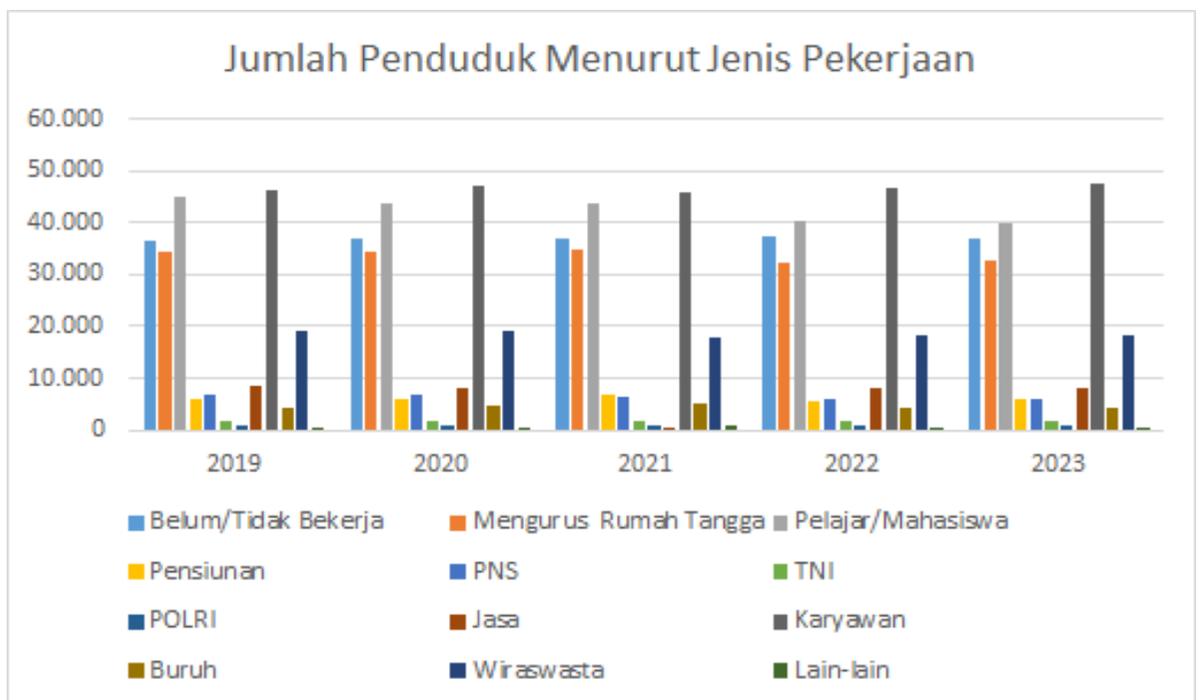
Sebagaimana termuat pada tabel 2.32 dan gambar 2.14 di atas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Madiun kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah penduduk kategori tamat D-I/II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA.

Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut jenis pekerjaan tahun 2019-2023:

**Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
a.Belum/Tidak Bekerja	36.390	37.002	37.048	37.292	37.000
b.Mengurus Rumah Tangga	34.412	34.301	34.746	32.468	32.655
c.Pelajar/Mahasiswa	44.940	43.957	43.771	40.495	40.083
d.Pensiunan	6.095	6.046	6.622	5.611	5.819
e.PNS	6.826	6.711	6.252	6.109	5.945
f.TNI	1.771	1.733	1.583	1.632	1.638
g.POLRI	1.027	1.025	955	958	956
h.Jasa	8.449	8.213	626	8.140	7.959
i.Karyawan	46.311	46.901	46.023	46.745	47.708
j.Buruh	4.390	4.679	5.022	4.083	4.331
k.Wiraswasta	18.994	19.107	17.992	18.223	18.443
l.Lain-lain	510	275	812	4	7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2023



**Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.33 dan Gambar 2.15 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sebagai karyawan. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023 berjumlah 47.708 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah Tangga sejak tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Melihat karakteristik Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, banyak penduduk di Kota Madiun yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja sebagai wiraswasta juga cukup banyak, yakni sebanyak 18.443 orang hingga tahun 2023 dan penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 7.959 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada tahun 2023 berjumlah 8.539 orang.



**Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Madiun, Tahun 2019-2023**  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2024

Mayoritas penduduk di Kota Madiun beragama Islam, yang mana selama periode Tahun 2018 hingga Tahun 2022 jumlahnya lebih banyak dibanding agama lainnya. Tahun 2022, jumlah penduduk di Kota Madiun yang beragama Islam sebanyak 184.241 orang. Sementara itu di Tahun yang sama, jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 11.067 orang, Agama Katolik sebanyak 5.706 orang, Agama Buddha sebanyak 562 orang, Agama Hindu sebanyak 150 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 10 orang.

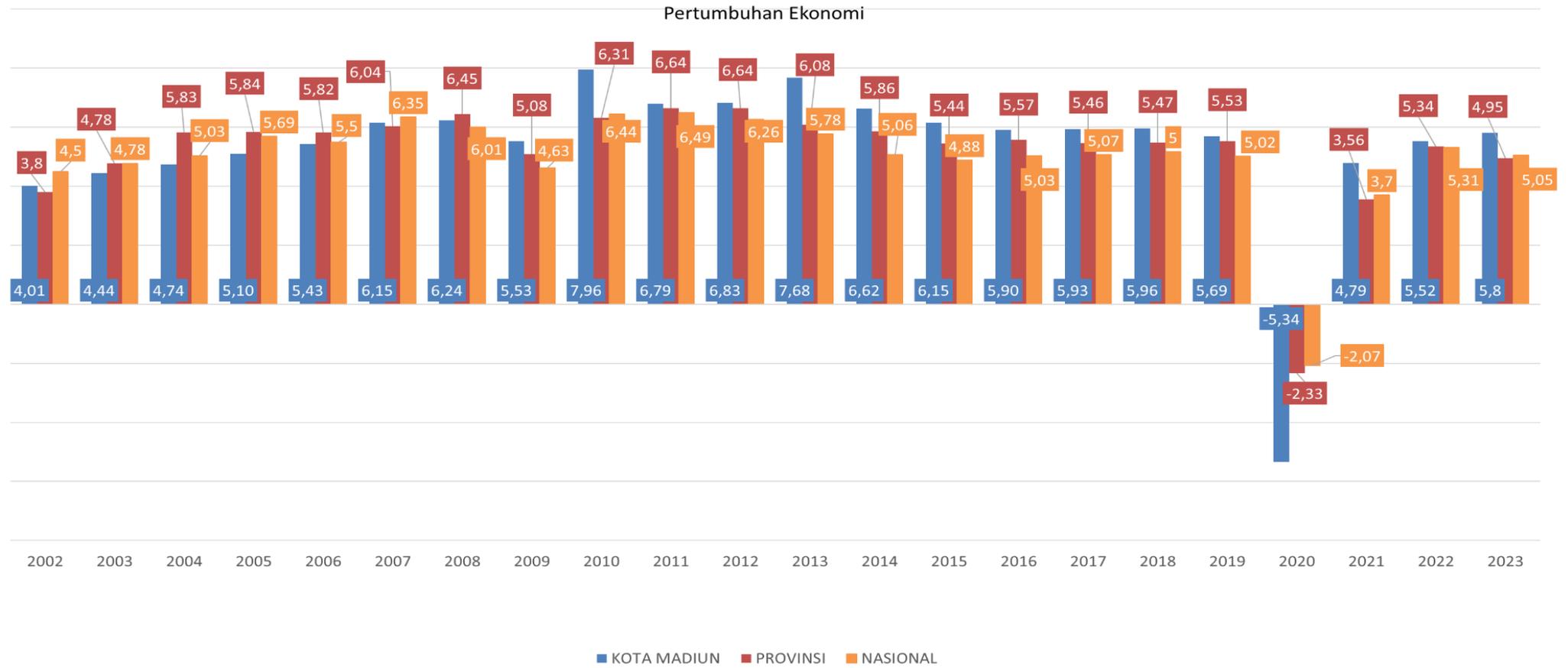
## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

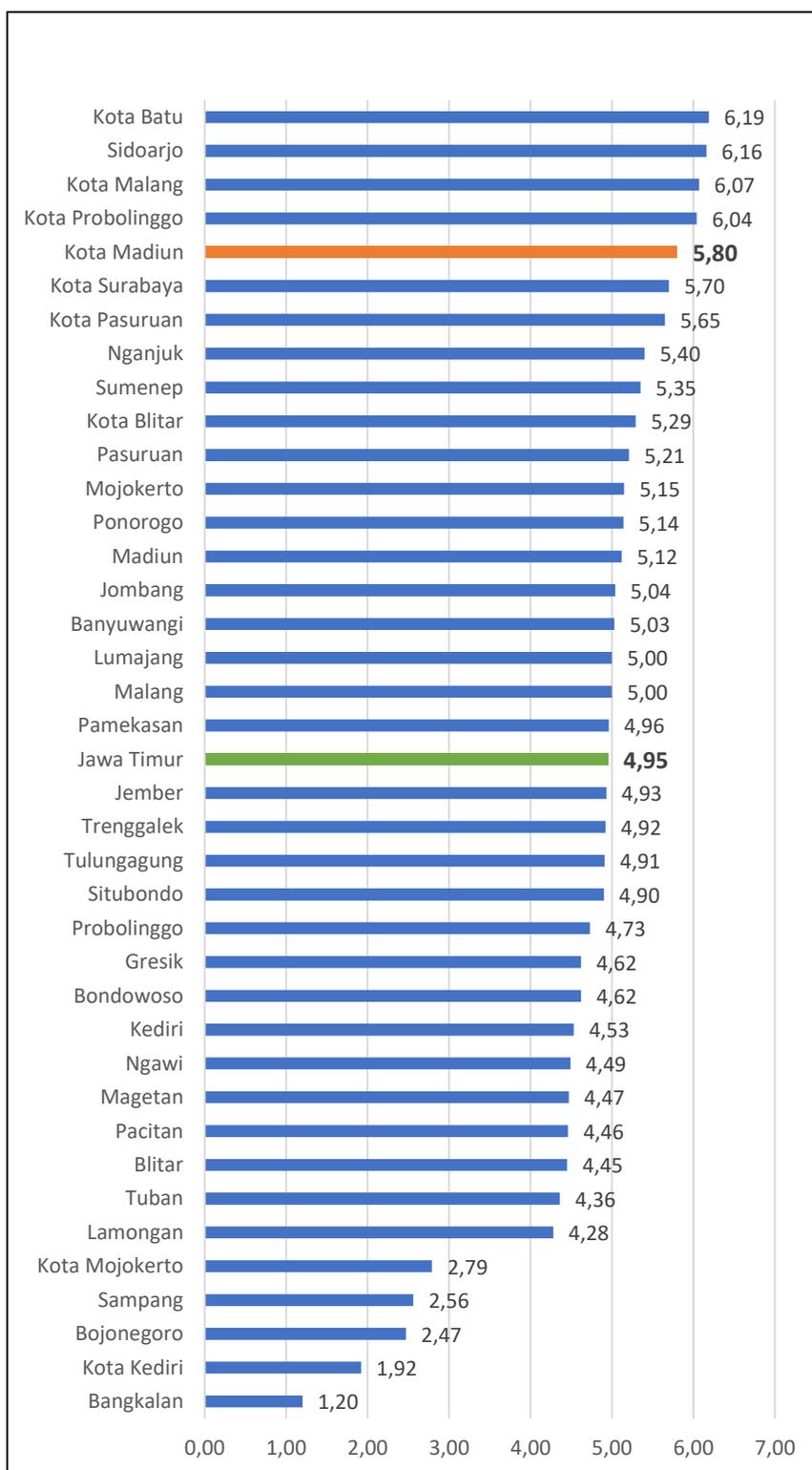
#### **2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang melihat kemampuan pembangunan ekonomi pada suatu Daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu Daerah dapat diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Daerah tersebut. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akan datang.



**Gambar 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2002-2023**  
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2024



**Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada lima Tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional kecuali pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 5,8% sedangkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebesar 4,95% dan 5,05%.

Pada Tahun 2020 pertumbuhan Kota Madiun terkontraksi hingga -5,34% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur -2,33% dan Nasional sebesar -2,1% akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sudah mulai pulih kembali bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kota Madiun dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 berada pada posisi 5 dengan nilai sebesar 5,80%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2023 ditempati oleh Kota Batu dengan nilai mencapai 6,19% disusul Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 6,16%.

**Tabel 2. 9 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, Tahun 2019-2023**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Madiun	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80
Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12
Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89	4,47
Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49
Pacitan	5,08	-1,84	2,49	5,54	4,46
Ponorogo	5,01	-0,9	3,19	3,24	5,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Daerah sekitarnya pada periode Tahun 2019-2023. Namun, di Tahun 2020, pandemi memberikan dampak terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sehingga pertumbuhan Kota Madiun memiliki nilai paling rendah dibandingkan wilayah eks Karesidenan Madiun lainnya.

**Tabel 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79	-0,104
Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	-2,956
Industri Pengolahan	4,64	-23,84	7,1	2,17	7,98	-0,584
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38	5,004
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,5	4,21	4,720

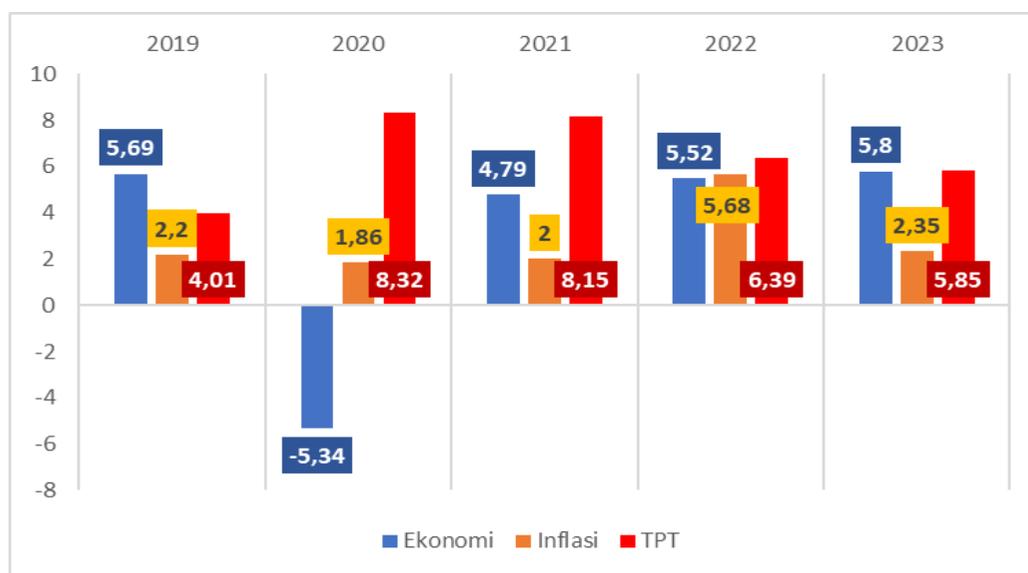
Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Konstruksi	4,9	-4,71	-0,9	8,24	4.83	1,912
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	-11,18	10,16	7,98	5.60	4,134
Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,9	11.64	7,456
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6.93	4,656
Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6.17	7,346
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2.82	1,800
Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4.35	3,228
Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6.12	2,852
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0.51	0,936
Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3.17	2,992
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3.20	6,726
Jasa lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9.39	3,634
Produk Domestik Regional Bruto	5,69	-5,34	4,79	5,52	5.80	3,324

Sumber: BPS Kota Madiun

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menurut lapangan usaha pada periode Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Saat pandemi Covid-19 Tahun 2020, banyak sektor yang mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,57%), sektor Informasi dan Komunikasi (16,12%), serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86%). Secara keseluruhan terdapat tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama lima Tahun terakhir. Sektor tersebut berupa transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 7,456% per Tahun, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,346% per Tahun, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,726% per Tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalan yang terkontraksi sebesar -2,956% per Tahun.

Pada Tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,64% serta sektor jasa lainnya sebesar 9,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha tersier memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan terendah pada Tahun 2023 yakni sektor pertambangan dan penggalan sebesar -5,53%. Sektor tersebut juga menjadi sektor dengan pertumbuhan terendah pada Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar -8,49% dan bersama dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -5,67%.

Kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan TPT di Kota Madiun. Inflasi bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada gambar 2.10. Inflasi merupakan harga yang harus dibayar oleh suatu Daerah jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian pula inflasi. Ini merupakan efek dari inflasi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan *agregat* dengan cara yang mempengaruhi kenaikan harga. Pandemi yang merebak di Tahun 2020 mengguncang perekonomian kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga ke level -5,34. Kekhasan kota Madiun dan faktor ekonomi utama sektor perdagangan, industri, dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan terhadap gangguan permintaan. Perdagangan, industri, dan jasa menjadi sektor yang buruk bersama dengan usaha transportasi, hotel, dan pariwisata, menyebabkan inflasi turun 0,34 basis poin ke level 1,86 pada Tahun 2020. Menurunnya penyebaran Covid-19 dan perekonomian yang kembali bangkit ditunjukkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan bangkit sebesar 4,79% dan mencapai 5,52% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, inflasi menurun menjadi sebesar 2,35, begitu pula TPT yang mengalami penurunan menjadi 5,85%. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 5,8%. Hal tersebut tidak luput dari program-program Pemerintah Kota Madiun yang telah mendukung pergerakan perekonomian Kota Madiun menjadi lebih baik.



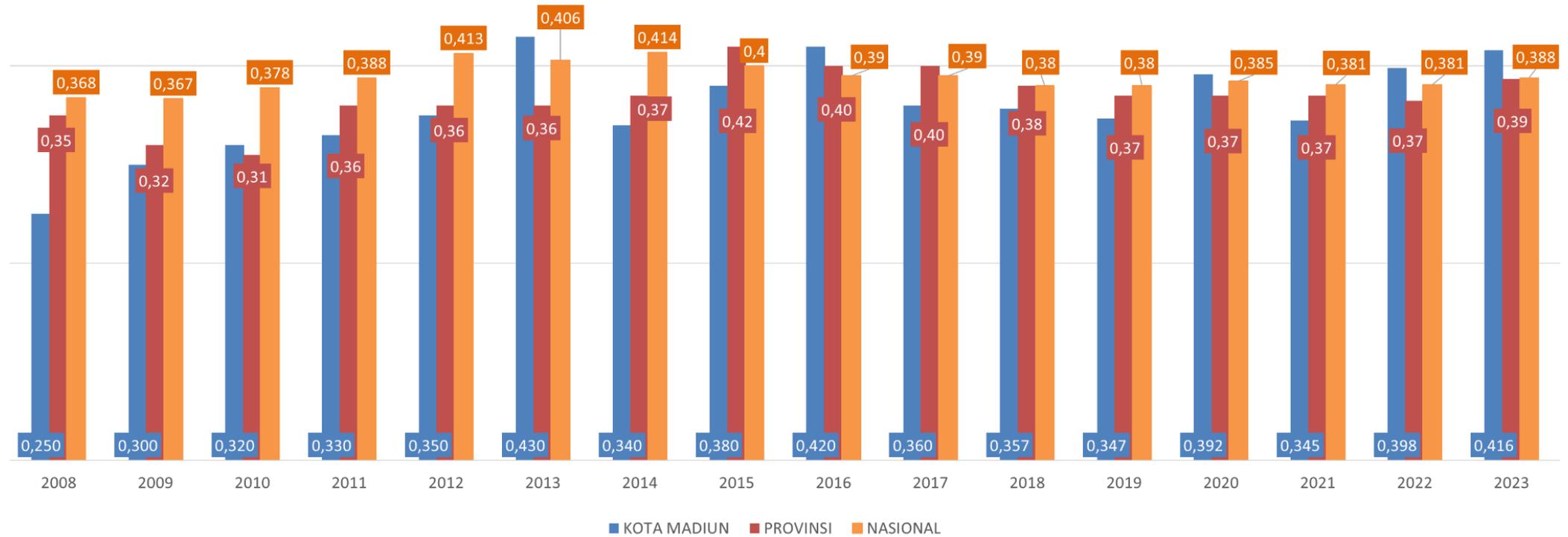
**Gambar 2. 13 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, (diolah)

#### **2.2.1.2.Indeks Gini**

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah yakni indeks gini. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di Daerah tersebut.

Indeks Gini



**Gambar 2. 14 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2008-2023**  
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2024

Indeks ini Kota Madiun secara umum selama lima Tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 indeks gini Kota Madiun mencapai 0,357 dan mencapai 0,345 pada Tahun 2021. Indeks gini sempat mencapai 0,392 pada Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi. Sedangkan pada Tahun 2022 pencapaian indeks gini Kota Madiun naik menjadi 0,398. Tahun 2023 indeks gini Kota Madiun terus meningkat menjadi 0.416, dan masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 fluktuatif di atas indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian indeks gini Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

### **2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan**

Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kategori: 40 persen berpenghasilan rendah, 40 persen berpenghasilan menengah, dan 20 persen berpenghasilan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia terkonsentrasi pada 40 persen penduduk pendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria:

1. bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi;
2. bila menerima 12–17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang; dan
3. bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

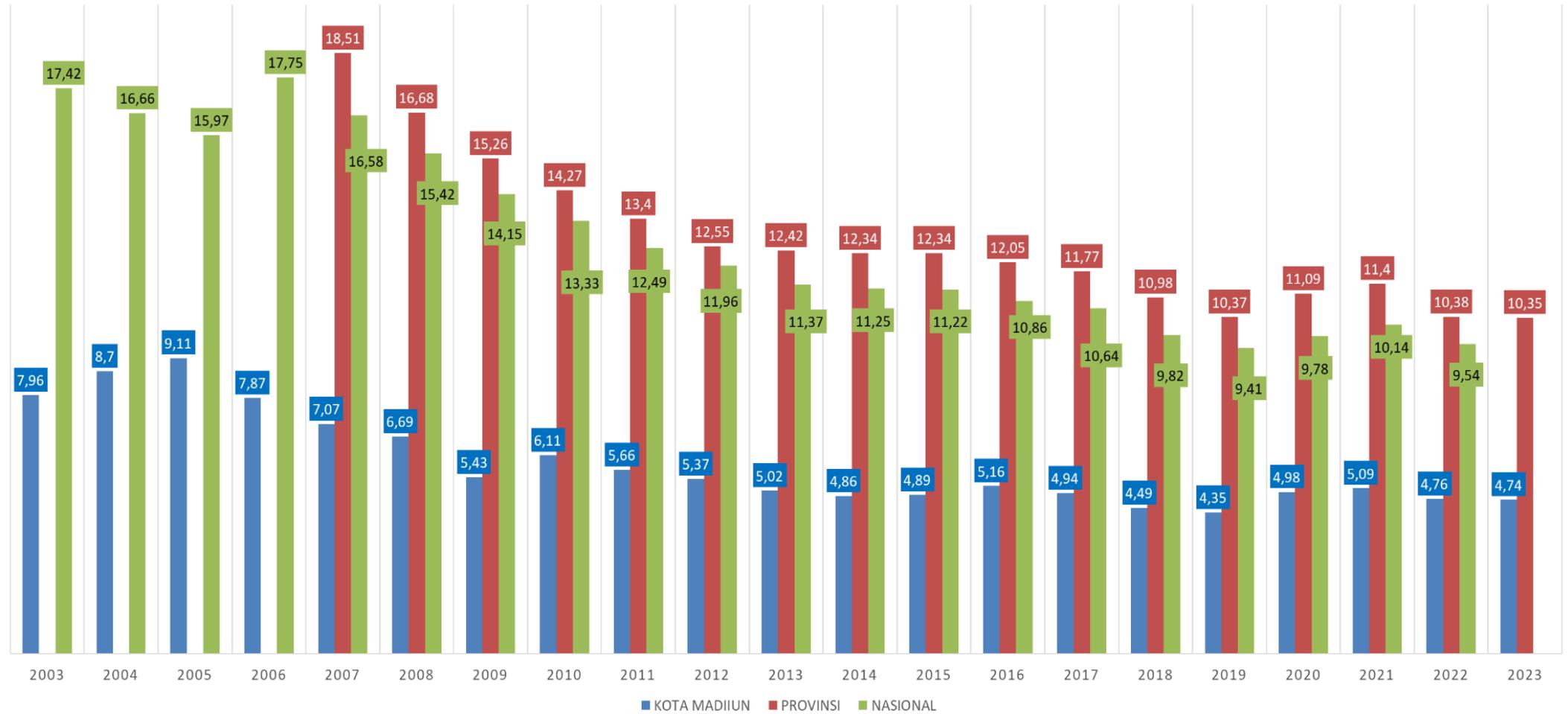
Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu Daerah. Tingkat kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Selama lima Tahun terakhir garis kemiskinan Kota Madiun mengalami kenaikan setiap Tahunnya dari mulai Rp 478.304,00 pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 605.131,00 pada Tahun 2023.

**Tabel 2. 11 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	478.304	4,35
2020	497.628	4,98
2021	514.409	5,09
2022	551.620	4,76
2023	605.131	4,74

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

## TINGKAT KEMISKINAN



**Gambar 2. 15 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Madiun pada lima Tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 4,35% menjadi 5,09%, walaupun demikian nilainya masih jauh di bawah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 11,4% dan 9,71%. Kemudian pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 terus mengalami penurunan yaitu 4,76% Tahun 2022 menjadi 4,74% di Tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Madiun dalam berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2019-2023. Indeks kedalaman kemiskinan kota Madiun Tahun 2019 sebesar 0,50. Kemudian meningkat setiap Tahunnya menjadi 0,77 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 nilai indeks kedalaman kemiskinan kemudian menurun menjadi 0,67 dan pada Tahun 2023 menjadi 0,65.

**Tabel 2. 12 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

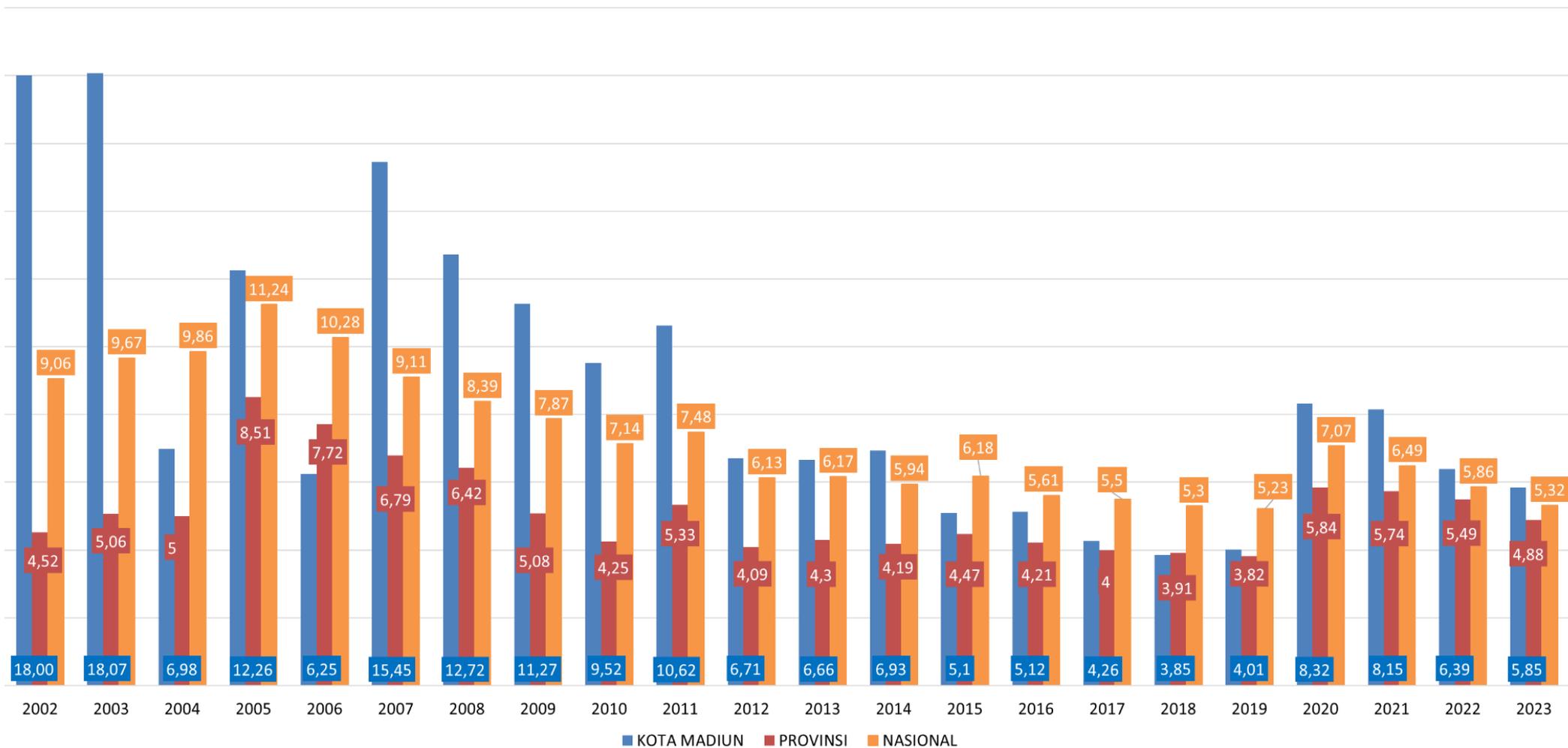
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,50	0,77	0,67	0,40	0,65
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,08	0,18	0,15	0,06	0,16

Sumber: BPS Kota Madiun

Indeks Keparahan Kemiskinan mengkaji masalah ketimpangan di kalangan masyarakat miskin. Indeks ini menunjukkan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kota Madiun berfluktuasi cukup aktif pada periode Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 nilai indeks sebesar 0,08, dan Tahun 2020 nilai indeks meningkat menjadi 0,18. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami penurunan, nilai indeks turun menjadi 0,06 dan 0,16.

#### **2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Kondisi ketenagakerjaan di suatu Daerah dapat digambarkan melalui salah satu indikator yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja tidak baik. Pengangguran terbuka, merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk berwirausaha atau yang merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Gambaran mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023 sebagai berikut:



**Gambar 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 3,80% kemudian meningkat pada Tahun 2019 sebesar 3,96%. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,32% karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) serta terjadinya pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,15% dan 6,39%. Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,85% dan 2,30%. Tingkat pengangguran Kota Madiun berada di atas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 nilai tingkat pengangguran Kota Madiun sebesar 5,85 di atas TPT Jawa Timur sebesar 4,88%.

**Tabel 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023**

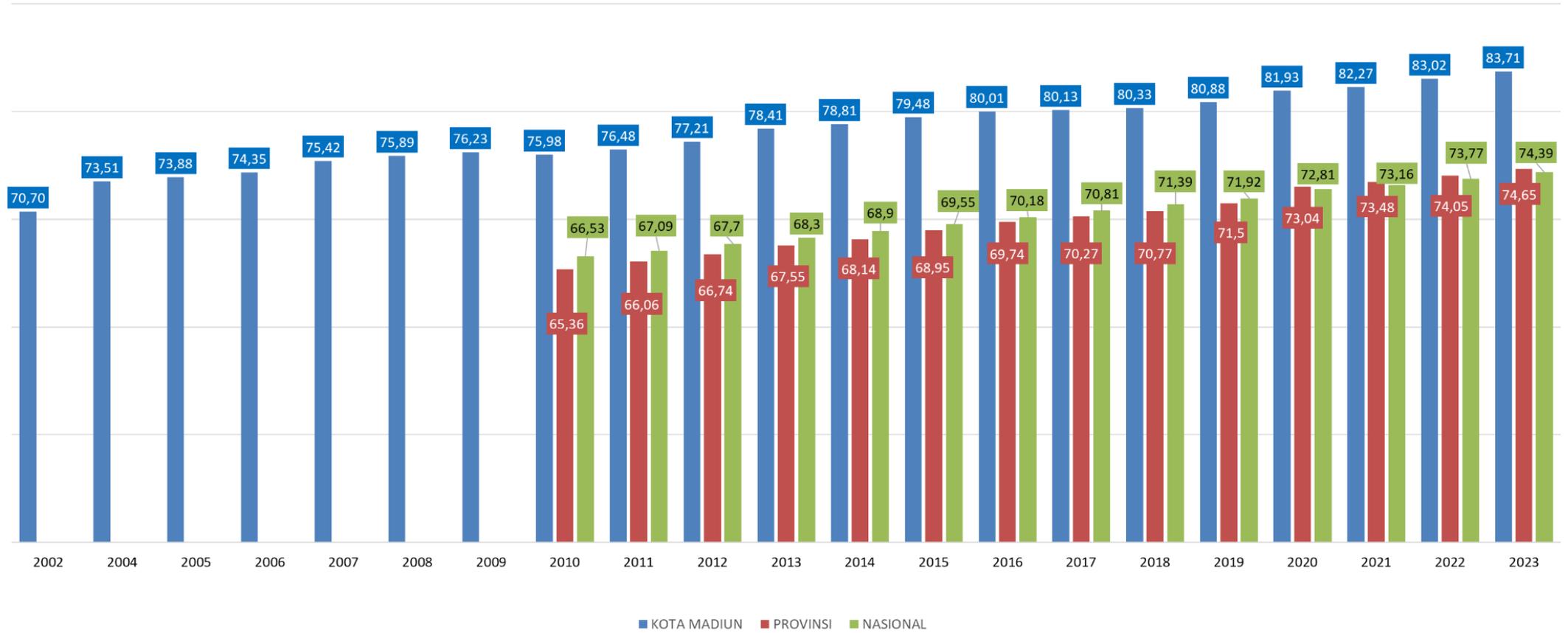
Uraian	TPT (%)
Laki-laki	6,07
Perempuan	5,57

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

#### **2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dapat mengarah pada hasil pembangunan. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Gambar 2. 17 IPM Kota Madiun Tahun 2002-2023

Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

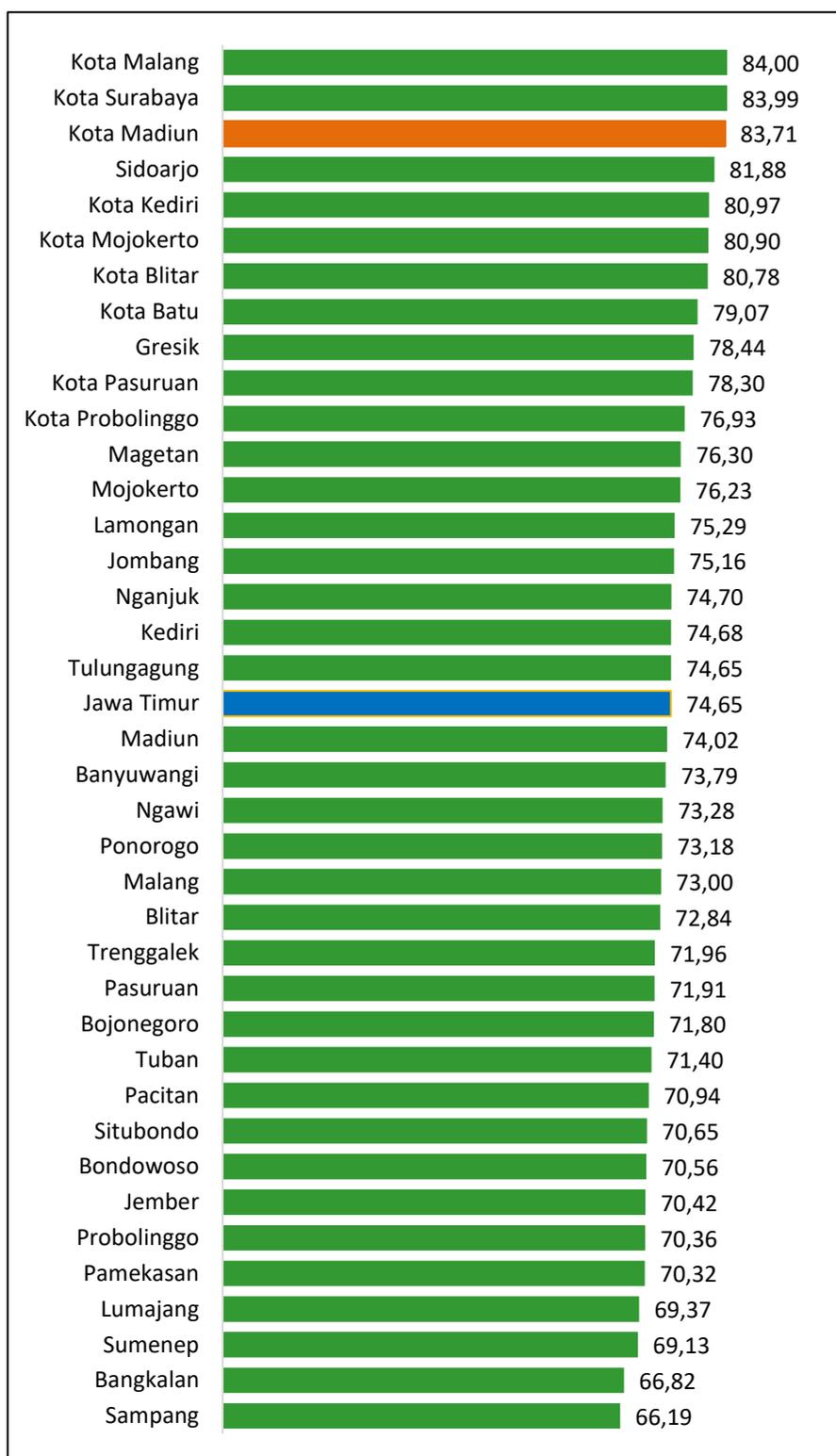
Pada grafik di atas IPM Kota Madiun mengalami tren yang terus meningkat dari Tahun 2018 sebesar 80,33 hingga Tahun 2023 sebesar 83,71. Nilai IPM Kota Madiun tetap di atas nilai rata-rata IPM Provinsi dan Nasional. Secara umum peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kota Madiun semakin maju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun termasuk Daerah dengan IPM sangat tinggi dengan nilai di atas 80. Mulai Tahun 2020, penghitungan IPM menggunakan hasil Sensus Penduduk Long Form (SP LF Tahun 2020). Berdasarkan hasil SP LF 2020, IPM penyesuaian hasil SP LF mengalami peningkatan.

**Tabel 2. 14 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur**

Indeks	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
Umur Harapan Hidup	75,40	74,87
Harapan Lama Sekolah	14,44	13,38
Rata-rata Lama Sekolah	11,82	8,11
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	17.115	12.420
IPM	83,71	74,65

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing dimensi pembentuk dari IPM. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2023 yakni sebesar 75,40 Tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,44 Tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,82 Tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp17,115 juta, sehingga IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 83,71 menandakan seluruh dimensi pembentuk IPM Kota Madiun terkategori tinggi jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.



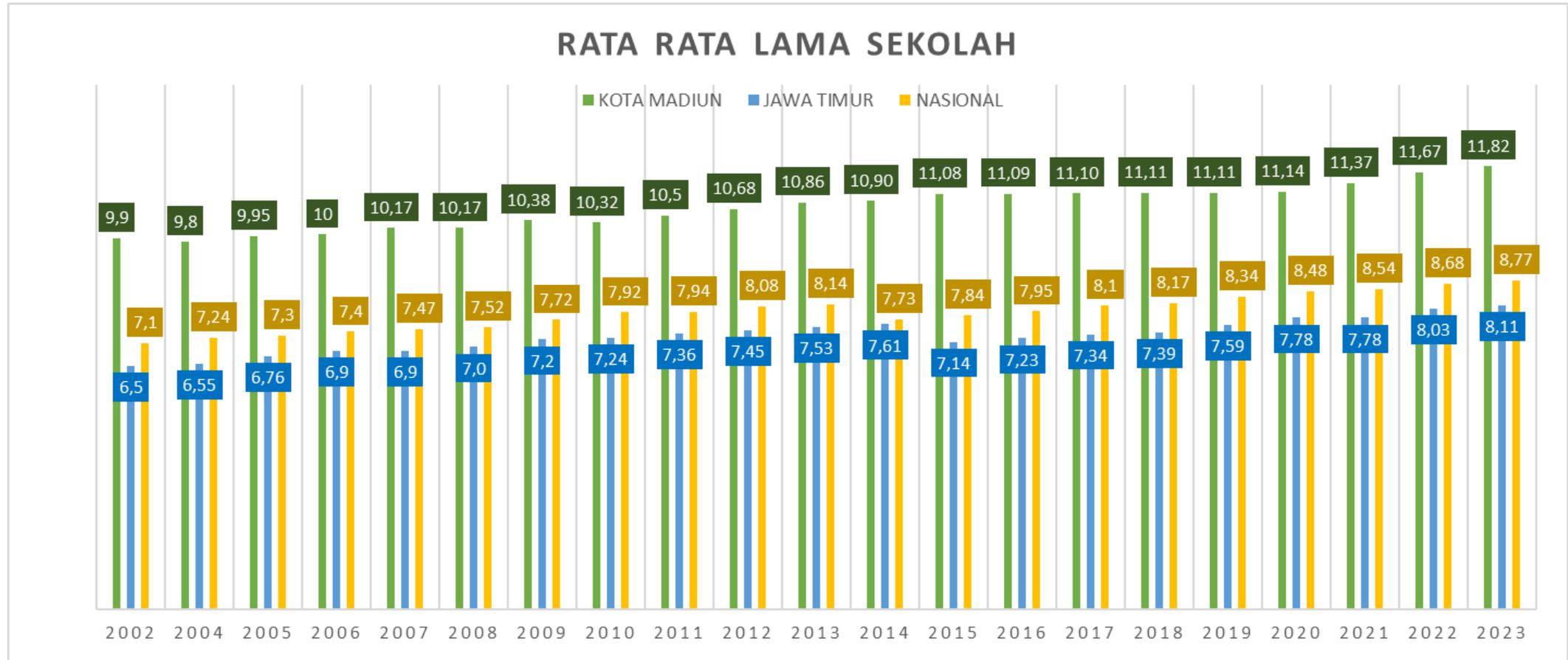
**Gambar 2. 18 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023**

Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 berada pada urutan ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Timur dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain. Dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur IPM tertinggi pada Kota Malang yaitu 84,00. Posisi Kedua yakni Kota Surabaya 83,99 dan urutan ketiga Kota Madiun dengan IPM 83,71. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Sampang.

#### **2.2.1.6.Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan penduduk berumur 25 Tahun ke atas pada semua jenis pendidikan formal. Berbeda dengan metode lama yang menghitung rata-rata lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah pada jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 Tahun ke atas. Realisasi angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan dari Tahun 2002 sebesar 9,9 menjadi 11,82 pada Tahun 2023 atau setingkat dengan SMA kelas 2 semester 2. Artinya sebagian besar penduduk Kota Madiun menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA semester 2. Nilai rata-rata lama sekolah Kota Madiun bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang sebesar 8,11 dan 8,77. Peningkatan dan tingginya angka tersebut disebabkan semakin menyadari pentingnya pendidikan dan dukungan pemerintah kota Madiun, khususnya program pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, serta program BOS dari pemerintah pusat.

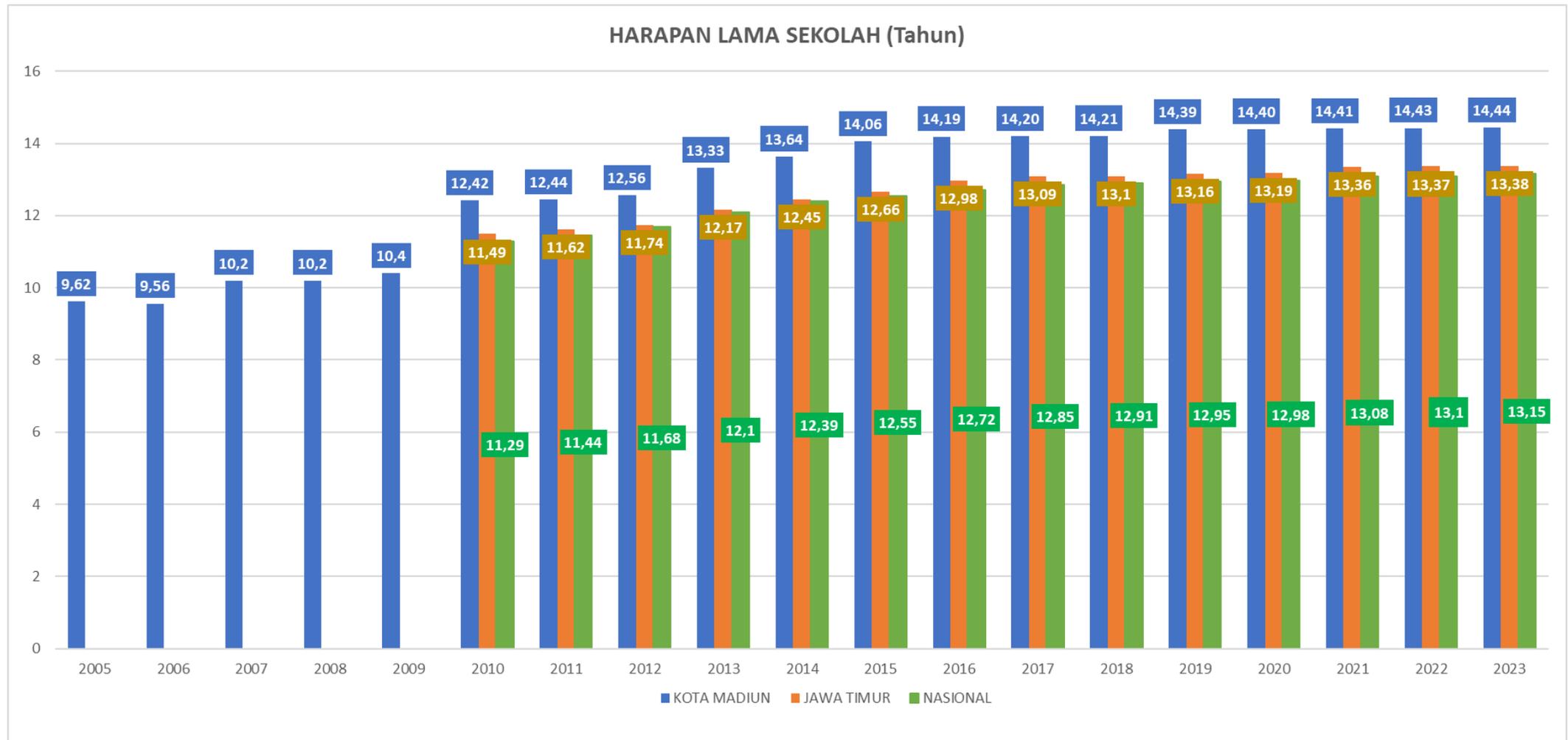


**Gambar 2. 19 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2002-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

#### **2.2.1.7. Harapan Lama Sekolah**

Lama bertahannya seorang anak dalam pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan suatu Daerah. Angka harapan lama sekolah merupakan lama belajar (dalam Tahun) yang mungkin dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Capaian harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode Tahun 2010-2023 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Angka Harapan Lama sekolah pada Tahun 2010 sebesar 12,42 Tahun, kemudian pada Tahun 2023 mencapai 14,44 Tahun. Hal tersebut menunjukkan lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa depan telah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, bantuan Laptop gratis, dan bantuan seragam gratis serta ongkos jahit bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

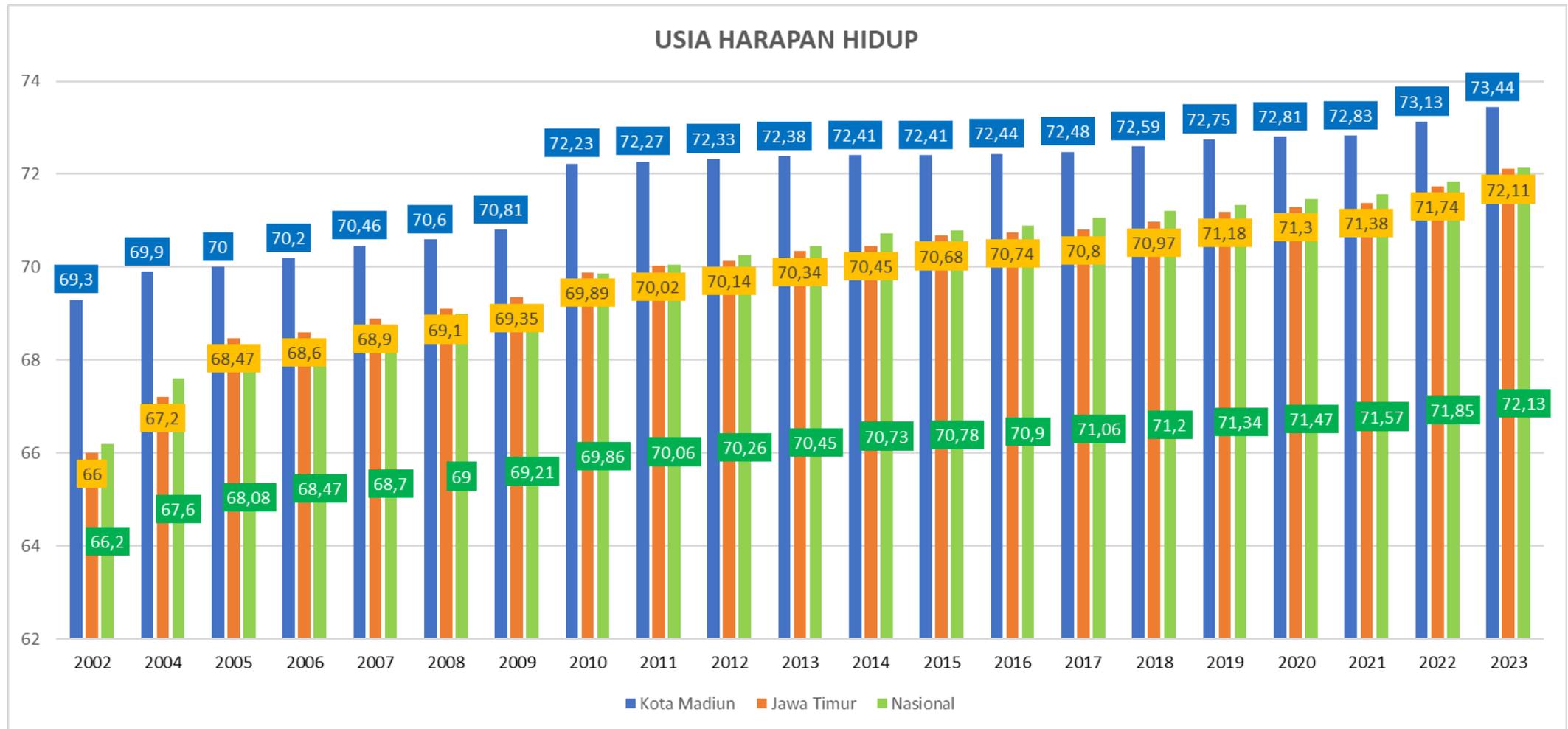


**Gambar 2. 20 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2010-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

#### **2.2.1.8. Umur Harapan Hidup**

Umur harapan hidup merupakan perkiraan jumlah Tahun seseorang dapat hidup (secara rata-rata). Indikator umur harapan hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Umur harapan hidup yang ditunjukkan pada grafik di atas untuk wilayah Kota Madiun mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2002 umur harapan hidup Kota Madiun sebesar 69,3 Tahun. Kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2023 mencapai 73,44 Tahun. Selama rentang lima Tahun terakhir umur harapan hidup di Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup Provinsi Jawa Timur dan umur harapan hidup Nasional.



**Gambar 2. 21 Umur Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2002-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

## **2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

### **2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat**

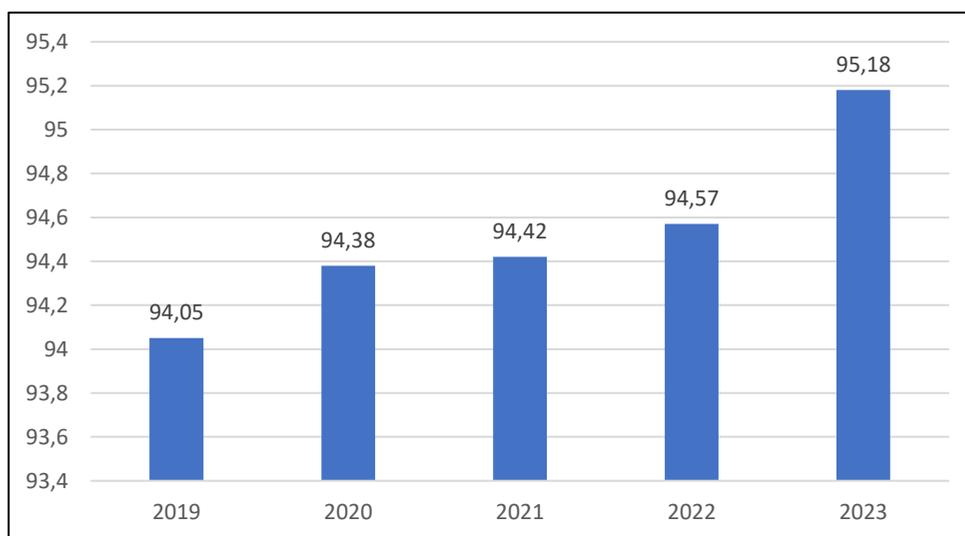
Terdapat 12 indikator indeks keluarga sehat. Indikator tersebut terdiri atas:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Capaian indeks keluarga sehat sampai dengan Tahun 2022 yakni 0,57. Hal ini dapat diartikan masih banyak keluarga yang belum termasuk keluarga sehat.

### **2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender**

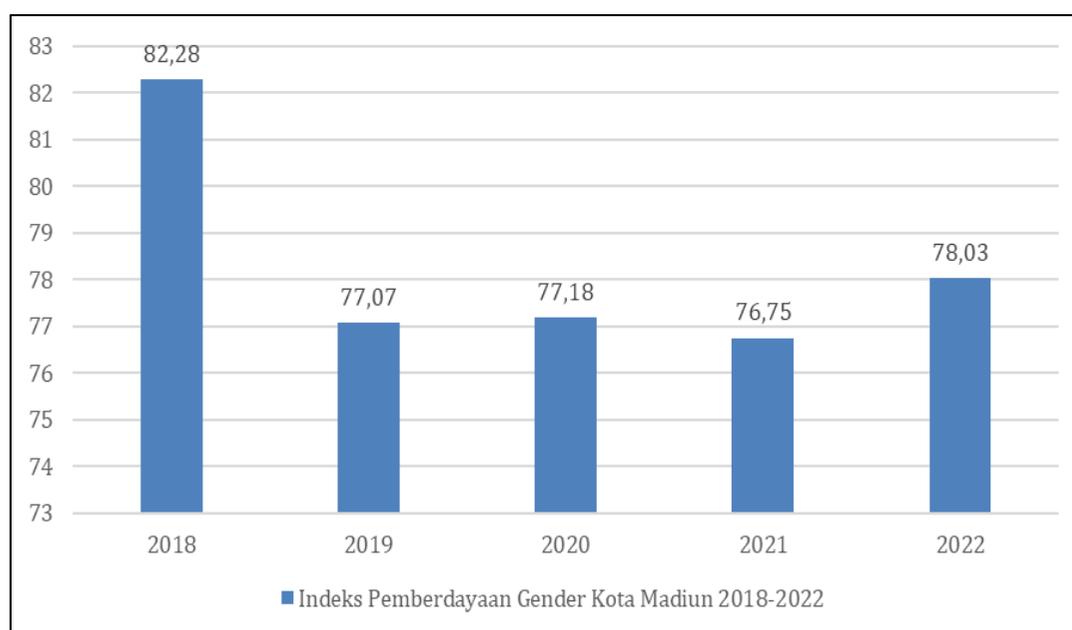
Berdasarkan data laporan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu, tidak terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak. selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik, dengan capaian sebesar 100%. Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



**Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 94,05. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,38. Tahun 2021, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,42, hingga Tahun 2023 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,18. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Kemudian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

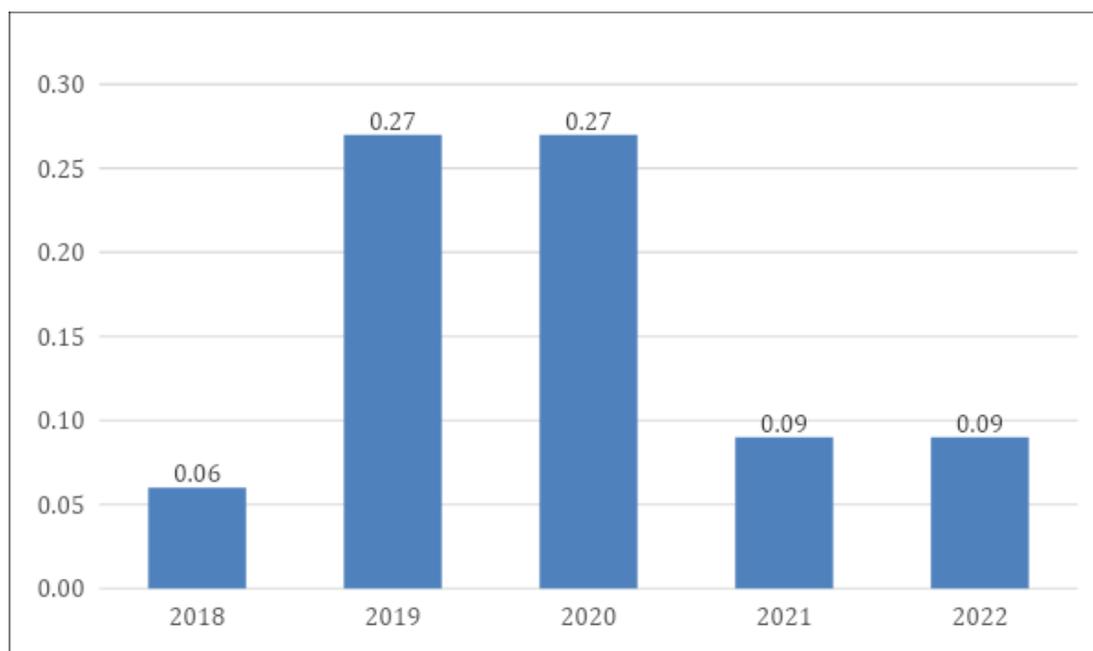


**Gambar 2. 23 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Madiun pada Tahun 2018 mampu mencapai sebesar 82,28%. Tahun 2019, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 menjadi 77,07%. Tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 77,18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Tahun 2021, IDG turun menjadi 76,75%. Tahun 2022, IPG Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 78,03%.

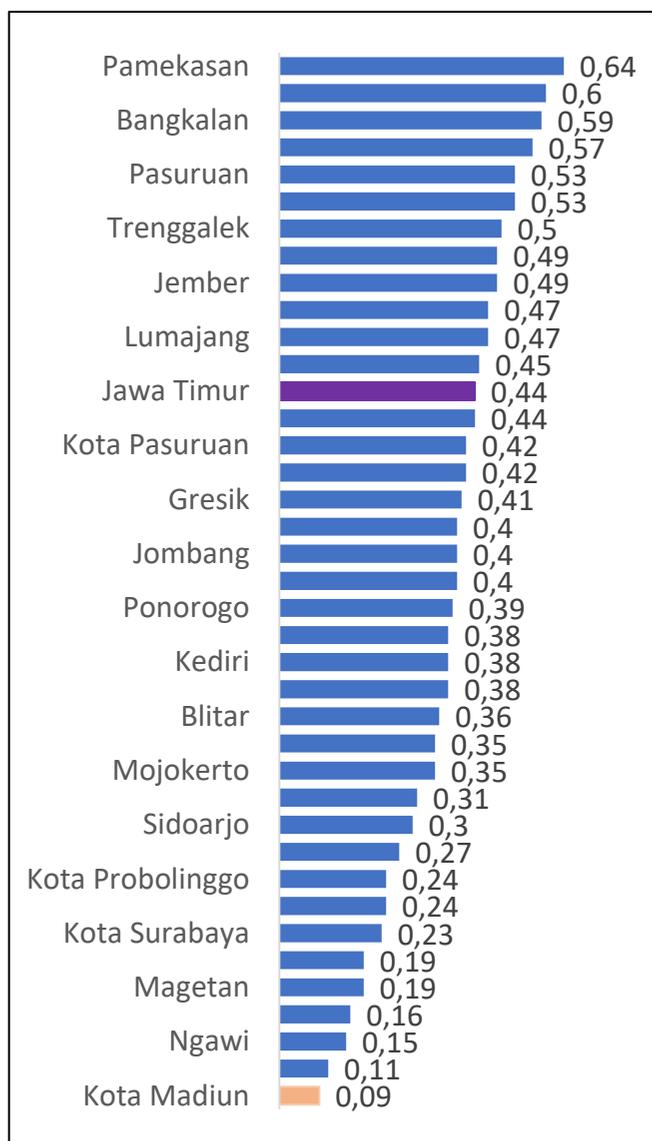
Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender yakni Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



**Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Madiun pada Tahun 2018 mencapai sebesar 0,06. Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 menjadi 0,27. IKG Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,09. Hal ini menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Kota Madiun semakin baik.



**Gambar 2. 25 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

### **2.3. Aspek Daya Saing Daerah**

#### **2.3.1. Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah**

##### **2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010.



**Gambar 2. 26 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun, Tahun 2002-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

PDRB Kota Madiun Tahun 2002-2023 menunjukkan tren peningkatan baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun mencapai Rp 952.238 juta pada Tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp17.256.226,94 juta pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2020, PDRB ADHB sempat mengalami penurunan menjadi Rp13.519.884,9 juta. Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada Tahun 2002 dari Rp 773.497 menjadi sebesar Rp11.764.400,49 juta pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2020, PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp 13.519.884,9 juta. PDRB ADHK juga sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp10.055.909,7 juta.

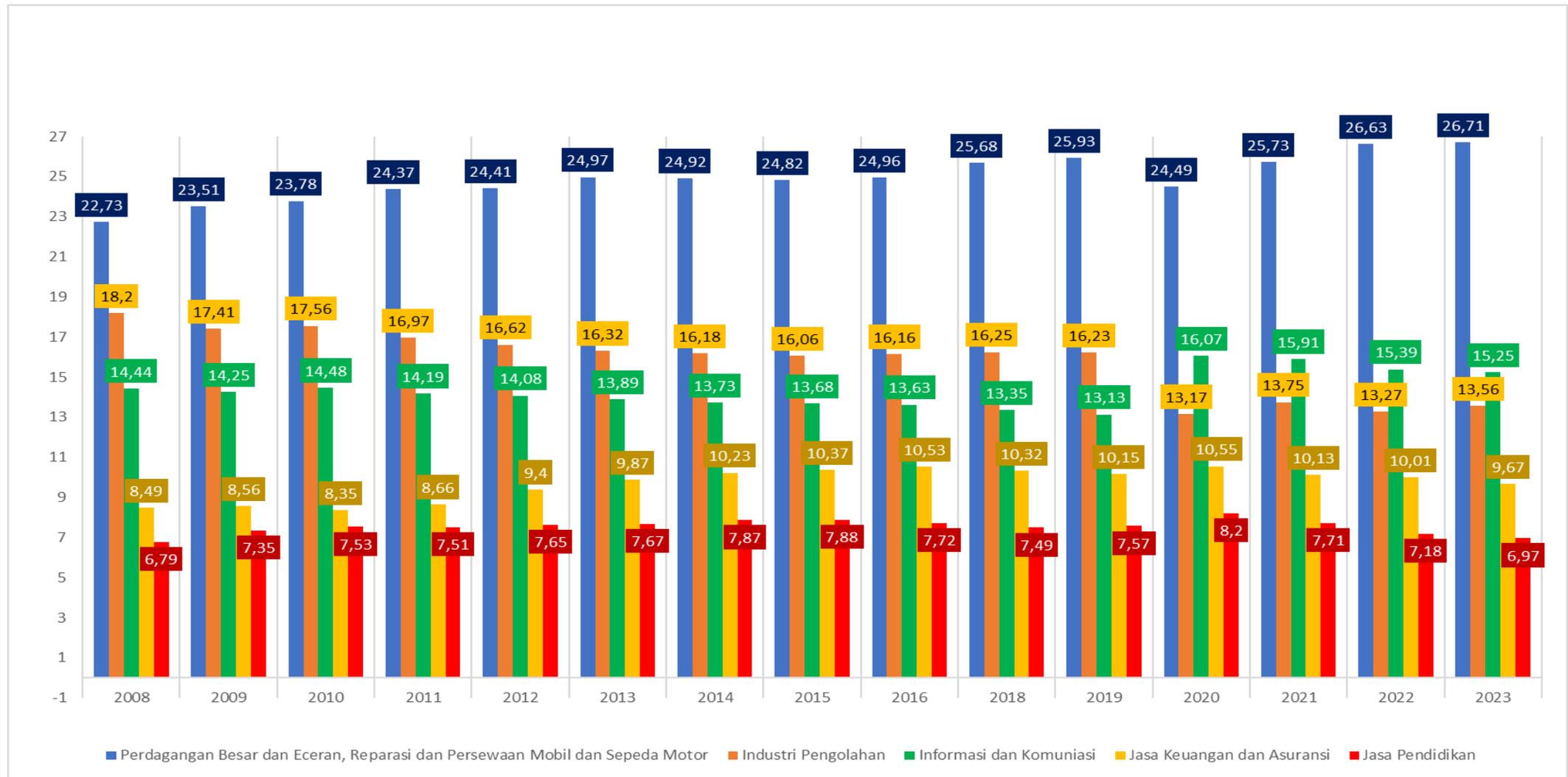
Ketika struktur perekonomian Kota Madiun yang bercirikan sektor perdagangan, industri dan jasa turun akibat pandemi, kegiatan perekonomian menjadi sulit dan para pengusaha terpaksa menekan biaya produksi melalui sistem PHK. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 8,32% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan, hal ini dibantu dengan pandemi yang memasuki era *new normal* dan perekonomian yang kembali pulih sehingga lapangan kerja kembali meningkat.

Struktur perekonomian memiliki berbagai macam kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase PDRB secara sektoral. Distribusi persentase PDRB per sektor menunjukkan bagian masing-masing sektor dalam keseluruhan nilai PDRB. Semakin besar persentase sektor tersebut, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Tingkat kontribusi terhadap PDRB dapat memperlihatkan sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor unggulan dalam Daerah tersebut. Penetapan sektor unggulan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan suatu Daerah. Dalam hal ini, Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan potensi Daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

**Tabel 2. 15 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2008-2023**

No.	Sektor/Kategori	TAHUN																Rata - Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,14	1,15	1,15	1,13	1,09	1,03	1	0,96	0,91	0,83	0,83	0,76	0,89	0,75	0,7	0,70	0,94
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	18,2	17,41	17,56	16,97	16,62	16,32	16,18	16,06	16,16	16,35	16,25	16,23	13,17	13,75	13,27	13,56	15,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,3	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,23	0,23	0,23	0,21	0,22	0,23	0,22	0,21	0,24
6	Konstruksi	6,49	6,6	6,51	6,77	6,85	6,78	6,65	6,52	6,42	6,35	6,14	5,92	5,91	5,58	5,91	5,83	6,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	22,73	23,51	23,78	24,37	24,41	24,97	24,92	24,82	24,96	25,03	25,68	25,93	24,49	25,73	26,63	26,71	24,92
8	Transportasi dan Pergudangan	2,91	2,83	2,81	2,79	2,81	2,89	3,05	3,15	3,22	3,37	3,43	3,54	3,53	3,58	4,07	4,52	3,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,91	4,79	4,63	4,65	4,6	4,52	4,51	4,56	4,68	4,74	4,85	4,98	4,89	4,96	5,13	5,22	4,79
10	Informasi dan Komuniasi	14,44	14,25	14,48	14,19	14,08	13,89	13,73	13,68	13,63	13,71	13,35	13,13	16,07	15,91	15,39	15,25	14,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,49	8,56	8,35	8,66	9,4	9,87	10,23	10,37	10,53	10,4	10,32	10,15	10,55	10,13	10,01	9,67	9,73
12	Real Estate	2,5	2,45	2,52	2,58	2,57	2,59	2,57	2,69	2,66	2,64	2,62	2,65	2,83	2,69	2,61	2,54	2,61
13	Jasa Perusahaan	0,77	0,75	0,73	0,7	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,69	0,7	0,72	0,7	0,69	0,68	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,56	4,44	4,17	4,02	3,82	3,55	3,32	3,23	3,13	3,03	3,06	3,11	3,35	3,1	2,87	2,70	3,47
15	Jasa Pendidikan	6,79	7,35	7,53	7,51	7,65	7,67	7,87	7,88	7,72	7,62	7,49	7,57	8,2	7,71	7,18	6,97	7,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,11	1,15	1,18	1,21	1,2	1,24	1,29	1,27	1,29	1,31	1,34	1,57	1,57	1,52	1,49	1,30
17	Jasa Lainnya	4,54	4,42	4,26	4,13	3,87	3,71	3,73	3,79	3,7	3,63	3,65	3,68	3,51	3,51	3,7	3,85	3,86
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah



**Gambar 2. 27 Kontribusi 5 Sektor / Kategori Terbesar PDRB ADHB Tahun 2008-2023**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Kontribusi sektor yang paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun berdasarkan tabel dan gambar di atas yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 24,9% setiap Tahunnya. Setiap Tahunnya sektor tersebut memiliki tren yang meningkat dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Madiun kecuali saat pandemi Covid-19 yang sempat mengalami penurunan kontribusi. Kontribusi besar tersebut dapat mendorong Kota Madiun menjadi kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua yakni sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata kontribusi setiap Tahunnya sebesar 14,32%. Selama periode Tahun 2008-2023 sektor informasi dan komunikasi berkontribusi paling besar pada Tahun 2020. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi Kota Madiun memiliki potensi pengembangan yang besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian. Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar juga terhadap perekonomian Kota Madiun yakni sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa Pendidikan dengan masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 15,88%, 9,73%, dan 7,54 % per Tahun.

**Tabel 2. 16 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2008-2023**

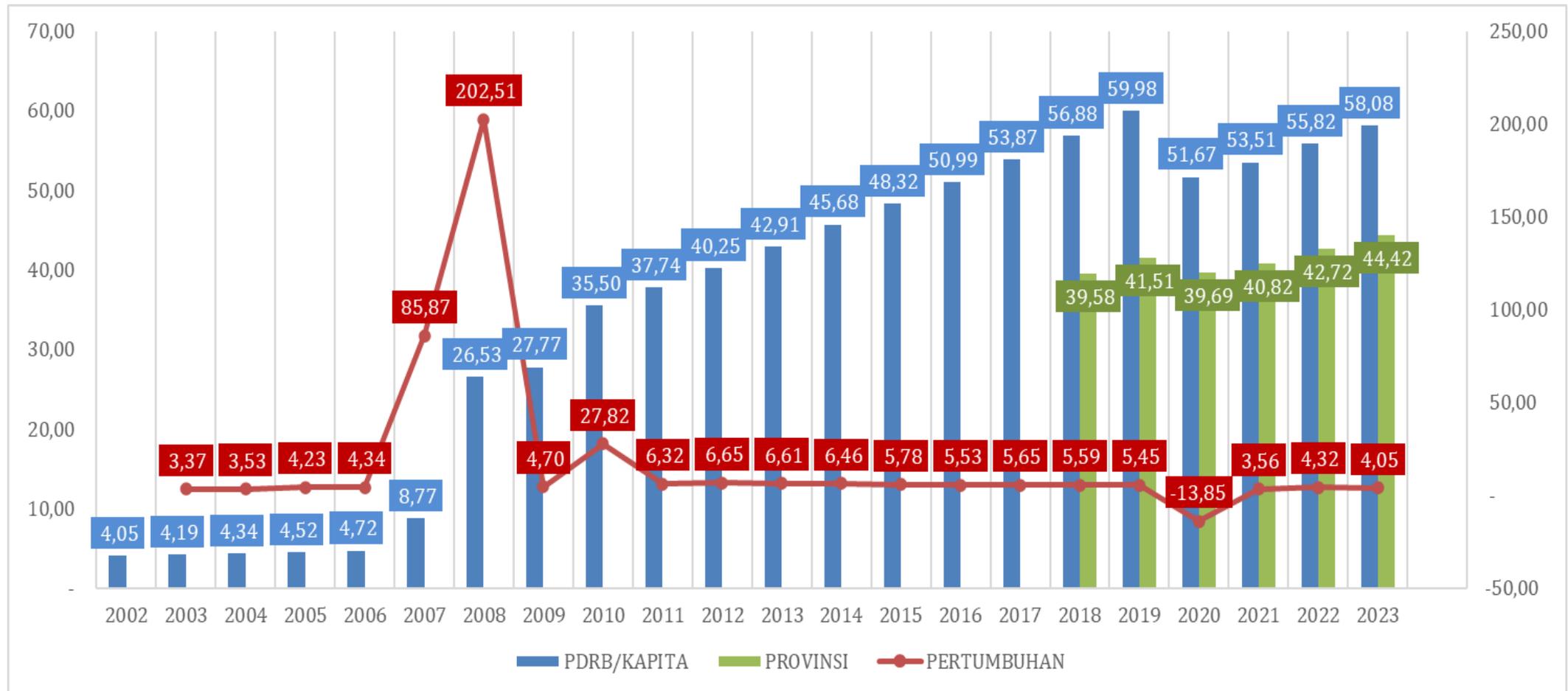
Sektor	Tahun															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primer (%)	1,17	1,18	1,18	1,16	1,12	1,06	1,03	0,98	0,93	0,85	0,85	0,78	0,91	0,77	0,72	0,72
Sekunder (%)	25,08	24,37	24,41	24,06	23,78	23,41	23,13	22,88	22,89	23,01	22,7	22,44	19,38	19,64	19,48	19,68
Tersier (%)	73,75	74,46	74,41	74,78	75,1	75,53	75,84	76,14	76,18	76,14	76,45	76,78	79,71	79,59	79,8	79,6

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Berdasarkan data di atas bahwa struktur perekonomian Kota Madiun tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu Tahun 2008-2023, dimana sektor tersier masih mendominasi perekonomian bahkan terus berkembang. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor tersier di Kota Madiun sebesar 73,75% dan terus meningkat menjadi 79,60% pada Tahun 2023. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 1,17% pada Tahun 2008 menjadi sebesar 0,72% pada Tahun 2023. Sektor sekunder sendiri selama periode 2008-2023 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2008, kontribusi sektor sekunder yakni sebesar 25,08% dan menurun menjadi sebesar 19,68% pada Tahun 2023. Sektor Industri Pengolahan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor sekunder.

#### **2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per Kapita, maka tingkat kesejahteraan semakin baik.



**Gambar 2. 28 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2002-2023**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Perkembangan PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode Tahun 2008-2023 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Namun, pada Tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan PDRB perkapita mengalami penurunan menjadi Rp 51,67 juta dari Rp 59,98 juta di Tahun 2019. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, PDRB per kapita Kota Madiun mulai bangkit kembali sehingga pada Tahun 2023 dengan mencapai Rp 58,08 juta. Rata pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2008-2023 sebesar 5,75 %.

### **2.3.1.3. Indeks Ekonomi Inklusif**

Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan peluang dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada Tahun 2018-2022 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di kota madiun meningkat dari 6,72 pada Tahun 2018 menjadi 6,78 pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,69. Walaupun demikian, indeks pembangunan ekonomi inklusif kembali meningkat pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 6,87.

**Tabel 2. 17 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2018-2021**

IPEI	2018	2019	2020	2021
Kota Madiun	6,72	6,78	6,69	6,87

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas

### **2.3.2. Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)**

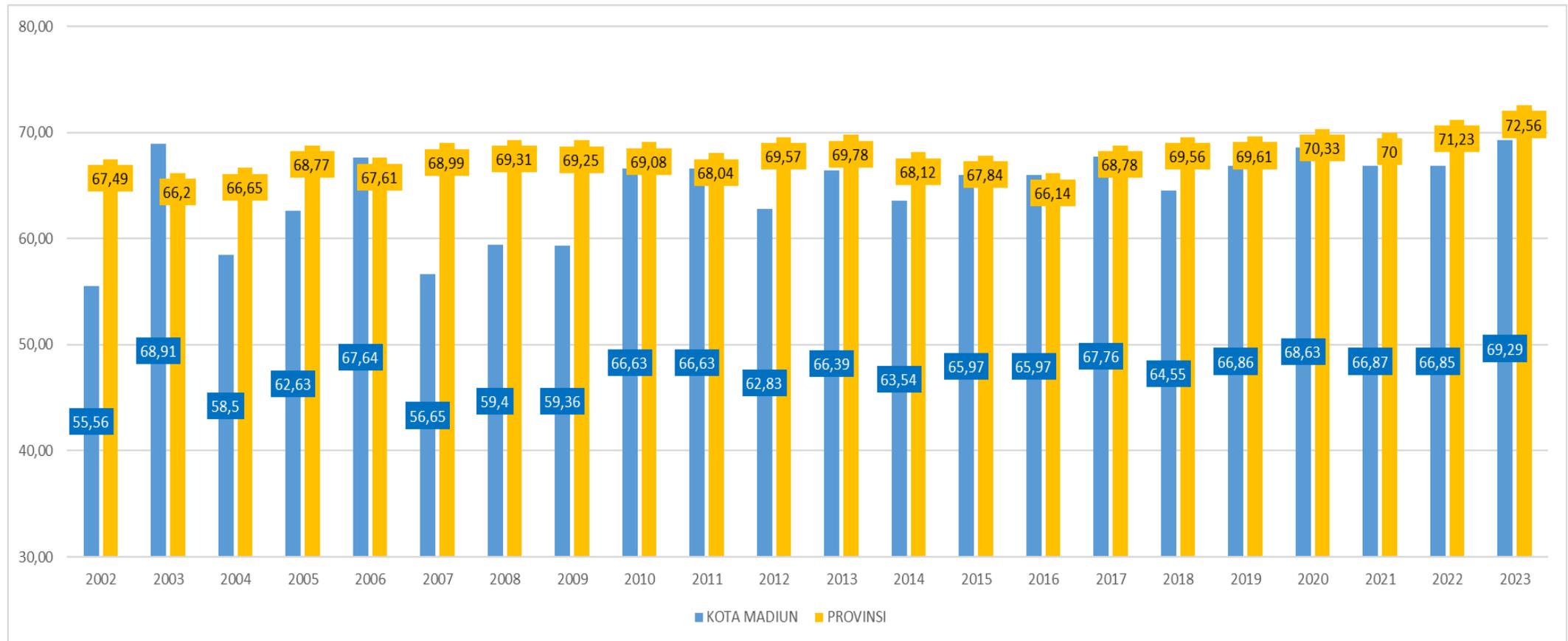
#### **2.3.2.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas.

Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Realisasi rata-rata lama sekolah Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 11,82. Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 mencapai 14,44 Tahun.

#### **2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial, karena mencakup banyak hal seperti ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, produktivitas, dan lain-lain. Salah satu indikator untuk melihat ketenagakerjaan yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase angkatan kerja dalam total angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat digunakan sebagai indikator seberapa sulitnya angkatan kerja dalam mencari pekerjaan.



**Gambar 2. 29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2002-2023**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Perkembangan TPAK Kota Madiun dalam rentang waktu enam Tahun terakhir mengalami perkembangan fluktuatif naik. Pada Tahun 2018 TPAK Kota Madiun sebesar 64,55% sedangkan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 66,86%. Selanjutnya TPAK Kota Madiun mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar 68,63% menjadi 66,85% pada Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 Tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Pada Tahun 2023, TPAK Kota Madiun kembali mengalami peningkatan menjadi 69,29%. TPAK Kota Madiun mengalami fluktuatif naik karena ketersediaan lapangan kerja dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan wirausaha baru. TPAK Kota Madiun dalam 20 Tahun terakhir selalu di bawah dari TPAK Provinsi.

### **2.3.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Dalam mengukur kinerja infrastruktur digunakan indikator indeks Infrastruktur. Indeks infrastruktur Kota Madiun pada Tahun 2020-2023 sebesar 96,15; 97,99; 98,26; dan 98,44. Indikator ini mempresentasikan kinerja infrastruktur Kota. Infrastruktur yang menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indeks infrastruktur antara lain: kualitas infrastruktur jalan beraspal, cakupan layanan air bersih perpipaan, dan cakupan layanan sanitasi aman bagi masyarakat. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah: adanya keinginan masyarakat agar sarana dan prasarana perkotaan yang representatif dan adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur dan kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

#### 2.3.4. Fokus Iklim Investasi

Perkembangan investasi di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 cenderung menurun. Tahun 2019, jumlah investasi di Kota Madiun sebesar Rp 968,70 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel, dan rumah kos. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi Rp 327,63 miliar. Tahun 2021 hingga Tahun 2022 jumlah investasi di Kota Madiun terus mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar Rp 202 miliar dan Rp 214,4 miliar.



**Gambar 2. 30 Realisasi Investasi Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: LKPJ Kota Madiun

Pada Tahun 2023, jumlah realisasi investasi di Kota Madiun mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar Rp 236,34 Miliar. Sesuai data yang masuk bahwa sektor penyumbang terbesar investasi merupakan dari sektor perdagangan yaitu sekitar 60%. Sektor lainnya yang turut menyumbang dalam investasi selebihnya dari sektor perhotelan, restoran, serta usaha jasa lainnya.

##### 2.3.4.1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan kerukunan merupakan indikator dengan perhitungan dari 5 (lima) dimensi persepsi yaitu menghormati, menerima, jujur, teladan, dan kesetaraan. Capaian dari indeks ketentraman di Kota Madiun pada Tahun 2020-2023 sebesar 76,87; 78,74; 81,25 dan 82,88.

##### 2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan perekonomian Daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi Daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing Daerah adalah sebagai berikut:

a. Fokus kemampuan ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi Daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu Daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%)**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	5,69
2020	-5,34
2021	4,79
2022	5,52
2023	5,80

Sumber :BPS Kota Madiun, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun, untuk Kota Madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada saat terjadi pandemi covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021 perekonomian Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode Tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat.

Pada Tahun 2019 hingga 2020 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang signifikan dari 5,69% pada Tahun 2019 hingga mencapai -5,34% pada Tahun 2020 hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung di seluruh dunia sehingga berdampak pada perekonomian global, nasional, maupun regional. Namun pada saat pandemi Covid-19 mulai mereda dan kebijakan *new normal* yang diterapkan di Tahun 2021 berdampak positif. Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di Tahun 2021 kembali bangkit berada pada 4,79% dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 5,8%.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

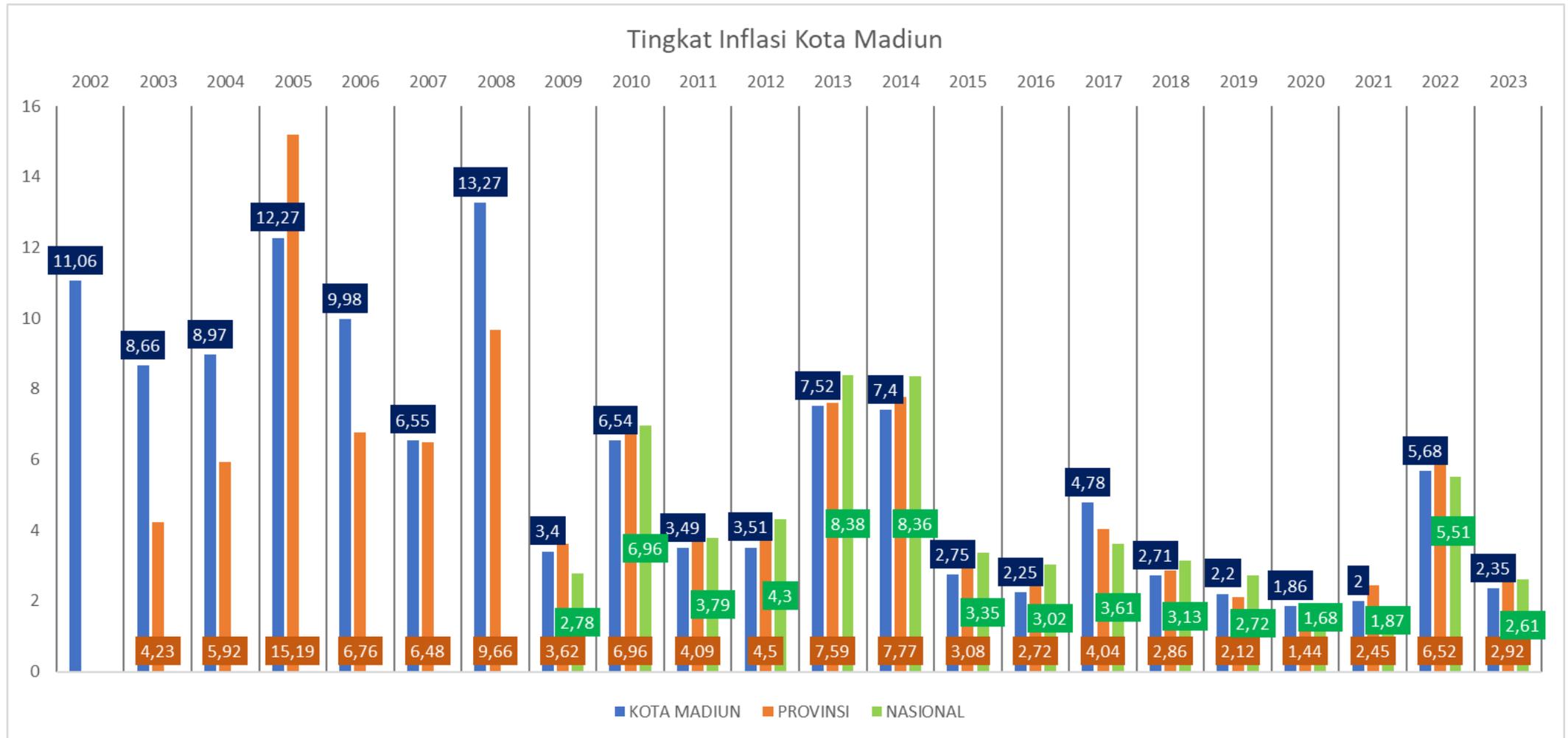
**Tabel 2. 19 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79	1,224
Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	1,198
Industri Pengolahan	4,64	-12,84	7,1	2,17	7,98	4,982
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38	5,592
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,5	4,21	3,941
Konstruksi	4,9	-4,71	-0,9	8,24	4,83	4,307
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	6,2	-11,18	10,16	7,98	5,6	5,397
Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,9	11,64	7,153
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93	6,392
Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6,17	8,141
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2,82	5,249
Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4,35	5,422
Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6,12	5,225
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	2,143
Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3,17	5,393
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3,2	7,483
Jasa Lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9,39	4,602
PDRB	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,8	5,570

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel di atas, pada Tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar (16,12). Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sektor lain seperti Pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa Pendidikan dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan negatif Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, pertumbuhan negatif tertinggi ditempati oleh sektor industri pengolahan sebesar (-12,84%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor sebesar (-11,18%), dan sektor jasa lainnya sebesar (-10,68%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi Tahun 2023 berada pada sektor transportasi dan perdagangan yang mencapai (11,64%), jasa lainnya sebesar (9,39%) dan Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (6,93%), hal ini ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Tingkat Inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2. 31 Tingkat Inflasi di Kota Madiun Tahun 2002-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 tingkat inflasi Kota Madiun sebesar 2,71%, kemudian terjadi penurunan sebesar 0,51 poin pada Tahun 2019 menjadi 2,20% dan 2020 di angka 1,86%. Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7 poin dari Tahun 2021 sehingga inflasi Kota Madiun pada Tahun 2023 di angka 2,35%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.

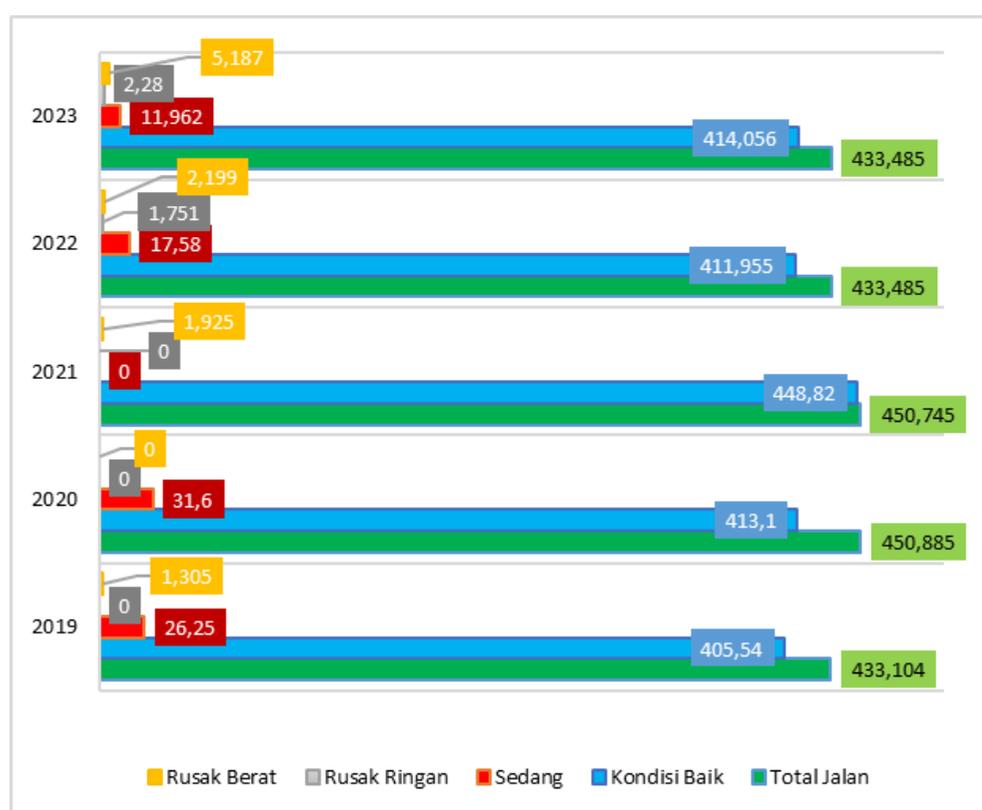
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur Daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.

**Tabel 2. 20 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104
2020	413,100	31,6	0	1,93	450,885
2021	448,820	0	0	1,925	450,745
2022	411,955	17,580	1,751	2,199	433,485
2023	414,056	11,962	2,280	5,187	433,485

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2024



**Gambar 2. 32 Kondisi Jalan di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel dan Gambar di atas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2019 yakni sepanjang 405,54 km dan setiap Tahunnya meningkat menjadi sepanjang 414,056 km pada Tahun 2023. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap Tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak ringan, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

c. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Umur Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel 2. 21 Perkembangan Komponen IPM Kota Madiun Tahun 2010-2023**

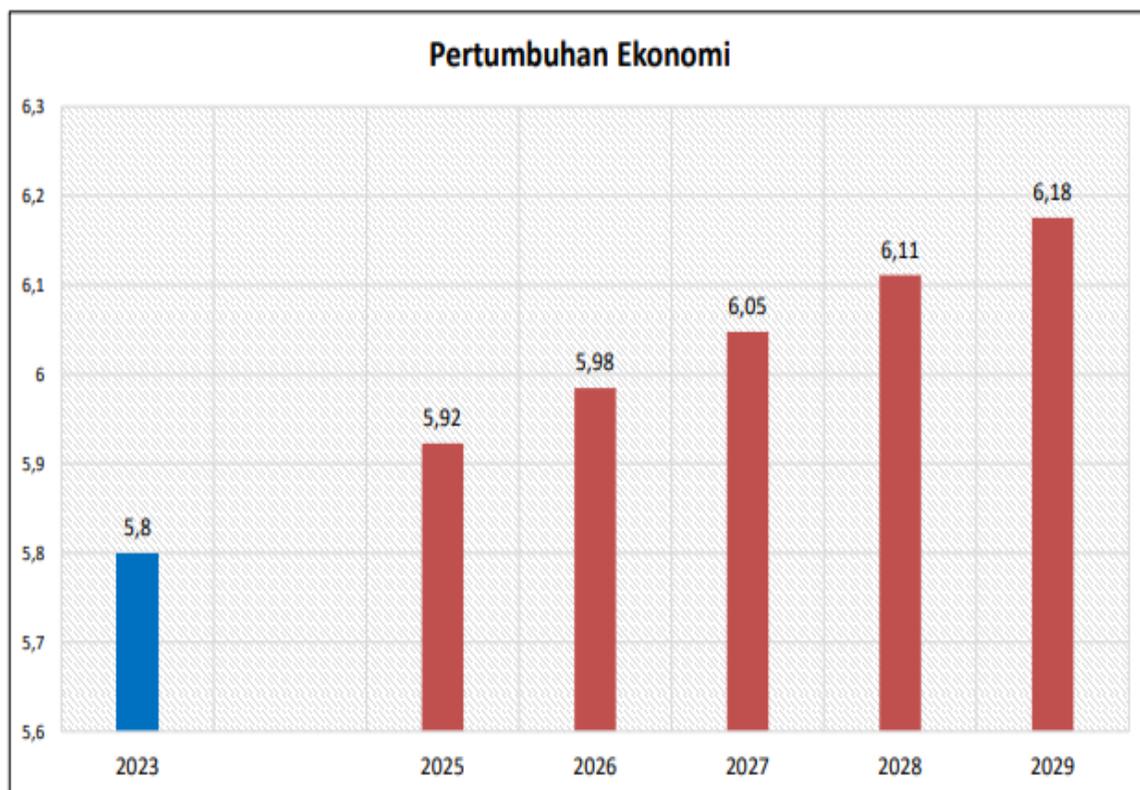
Indeks	Tahun													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88	81,93	82,27	83,02	83,71
Umur Harapan Hidup	72,23	72,27	72,33	72,38	72,41	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13	73,44
Harapan Lama Sekolah	12,42	12,44	12,56	13,33	13,64	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39	14,4	14,41	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	10,32	10,5	10,68	10,86	10,90	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	13,455	13,799	14,317	14,604	14,643	14,723	15,000	15,415	15,616	16.040	16.018	16.095	16.503	17.115

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas, perkembangan IPM dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 nilai IPM Kota Madiun mencapai 80,33 dan pada Tahun 2023 mencapai 83,71. Kenaikan nilai IPM dapat diartikan sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan. Kota Madiun masuk Daerah dengan IPM sangat tinggi di atas 80 poin, dan menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang di Provinsi Jawa Timur.

### 2.3.5. Proyeksi Kondisi Makro Daerah

#### 2.3.5.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

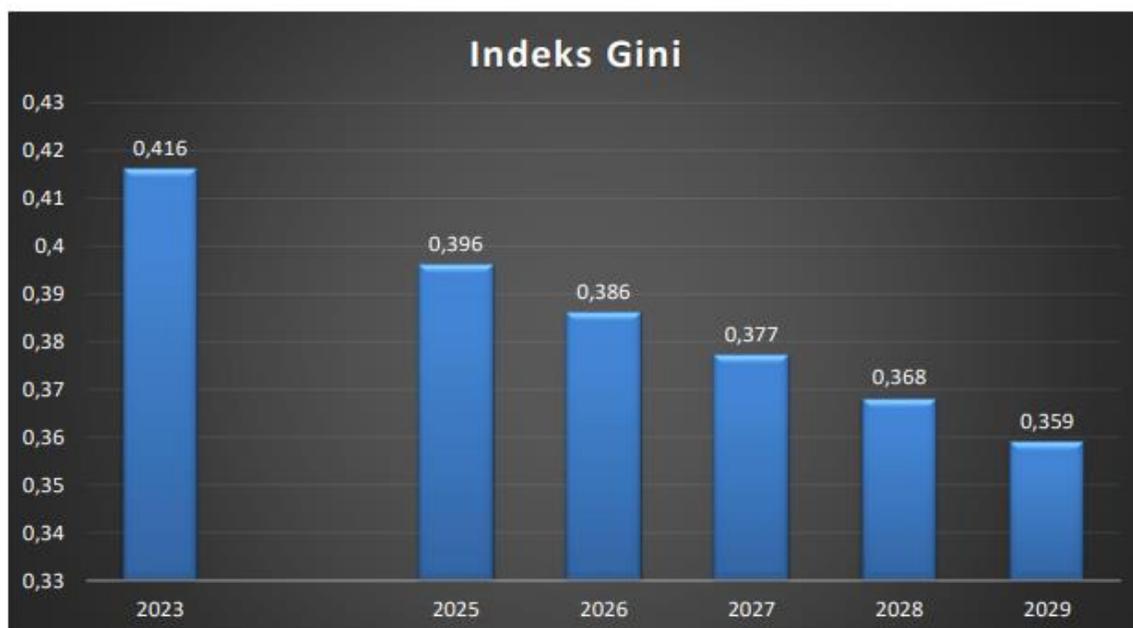


**Gambar 2. 33 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 -2029**

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang baik dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun diproyeksikan akan meningkat hingga Tahun 2029. Mengacu pada *baseline* Tahun 2023 sebesar 5,8; Pertumbuhan ekonomi diprediksi stabil meningkat hingga mencapai puncak angka tertinggi pada Tahun 2029, yakni sebesar 6,13 persen.

### 2.3.5.2. Proyeksi Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2025-2029

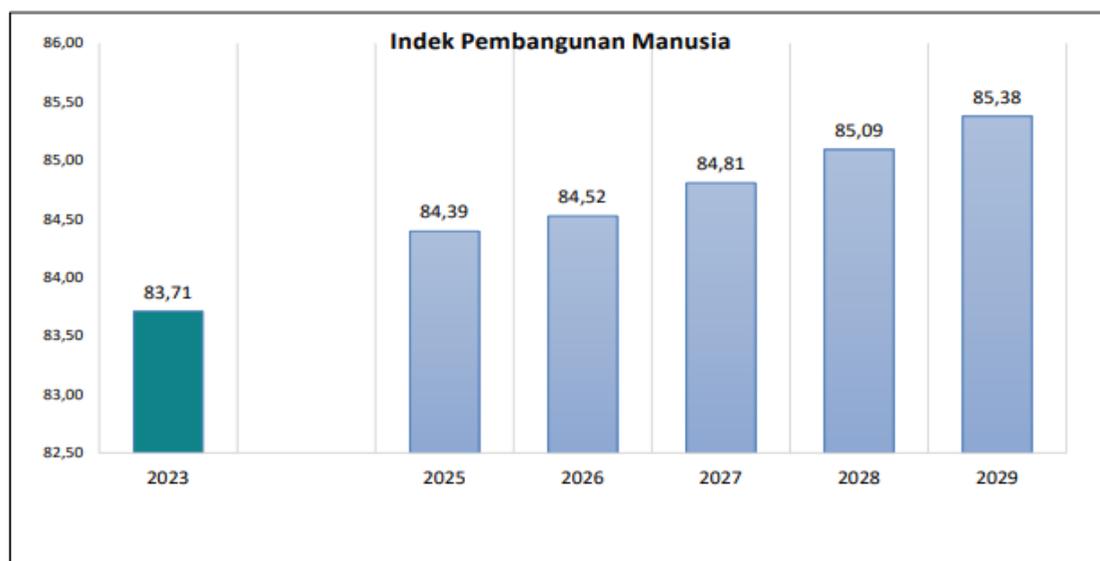


**Gambar 2. 34 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2023 – 2029**

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

Indeks gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah. Dalam konteks ini, perkembangan indeks Gini di Kota Madiun menunjukkan terjadinya distribusi pendapatan yang semakin merata dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pada Tahun 2023 sendiri, angka rasio Gini Kota Madiun berada pada 0,416; mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi pada Tahun tersebut cukup tinggi. Selanjutnya, indeks Gini Kota Madiun diproyeksikan akan semakin mengecil hingga mencapai angka 0,359 pada Tahun 2029.

### 2.3.5.3. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2025-2029



**Gambar 2. 35 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025-2029**

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

Indeks pembangunan manusia merupakan aspek yang penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Indeks ini menggunakan ukuran atau tingkatan kualitas manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang baik dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pada Tahun 2023, indeks pembangunan manusia Kota Madiun mencapai angka 83,71, dan kemudian akan diprediksi semakin membaik hingga mencapai angka 85,38 pada Tahun 2029.

#### 2.3.5.4. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2025-2029



**Gambar 2. 36 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun 2025-2029**

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

Pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun mengingat bahwa permasalahan seputar kemiskinan adalah permasalahan yang krusial. Dalam hal ini, mengacu pada *baseline* tingkat kemiskinan Kota Madiun pada Tahun 2023, yang sebesar 4,74; diproyeksikan kedepannya dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029, tingkat kemiskinan di Kota Madiun akan mengalami penurunan. Pada akhir periode I, yakni pada Tahun 2029, tingkat kemiskinan di Kota Madiun akan berada pada angka 4,02 persen.

#### 2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum Daerah merupakan kemampuan Daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Aspek pelayanan Daerah terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 persen dari APBD yang harapannya dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah serta menciptakan SDM yang cerdas dan terampil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK, serta jumlah peserta didik yang dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 22 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	131	150	164
2.	Peserta PAUD	577	540	594
3.	Tenaga Pendidik	54	56	70
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1389	1381	1810
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	188	190	272

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, data pada Tahun 2023 menunjukkan fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai.

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 131 unit dengan jumlah peserta didik 577 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 15 unit dengan jumlah peserta didik 540 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 164 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 594 anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah kecamatan Kartoharjo terdapat 188 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.389 anak, untuk kecamatan Manguharjo terdapat 190 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1381 anak, dan untuk kecamatan Taman terdapat 272 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.810 anak.

**Tabel 2. 23 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023**

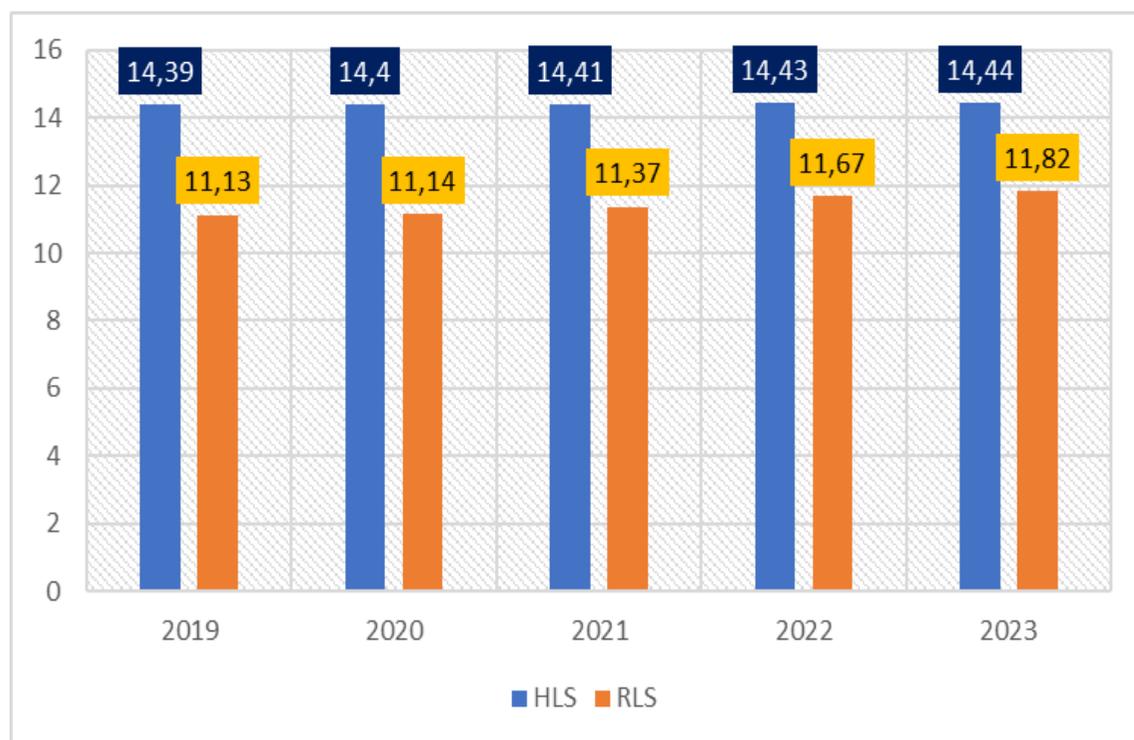
Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Manguharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	26	22	68
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Manguharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	15	11	39
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, Jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun Tahun 2023 sebanyak 68 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 39 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunan di beberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



**Gambar 2. 37 Perkembangan Indikator IPM Tahun 2019-2023**

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Sebagaimana termuat pada gambar di atas, angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,0044 poin per Tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2023, HLS di Kota Madiun telah mencapai 14,44 Tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun tumbuh 0,112 poin per Tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

RLS Kota Madiun Tahun 2023 mencapai 11,82 Tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 Tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2). Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 24 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2019 – 2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	135,75	113,75	119,83	119,83*	111,9
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:52	1:56	1:16	1:37	1:42
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1 : 15	1:13
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:28	1:24	1:15	1 : 25	1 : 15
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	135,45	174,89	130	114,99	107,71%
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,24	98,48	97,20	89%	99,8%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	98,68	92,63	99,5	95%	99,7%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	109	95,61	90,04	198,27	104,06%
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0,7	0	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0,7	0	0	0

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	111,35	100	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	96,1	96,83	97	99,6	93,3
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.427	398	1.212	1.200	1.215
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka APS pada pada Tahun 2019 sebesar 135,75%. Pada Tahun 2020 capaian APS menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75%. Tahun 2021 capaian APS sebesar 119,83 Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Capaian sementara APS Tahun 2022 119,83% dan 2023 sebesar 111,9%.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk Tahun 2019 capaiannya sebesar 1:52 dan Tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada Tahun 2021 sebesar 1:16. Pada Tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:37 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 1:42. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 42 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2023.

3. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 yakni 1:16 dan untuk Tahun 2022 sebesar 1:15, artinya bahwa satu orang guru menangani 15 siswa. Pada Tahun 2023, rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mengalami penurunan menjadi 1:13 atau satu orang guru menangani 12 siswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2019 yakni 1:28 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian Tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 capaiannya sebesar 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan Tahun 2022, terjadi penurunan dalam rasio guru per kelas pada Tahun 2023, di mana satu guru pada Tahun 2022 mengajar 25 murid, namun pada Tahun 2023, satu guru hanya mengajar 15 murid. Perubahan ini disebabkan oleh perekrutan guru CPNS tambahan di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan Guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM berisi persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP Tahun 2019 sebesar 135,45%. Selanjutnya, dari Tahun 2020 ke Tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) menurun dari 174,89% menjadi 130%, kemudian turun 15,11 poin pada Tahun 2022 menjadi 114,99% dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, APM tercatat turun menjadi 107,1%. Angka tersebut mencerminkan sekitar 107,1% anak usia 7-15 Tahun yang mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) di Kota Madiun.

6. Kondisi Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Tahun 2019 hingga Tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada Tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di Tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di Tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%, akan tetapi pada Tahun 2022 ini kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik turun menjadi hanya sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan yang positif dimana kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik meningkat cukup tinggi sehingga menjadi 99,8%.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik Tahun 2019 98,68%. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua Tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Akan tetapi pada Tahun 2022, kondisi sekolah pendidikan dasar SMP/MTs kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%, yang berarti turun 4,50% dari Tahun 2021. Pada Tahun 2023, kembali mengalami peningkatan menjadi 99,7%.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dalam hal ini APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

APK PAUD pada Tahun 2019 sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada Tahun 2020 capaian APK PAUD mengalami penurunan sebesar 13,39 menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 capaian APK PAUD sebesar 90,04%. Akan tetapi pada Tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada Tahun 2023 menjadi 104,06%.

8. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Rata-rata Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada Tahun sebesar 0. Hal ini dapat diartikan bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2019 capaiannya sebesar 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 100%.

Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2019, 111,35%. Pada Tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (*on going formation*) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:

**Tabel 2. 25 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Kualifikasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SMA	11	0	0	0	0
2	D1	4	0	0	0	0
3	D2	17	0	0	0	0
4	D3	6	19	32	7	50
5	DIV/S1	1.818	1.804	1.956	1.849	2.274
6	S2	116	93	102	125	108

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada table di atas, capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2019 sebesar 92,19 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818 orang. Pada Tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada Tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 93,59%. Capaian ini mengalami penurunan 0,566 poin dibandingkan capaian Tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru mengalami kenaikan sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang.

Terjadi penurunan dari sisi capaian dan jumlah guru namun terjadi peningkatan dari sisi kualifikasi pendidikan S2. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari Tahun ke Tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar. Sedangkan pada Tahun 2023 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebanyak 2.274 orang dan terjadi penurunan dari sisi kualifikasi pendidikan S2 dari 125 orang di Tahun 2022 dan menjadi 108 di Tahun 2023.

#### 11. Pengolahan *Database* Informasi Pendidikan dan Evaluasi Pelaporan Berbasis TIK

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai Tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak Tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di *update* terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan *server* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan di *upload* secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis *web* dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

- a) sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 Tahunan;
- b) sekolah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
- c) sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap Tahun anggaran dan Tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian Capaian pada Tahun 2019 adalah 1.250 guru, meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan target RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS Tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada Tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional terus mengalami peningkatan dengan capaian 1.212 orang guru Tahun 2021, sebanyak 1.200 guru di Tahun 2022, dan sebanyak 1.215 guru di Tahun 2023.

14. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 26 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 - 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PENDIDIKAN											
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	23.184	21.803	94,04%	26.323	30.270	114,99%	25.902	28.417	109,71%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.381	176	12,74%	175	273	156%	225	320	142,22%
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.582	2.483	96,17%	2.607	3.030	116,23%	5.162	5.395	104,51%

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 118,81% atau masuk dalam kategori Tuntas Paripurna.

b. Pelayanan Kesehatan

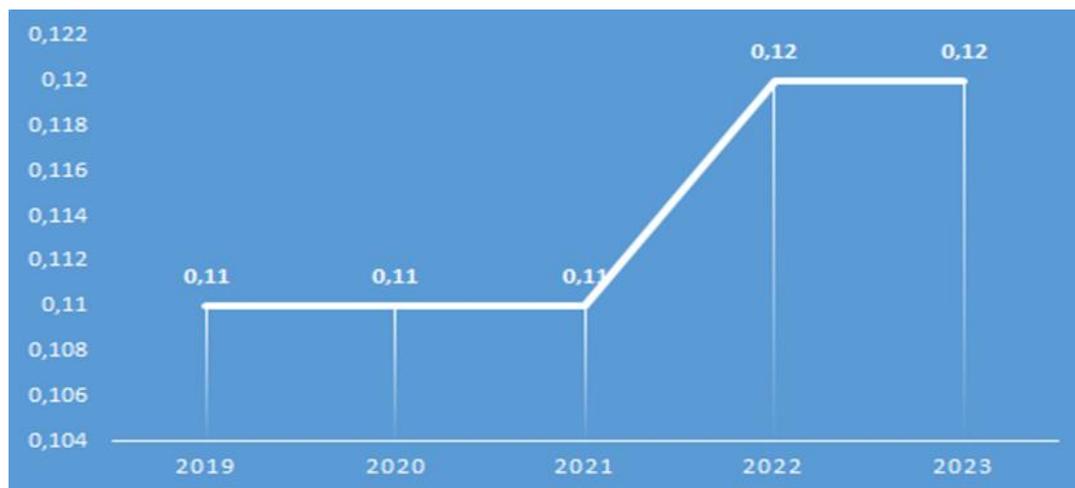
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 27 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk
2019	0,11
2020	0,11
2021	0,11
2022	0,12
2023	0,12

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada Tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada Tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan di angka 0,12. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 38 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

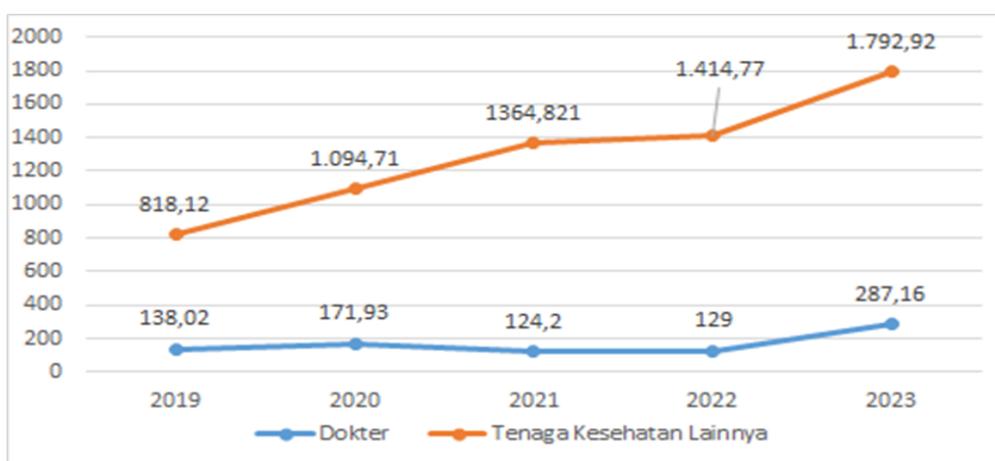
**Tabel 2. 28 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77
2023	287,16	1.792,92

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk.

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 129 (Tahun 2022) hingga 287,16 (Tahun 2023). Rasio tenaga kesehatan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berkisar antara 818,12 (Tahun 2019) hingga 1.792,92 (Tahun 2023). Pada Tahun 2023, mengalami peningkatan yang cukup tinggi baik dari rasio dokter maupun rasio tenaga kesehatan lainnya. Namun, secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuatif dan menurun jika dibandingkan Tahun 2019. Rasio tenaga kesehatan dalam lima Tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.



**Gambar 2. 39 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang termuat pada gambar di atas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 29 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023**

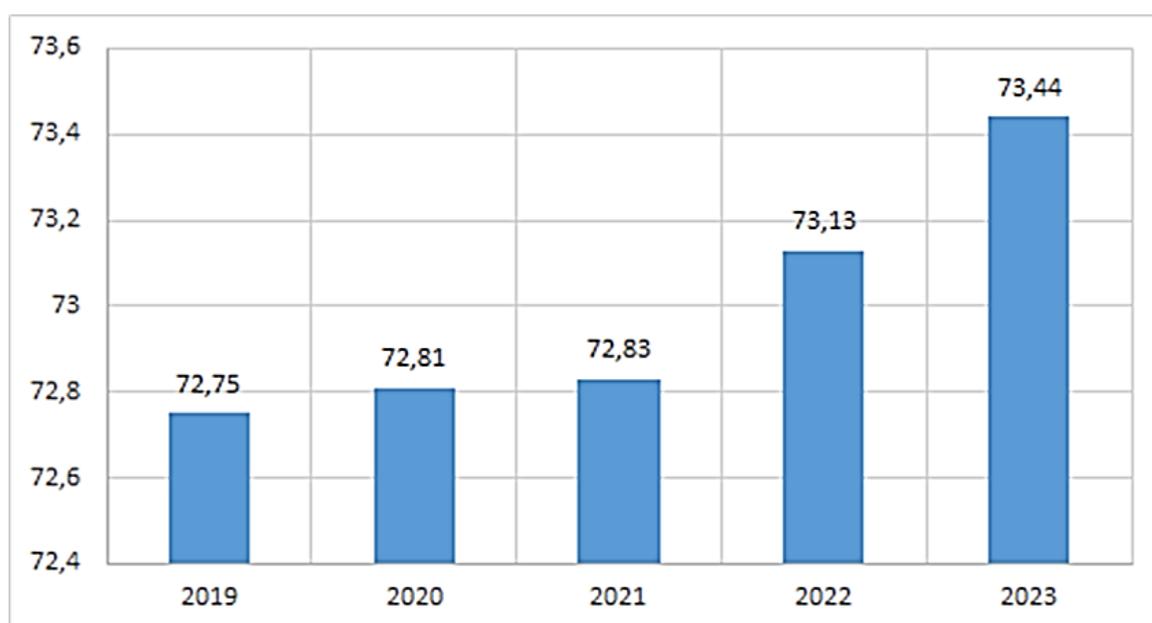
Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2019	8	210.115	0,0380
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397
2023	9	202.544	0,0444

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 9 rumah sakit.

Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada Tahun 2019 menuju Tahun 2023 di Kota Madiun mengalami peningkatan dari 0,0380 menjadi 0,0444. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan secara absolut jumlah rumah sakit turut bertambah. Sejak Tahun 2021, rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0017 pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 rasio menjadi sebesar 0,0397. Dan peningkatan terjadi juga pada Tahun 2023 dimana rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0047 menjadi 0,0444.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2. 40 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 terjadi pada 2 (dua) kelurahan. Pada Tahun 2023, kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 27 kelurahan. Sampai dengan bulan April Tahun 2024 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 26 kelurahan.

**Tabel 2. 30 Jumlah Kasus KLB Kota Madiun Tahun 2022-2024**

No	Jenis Kasus KLB	Waktu Kejadian Diketahui	Kelurahan Tempat Kejadian
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Januari – Desember 2022	2 Kelurahan
		Januari – Desember 2023	27 Kelurahan
		Januari – April 2024	26 Kelurahan

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

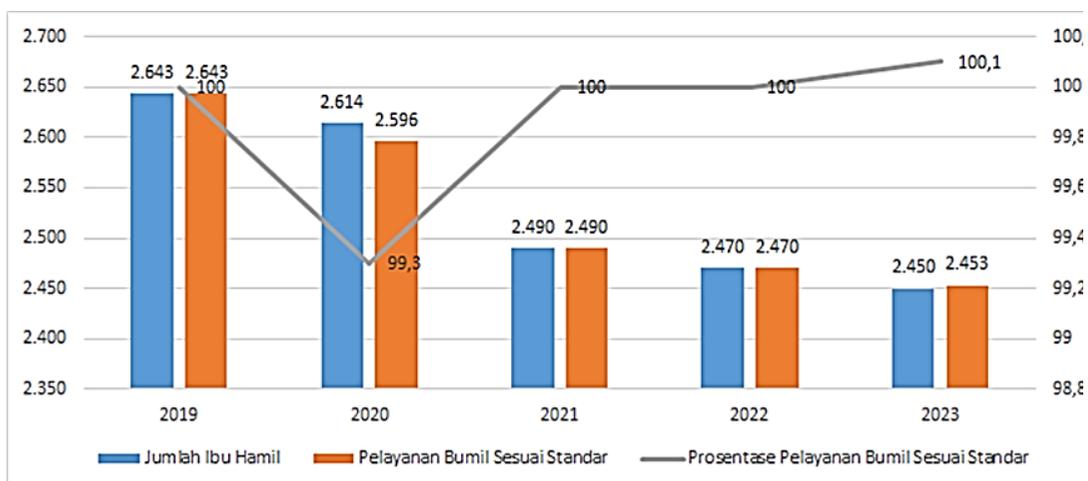
1. meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon; dan
4. pemberantasan sarang nyamuk di tempat yang berpotensi terjadinya perkembang biakan nyamuk.

Berikutnya yang harus diperhatikan yakni pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 2. 31 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Ibu Hamil	2.643	2.614	2.490	2.470	2.450
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.643	2.596	2.490	2.470	2.453
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,3	100	100	100,1

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah



**Gambar 2. 41 Capaian Presentase Pelayanan Ibu Hamil, Tahun 2019-2023**

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar di Tahun 2023 sebesar 100,1%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan, Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- b. optimalisasi kelas ibu hamil di Puskesmas;
- c. terjalin kerja sama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman; dan
- f. pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

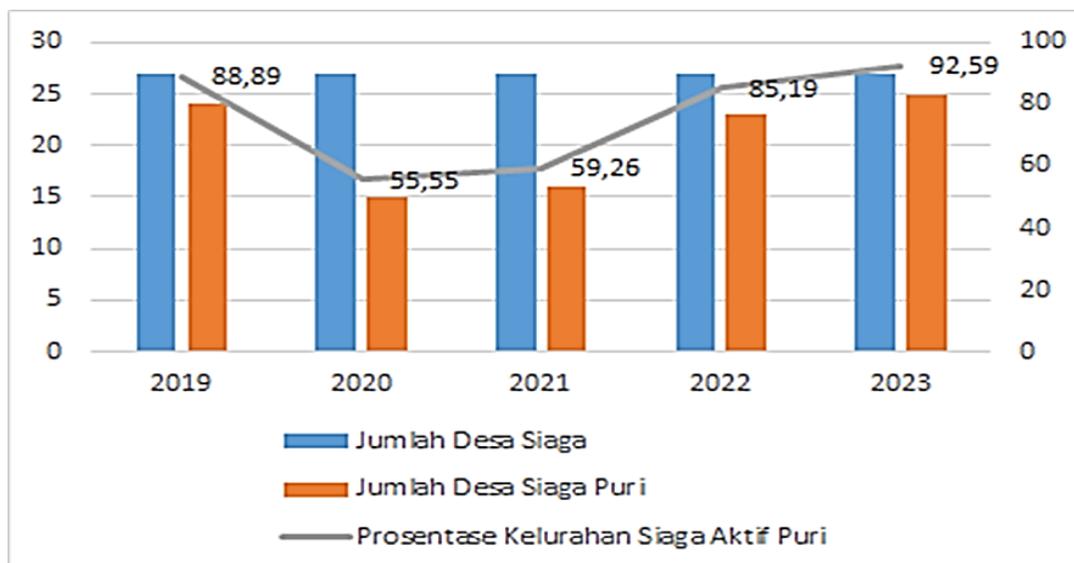
Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan, peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2023:

**Tabel 2. 32 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	24	15	16	23	25
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59

Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, jumlah desa siaga puri setiap Tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:



**Gambar 2. 42 Perkembangan Desa Siaga Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada gambar di atas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2023 yaitu sebesar 92,59% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 8 kelurahan dibandingkan Tahun 2021. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 33 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,35	0,119	0,12

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, terlihat bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada Tahun 2021 menjadi 0,35, Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,119, dan kembali meningkat di Tahun 2023 menjadi 0,12. Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 9 (sembilan) Rumah Sakit (RS) sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu Poned (Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 9 (sembilan) RS. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

**Tabel 2. 34 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	4
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	9
7	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,04443

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, terlihat bahwa Tahun 2019 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah 0,0380. Tahun 2020, nilai rasionya tetap sebesar 0,0380. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk.

Lebih lanjut di Tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,0444 dikarenakan adanya tambahan satu rumah sakit swasta. Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 35 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,0444
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	138,02	171,93	116,9	129	287,16
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	818,12	1.094,7 1	132,83	1.414,77	1.792,92
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	457	478	0	195	67
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	68,21	69	69,43	64,88	70,94
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	62,96	100	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	48	100	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	39,53	0	126	42,42	0
2.14	Persentase rumah tangga sehat	68,21	69	99,92	88,41	89,25
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	100	95,17	113	98,73	100,61
2.16	Jumlah kasus KLB	9	162	2	2	4
2.17	Persentase penanganan penyakit	87,5	100	100	100	83,34
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	59,26	40,74	74,1	100	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	85	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,84	74,94	84,917	86,02	85,98
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	50	100
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	85,12	86,63	100	90,72	95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	100	110
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	104,67	90,25	118,4	110,81	110,62
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	408	502	550	252	161
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	100,12
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	85,61	86,32	TTU : 95,3 TPM: 95,2	TTU : 81 TPM : 96,67	TTU : 95,7 TPM : 89,7
2.29	Angka kematian bayi	6,32	4,32	3,8	4,2	5,1
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0,3	0,3	0,6	0,1	0,4
2.31	IKM rumah sakit	80,35	80,19	83,39	88,94	89,56
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	78,26	81,52	79,35	88,17	89,13
2.33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

#### 1. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyetatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di Tahun 2022-2023 menjadi 0,12.

#### 2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

### 3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 rumah sakit yang beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri dari 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada 2023 peningkatan juga terjadi dan nilai rasio rumah sakit per 1.000 penduduk menjadi 0,0444.

### 4. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 138,02 hingga 287,16. Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2023. Secara keseluruhan dalam dua Tahun terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2022 rasio dokter per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 129 dan naik pada 2023 menjadi 287,16.

### 5. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 818,12 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada Tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 1.414,77 dan mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 1.792,92.

### 6. Puskesmas Berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO adalah Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

#### 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2020 berkisar antara 457 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap Tahun dan termasuk dalam kriteria yang baik. Sedangkan pada Tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada Tahun 2022 skor mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada Tahun 2023.

#### 8. Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani

Tahun 2019 hingga Tahun 2023, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

#### 9. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan/Desa siaga aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Kota Madiun pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### 10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 68,21%, pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 69% pada Tahun 2020. Setahun setelahnya pada Tahun 2021, Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada Tahun 2022 menjadi 64,88% namun pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,94. Penurunan capaian di Tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator Tidak Merokok. Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 Tahun keatas yang merokok didalam rumah" menjadi "tidak ada anggota rumah tangga umur 10 Tahun keatas yang merokok".

11. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun, pada Tahun 2019 telah mencapai 100%. pada Tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada Tahun 2023 penanganan kasus DBD di kota Madiun juga mencapai 100%.

13. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi Pada Tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2023, Angka kematian ibu tercatat tidak ada kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat Tahun 2019 sebesar 68,21 dan pada Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Capaian pada Tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada Tahun 2022. Faktor melandasinya pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di Tahun 2023, terjadi peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%.

#### 15. Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 100%. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada Tahun 2022. Di Tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar menjadi 100,61%.

#### 16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 9 kejadian yang kemudian Tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada Tahun 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat Tahun 2021 hingga Tahun 2022 dimana Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian. Selanjutnya, di Tahun 2023 jumlah kasus luar biasa meningkat menjadi 4 kejadian.

#### 17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 87,5%. Pada Tahun 2020 - 2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada Tahun 2023, diketahui terdapat penurunan persentase penanganan penyakit menjadi 83,34%.

#### 18. Persentase Kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada Tahun 2019 sebesar 59,26%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada Tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 dan 2023.

#### 19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada Tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di Tahun 2023 ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat menjadi 100%.

#### 20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 81,84. Pelayanan dinas kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam Tahun tersebut. Pada Tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

#### 21. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun Tahun 2019 hingga 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada Tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah tidak tercapainya *Bed Occupancy Rate* (BOR), semakin banyak fasilitas kesehatan rawat inap yang baru kasus covid yang tetap masih ada, meskipun memiliki tren menurun, sehingga ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih dipersiapkan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan TT (Tempat Tidur) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada 2023, pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

22. Persentase Produk Makanan Lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 85,12%, produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada Tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada Tahun 2022. Meskipun capaian Tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada Tahun 2023, meningkat menjadi 95%.

23. Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2023 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di Skrining Faktor Resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM Tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 persentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM adalah sebesar 118,4% dan 110,81% serta pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 110,62%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI Tahun 2019 sebesar 88,89% Pada Tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu) kelurahan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan persentase 85,19% dan 92,59 pada Tahun 2023.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus meningkat, yaitu berkisar antara 408 hingga 550 sarana. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan.

Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana. Namun pada Tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan sebesar 161 sarana kesehatan.

#### 27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%.

#### 28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 85,61% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada Tahun 2022 (TTU) turun menjadi 81% akan tetapi (TPM) meningkat menjadi 96,67%. Pada Tahun 2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru TFU (Tempat Fasilitas Umum) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan istilah baru TPP (Tepat Pengelolaan Pangan) dengan capaian 2023 mencapai 89,7%.

#### 29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada Tahun 2019 sebesar 6,32, selanjutnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada Tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 5,1.

### 30. Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada Tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode Tahun 2019-2023 yaitu mencapai 0,1 saja. Namun pada Tahun 2023, mengalami peningkatan 0,3 basis menjadi 0,4 resiko orang terinfeksi kusta.

### 31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan dari 80,35 pada Tahun 2019 menjadi 89,56 pada Tahun 2023, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

### 32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM Tahun 2019 sebesar 78,26 dan pada Tahun 2022 telah mencapai 88,17 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 89,13 secara kategori masuk dalam Tuntas Madya.

### 33. Persentase Desa ODF

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF pada Tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase desa ODF di Kota Madiun pada saat ini mencapai 100%.

### 34. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan yang diterapkan di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 36 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun Tahun 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
<b>KESEHATAN</b>											
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.490	2.490	100%	2.470	2.470	100%	2.450	2.453	100,12%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.377	2.384	100,29%	2.357	2.360	100,13%	2.338	2.347	100,38%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.264	2.991	101,19%	2.245	2.257	100,53%	2.227	2.256	101,30%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9.218	9.198	99,78%	9.145	9.202	100,62%	9.081	9.099	100,20%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32.074	28.629	89,26%	31.855	31.855	100%	31.582	31.582	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	115.489	136.729	118,39%	115.110	127.548	110,81%	114.664	126.836	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	25.597	28.406	99,33%	29.585	30.187	102,03%	30.573	31.360	102,57%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68.685	37.767	54,99%	68.973	38.781	56,23%	69.278	42.970	62,03%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8.111	9.574	118,04%	8.143	9.890	121,45%	7.741	8.425	108,84%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	338	389	115,09%	339	360	106,19%	339	374	110,32%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3.261	1.718	52,68%	5.184	6.553	126,41%	5.076	5.763	113,53%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.845	5.968	102,10%	5.780	6.849	118,49%	5.828	6.664	114,34%

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Pada Tahun 2023 capaian Kesehatan secara keseluruhan adalah 101,14 % atau dikategorikan Tuntas Paripurna. Namun dari 12 indikator masih terdapat 1 indikator yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada Tahun 2023 baru mencapai 62,03%. Hal ini dikarenakan penetapan target dari Kemenkes berdasarkan proyeksi prevalensi Hipertensi hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI), terlalu tinggi.

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 2. 37 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2023**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	%	42,18	0
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya : (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100,38
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	9,12	4,2
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	4,56	2,1
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	%	0,19	0,896
	Jumlah kasus baru HIV		kasus	34	160
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	114,34
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	337,7	Tidak ada ata
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%	< 1	<1
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	<2% jumlah bumil diperiksa HbsAg	0,67%
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	0,45
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota	1	1

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
			jadi merupakan indikator provinsi		
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kabupaten/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47,7	47,7
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	62,03
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	%	tidak ada	21
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 Tahun dalam satu Tahun terakhir.	—	orang		3
3.6 Pada Tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang	26	28
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	63	76,27
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 Tahun; umur 15-19 Tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4,6	7,23
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinkes, PP dan KB	%	<2,1	1,93
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	7,5	4,74
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	98	100,61
3.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 Tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%	Tidak ada data	23,29
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	94,6	98,34
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11,5	19,34
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

Sumber : LPPD Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

### c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 38 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99,95	99,95	99,66	99,58	99,72
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	100	99,66	99,58	99,72
4.3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05
4.4	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	0	12,08	31,98	20,43	0,91

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

#### 1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 99,95. Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99,66 dan 99,58. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 99,72. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru Tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif.

#### 2. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal di atas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan Tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga di tingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun Rasio permukiman layak huni sebesar 99,58%.

#### 3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas permakaman.

Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55% dengan capaian cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% dengan jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan dimana nilai indeks sarana prasarana permukiman menjadi 94,05.

**Tabel 2. 39 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05

*Sumber : LKPJ Kota Madiun Tahun 2023*

#### 4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 63,58 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Berita Acara capaian pengurangan luasan kumuh Tahun 2022 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020 terealisasi sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan capaian dimana menurun menjadi 0,91.

#### 5. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 40 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2021 dan 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	65	65	100%	105	105	100%	105	105	100%

Sumber : LKPJ Kota Madiun Tahun 2023, diolah

Adapun capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada Tahun secara keseluruhan mencapai 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna.

d. Pelayanan Sosial

Untuk indikator Fasilitas penyediaan rumah yang Pelayanan Sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2. 41 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2019- 2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10.573	30.295	27.358	30.690	33.716
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100,30%	99,80%	99,66%	99,95%	99,90%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.6	Tingkat Kemiskinan	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74
6.7	Indeks Gini	0,35	0,39	0,345	0,398	0,416

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan sebanyak 8 (delapan) lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada Tahun 2019 sebanyak 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah penerima bantuan terjadi pada Tahun 2020. Jumlah penerima bantuan pada Tahun 2020 mencapai 49.075. Penyebab kenaikan tersebut adalah terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data Daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan adalah penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Hal ini terjadi pada penerima Bansos Lansia non potensial.

Pada Tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang. Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan.

### 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2019 sebesar 10.573. Tahun 2020 sebesar 30.295, dan meningkat sebesar 33.690 pada Tahun 2022. Tujuan dari penanganan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dahulu disebut dengan PMKS.

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2% dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga, Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2023 sudah tertangani sebesar 33.716.

### 4. PMKS yang tertangani

Pada Tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari Tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada Tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari Tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang.

Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang anak jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 cakupan PMKS yang tertangani berturut-turut sebesar 99,66%; 99,95%; dan 99,90%.

#### 5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

**Tabel 2. 42 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023**

JENIS PMKS	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar / Non potensial	216	Tunai
2. Anak Terlantar	51	Tunai (BLTD, BST, PKH)
3. Fakir Miskin dengan rincian :		
- Fakir Miskin KPM BPNT	8.761	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH	5.399	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD	4.513	APBD
Jumlah	18.940	

Sumber : Laporan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, pada Tahun 2023 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 18.940 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp. 8.212.500,- per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanan yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp. 1.638.130.000,-. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.

#### 6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Sesuai data BPS tingkat kemiskinan Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada di bawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,-/jiwa/bln). Tahun 2022 tingkat kemiskinan kota madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin.

Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Madiun. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,74.

#### 7. Realisasi SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 43 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
<b>SOSIAL</b>											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	93	100	107,53%	100	95	107,53%	97	117	120,60%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	457	628	137,42%	460	736	160,22%	465	613	131,82%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	135	276	204,44%	137	213	155,47%	139	251	180,57%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	50	50	100%	92	72	78,26%	94	105	111,70%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.300	5.734	173,75%	36	17	47,22%	36	58	161,11%

Sumber : Laporan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2024

Capaian SPM urusan bidang Sosial secara keseluruhan Tahun 2023 adalah 141,16% sehingga dapat dikategorikan Tuntas Paripurna.

#### e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan Daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 44 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 -2023**

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun	100	100	18	13	14
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66.86%	68,63%	66,87%	66,85%	69,29%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	85,52	73,04	79,15	91,76	92,43 %
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4.01%	8,32%	8,15%	6,39%	5,85%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	15.976	23.294	25.218	25.505	28.150
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah	100	100	0	0	0

*Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah*

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2019-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara Tahun 2019-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap Tahun berbeda, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada Tahun 2021 dan 13% pada Tahun 2022 dan 14% pada Tahun 2023 Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan.

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK Tahun 2019 sebesar 66,86%. Pada Tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 Tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pada Tahun 2023, Capaian TPAK mengalami peningkatan menjadi 69,29%.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu Tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru.

### 3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

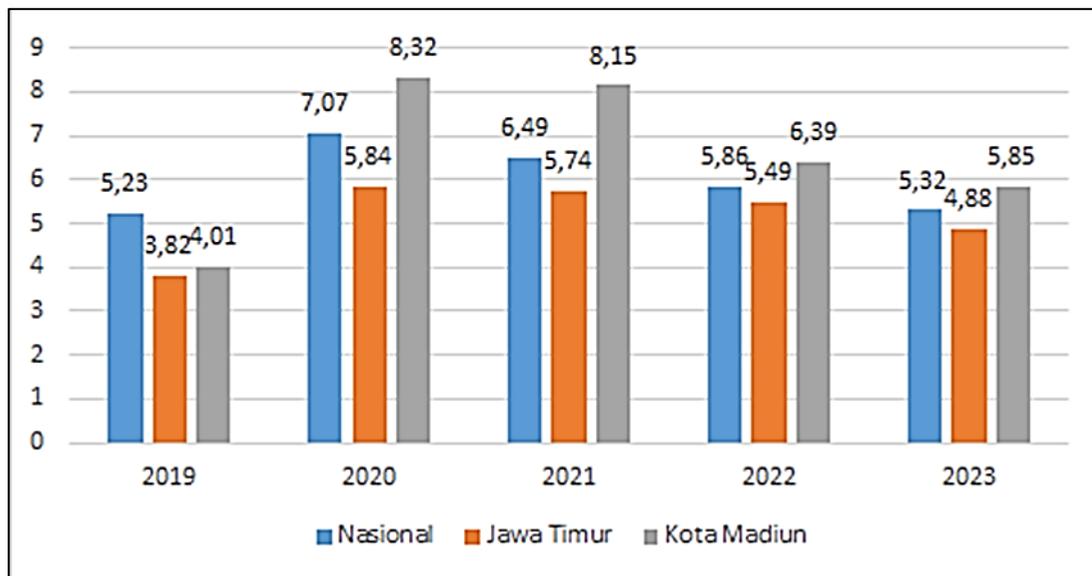
Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tahun 2019 sebesar 85,52%. Pada Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan sebagian besar perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15% dan pada Tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 92,43%, hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan.

### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari Tahun ke Tahun.

Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT pada Tahun 2019 sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 4,01%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%.

Peningkatan TPT Tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) dan Tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di Tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di Tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 8,15%, 6,39% dan 5,85%.



**Gambar 2. 43 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019-2023**

Sumber : BPS Kota Madiun

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi Covid-19 untuk Kota Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat dan setelah pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka terkerek naik menjadi di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2023.

5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja di lingkungan pekerjaannya.

Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Kota Madiun selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada Tahun 2019 jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 15.976, Tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

#### 6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2019-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2023, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah Kota Madiun yang terjadi pada Tahun 2021-2023.

f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 45 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA Kota Madiun Tahun 2019 - 2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12,78	12,72	7,83	13,47	11,73
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,017	0,016	0,032	0,00023	0,00024
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	77,07	77,18	76,75	78,03	belum rilis
8.5	Indeks pembangunan Gender	94,05	94,38	94,42	94,57	95,18

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun. Untuk realisasi Tahun 2019 sebesar 12,78%, Tahun 2020 sebesar 12,72%, dan Tahun 2021 sebesar 7,83%.

Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada Tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun, pada Tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%.

2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi Tahun 2019 sebesar 0,017. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada Tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032 dan pada Tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

4. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun Tahun pada Tahun 2019 menjadi 77,07. Fluktuatif capaian terjadi Tahun 2019 sampai dengan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan nilai pada Tahun 2022 sebesar 78,03.

5. Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Pada, Tahun 2019 sebesar 94,05. Nilai IPG Tahun 2020 sebesar 94,38 dan Tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 95,18.

g. Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 46 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Kota Madiun Tahun 2019 – 2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	104%	94%	100%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	100	90	93	98%	98%
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	85,08	85,9	85,903	87,289	87,36
14.4	Presentase Perlengkapan Jalan	64%	67%	84%	100%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	44%	35%	40%	70%	70%

Sumber : Laporan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya persentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada Tahun 2019 sudah mencapai 104%. Setahun selanjutnya terdapat penurunan persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada Tahun 2020 hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mencapai 100%.

2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik pada Tahun 2021 adalah 93% dan Tahun 2022 adalah 98%, sedangkan target pada Tahun 2023 adalah 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 47 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2022 – 2023**

No.	NAMA	2022			2023		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	11	91%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%
4	WARNING LIGHT	65	65	100%	65	69	100%
JUMLAH		132	130	98%	136	135	98%

Sumber : Laporan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap Tahunnya, namun demikian untuk persentase capaiannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 di angka 98%.

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas Tahun 2019 mencapai 85,08. Tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,9. Sedangkan pada Tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan pada terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360 di Tahun 2023.

### 4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 64%, dan terdapat 67% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan pada periode Tahun 2019 dan Tahun 2020. Tahun 2022-2023, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

## 5. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2019 masih mencapai angka 44% dan justru turun menjadi 35% pada Tahun 2020. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu pada Tahun 2020 terjadi pandemi Covid- 19 yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja angkutan umum pada Tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

### h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Tahun 2019 sebesar 93,30% penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 98,17% pada Tahun 2022 dan 100% di Tahun 2023.

**Tabel 2. 48 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2019	93,30
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17
2023	100

Sumber: LKPJ Kota Madiun, diolah

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase *draine* baik yang ada di kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 49 Persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaringan Sistem Drainase (Km)	80,03	60,72	72,78	72,78	72,776
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	7,23	20,24	14,53	13,80	13,346
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90,90	90,40	80,03	80,06	80,09

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 50 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2021-2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	41.409	40.637	98,14%	44.831	44.011	98,17%	42.650	42.728	100,2%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41.409	40.591	98,02%	44.831	42.706	95,25%	44.706	46.141	103,20%

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Secara umum Tahun 2023 capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum mencapai 101,7% sehingga dikategorikan Tuntas Paripurna.

i. Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

**Tabel 2. 51 Data Layanan Pertanahan Tahun 2019- 2023**

No	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2019	2 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
2	2020	0 layanan	-
3	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
5	2023	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

j. Pelayanan kepemudaan dan olahraga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarnya berikut:

**Tabel 2. 52 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Tahun 2019- 2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
18	Pemuda dan Olahraga					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	6	6	5	5	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	1	1	1	1
18.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.5	Jumlah Organisasi Olahraga	28	28	28	28	28
18.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga Tingkat Nasional	7	3	4	6	8
18.7	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Regional dan Nasional	52	79	97	205	212
18.8	Jumlah Peserta Olahraga	19.266	2.015	2.895	7.835	7.965
18.9	Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Kota Madiun, diolah

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

1) Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2023 antara lain:

- a. Anggota KONI;
- b. Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
- c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
- d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
- e. Anggota Dewan Kesenian.

2) Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

3) Gelanggang/balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja. Pada Tahun 2023 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai remaja yang dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu :

- a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
- b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
- c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun; dan
- d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

4) Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini Tahun 2023 masih berjumlah 83 lapangan.

5) Jumlah organisasi olahraga

Tahun 2023 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan kondisi 2 (dua) Tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olahraga.

**Tabel 2. 53 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

6) Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga Tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat Provinsi, nasional maupun internasional pada Tahun 2023. Cabang olahraga yang diberangkatkan diantaranya cabang olahraga Kurash, Angkat Besi, Panahan, Atletik, Judo, Tinju, Gulat, Senam, Jujitsu, Balap sepeda, Taekwondo, Sambo, Muaythai, Selam, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya.

Adapun perolehan medali untuk beberapa even Tingkat Provinsi, nasional dan Internasional yaitu :

- a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand dan Turkmenistan);
- b. 4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;
- c. 5 Medali Peparada Jatim I di Sidoarjo;
- d. 52 Medali Porprov VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
- e. 5 Medali Kejurprov Senam;
- f. 7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;

- g. 1 Medali Kejurnas Karate;
  - h. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;
  - i. 1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
  - j. 1 Medali Jogja Open Cabang Olahraga Atletik;
  - k. 20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Jujitsu;
  - l. 5 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tekwondo;
  - m. 2 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Balap Sepeda;
  - n. Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
  - o. 4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olahraga Pencak Silat;
  - p. 3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;
  - q. 3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Gulat;
  - r. 2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;
  - s. 1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olahraga Sepak Takraw;
  - t. 1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;
  - u. 9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;
  - v. 2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-Jawa Timur Tahun 2023 Cabor JUJITSU;
  - w. 9 Medali Kejurda Atletik se-Jawa Timur Tahun 2023;
  - x. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
  - y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;
  - z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Walikota Madiun;
  - aa. 2 Medali Pencak Silat Malang Championship Tahun 2023;
  - bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi Championship Tahun 2023;
  - cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (*Wilis Basketball Competition* Tahun 2023); dan
  - dd. 12 Medali Cabor Drumband (Lomba Unjuk Gelar Drumband Parade Senja Kota Madiun Tahun 2023).
- 7) Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional  
Prestasi olahraga untuk Tahun 2021 di tingkat nasional dan regional sebanyak 205 prestasi. Tahun 2023 jumlah prestasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 212 prestasi.

8) Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di Tahun 2023 juga mencapai 100%.

k. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

**Tabel 2. 54 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No.	Uraian Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	37	36	36	217	218
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	51.986	85.518	88.765	90.674	98.396
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	81.284	108.211	56.178	94.986	83.682

Sumber: Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada Tahun 2023 ada sebanyak 218 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di Tahun 2020. Akan tetapi jumlah pengunjung Kembali landai selama kurun waktu 2 Tahun terakhir hingga di Tahun 2023 menjadi 83.682, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan *online* berkurang.

1. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatnya ketersediaan pangan”.

Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 2. 55 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	154,44	138,56	139	217	152
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,63	138,63	126,77	126,77*	132,23*

*Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun*

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;
- b. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;

- d. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;
- e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor: 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

## 2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/Tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk Tahun 2019 yaitu 210.147 jiwa. Adapun ketersediaan ketersediaan pangan utama Tahun 2019 sekitar 154,44 poin dan masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin. Adapun pada Tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di Tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152.

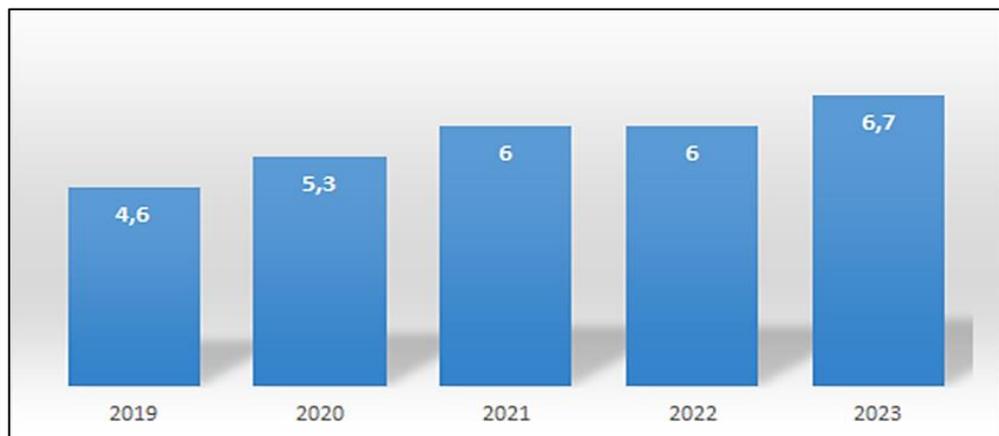
## 3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada Tahun 2019 sebanyak 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini yakni WNPG X Tahun 2012, yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari Tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari Tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%).

Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk Tahun 2019 sebesar 138,63. Pada Tahun 2020 ketersediaan energi dan protein masih sama dari Tahun 2019. Sedangkan untuk Tahun 2021 adalah sebesar 126,77% dan Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 132,23%.

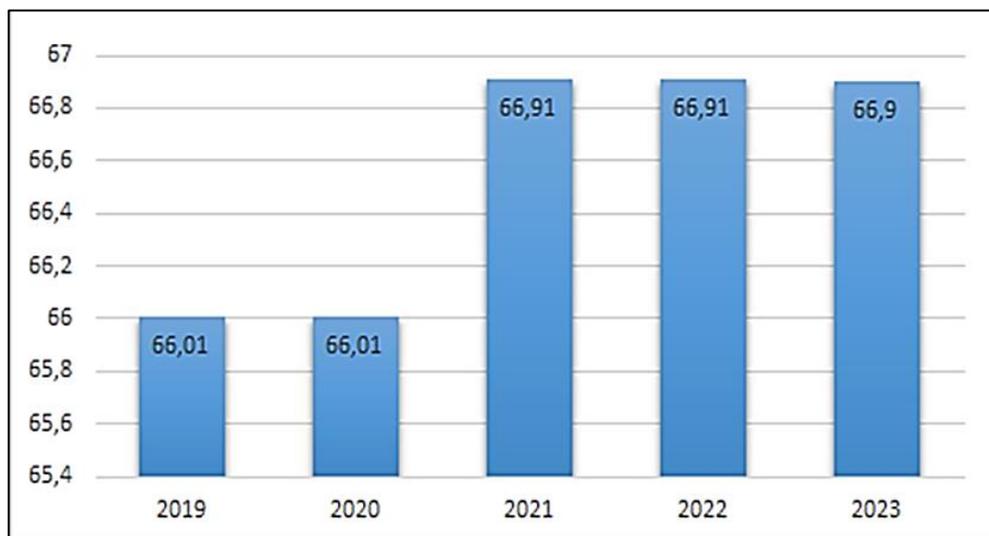
- m. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat. Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas Tahun 2023 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. 44 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024



**Gambar 2. 45 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar di atas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Adapun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, angka rasio petugas Satpol PP di Kota Madiun di angka 6 (enam). Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap Tahunnya.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 56 Intensitas Bencana di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banjir	11	5	5	9	13
2.	Angin Puting Beliung	66	33	0	0	0
3.	Kebakaran	36	29	13	21	70

Sumber: Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota. Maka jenis pelayanan dasar bidang Sub bidang bencana Daerah dan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah:

**Tabel 2. 57 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2021-2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45	45	100%	45	45	100%	41	41	100%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.575	2.575	100%	153.367	153.367	100%	950	950	100%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.575	2.575	100%	2.395	2.395	100%	252	252	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12%	12	100%	156	156	100%	42	42	100%

Sumber: Laporan Satpol PP dan BPBD Kota Madiun Tahun 2024

Pada Tahun 2023 Capaian SPM untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan yakni 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna.

n. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5 (lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel di bawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

**Tabel 2. 58 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2023**

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
A	Pelayanan Perizinan Non Berusaha			
1	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
5	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non Berusaha	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	5 (Lima)	13 (Tiga Belas)	Tidak Ada
8	Izin Reklame Insidentil	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
9	Izin Reklame Permanen	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Psikolog Klinis	5 (Lima)	8 (Delapan)	Tidak Ada
11	Izin Praktik Perawat	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
12	Izin Praktik Bidan	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Tenaga Gizi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
15	Izin Praktik Apoteker	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
17	Izin Praktik Fisioterapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
18	Izin Kerja Fisioterapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Okupasi Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Okupasi Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Terapis Wicara	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Terapis Wicara	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
23	Izin Praktik Akupuntur Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
25	Izin Kerja Perekam Medis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
26	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Refraksionis Optisien	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Optometris	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Teknisi Gigi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
30	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
31	Izin Praktik Penata Anestesi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
32	Izin Kerja Radiografer	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
33	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Fisikawan Medis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Ortotis Prostetis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Elektromedis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
37	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
39	Izin Tukang Gigi	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
40	Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
41	Izin Penempatan Pedagang Pasar;	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
42	Izin Promosi dalam Pasar;	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
43	Izin Reklame dalam Pasar;	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
44	Izin Pengelolaan Parkir Pasar;	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
45	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar;	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
46	Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);			
	-Fungsi Hunian	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Usaha	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Sosbud	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Keagamaan	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Campuran	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
47	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
48	Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	1 (Satu)	30 menit	Tidak Ada
49	Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;	30 menit – Max 3 Hari	Konsultasi dan Pengaduan Secara Langsung/ Tatap muka : 2 (Dua) Konsultasi dan Pengaduan Secara Online : 3 (Tiga)	Tidak Ada
B	Pelayanan Perizinan Berusaha			
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
2	Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan DPMPSTP Kota Madiun;	Sesuai <i>Service Level Agreement</i> pada sistem OSS berdasarkan sektor	UMK Perorangan: 3 (Tiga) UMK Badan Usaha: 6 (Enam) Non UMK: 6 (Enam)	Tidak Ada

Sumber: Laporan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun

o. Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak yakni Kecamatan Taman yaitu 13 industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 271 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak 12 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 4819 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak dibanding kecamatan lain.

**Tabel 2. 59 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan Kota Madiun, Tahun 2019 – 2023**

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Manguharjo	5	5	6	9	12	1874	1874	2818	4782	4819
2	Taman	10	9	10	11	13	345	325	412	238	271
3	Kartoharjo	7	7	7	7	8	294	294	311	369	371
	Jumlah	22	21	23	27	33	2513	2493	3541	5389	5461

Sumber: Laporan Dinas Tenaga Kerja, KUKM Tahun 2024

p. Pelayanan Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun Tahun 2023 terdapat 9 unit, pasar khusus 2 unit, dan pasar desa 6 unit dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.524 pedagang.

**Tabel 2. 60 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, Tahun 2019-2023**

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasar Umum	9	9	9	9	9
2.	Pasar Khusus	3	2	2	2	2
3.	Pasar Desa	6	6	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.485	3.555	3.143	3.320	3.524

Sumber: Laporan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024

q. Pelayanan Kepariwisata

Pelayanan kepariwisataan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata dan membina destinasi pariwisata untuk dikembangkan serta mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, perkembangan data jumlah destinasi pariwisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 2. 61 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina Tahun 2023**

No	Destinasi Pariwisata	Tahun
		2023
1	Lapak/ODTW	35 tempat
2	THM/Karaoke	21 tempat
3	Cafe	66 tempat
4	Rumah Makan	68 tempat
5	Restoran	68 tempat
6	Hotel	36 tempat

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 2. 62 Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2023**

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2023
1	Seni Pertunjukan	25 Seni (109 pelaku)
2	Fesyen	28 pelaku
3	Kriya (kerajinan tangan)	12 pelaku
4	Kuliner	66 pelaku
5	Fotografi	15 pelaku
6	Musik	8 pelaku
7	Periklanan	1 pelaku
8	Seni Rupa	1 pelaku
9	Film Animasi	1 pelaku

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

r. Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, serta dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indek profesionalitas asn dan persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 63 Pelayanan Kepegawaian Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Indeks Profesionalitas ASN	72,03	46,49	49,72	79,88	83,38
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	17,25	34,38	71%	63,22%	67,82%

Sumber: Laporan BKPSDM Kota Madiun, diolah

s. Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tingkat keterbukaan informasi publik yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 64 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,10	87,25	97,33	99,25	96,71

Sumber: LKPJ Kota Madiun

t. Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik Daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Tahunan pemerintah Daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi Daerah, data kondisi geografis dan demografis Daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun.

Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

**Tabel 2. 65 Capaian Pelayanan Statistik Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Buku Analisis ASPM	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku Data Sektoral	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024

u. Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat Daerah yakni bidang persandian. Kewenangan Daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian sesuai arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian, dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

**Tabel 2. 66 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	65%	83,57%	96,74%	96,74%

Sumber: Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024

v. Pelayanan Perkoperasian

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) Tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam Tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir yaitu Tahun 2019-2022, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu Tahun 2019-2022 sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 67 Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi	308	155	156	156	156
Jumlah Koperasi Aktif	302	153	154	156	140
persentase Koperasi Aktif	98,05	98,71	98,71%	100%	89,74%

*Sumber : Laporan Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun Tahun 2024*

## **2.5. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **2.5.1. Analisis Proyeksi Kependudukan**

Pertumbuhan penduduk merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Analisis kependudukan menjadi landasan utama untuk memahami dinamika populasi dan merencanakan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kota Madiun, sebagai salah satu pusat perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali dari tantangan pengelolaan populasi. Oleh karena itu, proyeksi penduduk menjadi langkah kritis dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini, analisis kependudukan yang komprehensif dan cermat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Madiun dapat menghadapi perubahan demografis dengan efektif.

Dengan melihat ke depan, proyeksi penduduk hingga Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam upaya perencanaan pembangunan Kota Madiun. Tujuan utama dari proyeksi ini adalah untuk memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur demografis, dan distribusi spasial dalam beberapa dekade mendatang. Melalui pemahaman yang baik tentang tren demografis ini, maka dapat merancang kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Proyeksi penduduk bukan hanya sekadar statistik, tetapi juga menjadi landasan penting untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik yang efisien. Proyeksi penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Proyeksi jumlah penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 akan menggunakan metode eksponensial. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan pertumbuhan populasi yang bertambah secara proporsional seiring waktu. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk masa lalu, metode eksponensial memungkinkan untuk mengevaluasi dampak potensial dari perubahan demografis dengan lebih akurat. Berikut ini adalah rumus pertumbuhan penduduk dengan metode eksponensial:

$$P_n = P_0 \times e^{rn}$$

- Po : Penduduk pada Tahun awal  
n : Waktu dalam Tahun (periode proyeksi)  
r : Angka pertumbuhan penduduk (%)  
Pn : Penduduk pada Tahun n  
e : Bilangan pokok sistem logaritma natural = 2,7182818

#### **2.5.1.1. Berdasarkan Total Penduduk**

Proyeksi total jumlah penduduk sebuah kota merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini, proyeksi total penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 menjadi titik fokus dalam upaya untuk memahami dan merespons dinamika demografis yang terus berkembang. Dengan mengeksplorasi total jumlah penduduk, dapat diidentifikasi tren pertumbuhan yang signifikan dan mengevaluasi implikasi kebijakan serta kebutuhan infrastruktur.

Proyeksi ini bukan hanya sebuah angka statistik, melainkan sebuah pandangan proaktif yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana untuk memastikan bahwa Kota Madiun dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya hingga Tahun 2045.

**Tabel 2. 68 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun**

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
	2025	2030
202.544	204.744	211.177

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan data BPS Kota Madiun, jumlah total penduduk Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 202.544 jiwa. Dapat dilihat dari hasil proyeksi di atas yang dirinci per lima Tahun, dapat disimpulkan bahwa total jumlah penduduk di Kota Madiun pada periode Tahun 2025 hingga Tahun 2045 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2025, jumlah total penduduk diperkirakan sebesar 204.744 jiwa, yang kemudian terus meningkat hingga Tahun 2030 hingga menjadi sebesar 211.177 jiwa. Proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun dapat mengharapkan pertumbuhan populasi selama dua dekade mendatang. Faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran, dan perkembangan ekonomi mungkin akan berperan dalam meningkatkannya jumlah penduduk kota ini. Hal ini akan menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk seiring dengan pertumbuhan ini agar Kota Madiun tetap menjadi tempat yang baik untuk ditinggali.

#### **2.5.1.2. Berdasarkan Jenis Kelamin**

Analisis demografis yang komprehensif tidak hanya memerlukan proyeksi jumlah penduduk secara keseluruhan, tetapi juga memperhatikan dimensi gender sebagai aspek kritis dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, proyeksi penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 akan difokuskan pada pemahaman struktur demografis berdasarkan jenis kelamin. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan kebijakan pembangunan memerlukan pemahaman mendalam tentang perubahan proporsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

**Tabel 2. 69 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
Laki-laki	99.319	99.993	103.397
Perempuan	103.225	104.751	107.780
Rasio	0,962	0,955	0,959

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan informasi dari BPS Kota Madiun, populasi Kota Madiun pada Tahun 2023 dapat diperinci berdasarkan jenis kelamin, di mana jumlah laki-laki mencapai 99.319 jiwa dan perempuan sebanyak 103.225 jiwa, dengan rasio sebesar 0,962. Diperkirakan bahwa distribusi jenis kelamin di Kota Madiun akan mengalami pergeseran hingga Tahun 2045. Menurut proyeksi tersebut, jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 117.442 jiwa, sedangkan jumlah perempuan diperkirakan sebanyak 123.093 jiwa. Rasio jenis kelaminnya diestimasi sebesar 0,954, mengindikasikan adanya perubahan dalam proporsi antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini membawa implikasi terhadap struktur demografis masyarakat di Kota Madiun, menyoroti kecenderungan peningkatan jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki.

### **2.5.1.3. Berdasarkan Kelompok Umur**

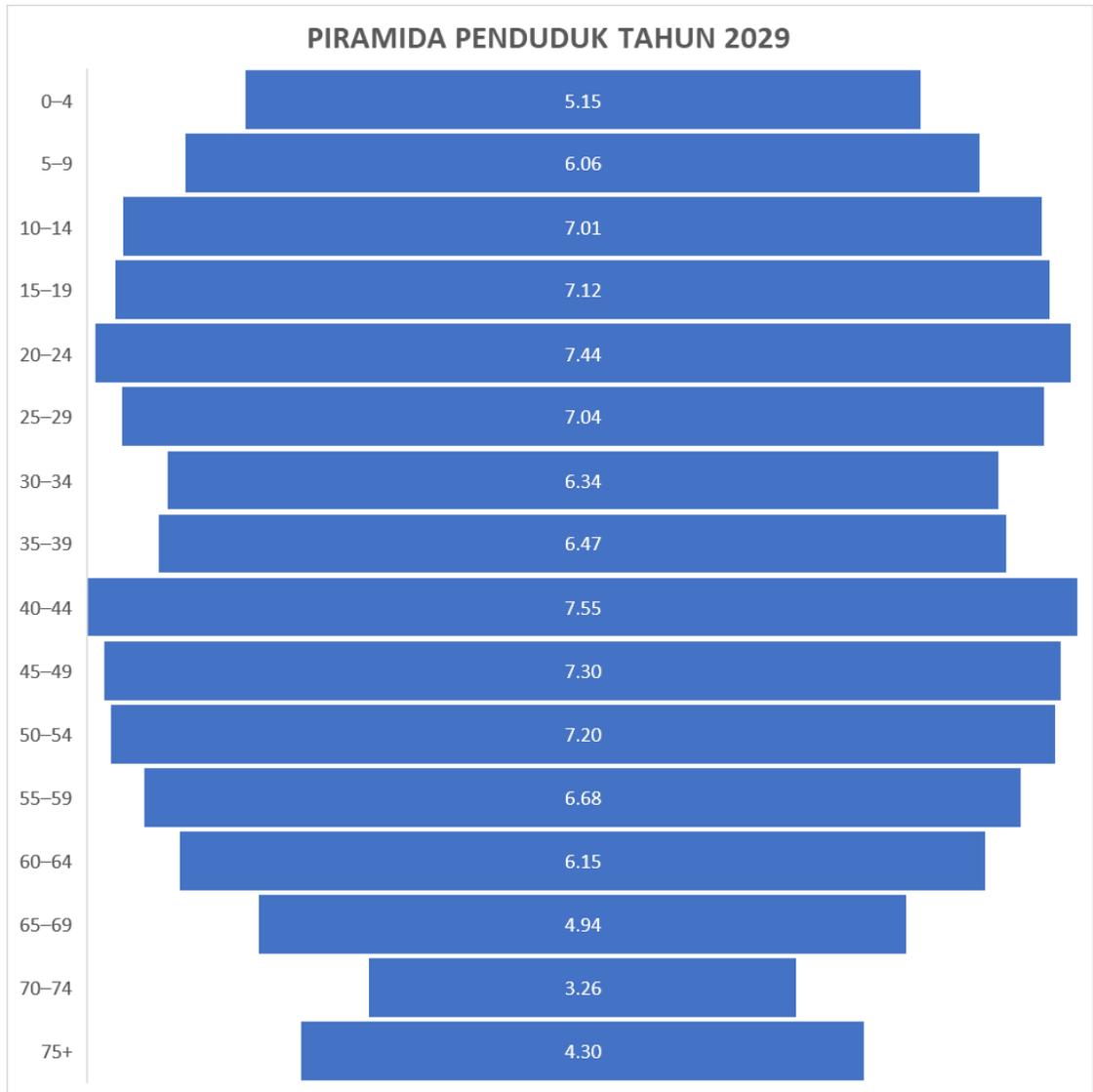
Analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Madiun hingga Tahun 2045 menjadi suatu pendekatan strategis dalam merencanakan pembangunan dan kebijakan sosial-ekonomi. Memahami dinamika pertumbuhan penduduk dalam setiap kelompok usia tidak hanya memungkinkan identifikasi tren demografis, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai komposisi masyarakat. Proyeksi ini memiliki tujuan ganda, yakni untuk menganalisis kelompok usia yang akan masuk dalam angkatan kerja, esensial bagi perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui tingkat ketergantungan dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan perubahan proporsi kelompok umur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya secara tepat guna, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Tabel 2. 70 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun berdasarkan Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
0-14 Tahun	39.473	39.047	38.005
15-64 Tahun	141.874	142.945	146.006
>65 Tahun	21.197	22.752	27.166
Angka Ketergantungan	70,05	69,82	69,14

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024*

Berdasarkan proyeksi penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045, diperkirakan bahwa jumlah penduduk pada tiap kelompok umur akan terus meningkat, mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang signifikan. Pada Tahun 2045, proyeksi menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 Tahun diperkirakan mencapai 35.080 jiwa, sementara kelompok usia 15-64 Tahun diperkirakan mencapai 159.135 jiwa. Angka ini menandakan pertumbuhan jumlah angkatan kerja, menciptakan potensi untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, kelompok usia 65 Tahun ke atas diperkirakan sebanyak 46.363 jiwa, menciptakan tantangan baru terkait kesejahteraan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia.



**Gambar 2. 46 Piramida Penduduk Tahun 2029**

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Penting untuk mencermati angka ketergantungan, yang dihitung sebagai rasio antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 Tahun dan 65 Tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 Tahun). Dalam proyeksi ini, angka ketergantungan diperkirakan mencapai 66,15 %, mengindikasikan proporsi besar penduduk yang memerlukan dukungan dan layanan dari kelompok usia produktif. Analisis ini penting dalam merancang kebijakan dan program pembangunan, mengingat bahwa tingginya angka ketergantungan dapat memberikan tekanan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan strategi pembangunan di Kota Madiun akan sangat tergantung pada kemampuan merespons dinamika populasi ini dengan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

### **2.5.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar**

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua dekade ke depan yang dipaparkan setiap lima Tahun, guna menilai kebutuhan infrastruktur yang sesuai dengan jumlah penduduk, dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu, penetapan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan setidaknya mencakup rumah/tempat tinggal, air bersih, energi/listrik, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.

#### **2.5.2.1. Rumah/Tempat Tinggal**

Proyeksi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal melibatkan penilaian terhadap pertumbuhan populasi serta faktor-faktor demografis lainnya. Pertumbuhan populasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi kebutuhan perumahan. Seiring terus meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap rumah atau tempat tinggal juga akan terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan rumah mengharuskan adanya pendekatan yang melibatkan analisis data demografis guna memahami tren dan pola yang mungkin berdampak pada kebutuhan perumahan di masa mendatang. Hal ini menjadi landasan bagi pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan tahan lama, yang dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tuntutan masyarakat.

Proyeksi kebutuhan rumah ini didasarkan pada asumsi dari SNI 03-1733-2004, yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah penghuni per unit rumah adalah 5 orang dan luas kavling minimum per unit adalah  $100 m^2$ . Setelah mengacu pada informasi dari BPS Provinsi Jawa Timur mengenai Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga di Kota Madiun pada Tahun 2022 yang mencapai 3,26, diasumsikan jumlah ini menjadi 4 orang per rumah tangga untuk satu unit rumah. Berikut ini merupakan data proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal Kota Madiun hingga Tahun 2045.

**Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Madiun**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	
		2025	2030
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	50.365	50.888	53.038

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024*

Berdasarkan data populasi yang disajikan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 202.544 jiwa. Melalui proyeksi kebutuhan rumah, diperkirakan bahwa sekitar 50.365 unit rumah akan diperlukan untuk menampung populasi tersebut. Namun, proyeksi untuk Tahun 2045 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan estimasi jumlah penduduk mencapai 240.335 jiwa. Akibatnya, perkiraan kebutuhan rumah pun mengalami peningkatan menjadi sebanyak 60.084 unit. Fenomena ini mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Dalam hal perencanaan pembangunan, hal ini menandakan perlunya strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus berkembang seiring waktu, memastikan ketersediaan rumah yang memadai untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang pesat.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Madiun menunjukkan tren peningkatan hingga Tahun 2025 untuk semua tingkatan pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai rentang usia. Namun, saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kota Madiun sudah memiliki sejumlah sarana pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, dan SMA yang beroperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah ada dapat memenuhi dan menyesuaikan diri dengan proyeksi kebutuhan masa depan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia. Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Madiun menunjukkan tren peningkatan hingga Tahun 2025 untuk semua tingkatan pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai rentang usia.

Namun, saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kota Madiun sudah memiliki sejumlah sarana pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, dan SMA yang beroperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah ada dapat memenuhi dan menyesuaikan diri dengan proyeksi kebutuhan masa depan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia.

#### **2.5.2.2. Air Bersih**

Pengelolaan sumber daya air merupakan aspek krusial dalam merencanakan pembangunan suatu kota untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini, akan dirinci proyeksi kebutuhan air di Kota Madiun hingga Tahun 2045. Penyediaan air bersih diperoleh melalui pengelolaan sistem jaringan yang dioperasikan oleh PDAM dan sumber air sumur. Bagi Kota Madiun, diharapkan seluruhnya menggunakan air bersih dari PDAM. Rencana penyediaan air bersih ini didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk selama periode perencanaan, konsumsi rata-rata air bersih per pelanggan, dan persentase kehilangan air pada Tahun tertentu.

Melalui proyeksi ini, diharapkan dapat disusun strategi dan kebijakan yang terarah untuk memastikan keberlanjutan pasokan air di masa depan. Perhitungan kebutuhan air bersih dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Kebutuhan Domestik**

Kebutuhan domestik merujuk pada kebutuhan air bersih yang digunakan untuk mendukung aktivitas rumah tangga, dengan perhitungan yang didasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah air yang diperlukan per individu per hari disesuaikan dengan standar kriteria, serta layanan yang disesuaikan berdasarkan ukuran atau kategori kota.

**Tabel 2. 72 Standar Kebutuhan Domestik**

Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Keb. Domestik (Ltr/Org/Hari)	Non Domestik
<b>Metropolitan</b>	>1 juta	190	Berdasarkan survei masterplan
<b>Kota Besar</b>	500 ribu – 1 juta	170	
<b>Kota Sedang</b>	100 – 500 ribu	150	
<b>Kota Kecil</b>	20 – 100 ribu	130	20 – 30% keb. Domestik
<b>Kota Kecamatan</b>	3 – 20 ribu	100	10 – 20% keb. Domestik
<b>Pedesaan</b>	<3000	60	-

Sumber: SNI Nomor 6728.1-2015, Penyusunan neraca spasial sumber daya alam

Perhitungan kebutuhan air domestik didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Air Domestik} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air Per Kapita}$$

Sesuai dengan standar, Kota Madiun pada Tahun 2023 dengan penduduk 202.544 jiwa dapat diklasifikasikan sebagai Kota Sedang. Maka, kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih adalah sebesar 150 liter/orang/hari. Begitu pula pada Tahun 2045, jumlah penduduk di Kota Madiun diprediksi akan menjadi 240.335 jiwa. Sehingga kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih di Kota Madiun tetap sebesar 150 liter/orang/hari.

a) Kebutuhan Non Domestik

Kebutuhan non-domestik mencakup penggunaan air yang tidak terkait dengan aktivitas rumah tangga, dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan komersial, industri, fasilitas umum, dan sebagainya. Proporsi atau perkiraan kebutuhan air non-domestik setiap Tahun dianggap sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, yaitu sekitar 10-20% dari total kebutuhan domestik. Sementara itu, asumsi untuk setiap jenis kebutuhan air non-domestik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
2. Kantor = 15% x kebutuhan domestik
3. Komersial = 20% x kebutuhan domestik
4. Industri = 10% x kebutuhan domestik

b) Kebocoran/Kehilangan Air

Kebocoran air dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah air yang dihasilkan oleh penyedia air dan jumlah air yang sebenarnya terjual kepada konsumen (*uncounted water*) sebagaimana yang terdokumentasi pada meter air pelanggan. Secara umum, kebocoran air diasumsikan mencapai sekitar 10% dari total kebutuhan, dan kebocoran tersebut dapat terjadi selama proses distribusi air kepada setiap konsumen. Terdapat dua jenis kebocoran atau kehilangan air, yaitu:

- 1) Kehilangan teknis, yang timbul akibat perbedaan antara jumlah penggunaan air (*volume*) yang terukur pada meter air pelanggan atau disebabkan oleh adanya kebocoran pada jaringan perpipaan air bersih; dan
- 2) Kehilangan non teknis, yang berlangsung karena terjadi kesalahan dalam membaca meter air dan adanya kolaborasi antara petugas dan konsumen, atau disebabkan oleh adanya penyambungan pipa air bersih yang tidak sah.

Seiring dengan hasil proyeksi yang menunjukkan peningkatan terus-menerus dalam jumlah penduduk Kota Madiun, kebutuhan akan air bersih di kota ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi demografis yang meningkat ini berimbas pada peningkatan konsumsi air di berbagai sektor. Dalam menetapkan standar kebutuhan air bersih, beberapa perhitungan menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, kebiasaan konsumsi air per individu, dan tingkat kebocoran dalam distribusi air menjadi pertimbangan utama. Dengan memperhitungkan elemen-elemen tersebut, standar kebutuhan air bersih dapat didefinisikan dan dirancang dengan lebih akurat, memastikan ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Standar kebutuhan air bersih kemudian didasarkan pada beberapa perhitungan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Air Domestik =  $\sum$  Penduduk x Kebutuhan Air per Kapita
2. Kebutuhan Non Domestik
  - Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
  - Kantor = 15% x kebutuhan domestik
  - Komersial = 20% x kebutuhan domestik
  - Industri = 10% x kebutuhan domestik

3. Hidran air =  $20\% \times (\text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik})$
4. Kehilangan Air =  $10\% \times (\text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik})$
5. Kebutuhan Total = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran
6. Kebutuhan Rata-rata Harian = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran + kehilangan air
7. Kebutuhan Harian Maksimum =  $1,15 \times \text{kebutuhan rata-rata harian}$ .

Dengan menerapkan perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Madiun untuk masa mendatang dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 73 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2025	204.744	30.532.500	4.579.875	4.579.875	6.106.500	3.053.250	9.770.400	4.885.200	58.622.400	63.507.600	73.033.740
2026	205.921	30.798.000	4.619.700	4.619.700	6.159.600	3.079.800	9.855.360	4.927.680	59.132.160	64.059.840	73.668.816
2027	207.151	31.060.500	4.659.075	4.659.075	6.212.100	3.106.050	9.939.360	4.969.680	59.636.160	64.605.840	74.296.716
2028	208.463	31.320.000	4.698.000	4.698.000	6.264.000	3.132.000	10.022.400	5.011.200	60.134.400	65.145.600	74.917.440
2029	209.777	31.573.500	4.736.025	4.736.025	6.314.700	3.157.350	10.103.520	5.051.760	60.621.120	65.672.880	75.523.812

**Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kota Madiun**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	58.020.480	58.622.400	61.099.200

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Madiun pada Tahun 2045, diperkirakan akan memerlukan kebutuhan air bersih domestik sebesar 36.050.248 liter. Sementara itu, kebutuhan air bersih non-domestik untuk fasilitas umum diestimasi sebanyak 5.407.537 liter, untuk kantor sejumlah 5.407.537 liter, untuk sektor komersial mencapai 7.210.050 liter, dan untuk kebutuhan industri mencapai 3.605.025 liter. Dengan membandingkan kebutuhan total air bersih pada Tahun 2023, yang mencapai 58.020.480 liter per hari, terlihat peningkatan signifikan menjadi 69.216.476 liter per hari di Tahun 2045. Proyeksi ini mencerminkan kebutuhan air bersih yang terus berkembang seiring pertumbuhan populasi, menekankan pentingnya strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai di masa depan.

### **2.5.2.3. Energi/Listrik**

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kebutuhan listrik yang diantisipasi juga ikut meningkat untuk Tahun-Tahun mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan infrastruktur listrik menjadi semakin krusial dengan merujuk pada proyeksi kebutuhan listrik yang sangat tergantung pada populasi yang terus berkembang. Faktor ini menekankan pentingnya proyeksi kebutuhan listrik dalam beberapa Tahun ke depan, terutama terkait dengan konsumsi listrik per individu. Dengan merinci proyeksi kebutuhan listrik untuk dua dekade ke depan sesuai dengan standar pelayanan PLN, perencanaan pembangunan infrastruktur listrik dapat disusun dengan lebih akurat dan responsif terhadap pertumbuhan konsumsi listrik yang diharapkan.

Estimasi kebutuhan listrik untuk dua dekade ke depan dapat dihitung dengan merujuk pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh PLN. Perhitungan ini mencakup beberapa rincian yang perlu dipertimbangkan, seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan listrik per individu, dan proyeksi konsumsi listrik di berbagai sektor. Dengan merinci faktor-faktor ini, estimasi kebutuhan listrik dapat disusun secara komprehensif untuk memberikan pandangan yang akurat mengenai tuntutan energi di masa depan. Berikut standar kebutuhan listrik (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan):

- Rumah tangga: 750 watt = 0,75 KVA/rumah tangga
- Industri dan Perdagangan: 70% kebutuhan rumah tangga
- Fasilitas Sosial dan Ekonomi: 15% kebutuhan rumah tangga
- Fasilitas Perkantoran: 10% kebutuhan rumah tangga
- Penerangan jalan: 1% kebutuhan rumah tangga
- Cadangan: 5% kebutuhan rumah tangga

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kota Madiun hingga Tahun 2045:

**Tabel 2. 75 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Madiun berdasarkan Standar Pelayanan PLN**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2025	204.744	50.888	38.166	26.716	5.725	3.817	382	1.908	76.713
2026	205.921	51.330	38.498	26.948	5.775	3.850	385	1.925	77.380
2027	207.151	51.768	38.826	27.178	5.824	3.883	388	1.941	78.040
2028	208.463	52.200	39.150	27.405	5.873	3.915	392	1.958	78.692
2029	209.777	52.623	39.467	27.627	5.920	3.947	395	1.973	79.328

**Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Madiun**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335
Proyeksi Kebutuhan Listrik	75.925	76.713	79.954	82.799	86.333	90.576

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

Hasil analisis menunjukkan tren peningkatan kebutuhan listrik di Kota Madiun dari Tahun 2023 hingga Tahun 2045. Pada awal periode tersebut, penduduk kota ini mencapai sekitar 202.544 jiwa yang diperkirakan tersebar dalam 37.774 rumah tangga pada Tahun 2023. Proyeksi kebutuhan listrik untuk Tahun 2045 didasarkan pada pertumbuhan jumlah rumah tangga. Total proyeksi penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2045 mencapai 240.335 jiwa yang diperkirakan tersebar di 60.084 rumah tangga. Oleh karena itu, kebutuhan listrik Kota Madiun pada Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 90.576 KVa, angka yang signifikan lebih tinggi daripada kebutuhan pada Tahun 2023 yang hanya sebesar 75.925 KVa. Penambahan kebutuhan listrik yang substansial ini mencerminkan tantangan dan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan yang sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

#### **2.5.2.4.Persampahan**

Analisis fasilitas persampahan dilakukan dengan tujuan utama untuk memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di suatu daerah dan merencanakan fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sampah tersebut. Dalam usaha memproyeksikan kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Madiun, pedoman perhitungan didasarkan pada SNI-3242-2008 sebagai standar perhitungan volume sampah. Perbandingan hasil perhitungan ini kemudian dilakukan dengan standar kebutuhan infrastruktur yang diatur dalam SNI 03-1733-2004. Sesuai dengan ketentuan SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, estimasi volume sampah yang dihasilkan dan infrastruktur yang diperlukan di kota kecil adalah sekitar 2,5 liter per orang per hari, sedangkan di kota besar ditetapkan sekitar 3 liter per orang per hari. Analisis ini menjadi landasan penting dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif dan sesuai dengan ukuran dan karakteristik Kota Madiun. Berikut merupakan standar kebutuhan prasarana persampahan:

**Tabel 2. 77 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan**

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan			
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi				
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--			
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m <sup>3</sup>	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu		
	Bak sampah kecil		6 m <sup>3</sup>				
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m <sup>3</sup>			Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m <sup>3</sup>				
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-				
	Bak sampah besar		25 m <sup>3</sup>				
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Mobil mengangkut 3x seminggu		
	Tempat daur ulang sampah		-				

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan peraturan tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan manajemen sampah di tingkat kecamatan, diperlukan fasilitas persampahan, seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah dengan kapasitas 25 m<sup>3</sup> di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setempat. Hasil proyeksi volume sampah dan persyaratan sarana pengelolaan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 78 Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan TPS, TPA, dan Mobil Sampah Kota Madiun Berdasarkan SNI**

Tahun	Jumlah Penduduk	Volume Sampah (L/org/hari)	Kebutuhan TPS	Kebutuhan TPA	Kebutuhan mobil sampah
2025	204.744	610.650	24	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2026	205.921	615.960	25		
2027	207.151	621.210	25		
2028	208.463	626.400	25		
2029	209.777	631.470	25		

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

**Tabel 2. 79 Proyeksi Persampahan di Kota Madiun**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah	
		2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177
Proyeksi Timbulan Sampah	607.732	610.650	636.450

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

Pada Tahun 2023, dengan jumlah penduduk mencapai 202.544 jiwa di Kota Madiun, volume sampah harian diperkirakan mencapai 604.380 liter per orang. Perkiraan ini didasarkan pada standar SNI yang menetapkan bahwa rata-rata setiap individu akan menghasilkan sampah sebanyak 3 liter per hari.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, proyeksi untuk Tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi 240.335 jiwa, yang kemudian diperkirakan dapat menghasilkan volume sampah sebesar 721.005 liter per orang setiap harinya. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang tren peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Madiun, dan merupakan dasar penting dalam perencanaan infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

#### **2.5.2.5.Fasilitas Kesehatan**

Seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan demografis, dan dinamika sosial yang terus berkembang, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi suatu aspek penting dalam perencanaan infrastruktur kota. Kota Madiun, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial, mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Madiun hingga Tahun 2045 menjadi suatu kajian yang strategis. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk menjadi poin penting yang perlu diperhitungkan dalam proyeksi ini. Dengan merinci dan menganalisis dinamika ini, diharapkan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk perencanaan yang berkelanjutan dan efisien dalam memenuhi tuntutan kesehatan masyarakat Kota Madiun di masa depan.

Sarana kesehatan memegang peran yang sangat vital dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan sekaligus memiliki dampak strategis dalam percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Penyediaan sarana ini didasarkan pada jumlah penduduk yang akan menerima pelayanan dari fasilitas tersebut. Pendekatan desain ruang juga akan mempertimbangkan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada, terkait dengan pembentukan grup bangunan atau blok yang sesuai dengan konteks lingkungan. Penempatan fasilitas ini akan mempertimbangkan cakupan area layanan yang sesuai dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani daerah tertentu. Beberapa jenis sarana yang diperlukan melibatkan:

- 1) Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;

- 2) Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*currative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- 3) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 Tahun;
- 4) Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- 5) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- 6) Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- 7) Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Berikut merupakan standar kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004:

**Tabel 2. 80 Sarana Kebutuhan Kesehatan**

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min. (m <sup>2</sup> )		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

Berdasarkan ketentuan di atas, proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kota Madiun akan melibatkan tiga jenis fasilitas utama, yaitu puskesmas, rumah sakit, dan posyandu. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan puskesmas di Kota Madiun dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Analisis ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi jumlah puskesmas yang optimal guna menyediakan pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat. Selain puskesmas, proyeksi kebutuhan sarana rumah sakit dan posyandu juga akan dihitung agar dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang diinginkan dan memadai bagi seluruh masyarakat di Kota Madiun. Berikut merupakan data proyeksi kebutuhan puskesmas di Kota Madiun:

**Tabel 2. 81 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2025	204.744	120.000	Puskesmas	6	3	0
2026	205.921	120.000	Puskesmas	6	3	0
2027	207.151	120.000	Puskesmas	6	3	0
2028	208.463	120.000	Puskesmas	6	3	0
2029	209.777	120.000	Puskesmas	6	3	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 proyeksi kebutuhan puskesmas dengan jumlah penduduk pendukung mencapai 120.000 jiwa, diperkirakan bahwa pada Tahun 2045 dimana jumlah penduduk diperkirakan mencapai 240.335 jiwa akan dibutuhkan sebanyak 2 (dua) puskesmas. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus tersedia minimal 1 (satu) unit di tiap kecamatan maka minimal puskesmas di Kota Madiun adalah sebanyak 3 (tiga) puskesmas. Saat ini, Kota Madiun sudah dilengkapi dengan 6 (enam) puskesmas. Dengan demikian, keberadaan puskesmas di Kota Madiun telah memenuhi namun dapat berkembang sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat.

**Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2025	204.744	240.000	RS	9	1	0
2026	205.921	240.000	RS	9	1	0

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2027	207.151	240.000	RS	9	1	0
2028	208.463	240.000	RS	9	1	0
2029	209.777	240.000	RS	9	1	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan proyeksi kebutuhan rumah sakit dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 240.335 jiwa dan dengan asumsi 1 tempat tidur per 1000 penduduk, maka diproyeksikan bahwa di Tahun 2045, akan dibutuhkan 1 (satu) rumah sakit umum kelas A dengan jumlah minimal 250 tempat tidur atau 2 (dua) rumah sakit kelas B dengan jumlah minimal 200 tempat tidur sebagai sarana pelayanan kesehatan. Saat ini, Kota Madiun sudah memiliki 9 (sembilan) rumah sakit, terdiri dari 7 (tujuh) rumah sakit umum dengan jumlah tempat tidur sebanyak 931 unit. Selain itu, Kota Madiun memiliki 2 (dua) rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Paru. Oleh karena itu, dengan jumlah fasilitas yang sudah ada, kebutuhan sarana rumah sakit di Kota Madiun telah terpenuhi sesuai dengan proyeksi kebutuhan yang diantisipasi untuk masa depan. Menggunakan metode proyeksi kebutuhan tempat tidur rumah sakit dengan rasio 1 (satu) tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk maka kebutuhan tempat tidur di rumah sakit sampai dengan Tahun 2045 masih mencukupi.

**Tabel 2. 83 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Posyandu di Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2025	204.744	1.250	Posyandu	271	163	0
2026	205.921	1.250	Posyandu	271	164	0
2027	207.151	1.250	Posyandu	271	166	0
2028	208.463	1.250	Posyandu	271	167	0
2029	209.777	1.250	Posyandu	271	168	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan proyeksi kebutuhan posyandu dengan jumlah penduduk pendukung sekitar 1250 jiwa, kebutuhan posyandu di Kota Madiun pada Tahun 2045, dengan diperkirakan jumlah penduduk mencapai 240.335 jiwa, diproyeksikan memerlukan sebanyak 192 posyandu. Saat ini, di Kota Madiun, sudah terdapat sebanyak 271 posyandu yang beroperasi.

Dengan jumlah posyandu yang telah ada, kebutuhan sarana ini sejauh ini telah terpenuhi dengan baik, bahkan melampaui proyeksi kebutuhan di masa mendatang.

**Tabel 2. 84 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kota Madiun**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Sarana Kesehatan	
		Tahun 2025	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177
Proyeksi Sarana Puskesmas	3	3	3
Proyeksi Sarana Rumah Sakit	1	1	1
Proyeksi Sarana Posyandu	161	163	170

*Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*

Dari data yang tertera dalam tabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2045 seiring dengan pertumbuhan populasi. Meskipun demikian, pada kondisi saat ini, Kota Madiun telah mencapai tingkat pemenuhan yang memadai terhadap sarana kesehatan tersebut. Adanya sarana kesehatan yang sudah tersedia saat ini dapat dianggap sebagai pencapaian positif dalam upaya menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat Kota Madiun. Pemenuhan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan kesehatan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **2.5.2.6 Fasilitas Pendidikan**

Dalam menghadapi dinamika pertumbuhan populasi dan perkembangan pendidikan, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan menjadi suatu aspek krusial dalam perencanaan strategis kota Madiun hingga Tahun 2020. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung diharapkan akan berdampak signifikan pada tuntutan akan sarana pendidikan yang memadai. Selain itu, perubahan dalam preferensi masyarakat terkait pendidikan serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi metode pembelajaran turut menjadi faktor penting dalam merumuskan kebutuhan fasilitas pendidikan di masa mendatang. Penyusunan proyeksi ini didasarkan pada analisis yang mendalam seperti terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Dengan memahami proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan, diharapkan kota Madiun dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang optimal dan memenuhi standar pendidikan yang berkualitas hingga Tahun 2029. Penyediaan sarana pendidikan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan desain ruang untuk unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini berhubungan dengan pembentukan grup bangunan atau blok yang akan terbentuk sesuai dengan konteks lingkungan.

Selain itu, penempatan fasilitas ini juga akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Dalam perencanaan fasilitas pendidikan, sangat krusial untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Fasilitas pembelajaran dan ruang belajar harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara optimal. Oleh karena itu, dalam perencanaan sarana pendidikan, aspek-aspek yang memerlukan perhatian meliputi:

- o berapa banyak anak yang membutuhkan fasilitas ini di Kota Madiun;
- o optimalisasi kapasitas dengan 1 (satu) *shift*;
- o efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang belajar secara terpadu;
- o penggunaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; dan
- o kesesuaian dan keselarasan dengan konteks tempat, terutama dengan berbagai jenis fasilitas lingkungan lainnya.

Standar kebutuhan ruang kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

**Tabel 2. 85 Kebutuhan Ruang Kelas**

No	Jenjang Pendidikan	Rasio Rombel (Maksimal)
1	Taman Kanak - Kanak (TK)	1 : 15
2	Sekolah Dasar (SD)	1 : 28
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 : 32
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 : 36

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2024

Perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Madiun dilakukan dengan mengestimasi jumlah penduduk pada rentang usia tertentu, seperti 4-6 Tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK), 7-12 Tahun untuk Sekolah Dasar (SD), 13-15 Tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16-18 Tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Rincian data untuk setiap kebutuhan sarana Pendidikan tingkat taman kanak-kanak dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk 5-6 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 14)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 15)	Belum Terpenuhi
2025	5.936	TK	328	396	68
2026	6.011	TK	328	401	73
2027	6.049	TK	328	403	75
2028	6.087	TK	328	406	78
2029	6.126	TK	328	408	80

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 – 2029

Dari informasi yang terdapat dalam tabel di atas, dapat diperhatikan bahwa kebutuhan sarana pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) pada Tahun 2025 adalah sebanyak 396 ruang kelas dengan rasio rombel 1 : 14. Sedangkan proyeksi kebutuhan sarana TK pada Tahun 2029 dengan rasio rombel 1 : 15 meningkat menjadi 408 ruang kelas. Saat ini, jumlah ruang kelas pendidikan TK di Kota Madiun sudah mencapai 328 ruang kelas. Analisis ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan tingkat TK yang sudah ada di Kota Madiun masih memerlukan penambahan ruang kelas untuk TK.

Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 87 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 15)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 28)	Belum Terpenuhi
2025	16.781	SD	857	599	0
2026	16.858	SD	857	602	0
2027	16.897	SD	857	603	0
2028	16.935	SD	857	605	0
2029	16.974	SD	857	606	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2029

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) pada Tahun 2025 dengan rasio maksimum 1 : 28 mencapai 599 ruang kelas dan kebutuhan sarana SD pada Tahun 2029 mengalami peningkatan menjadi 606 ruang kelas. Saat ini, di Kota Madiun, terdapat sebanyak 69 sekolah SD dengan ruang kelas sebanyak 857 ruang kelas dengan rasio 1 : 15. Data ini mencerminkan bahwa sarana pendidikan tingkat SD yang telah tersedia di Kota Madiun saat ini telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah sekolah yang sudah ada jauh melebihi kebutuhan yang diproyeksikan, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah setempat dalam menyediakan fasilitas pendidikan dasar bagi masyarakat Kota Madiun. Analisis kebutuhan sarana Pendidikan Tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga Tahun 2029 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2. 88 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 29)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 32)	Belum Terpenuhi
2025	10.465	SMP	371	327	0
2026	10.320	SMP	371	323	0
2027	10.203	SMP	371	319	0
2028	10.137	SMP	371	317	0
2029	10.143	SMP	371	317	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa kebutuhan sarana pendidikan di tingkat SMP dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 sebanyak 327 ruang kelas dan meningkat di Tahun 2045 menjadi 357 ruang kelas dengan rasio 1 : 32. Saat ini, di Kota Madiun terdapat 23 sekolah SMP dengan ruang kelas sebanyak 371. Rasio keterisian ruang kelas saat ini adalah 1 : 29. Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan tingkat SMP yang telah ada di Kota Madiun sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Hal ini mencerminkan tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dalam menjawab tuntutan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di kota tersebut. Selanjutnya analisis mengenai kebutuhan sarana Pendidikan Tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Kota Madiun hingga Tahun 2045 dapat dijeaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 89 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Madiun**

Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 26)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 36)	Belum Terpenuhi
2025	13.634	SMA/SMK	543	379	0
2026	13.642	SMA/SMK	543	372	0
2027	13.647	SMA/SMK	543	366	0
2028	13.651	SMA/SMK	543	362	0
2029	13.655	SMA/SMK	543	358	0

*Sumber: Hasil RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 – 2045*

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel di atas, terungkap bahwa kebutuhan sarana pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 meningkat dari 358 ruang kelas menjadi 384 ruang kelas. Saat ini, Kota Madiun memiliki 12 sekolah SMA maupun SMK dengan ruang kelas sebanyak 543 ruang kelas yang sudah beroperasi. Data tersebut mencerminkan bahwa sarana pendidikan tingkat SMA di Kota Madiun, dengan jumlah saat ini, telah memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masa mendatang.

**Tabel 2. 90 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Madiun**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan	
		2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk	202.544	203.550	212.150
Proyeksi Sarana TK (ruang kelas)	328	396	411
Proyeksi Sarana SD (ruang kelas)	857	599	599
Proyeksi Sarana SMP (ruang kelas)	371	327	327
Proyeksi Sarana SMA/SMK (ruang kelas)	543	379	379

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2030

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Madiun menunjukkan tren peningkatan hingga Tahun 2025 untuk semua tingkatan pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai rentang usia. Namun, saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kota Madiun sudah memiliki sejumlah sarana pendidikan, termasuk SD, SMP, dan SMA yang beroperasi. Untuk jenjang Pendidikan TK saat ini masih dibutuhkan ruang kelas sebanyak 215 ruang kelas dan terus meningkat sampai dengan Tahun 2030 menjadi 279 ruang kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah ada dapat memenuhi dan menyesuaikan diri dengan proyeksi kebutuhan masa depan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah dua kali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perubahan ini mengarahkan pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta seluruh bentuk kekayaan yang dapat menjadi milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dianggap baik apabila berhasil merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Pengelolaan keuangan daerah melibatkan manajemen sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja, dan berbagai sumber pembiayaan. Daerah yang mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer memiliki peluang lebih besar untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri. Untuk menilai tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Madiun, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah, baik dari segi kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang mendasari pengelolaannya. Lebih lanjut, gambaran umum keuangan daerah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. Setiap aspek dianalisis secara mendetail sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah adalah komponen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan representasi kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam struktur yang mencerminkan alokasi pendanaan untuk mencapai berbagai sasaran, sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat untuk periode tertentu. Dengan demikian, APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan kajian terhadap pelaksanaan APBD selama lima Tahun terakhir, guna menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan Tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dievaluasi berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Aspek pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara itu, pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut merupakan struktur APBD yang

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



**Gambar 3. 1 Struktur APBD**

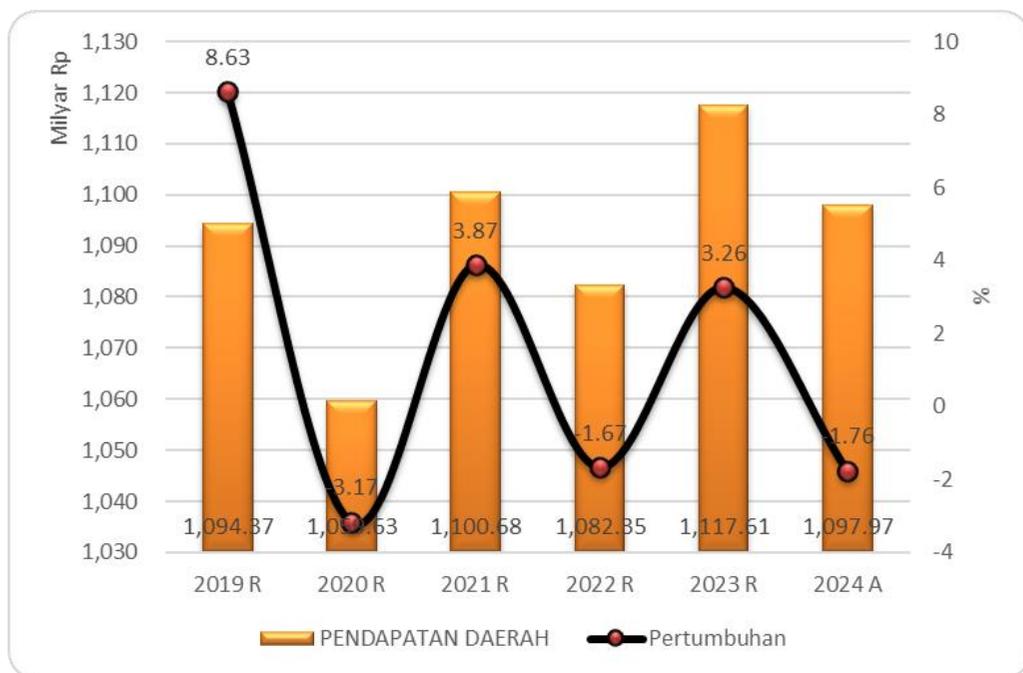
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

### 3.1.1.1. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran melibatkan perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran. Demikian pula dalam APBN/APBD, inti dari penganggaran adalah membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, analisis keuangan daerah dalam bagian ini akan dibagi menjadi dua kerangka: penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada bagian penerimaan daerah, akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah serta penerimaan pembiayaan, yang kemudian akan diikuti oleh proyeksi selama 5 Tahun ke depan yang akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

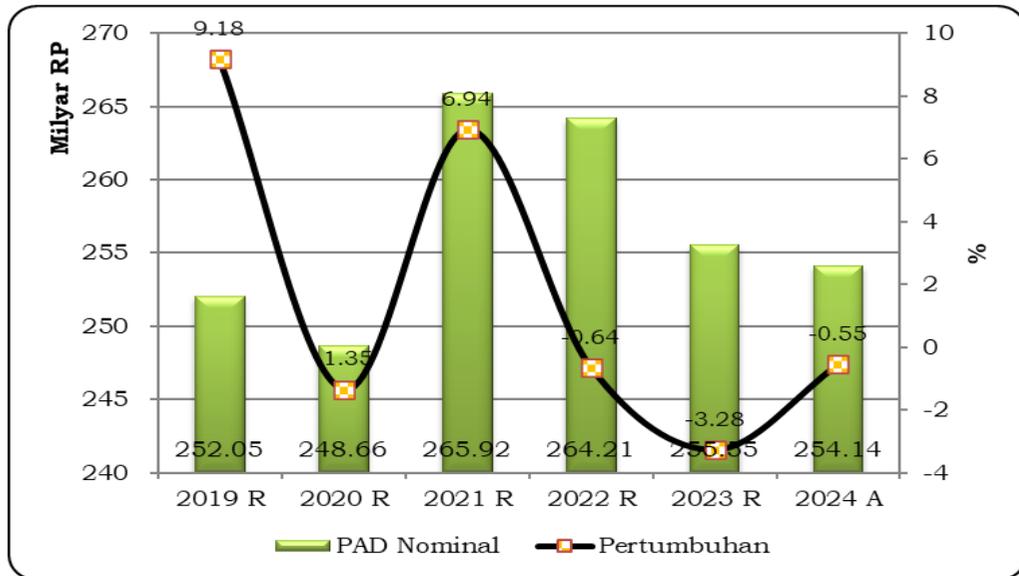
Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer diantaranya berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini harapannya dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.



**Gambar 3. 2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Kota Madiun mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan nominal pada Tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi, sehingga mengurangi pendapatan pemerintah. Pada Tahun 2021, pendapatan daerah kembali meningkat sebesar 3,87 persen, namun menurun hingga minus 3,63 persen pada Tahun 2022, dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 5,37 persen.

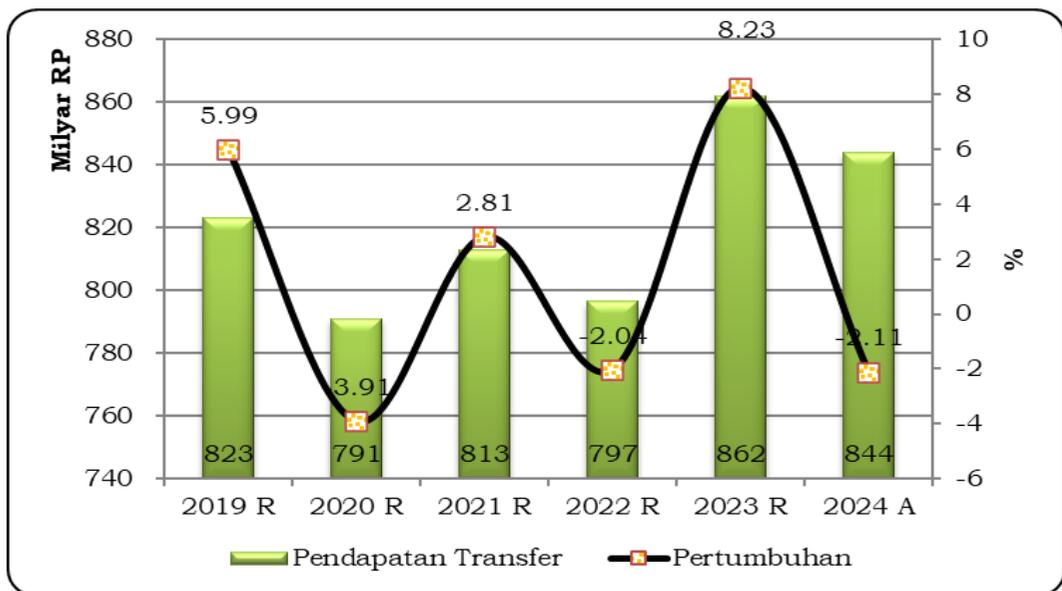


**Gambar 3. 3 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun mengalami penurunan pada Tahun 2020. Namun, pada Tahun 2021, PAD menunjukkan pertumbuhan positif, mencapai nominal tertinggi dalam tiga Tahun terakhir. Pada Tahun 2023, pertumbuhan PAD di Kota Madiun kembali mengalami penurunan, mencapai minus 3,28 persen.

Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



**Gambar 3. 4 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2019-2024**

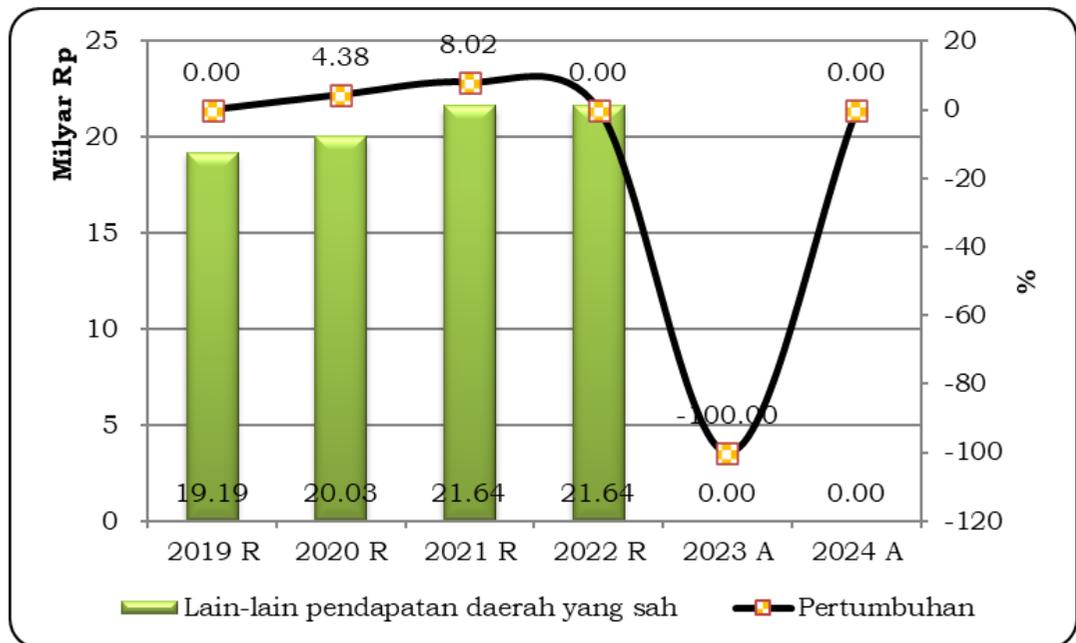
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer dalam nilai nominal menunjukkan karakteristik yang fluktuatif. Pada Tahun 2020, pendapatan transfer mengalami penurunan signifikan.

Kemudian, pada Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 2,81 persen.

Namun, pada Tahun 2022, pendapatan transfer menurun sebesar 2,04 persen dibandingkan Tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada Tahun 2023, pendapatan transfer kembali meningkat secara signifikan sebesar 8,23 persen.

Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

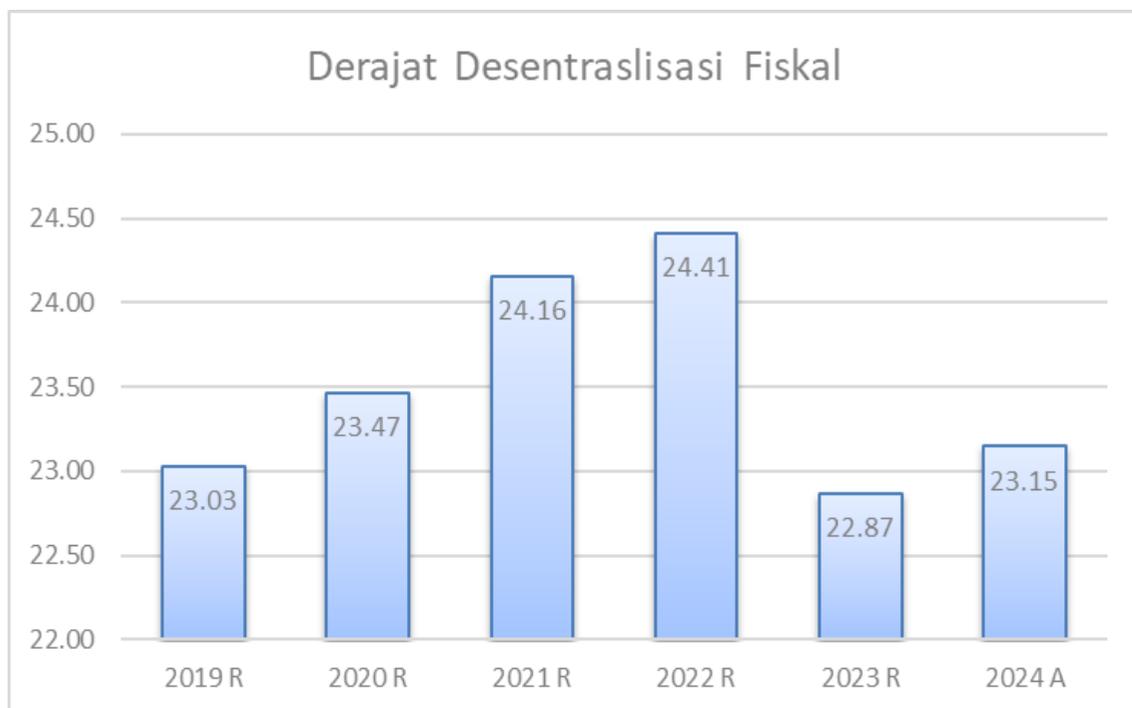


**Gambar 3. 5 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sah mengalami peningkatan nominal yang sedikit selama periode Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2019, jumlah realisasinya mencapai Rp. 19,19 miliar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 miliar pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp. 21,64 miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Namun, pada Tahun 2022, realisasi pendapatan dari komponen ini mencapai 0, menunjukkan ketiadaan pendapatan daerah terutama dari subkomponen hibah.

Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 3. 6 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Selama periode Tahun 2019 hingga Tahun 2021, tercatat adanya peningkatan pada tingkat desentralisasi fiskal di Kota Madiun. Namun, pada Tahun 2023, terdapat kecenderungan penurunan pada tingkat desentralisasi fiskal ini, yang tercermin dalam nilai realisasinya yang mencapai 22,87.

Realisasi Pendapatan Kota Madiun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Realisasi dan Anggaran Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2024**

	Uraian	JUMLAH					
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A
1	PENDAPATAN DAERAH	<b>1,094,367,497,996.59</b>	<b>1,059,625,581,411.32</b>	<b>1,100,682,829,130.86</b>	<b>1,082,347,176,084.55</b>	<b>1,117,609,570,233.47</b>	<b>1,097,967,032,000.00</b>
01.01	Pendapatan Asli Daerah	<b>252,048,754,413.59</b>	<b>248,656,192,759.32</b>	<b>265,920,295,216.86</b>	<b>264,207,393,517.55</b>	<b>255,551,933,408.67</b>	<b>254,141,714,400.00</b>
01.01.01	Pajak daerah	91,077,191,655.45	90,286,840,987.07	87,874,777,059.32	106,165,312,122.76	113,514,116,369.67	102,506,770,000.00
01.01.02	Retribusi daerah	20,301,325,919.00	15,291,324,019.00	17,463,721,195.00	21,380,512,837.00	22,551,072,553.00	18,012,701,000.00
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14,641,711,340.55	15,216,268,562.40	16,199,882,796.95	15,595,752,355.97	14,983,008,032.73	16,029,310,600.00
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	126,028,525,498.59	127,861,759,190.85	144,381,914,165.59	121,065,816,201.82	104,503,736,453.27	117,592,932,800.00
01.02	Pendapatan Transfer	<b>823,129,463,583.00</b>	<b>790,939,408,652.00</b>	<b>813,126,832,914.00</b>	<b>796,504,081,567.00</b>	<b>862,057,636,824.80</b>	<b>843,825,317,600.00</b>
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>737,079,907,650.00</b>	<b>705,872,676,797.00</b>	<b>709,162,104,477.00</b>	<b>697,480,692,487.00</b>	<b>666,070,630,012.80</b>	<b>747,542,927,000.00</b>
1.2.1.01.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	16,076,390,385.00	34,444,290,949.20	33,962,127,578.00	29,804,646,600.00	24,092,136,000.00	24,441,861,000.00
1.2.1.01.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	52,685,578,633.00	51,666,436,423.80	63,851,956,219.00	82,308,678,000.00	36,475,210,342.00	26,554,349,000.00
1.2.1.01.01.3	<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	13,939,983,813.00	0.00	19,833,010,286.00	21,802,781,361.00	35,959,029,435.00	29,607,909,000.00

	Uraian	JUMLAH					
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	522,596,024,000.00	473,852,439,000.00	465,495,171,000.00	463,486,748,121.00	487,141,770,396.00	510,653,158,000.00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	76,239,204,819.00	72,596,481,424.00	72,994,976,394.00	71,207,048,405.00	82,402,483,839.80	123,687,951,000.00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	55,542,726,000.00	73,313,029,000.00	53,024,863,000.00	28,870,790,000.00		<b>32,597,699,000.00</b>
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0	0	0.00	0.00	0.00	<b>0,00</b>
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>86,049,555,933.00</b>	<b>85,066,731,855.00</b>	<b>103,964,728,437.00</b>	<b>99,023,389,080.00</b>	<b>195,987,006,812.00</b>	<b>96,282,390,600.00</b>
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84,934,976,933.00	84,049,652,855.00	103,062,649,437.00	98,284,006,080.00	121,272,084,812.00	95,663,488,000.00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,114,579,000.00	1,017,079,000.00	902,079,000.00	739,383,000.00	74,714,922,000.00	618,902,600.00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<b>19,189,280,000.00</b>	<b>20,029,980,000.00</b>	<b>21,635,701,000.00</b>	<b>21,635,701,000.00</b>	0.00	0.00
01.03.01	Hibah	19,189,280,000.00	20,029,980,000.00	21,635,701,000.00	0.00	0.00	0.00
01.03.02	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

### **3.1.1.2 Kinerja Realisasi Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, disebutkan bahwa Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah, serta pengeluaran lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun anggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran ditujukan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Berikut merupakan jenis-jenis belanja modal antara lain: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai: belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai: belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai dan belanja aset lainnya,

digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja tidak terduga juga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya.

Belanja transfer adalah proses transfer dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pemerintahan ataupun institusi lain seperti pemerintah daerah yang lebih kecil, badan usaha milik negara (BUMN), lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau individu. Transfer ini dilakukan dengan tujuan untuk membiayai berbagai program, proyek, atau kegiatan tertentu. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.



**Gambar 3. 7 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Sejak munculnya Pandemi Covid-19, terjadi peningkatan tren pertumbuhan belanja daerah. Pada Tahun 2023, pertumbuhan belanja daerah mencapai 2,20 persen. Selanjutnya, akan dipaparkan proporsi beberapa komposisi belanja daerah pada setiap Tahun:

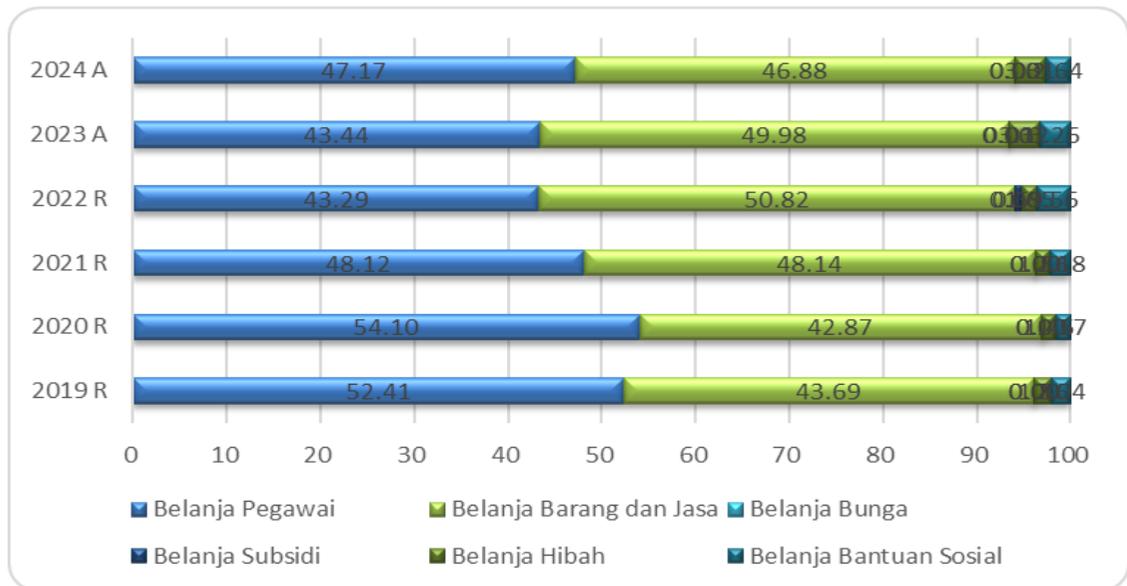


**Gambar 3. 8 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019- 2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Selama empat Tahun terakhir, pengeluaran daerah didominasi oleh belanja operasional, diikuti oleh belanja modal. Di sisi lain, belanja tak terduga dan belanja transfer memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis pengeluaran lainnya.

Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut:

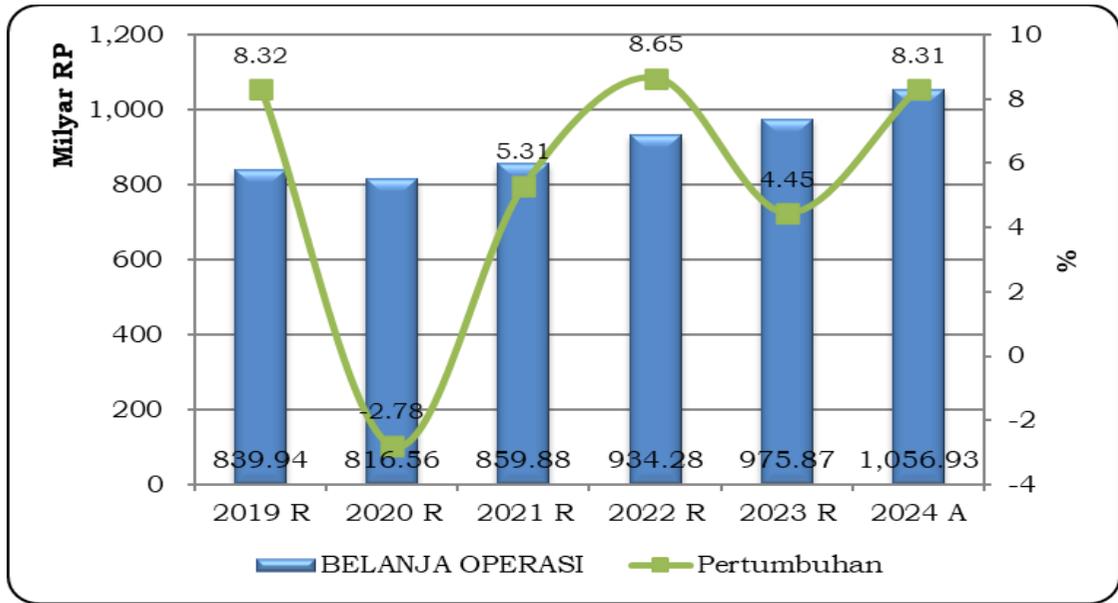


**Gambar 3. 9 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Komposisi Belanja operasi menunjukkan pola yang konsisten dari satu Tahun ke Tahun berikutnya. Meskipun secara nominal terjadi

perubahan dari waktu ke waktu, proporsi terbesar tetap terpusat pada belanja pegawai dan belanja barang serta jasa.

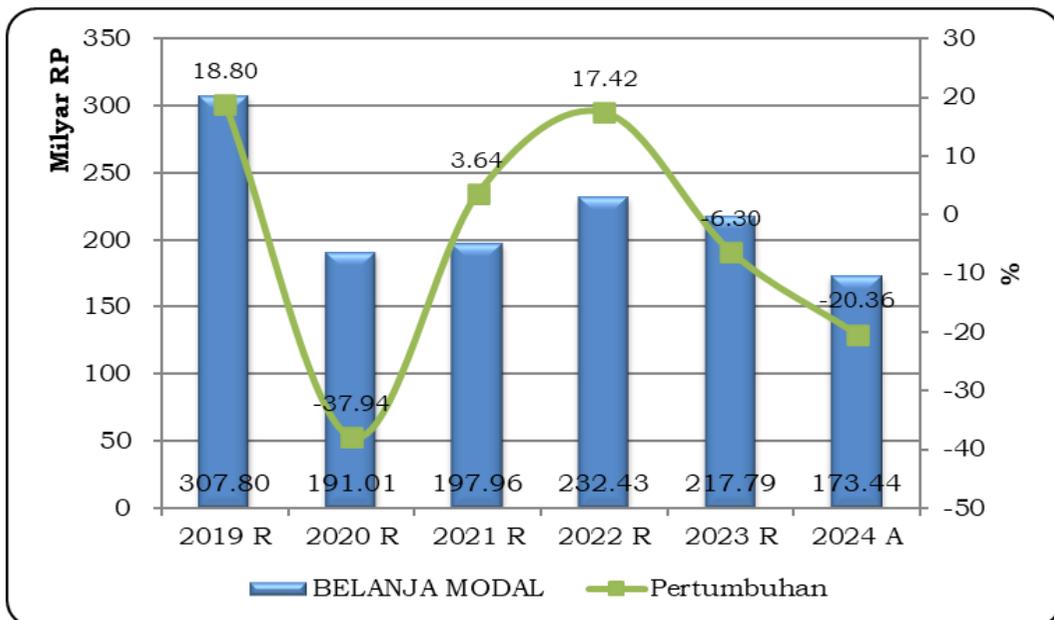


**Gambar 3. 10 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial. Selama enam Tahun terakhir, Belanja Operasi menunjukkan pola fluktuasi. Peningkatan terbesar terjadi pada realisasi Tahun 2022, mencapai 8,65 persen dengan nilai nominal sebesar Rp 934,28 miliar.

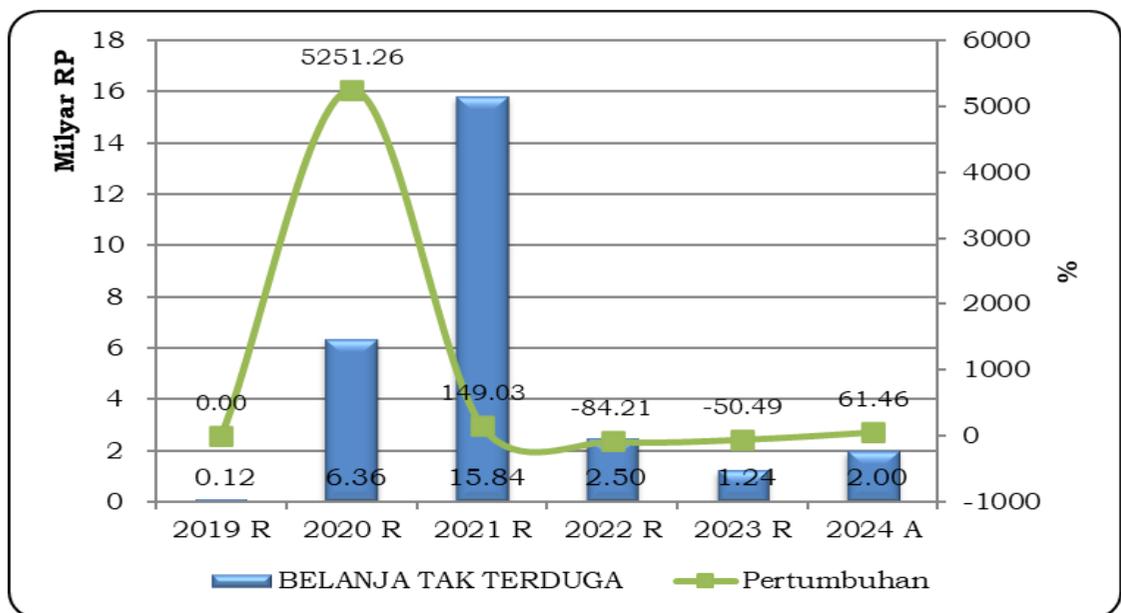
Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan belanja modal Tahun 2019 hingga Tahun 2024:



**Gambar 3. 11 Perkembangan Belanja Modal Kota Madun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

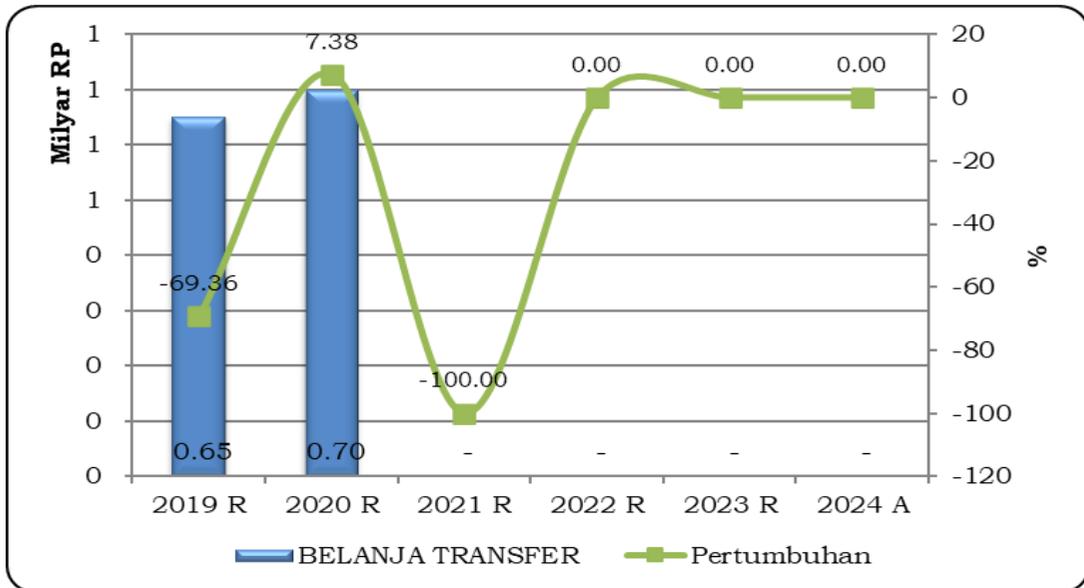
Belanja modal mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2020, diikuti dengan tren yang relatif stabil dalam Tahun-Tahun berikutnya. Komponen Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Penurunan yang mencapai minus 37,94 persen pada Tahun 2020 terjadi sebagai akibat dari refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, terjadi peningkatan belanja modal sebesar 3,64 persen atau mencapai Rp 197,96 miliar. Nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai 17,42 persen pada Tahun 2022, dengan jumlah mencapai Rp 232,43 miliar. Namun, pada Tahun 2023 terdapat efisiensi dalam belanja modal yang mencapai minus 6,30. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 3. 12 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Terjadi peningkatan yang signifikan dalam belanja tak terduga selama masa pandemi Covid-19, khususnya pada Tahun 2020 dan 2021. Jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2019, yang sebelumnya mencapai 0,12 miliar, meningkat menjadi 6,36 miliar pada Tahun 2020 dan 15,84 miliar pada Tahun 2021. Namun, pada realisasi Tahun 2022 dan 2023, belanja tak terduga mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kondisi pandemi yang relatif lebih baik. Selanjutnya perkembangan belanja transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 3. 13 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2019-2024**

*Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024*

Belanja transfer meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Terjadi sedikit peningkatan dalam perkembangan Belanja Transfer dari Tahun 2019 hingga 2020. Pada Tahun 2019, jumlah Belanja Transfer mencapai 0,65 miliar, sementara pada Tahun 2020 meningkat menjadi 0,70 miliar. Namun, dari anggaran Tahun 2021 hingga 2023, tidak ada alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Transfer.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut:

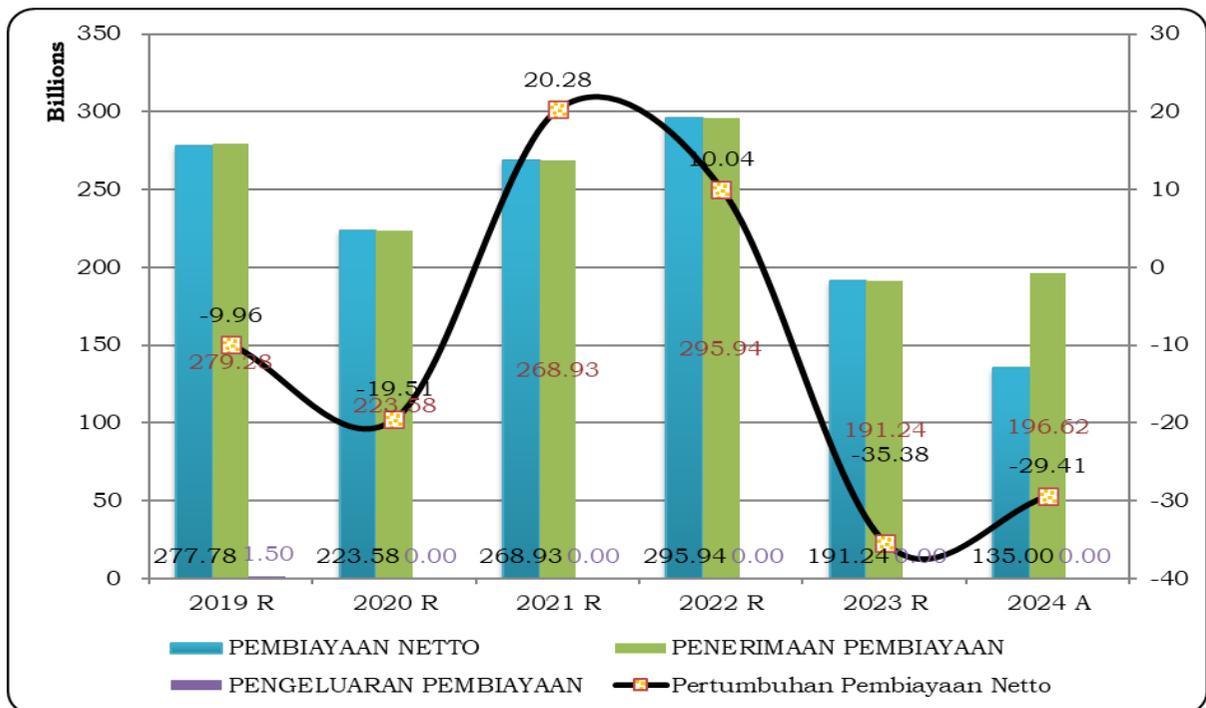
**Tabel 3. 2 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2024**

	Uraian	JUMLAH					
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,148,511,321,355.75</b>	<b>1,014,631,224,152.20</b>	<b>1,073,679,343,613.92</b>	<b>1,169,216,666,455.26</b>	<b>1,194,902,395,527.39</b>	<b>1,232,967,032,000,00</b>
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>839,939,781,749.69</b>	<b>816,557,831,371.63</b>	<b>859,879,322,395.91</b>	<b>934,280,133,791.29</b>	<b>975,873,375,042.70</b>	<b>1,057,523,335,128,00</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	440,222,382,579.38	441,740,830,119.00	413,765,191,395.00	404,406,660,608.25	423,896,152,844.39	498,361,265,622,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	366,995,675,620.23	350,024,036,581.10	413,958,099,347.91	474,775,658,285.04	487,717,322,693.31	496,250,751,989,00
05.01.03	Belanja Bunga	0		0	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	0		0	6,480,445,500.00	99,146,000.00	50,000,000,00
05.01.05	Belanja Hibah	15,603,619,810.08	11,938,091,671.53	13,431,646,653.00	15,369,183,718.00	32,355,896,005.00	34,955,559,517,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	17,118,103,740.00	12,854,873,000.00	18,724,385,000.00	33,248,185,680.00	31,804,857,500.00	27,905,758,000,00
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>307,800,742,344.06</b>	<b>191,011,897,074.57</b>	<b>197,958,260,924.01</b>	<b>232,434,449,701.97</b>	<b>217,790,302,662.69</b>	<b>173,443,696,872,00</b>
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	1,972,500,000.00	0	0	0	2,000,000,000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68,460,669,520.00	68,549,937,238.00	26,304,347,775.00	53,011,211,346	71,585,868,051.04	13,310,214,640,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,758,211,485.26	35,326,461,602.57	65,170,777,016.83	72,843,838,758	80,940,539,683.65	51,725,560,446,00

	Uraian	JUMLAH					
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	184,022,541,935.80	80,833,932,839.00	103,172,346,821.18	103,137,296,907	62,832,477,443.00	103,508,030,586,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,888,082,876.00	1,521,068,895.00	3,310,789,311.00	3,442,102,691	2,431,417,485.00	2,210,626,200,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	3,671,236,527.00	2,807,996,500.00	0	0	0	689,265,000,00
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>118,877,262.00</b>	<b>6,361,433,706.00</b>	<b>15,841,760,294.00</b>	<b>2,502,082,962.00</b>	<b>1,238,717,822.00</b>	<b>2,000,000,000,00</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	118,877,262.00	6,361,433,706.00	15,841,760,294.00	2,502,082,962.00	1,238,717,822.00	2,000,000,000,00
<b>05.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>651,920,000.00</b>	<b>700,062,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	651,920,000.00	700,062,000.00	0.00	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1,148,511,321,355.75</b>	<b>1,014,631,224,152.20</b>	<b>1,073,679,343,613.92</b>	<b>1,169,216,666,455.26</b>	<b>1,194,902,395,527.39</b>	<b>1,232,967,032,000,00</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

### 3.1.1.3 Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah



**Gambar 3. 14 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)**

Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2024

Perkembangan penerimaan pembiayaan di Kota Madiun menunjukkan fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan pertumbuhan pembiayaan *netto* sebesar -19,49%. Sementara pada Tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan berturut-turut sebesar 20,25% dan 10,04%. Namun, pada Tahun 2023, terjadi penurunan signifikan dalam penerimaan pembiayaan *netto*, mencapai -35,38%.

Tabel 3. 3 Realisasi dan Anggaran Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2024

	Uraian	JUMLAH					
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A
3	PEMBIAYAAN						
<b>03.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>279,278,826,431.22</b>	<b>223,581,475,124.05</b>	<b>268,933,182,301.20</b>	<b>295,937,467,818.14</b>	<b>191,240,034,447.43</b>	<b>135,000,000,000.00</b>
03.01.01	Penggunaan SiLPA	279,278,826,431.22	223,580,475,124.05	268,933,182,301.20	295,936,667,818.14	191,238,836,447.43	135,000,000,000.00
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	1,000,000	0	800,000	1,198,000.00	0
<b>03.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1,500,000,000.00	0	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0

	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>277,778,826,431.22</b>	<b>223,581,475,124.05</b>	<b>268,933,182,301.20</b>	<b>295,937,467,818.14</b>	<b>191,240,034,447.43</b>	<b>135,000,000,000.00</b>
03.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	223,635,003,072.06	268,575,832,383.17	295,936,667,818.14	209,067,977,447.43	113,947,209,153.51	0

umber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2024

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemerintah. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan neraca daerah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi yang besar bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif.

Komponen aset menjelaskan tentang sumber daya pemerintah daerah. Aset merupakan komponen penting dan berguna bagi ekonomi dan sosial pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset terdiri dari:

- (1) aset lancar;
- (2) investasi jangka panjang;
- (3) aset tetap;
- (4) dana cadangan; dan
- (5) aset lainnya.

Kewajiban adalah hasil dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lampau, yang mengindikasikan utang yang dimiliki pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim yang dimiliki pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Data mengenai kewajiban daerah selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa mayoritas kewajiban yang Pemerintah Kota Madiun tergolong dalam kategori kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi:

- (1) Ekuitas Dana Lancar;
- (2) Ekuitas Dana Investasi; dan
- (3) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, Ekuitas dana investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

**Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun, Tahun 2019-2023**

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
1.1.1	Kas						
	Kas di Kas Daerah	203.192,16	230.933,57	225.992,43	119.817,39	67.071,19	-19,87%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	601,132	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	2,11	1,81	6,4	10,23	10,23	74,80%
	Kas di BLUD RSUD	11.466,24	29.262,96	61.231,49	64.695,54	38.759,54	57,51%
	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.160,29	6.899,78	7.457,91	6.254,89	7.500,60	2,06%
	Kas Lainnya	1.877,79	1.835,06	1.265,49	474,38	610,48	-16,78%
	Deposito berjangka 1 bulan	-	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Pendek						
1.1.2	Piutang						
	Piutang Pajak	9.834,98	8.748,31	10.559,56	11.226,31	9.800,78	0,82%
	Piutang Retribusi	3.051,85	5.543,99	6.604,47	7.217,99	4.625,02	18,54%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	134,86	124,17	139,4	121,51	110.358,98	22678,62%
	Piutang Lain-Lain	32.039,14	1.169,19	15.215,70	6.558,72	8.072,83	267,81%
	Penyisihan Piutang						
	Persediaan	17.001,49	17.752,06	16850,71	12.928,83	13.537,73	-6,64%
	Belanja Dibayar Dimuka	2.657,86	19.008,00	2.426,62	-	364.051,75	263,96%
	Jumlah Aset Lancar	285.335,48	299.326,03	340.341,21	220.864,40	144.445,19	-12,77%
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
	Investasi Dana Bergulir	24.042,03	24.563,73	25.066,08	24.999,61	25.418,51	1,41%
	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	-4.532,36	-4.839,30	-9.707,00	-9.691,62	-10.134,89	27,94%
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	129.781,91	134.595,28	137.650,21	140.522,76	141.378,02	2,17%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	149.291,58	134.595,27	153.009,29	155.830,75	156.661,64	1,55%
<b>1.2</b>	<b>ASET TETAP</b>						
1.2.1	Tanah	709.974,67	723.583,59	710.406,12	710.406,12	709.585,94	-0,005%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	536.073,04	601.640,70	649.980,03	704.569,40	774.017,72	9,63%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	779.408,09	809.892,28	862.912,92	943.400,17	1.029.628,97	7,23%
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.134.991,90	1.212.978,74	1.314.462,74	1.417.896,99	1.468.634,35	6,67%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	5.915,70	6.141,44	6.826,49	6.625,59	6.698,63	3,28%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	4.916,06	7.607,04	8.578,64	9.539,40	9.976,42	20,82%
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-981.817,19	1.071.131,84	1.179,38	
	Jumlah Aset Tetap	2.090.514,51	2.158.740,82	2.209.312,32	2.304.956,76	2.362.482,60	3,11%
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-				
<b>1.3</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-				
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-				
1.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	155,65	121,44	114,44	-	-	
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	119.532,90	119.532,90	119.532,90	119.532,90	119.532,90	0,00%
	Bangun Guna Serah (Built of Transfer)	-	-	-	-	-	
1.3.4	Aset Tak Berwujud	3.410,65	3.251,33	2.084,07	1.427,50	23.172,03	362,80%
	Aset Lain-lain	24.743,31	32.817,02	34.978,69	40.520,83	40.452,83	13,72%

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
	Jumlah Aset Lainnya	133.599,73	136.105,40	123.203,97	131.985,53	131.030,15	-0,30%
	TOTAL AKTIVA	2.658.741,30	2.748.491,96	2.825.866,79	2.813.637,45	2.794.619,60	1,27%
	<b>2 KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49	-	17	8,7	6	
	Hutang Bunga	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK Bank	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-			
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-			
	Pendapatan Diterima Dimuka	5.782,08	4.482,21	4.966,40	4.898,95	5.051,62	-2,48%
	Utang Belanja	11.050,90	7.999,16	10.468,76	9.796,69	16.894,34	17,32%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16882,06	12.481,37	15.452,21	14.704,44	22.547,09	11,56%
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44	22.547,09	11,56%
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	223.635	268.868	-	-	-	
	Pendapatan yang ditanggguhkan	-	-	-	-	-	
3.1.2	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	
3.1.3	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	
	<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	
	Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	
	Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-	
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
<b>3.2.1</b>	<b>Diinvestasikan dalam Aset Tetap</b>						
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
	Jangka Panjang.	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dana Investasi	-	-	-	-	-	
	EKUITAS DANA CADANGAN						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	RK PPKD	-	-	-	-	-	
	RK SKPD	-	-	-	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.641.859,24	2.736.010,58	2.810.414,58	2.798.933,01	2.772.072,51	1,23%
	<b>TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA</b>	2.658.741,30	2.748.491,96	2.825.866,79	2.813.637,45	2.794.619,60	1,27%

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024, \*Realisasi Tahun 2023 menggunakan data per Minggu ke dua Bulan Januari 2024

Berdasarkan informasi dari neraca tersebut, kemampuan keuangan pemerintah dapat diidentifikasi melalui analisis rasio keuangan. Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai solvabilitas adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset diperoleh dengan membagi jumlah kewajiban oleh total aset, sementara rasio kewajiban terhadap ekuitas dihitung dengan membagi jumlah kewajiban oleh ekuitas. Rasio lancar digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam membayar hutang-hutangnya dalam jangka pendek. Semakin tinggi nilai rasio, semakin lancar kemampuan pembayaran hutang jangka pendeknya.

**Tabel 3. 5 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2019-2022**

Rasio	Rumus	2019	2020	2021	2022
<b>Rasio Likuiditas</b>	Aset Lancar	285.335,48	299.326,03	340.341,21	220.864,40
	Kewajiban Jangka Pendek	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	<b>Rasio Lancar</b>	<b>16,90</b>	<b>23,98</b>	<b>22,02</b>	<b>15,02</b>
	Aset Lancar Persediaan	268.333,99	281.573,97	323.490,49	207.935,57
	Kewajiban Jangka Pendek	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	<b>Quick Ratio</b>	<b>15,89</b>	<b>22,56</b>	<b>20,93</b>	<b>14,14</b>
	Total Hutang	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44

Rasio	Rumus	2019	2020	2021	2022
<b>Rasio Solvabilitas</b>	Total Aset	2.658.741,30	2.748.491,96	2.825.866,79	2.813.637,45
	<b>Rasio Total Hutang (%)</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,52%</b>
	Total Hutang	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	Total Ekuitas	2.641.859,24	2.736.010,58	2.810.414,58	2.798.933,01
	<b>Rasio Hutang/Modal (%)</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,46%</b>	0,55%	0,52%

Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan 2022 yang dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode Tahun 2019 sampai dengan 2022 terlihat mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikian juga dengan *quick ratio* yang mengalami tren fluktuatif selama lima Tahun terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi.

Tabel yang disajikan di atas memperlihatkan evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2019 hingga 2022, dianalisis melalui indikator rasio likuiditas dan solvabilitas. Perhitungan rasio likuiditas, seperti rasio lancar, selama periode yang disebutkan menunjukkan fluktuasi yang sejalan dengan perubahan dinamis dalam struktur kewajiban jangka pendek daerah. Begitu juga dengan perubahan tren pada *quick ratio*, yang mencerminkan dinamika pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah dalam lima Tahun terakhir. Meskipun demikian, secara keseluruhan, kemampuan Pemerintah Kota Madiun untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dinilai cukup tinggi.

Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang Tahun 2019-2022, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada Tahun 2019 nilai ini mengalami kenaikan hingga puncaknya sebesar 0,64%. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 0,46%.

Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan kembali mencapai 0,55%. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 0,52%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah utang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan analisis, hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio lancar pada Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengkonversi aset lancarnya menjadi uang tunai guna memenuhi seluruh kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai rasio lancar ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari Tahun ke Tahun. Fluktuasi ini dapat mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajibannya juga berubah-ubah dari waktu ke waktu.

*Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*), dikarenakan *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya walaupun nilainya mengalami tren yang fluktuatif. Akan tetapi, pada Tahun 2022, *quick ratio* mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan menurunnya nilai selisih aset lancar dan persediaan.

*Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan- pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

### **3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan**

Kerangka pendanaan menggambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah pada beberapa Tahun kedepan. Proyeksi ini disesuaikan dengan

prakiraan asumsi ekonomi makro dan data historis dari beberapa Tahun sebelumnya yang digunakan sebagai landasan. Selain itu, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kerangka pendanaan.

### 3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

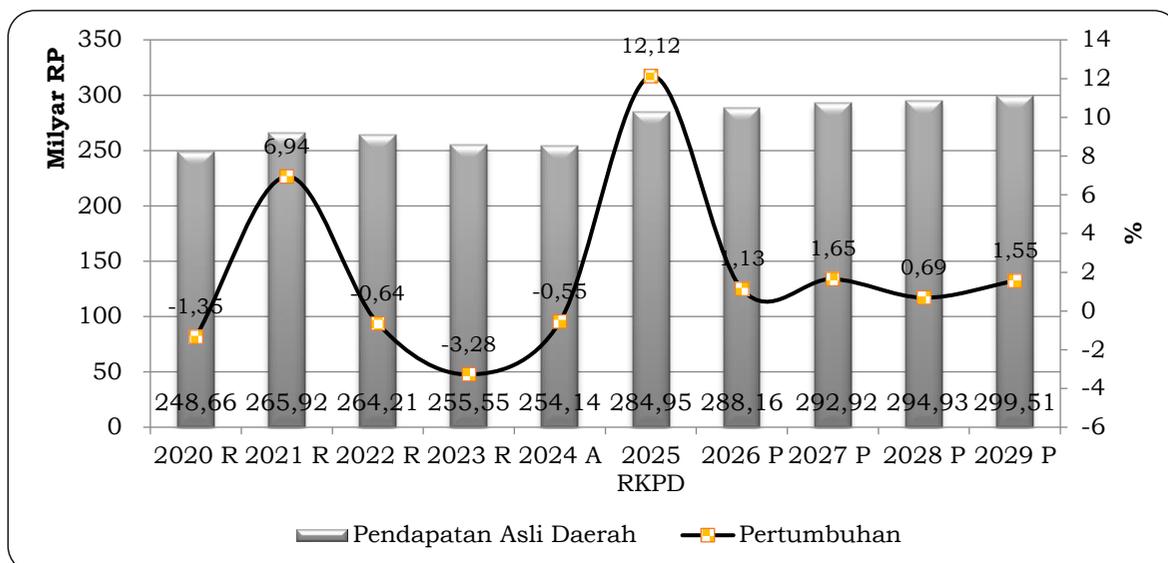
Proyeksi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berikut disajikan perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2029:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 15 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Di Kota Madiun, pertumbuhan pendapatan nominal mengalami penurunan pada Tahun 2020 karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian, dan sebagai akibatnya, pendapatan pemerintah menurun. Pada Tahun 2021, pendapatan daerah meningkat kembali sebesar 3,87 persen, namun mengalami penurunan lagi hingga minus 3,63 persen pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan anggaran pendapatan daerah sebesar 2,61 persen. Meskipun demikian, pada Tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan anggaran, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan menurun sebesar 0,88 persen. Proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 mengalami tren yang cenderung meningkat. Proyeksi Tahun 2028 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,60 kemudian kembali meningkat pada Tahun 2029 menjadi 1,24.

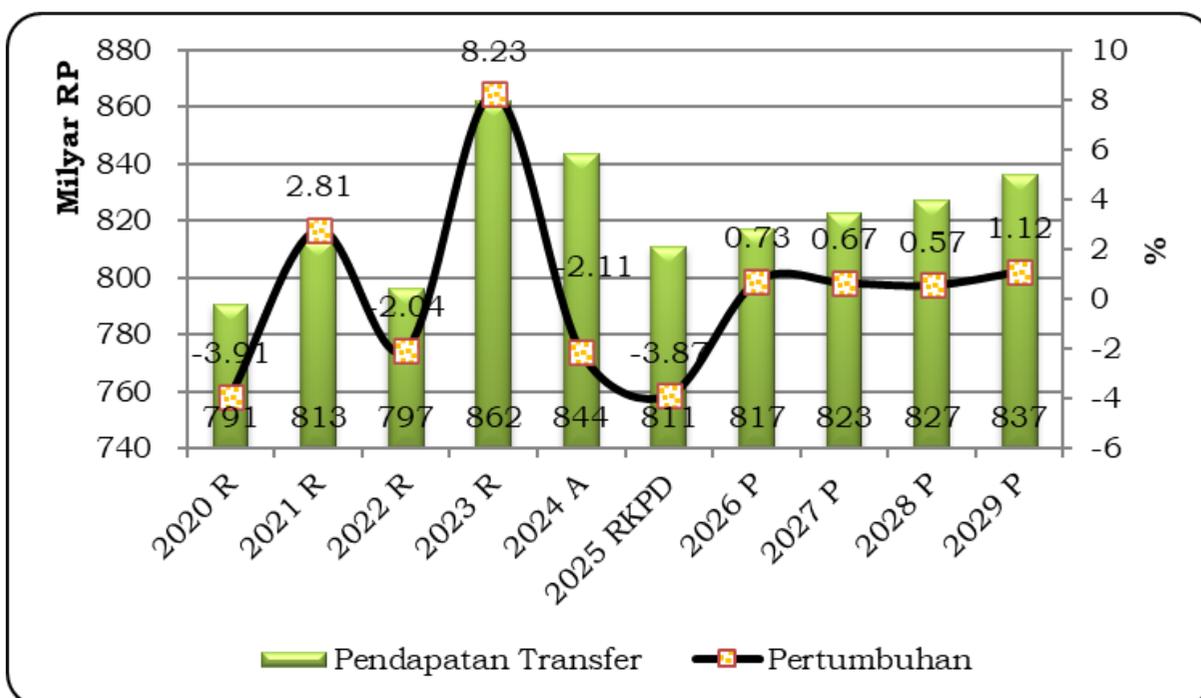


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 16 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun mengalami pertumbuhan positif pada Tahun 2021, mencapai nilai nominal tertinggi dalam tiga Tahun terakhir. Namun, pada Tahun 2022, terjadi penurunan pertumbuhan PAD sebesar 0,64 persen. Sementara itu, pada Tahun 2023, PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan lebih lanjut dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, dengan nilai penurunan mencapai 0,96 persen, yakni menjadi sebesar 261,68 miliar. Diperkirakan bahwa pada Tahun 2024, PAD akan mengalami penurunan sebesar 2,88 persen. Namun, pada Tahun 2026 hingga Tahun 2029, PAD diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan Tahun 2025. Tren penurunan tersebut berlanjut hingga pada Tahun 2029, PAD Kota Madiun diproyeksikan mencapai angka 1,55.

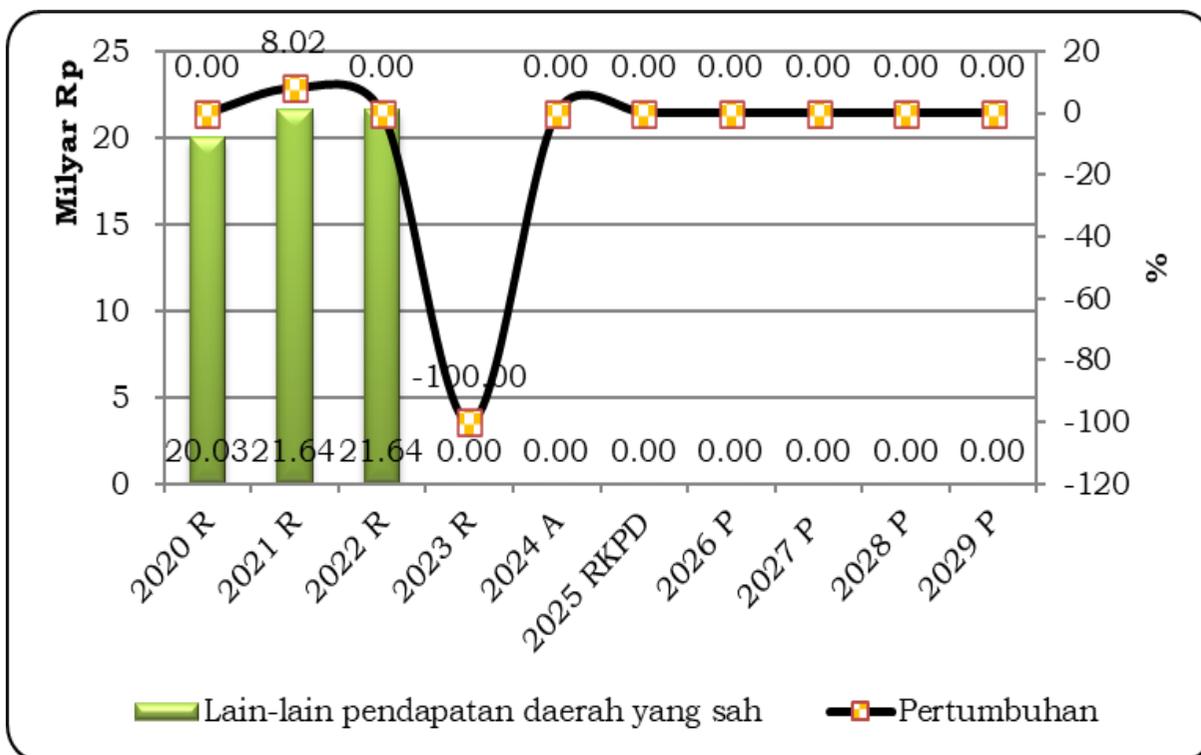
Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 17 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer, dalam nilai nominalnya, menunjukkan pola fluktuatif. Pada Tahun 2022, terjadi penurunan pendapatan transfer sebesar 2,04 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Untuk Tahun 2023, terdapat anggaran peningkatan pendapatan transfer sebesar 3,79 persen atau setara dengan Rp. 827 miliar. Selanjutnya, pendapatan transfer diharapkan meningkat sebesar 2,07 persen pada Tahun 2024. Proyeksi menunjukkan bahwa pendapatan transfer akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 817 miliar pada Tahun 2026, dengan pertumbuhan yang berkelanjutan pada Tahun 2028 dan 2029. Pada Tahun 2029, angka pendapatan transfer mengalami peningkatan dibandingkan dua Tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 1,12 persen. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

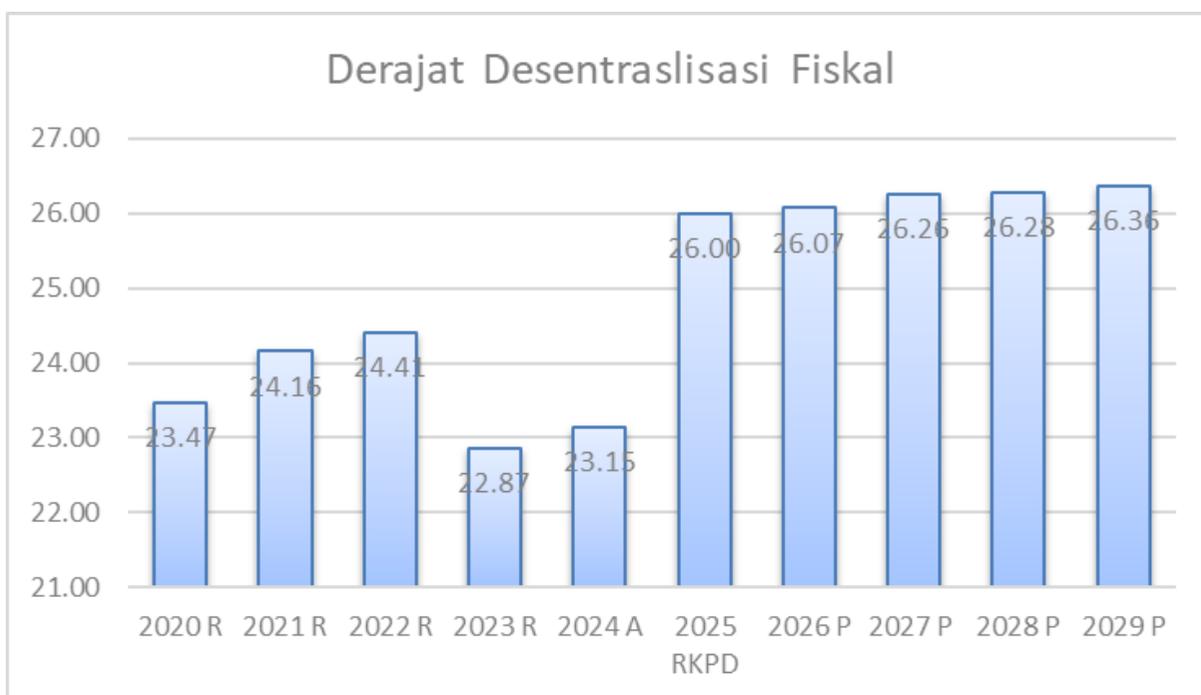


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 18 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2020-2026**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah secara nominal mengalami sedikit peningkatan pada rentang waktu 2020-2022. Pada Tahun 2020, realisasi mencapai Rp. 20,03 miliar. Pada Tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp. 21,64 miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Namun, pada Tahun 2022 dan dalam realisasi APBD 2023, anggaran 2024, serta proyeksi Tahun 2025 hingga Tahun 2029, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan menjadi 0,00. Hal ini menunjukkan tidak adanya pendapatan daerah dari komponen ini, terutama dari subkomponen hibah.

Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 19 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Kota Madiun mengalami peningkatan dalam tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal hingga Tahun 2022, mencapai nilai tertinggi dalam empat Tahun terakhir. Namun, dalam realisasi Tahun 2023, terjadi penurunan derajat desentralisasi fiskal menjadi 22,87. Proyeksi untuk Tahun 2024 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun diperkirakan akan mencapai 23,15. Sementara itu, proyeksi untuk Tahun 2025 menunjukkan 26,00, yang kemudian diperkirakan akan meningkat kembali pada Tahun 2026 menjadi 23,10. Dari Tahun 2026 hingga Tahun 2029, derajat desentralisasi fiskal Kota Madiun stabil pada kisaran persentase 26,0. Pada Tahun akhir 2029, derajat desentralisasi fiskal mencapai angka 26,36 persen.

Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020 sampai dengan 2022, APBD 2023-2024 dan proyeksi hingga Tahun 2029, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2026**

	Uraian	JUMLAH									
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
1	<b>PENDAPAT AN DAERAH</b>	<b>1,059,625,581,411.32</b>	<b>1,100,682,829,130.86</b>	<b>1,082,347,176,084.55</b>	<b>1,117,609,570,233.47</b>	<b>1,097,967,032,000.00</b>	<b>1,096,147,524,575.00</b>	<b>1,105,286,896,500.00</b>	<b>1,115,499,928,000.00</b>	<b>1,122,182,325,000.00</b>	<b>1,136,051,096,000.00</b>
1:01	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>248,656,192,759.32</b>	<b>265,920,295,216.86</b>	<b>264,207,393,517.55</b>	<b>255,551,933,408.67</b>	<b>254,141,714,400.00</b>	<b>284,951,304,575.00</b>	<b>288,164,443,500.00</b>	<b>292,921,252,000.00</b>	<b>294,932,832,000.00</b>	<b>299,513,985,000.00</b>
1:01:01	Pajak daerah	90,286,840,987.07	87,874,777,059.32	106,165,312,122.76	113,514,116,369.67	102,506,770,000	138,994,500,000.00	141,774,390,000.00	145,900,640,000.00	147,300,500,000.00	150,900,455,000.00
1:01:02	Retribusi daerah	15,291,324,019.00	17,463,721,195.00	21,380,512,837.00	22,551,072,553.00	18,012,701,000	131,142,088,290.00	131,464,255,000.00	131,839,450,000.00	132,236,480,000.00	132,890,000,000.00
1:01:03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15,216,268,562.40	16,199,882,796.95	15,595,752,355.97	14,983,008,032.73	16,029,310,600	14,127,425,985.00	14,235,498,500.00	14,480,654,000.00	14,675,000,000.00	14,978,000,000.00
1:01:04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	127,861,759,190.85	144,381,914,165.59	121,065,816,201.82	104,503,736,453.27	117,592,932,800	687,290,300.00	690,300,000.00	700,508,000.00	720,852,000.00	745,530,000.00
1:02	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>790,939,408,652.00</b>	<b>813,126,832,914.00</b>	<b>796,504,081,567.00</b>	<b>862,057,636,824.80</b>	<b>843,825,317,600.00</b>	<b>811,196,220,000.00</b>	<b>817,122,453,000.00</b>	<b>822,578,676,000.00</b>	<b>827,249,493,000.00</b>	<b>836,537,111,000.00</b>
1:02:01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>705,872,676,797.00</b>	<b>709,162,104,477.00</b>	<b>697,480,692,487.00</b>	<b>666,070,630,012.80</b>	<b>747,542,927,000.00</b>	<b>744,337,150,000.00</b>	<b>750,016,754,000.00</b>	<b>755,293,376,000.00</b>	<b>759,838,618,000.00</b>	<b>768,646,511,000.00</b>
1.2.1.01.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	34,444,290,949.20	33,962,127,578.00	29,804,646,600.00	24,092,136,000.00	80,604,119,000	711,739,451,000.00	715,136,054,000.00	718,543,076,000.00	721,603,118,000.00	727,790,911,000.00
1.2.1.01.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan</i>	51,666,436,423.80	63,851,956,219.00	82,308,678,000.00	36,475,210,342.00	510,653,158,000	77,398,333,000.00	78,345,678,000.00	79,800,345,000.00	80,456,800,000.00	82,398,333,000.00

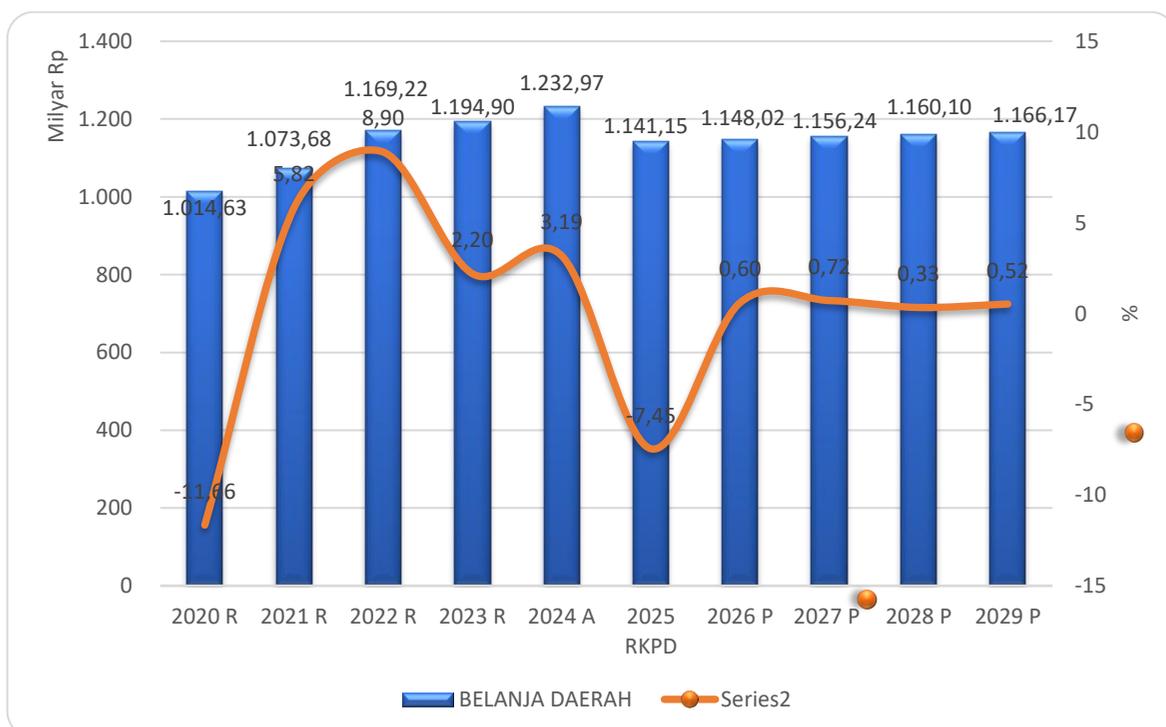
	Uraian	JUMLAH									
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
	<i>pajak</i>										
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	0.00	19,833,010,286.00	21,802,781,361.00	35,959,029,435.00	34,637,942,000					
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	473,852,439,000.00	465,495,171,000.00	463,486,748,121.00	487,141,770,396.00	89,050,009,000	510,653,158,000.00	511,768,576,000.00	512,445,600,000.00	513,450,900,000.00	515,653,158,000.00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi Khusus	72,596,481,424.00	72,994,976,394.00	71,207,048,405.00	82,402,483,839.80		123,687,960,000.00	125,021,800,000.00	126,297,131,000.00	127,695,418,000.00	129,739,420,000.00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	73,313,029,000.00	53,024,863,000.00	28,870,790,000.00		32,597,699,000	32,597,699,000.00	34,880,700,000.00	36,750,300,000.00	38,235,500,000.00	40,855,600,000.00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1:02:02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>85,066,731,855.00</b>	<b>103,964,728,437.00</b>	<b>99,023,389,080.00</b>	<b>195,987,006,812.00</b>	<b>96,282,390,600.00</b>	<b>66,859,070,000.00</b>	<b>67,105,699,000.00</b>	<b>67,285,300,000.00</b>	<b>67,410,875,000.00</b>	<b>67,890,600,000.00</b>
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84,049,652,855.00	103,062,649,437.00	98,284,006,080.00	121,272,084,812.00	95,663,488,000	66,859,070,000.00	67,105,699,000.00	67,285,300,000.00	67,410,875,000.00	67,890,600,000.00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,017,079,000.00	902,079,000.00	739,383,000.00	74,714,922,000.00	618,902,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Uraian	JUMLAH									
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
1:03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20,029,980,000.00	21,635,701,000.00	21,635,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1:03:01	Hibah	20,029,980,000.00	21,635,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1:03:02	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1:03:03	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil Proyeksi, 2024

### 3.2.2 Realisasi dan Proyeksi dari belanja daerah

Proyeksi anggaran belanja daerah mencakup berbagai kategori seperti belanja operasional, belanja yang tidak terduga, belanja modal, belanja untuk pegawai, dan belanja transfer. Berikut adalah gambaran tentang perkembangan belanja daerah Kota Madiun dari Tahun 2020 hingga 2029:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 20 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2020 – 2029**

Sejak dimulainya pandemi Covid-19, terlihat adanya peningkatan dalam pertumbuhan belanja daerah. Pada Tahun 2021, pertumbuhan belanja daerah mencapai 5,82 persen, menurun menjadi 2,20 persen pada realisasi Tahun 2023. Namun, proyeksi untuk Tahun 2024 menunjukkan penurunan pertumbuhan belanja daerah sebesar 12,64 persen. Proyeksi Tahun 2025 hingga Tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan kembali dalam pertumbuhan belanja daerah. Selanjutnya, belanja daerah pada Tahun 2027 hingga Tahun 2029 cenderung stabil. Pada Tahun 2029, persentase belanja daerah mencapai angka 0,52 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2028 yang sebesar 0,38 persen. Oleh karena itu, beberapa kategori belanja, seperti belanja operasional, modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, diharapkan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

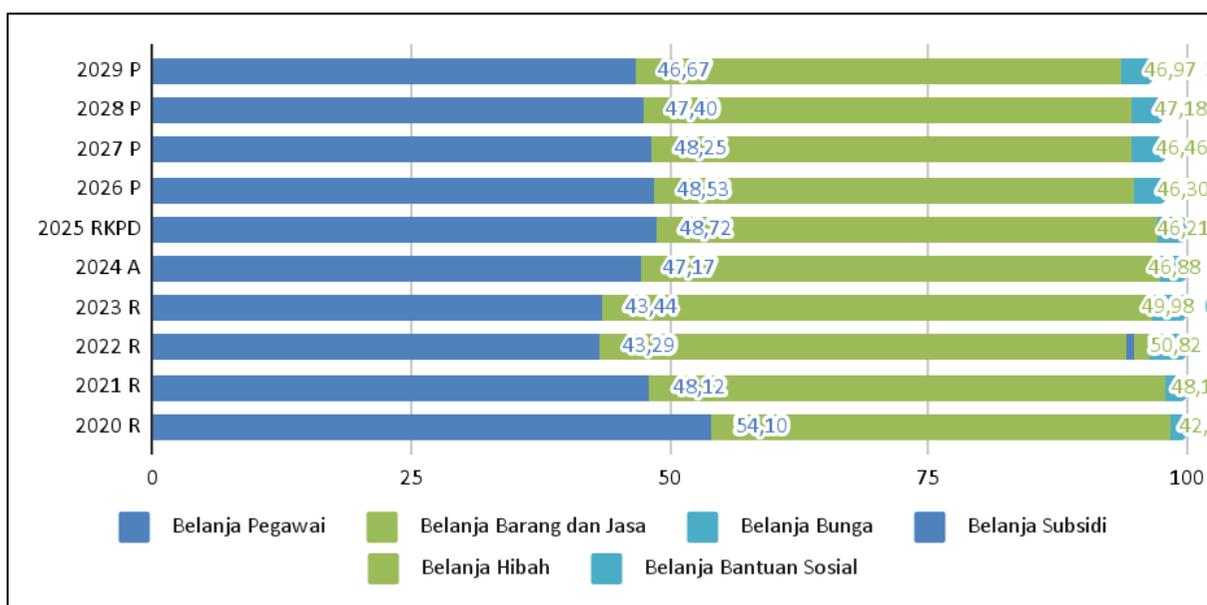
Berikut merupakan proporsi beberapa komposisi belanja daerah pada tiap Tahun:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 21 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020 - 2029**

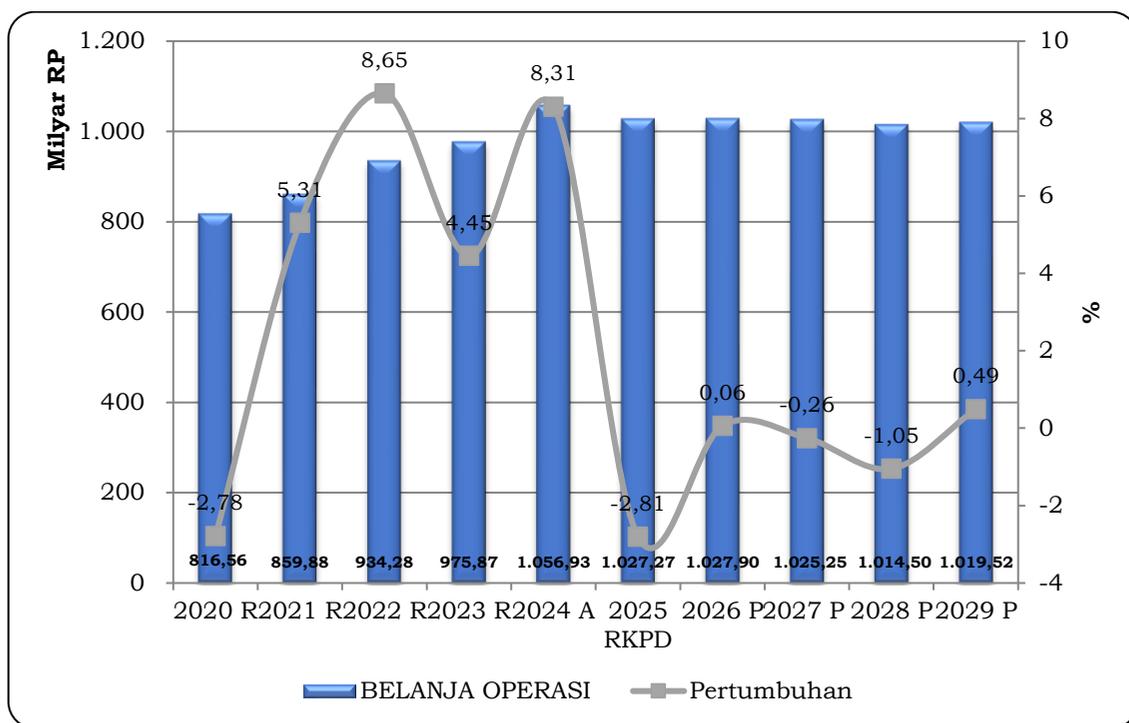
Pada proyeksi komposisi belanja pemerintah Kota Madiun untuk Tahun 2024, mayoritas alokasi masih diberikan kepada belanja operasi. Persentase belanja operasi diproyeksikan mencapai 85,72 persen pada Tahun 2024, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, dengan kenaikan proporsi sebesar 12 persen. Sementara itu, proyeksi alokasi belanja daerah pada Tahun 2025 hingga Tahun 2029 tetap didominasi oleh belanja operasi dan belanja modal. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun Tahun 2020-2029 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 22 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Komposisi Belanja operasi memiliki karakteristik komposisi yang relatif sama dari Tahun ke Tahun. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari Tahun ke Tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun hingga Tahun 2029.



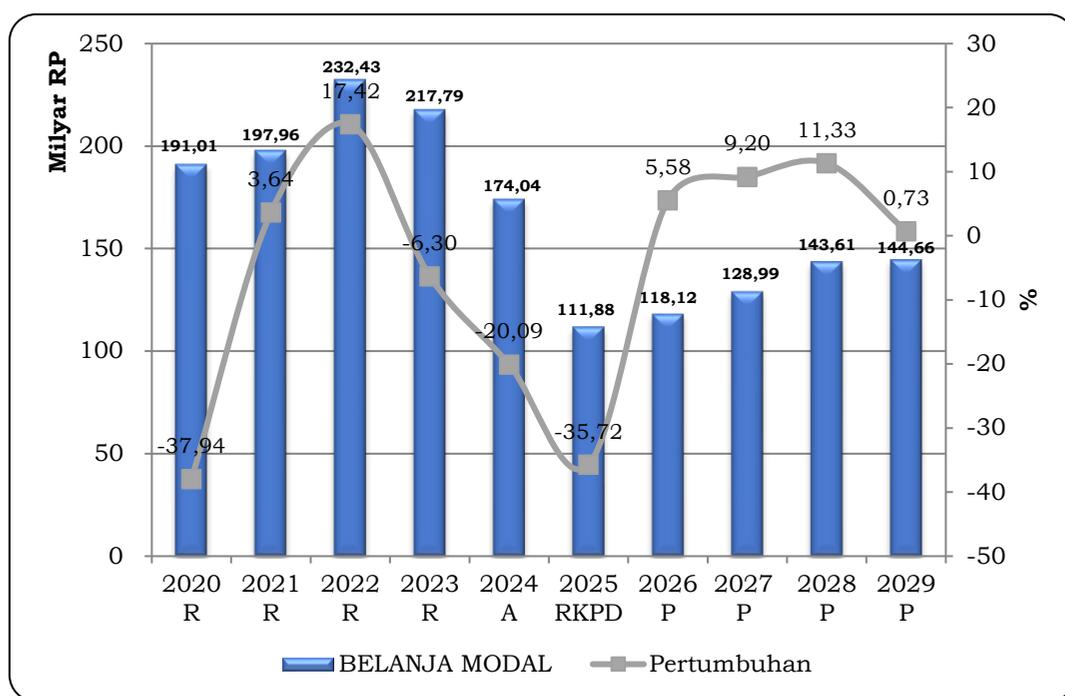
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 23 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Selama periode 2020 hingga 2022, belanja operasi menunjukkan fluktuasi dalam trennya. Pertumbuhan paling signifikan tercatat pada realisasi Tahun 2022, mencapai 8,65 persen dengan nilai sebesar Rp 934,28 miliar. Untuk realisasi Tahun 2023, pertumbuhan belanja operasi menurun sebesar 4,45%, sementara pada Tahun 2024, alokasi belanja operasi mengalami kenaikan menjadi 8,31%. Proyeksi pertumbuhan belanja operasi pada Tahun 2025 menurun, namun mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2026 menjadi Rp 1.048 triliun. Pada Tahun-Tahun selanjutnya, belanja operasi diproyeksikan stabil, hingga pada Tahun 2029, belanja operasi mencapai angka Rp.

1.051 triliun atau meningkat menjadi 0,49 persen dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2020 hingga 2029:



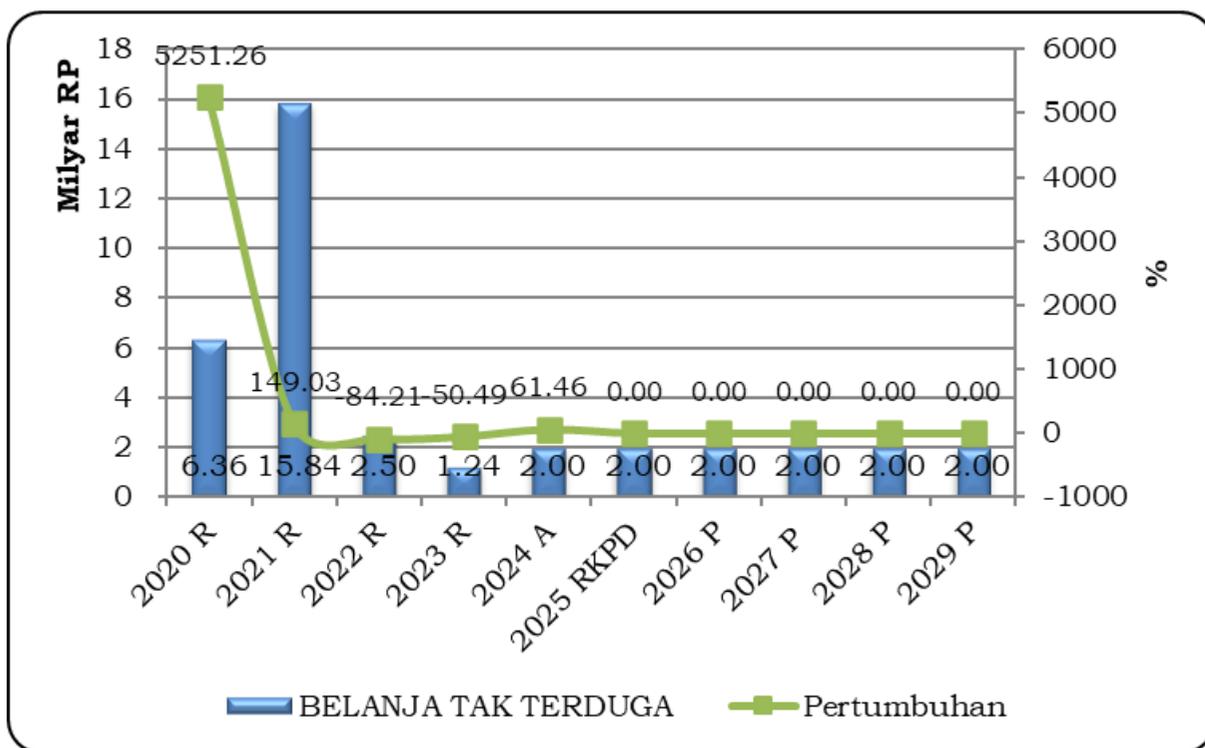
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 24 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Belanja modal mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2020, tetapi menunjukkan tren yang relatif stabil dalam Tahun-Tahun berikutnya. Komponen belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya. Penurunan belanja modal pada Tahun 2020 mencapai minus 37,94 persen, yang disebabkan oleh refocusing dan re-alokasi anggaran untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, belanja modal meningkat sebesar 3,64 persen, mencapai Rp 197,96 miliar, dan terus meningkat menjadi 17,42 persen dengan nilai Rp 232,43 miliar pada Tahun 2022. Namun, pada Tahun 2023, realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar -6,30 persen dibandingkan Tahun sebelumnya. Proyeksi belanja modal untuk Tahun 2024 menunjukkan penurunan lebih lanjut hingga minus 20,09% atau sebesar Rp 174,04 miliar. Sementara itu, proyeksi belanja modal untuk Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan dari Tahun anggaran 2024, diperkirakan meningkat sebesar 5,58 persen Tahun 2026.

Belanja Modal Kota Madiun diproyeksikan mengalami tren yang meningkat dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 secara nominal, hingga

mencapai angka Rp. 144 miliar pada Tahun 2029, kendati demikian mengalami penurunan secara persentase dibandingkan Tahun sebelumnya, yakni menjadi 0,73 persen. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:

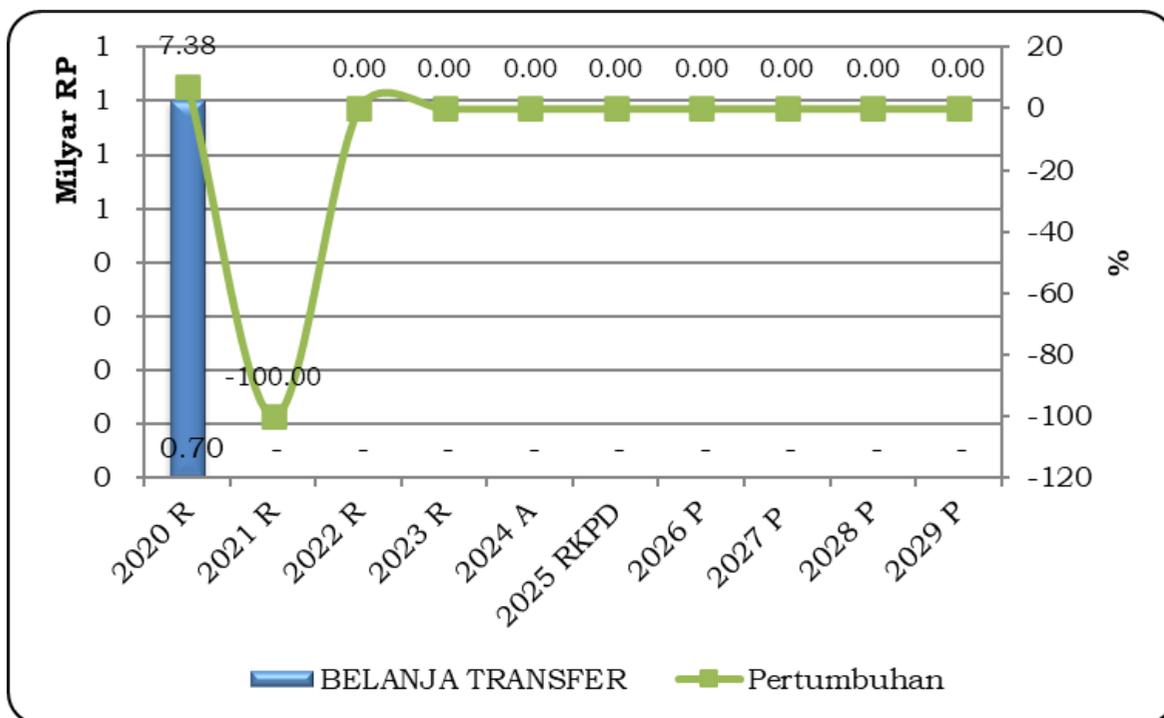


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 25 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2020-2029**

Terdapat peningkatan yang substansial dalam belanja tidak terduga selama masa pandemi Covid-19, khususnya pada Tahun 2020 dan 2021. Jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar 0,12 miliar meningkat secara signifikan menjadi 6,36 miliar pada Tahun 2020 dan mencapai 15,84 miliar pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022, terjadi penurunan dalam belanja yang tidak terduga sejalan dengan penurunan kondisi pandemi yang relatif stabil. Pada realisasi Tahun 2023, terdapat penurunan yang lebih rendah dalam belanja tidak terduga, mencapai Rp. 1,24 miliar. Sementara pada Tahun 2024, tidak terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun anggaran sebelumnya, tetap pada angka Rp 2 miliar. Proyeksi belanja yang tidak terduga untuk Tahun 2025 dan 2029 menunjukkan angka yang stabil pada Rp 2 miliar.

Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

**Gambar 3. 26 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2020-2029**

Belanja transfer terbagi menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pada Tahun 2020 mencapai Rp. 0,70 miliar namun, tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Transfer dalam periode Tahun 2021 hingga 2024. Begitu pula, tidak ada proyeksi anggaran untuk Belanja Transfer pada Tahun 2025 dan 2029.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun dan proyeksi anggaran Tahun 2020-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Realisasi Belanja Tahun 2020-2023, Anggaran Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2025 s.d. Tahun 2026**

	Uraian	JUMLAH									
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,014,631,224,152.20</b>	<b>1,073,679,343,613.92</b>	<b>1,169,216,666,455.26</b>	<b>1,194,902,395,527.39</b>	<b>1,232,967,032,000.00</b>	<b>1,141,147,524,575.00</b>	<b>1,148,020,641,000.00</b>	<b>1,156,241,372,500.00</b>	<b>1,160,102,452,500.00</b>	<b>1,166,174,748,400.00</b>
5:01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>816,557,831,371.63</b>	<b>859,879,322,395.91</b>	<b>934,280,133,791.29</b>	<b>975,873,375,042.70</b>	<b>1,056,928,996,265.00</b>	<b>1,027,268,571,647.00</b>	<b>1,027,901,570,000.00</b>	<b>1,025,250,498,000.00</b>	<b>1,014,497,144,000.00</b>	<b>1,019,518,572,000.00</b>
5:01:01	Belanja Pegawai	441,740,830,119.00	413,765,191,395.00	404,406,660,608.25	423,896,152,844.39	498,581,582,234	500,480,074,817.00	498,880,346,000.00	494,721,430,000.00	480,891,844,000.00	475,800,765,000.00
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	350,024,036,581.10	413,958,099,347.91	474,775,658,285.04	487,717,322,693.31	495,436,096,514	474,748,066,110.00	475,920,345,000.00	476,331,800,000.00	478,617,800,000.00	478,900,340,000.00
5:01:03	Belanja Bunga		0	0	-						
5:01:04	Belanja Subsidi		0	6,480,445,500.00	99,146,000.00	50,000,000	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
5:01:05	Belanja Hibah	11,938,091,671.53	13,431,646,653.00	15,369,183,718.00	32,355,89	34,955	21,796,11	22,400,55	22,866,76	23,280,90	33,012,90

	Uraian	JUMLAH									
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
					6,005.00	,559,517	7,584.00	5,000.00	8,000.00	0,000.00	0,000.00
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	12,854,873,000.00	18,724,385,000.00	33,248,185,680.00	31,804,857,500.00	27,905,758,000	30,144,313,136.00	30,600,324,000.00	31,230,500,000.00	31,606,600,000.00	31,704,567,000.00
5:02	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>191,011,897,074.57</b>	<b>197,958,260,924.01</b>	<b>232,434,449,701.97</b>	<b>217,790,302,662.69</b>	<b>174,038,035,735.00</b>	<b>111,878,952,928.00</b>	<b>118,119,071,000.00</b>	<b>128,990,874,500.00</b>	<b>143,605,308,500.00</b>	<b>144,656,176,400.00</b>
5:02:01	Belanja Modal Tanah	1,972,500,000.00	0	-	-	2,000,000,000					
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68,549,937,238.00	26,304,347,775.00	53,011,211,346	71,585,868,051.04	13,310,214,640	21,419,280,171.00	22,778,321,000.00	24,311,640,500.00	28,580,763,000.00	28,654,000,000.00
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35,326,461,602.57	65,170,777,016.83	72,843,838,758	80,940,539,683.65	51,846,008,984	24,188,793,038.00	27,422,900,000.00	31,800,342,000.00	36,254,200,000.00	36,580,875,000.00
5:02:04	Belanja Jalan, Irigasi dan	80,833,932,839.00	103,172,346,821.18	103,137,296,907	62,832,477,443.00	104,032,920,911	64,172,776,237.00	65,566,700,000.00	70,488,200,000.00	76,340,000,000.00	76,850,923,000.00

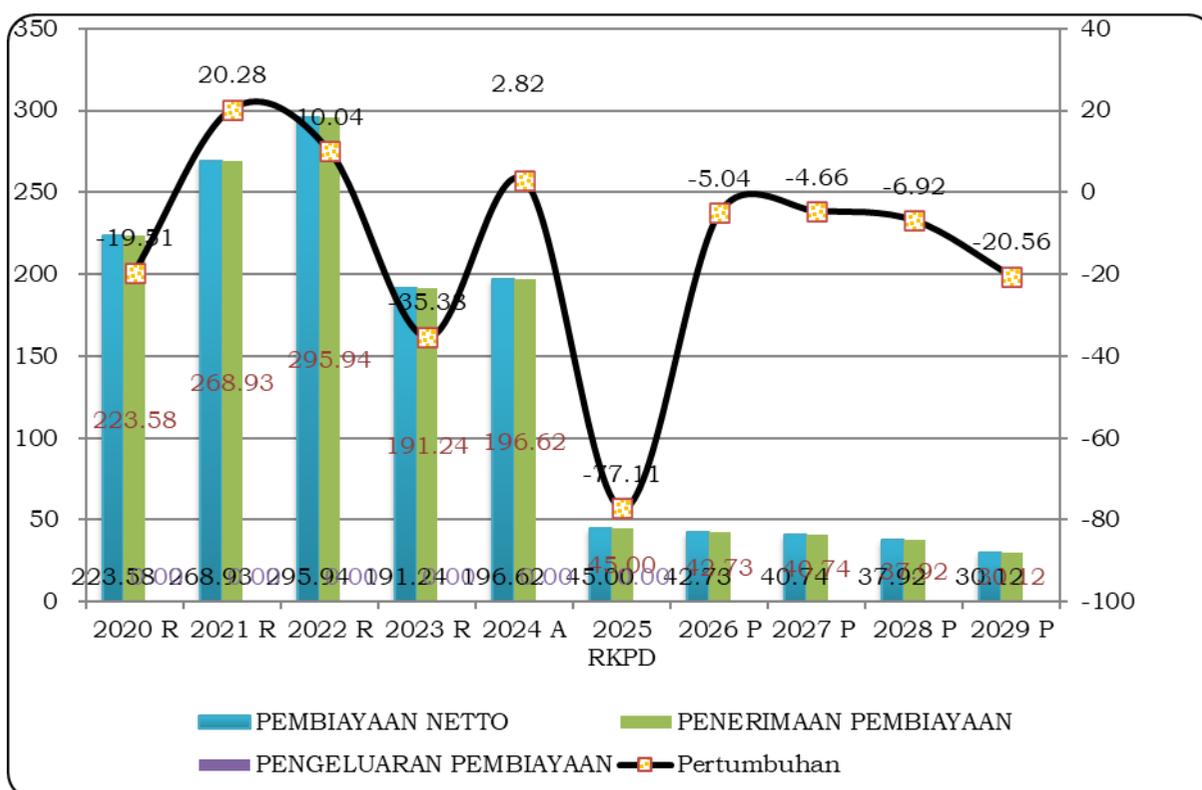


	Uraian	JUMLAH									
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
	r Ke Daerah Lain									-	
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	1,014,631,224,152.20	1,073,679,343,613.92	1,169,216,666,455.26	1,194,902,395,527.39	1,232,967,032,000.00	1,141,147,524,575.00	1,148,020,641,000.00	1,156,241,372,500.00	1,160,102,452,500.00	1,166,174,748,400.00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	44,994,357,259.12	27,003,485,516.94	-86,869,490,370.71	-77,292,825,293.92	-135,000,000,000.00	-45,000,000,000.00	-42,733,744,500.00	-40,741,444,500.00	-37,920,127,500.00	-30,123,652,400.00

Sumber: BKAD Kota Madiun, dan hasil proyeksi, 2024

### 3.2.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah meliputi komponen pembiayaan netto, pengeluaran pembiayaan, dan penerimaan pembiayaan. Berikut ini dipaparkan perkembangan belanja daerah Kota Madiun dari Tahun 2020-2029:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

**Gambar 3. 27 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2020-2029 (miliar Rupiah)**

Pertumbuhan penerimaan pembiayaan Kota Madiun mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2024, serta estimasi untuk Tahun 2020 dan 2029, terjadi penurunan dalam pembiayaan netto dan penerimaan pembiayaan. Informasi terperinci mengenai perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun dari Tahun 2019 hingga proyeksi Tahun 2029, dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 8 Rincian Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2026**

	Uraian	JUMLAH										
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
<b>3:01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>223,581,475,124.05</b>	<b>268,933,182,301.20</b>	<b>295,937,467,818.14</b>	<b>191,240,034,447.43</b>	<b>196,623,650,888.59</b>	<b>45,000,000,000.00</b>	<b>42,733,744,500.00</b>	<b>40,741,444,500.00</b>	<b>37,920,127,500.00</b>	<b>30,123,652,400.00</b>	<b>223,581,475,124.05</b>
3:01:01	Penggunaan SILPA	223,580,475,124.05	268,933,182,301.20	295,936,667,818.14	191,238,836,447.43	196,623,650,888.59	45,000,000,000.00	42,733,744,500.00	40,741,444,500.00	37,920,127,500.00	30,123,652,400.00	223,580,475,124.05
3:01:02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:01:03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:01:04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1000,000	0	800,000	1,198,000.00	-	-	-	-	-	-	1000,000
<b>3:02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,741,444,500.00</b>	<b>37,920,127,500.00</b>	<b>30,123,652,400.00</b>	<b>-</b>
3:02:01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0				0
3:02:02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0				0
3:02:03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0	0				0
3:02:04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0				0

	Uraian	JUMLAH										
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 A	2025 RKPD	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>223,581,475,124.05</b>	<b>268,933,182,301.20</b>	<b>295,937,467,818.14</b>	<b>191,240,034,447.43</b>	<b>196,623,650,888.59</b>	<b>45,000,000,000.00</b>	<b>42,733,744,500.00</b>	<b>40,741,444,500.00</b>	<b>37,920,127,500.00</b>	<b>30,123,652,400.00</b>	<b>223,581,475,124.05</b>
<b>3:03</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>268,575,832,383.17</b>	<b>295,936,667,818.14</b>	<b>209,067,977,447.43</b>	<b>113,947,209,153.51</b>	<b>61,623,650,888.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,575,832,383.17</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun dan Hasil proyeksi, 2023

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bagian ini menguraikan masalah strategis pembangunan Kota Madiun untuk periode 2025-2029 yang berkaitan dengan masalah utama pembangunan Kota Madiun. Isu-isu strategis ini dibuat berdasarkan komponen dari analisis hasil pembangunan periode sebelumnya, analisis RPJPN Tahun 2025-2045, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2045, dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun 2025-2045.

#### **4.1 Permasalahan**

##### **4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Pembangunan di tingkat daerah merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, perhatian khusus terhadap isu-isu yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan sangat penting. Analisis mendalam mengenai berbagai rintangan yang dihadapi oleh daerah menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan tentang masalah-masalah daerah yang berkaitan dengan prioritas dan tujuan pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, beberapa masalah utama yang menjadi fokus pembangunan daerah Kota Madiun untuk lima Tahun ke depan 2025 - 2029 antara lain:

##### **A. Permasalahan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas global**

Pembangunan sumber daya manusia ditentukan oleh aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang mana berhubungan dengan standar hidup layak yang kemudian disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Skor IPM Kota Madiun per Tahun 2023 mencapai angka 83,71. IPM Kota Madiun terus menunjukkan tren yang mengalami peningkatan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023. IPM Kota Madiun sampai Tahun 2023 merupakan tertinggi ketiga di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber

daya manusia Kota Madiun sudah baik namun perlu di tingkatkan untuk berdaya saing global.

Namun, pembangunan manusia di Kota Madiun masih mengalami permasalahan seperti:

1. Angka Melek Huruf di usia produktif yang masih belum maksimal 100%, dimana pada Tahun 2023 sendiri masih menunjukkan angka 99,43% sehingga masih perlu dioptimalkan;
2. Masih terdapat kasus balita kurang gizi dan stunting. Pada Tahun 2023 sendiri, jumlah balita dengan status gizi kurang sebanyak 628 Balita meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang sebanyak 536 Balita.
3. Masih belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan, terkait dengan proporsi guru PAUD dengan kualifikasi minimal S1/D IV masih 94,71 dan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B sebanyak 91,03
4. Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi masih sebanyak 21,14% pada Tahun 2023 sehingga membutuhkan peningkatan tingkat pendidikan tinggi.

#### **B. Permasalahan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**

Kota Madiun, sebagai salah satu kota penting di Provinsi Jawa Timur, menghadapi berbagai tantangan dalam membangun daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu diidentifikasi dan di atasi secara komprehensif antara lain:

1. Kontribusi sektor perdagangan jasa dan industri pengolahan terhadap PDRB yang cenderung stagnan;
2. Laju inflasi Kota Madiun yang rawan berfluktuasi, dimana kondisi inflasi Kota Madiun dalam kurun waktu lima Tahun terakhir antara  $2 \pm 1$  sampai dengan  $5 \pm 1$ ;
3. Iklim investasi yang masih kurang berdaya saing, dengan realisasi investasi Tahun 2019 sebesar 968,7 Milyar dan Tahun 2023 sebesar 230 Miliar;
4. Jumlah pasar yang sudah berstandar masih terbatas;
5. Kualitas industri dan UMKM yang masih belum optimal;

6. Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu dioptimalkan, dimana realisasi PAD Tahun 2023 sebesar 264,207 Miliar dengan tingkat desentralisasi fiskal masih di bawah 30 persen;
7. Ketimpangan pendapatan yang semakin melebar dengan nilai indeks Gini terus mengalami peningkatan dalam 5 Tahun terakhir. Tahun 2019 sebesar 0,347 dan Tahun 2023 sebesar 0,416; dan
8. Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan (ekonomi hijau) masih rendah.

### **C. Permasalahan Tata Kelola dan Pemerintahan**

Terdapat beberapa permasalahan tata kelola pemerintahan yang dihadapi oleh Kota Madiun, yang mana juga menjadi hambatan bagi upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

1. Nilai SPBE Kota Madiun masih sebesar 4,45 dari nilai maksimal 5. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi dilakukannya optimalisasi transformasi digital dalam pelaksanaan pemerintahan Kota Madiun.
2. Capaian kinerja penegakan Perda dan Perkada telah menunjukkan angka 100 persen, tetapi masih diperlukan upaya yang baik dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan Kota Madiun.

### **D. Permasalahan Lingkungan Hidup**

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan daerah dalam mengatasi bencana alam adalah hal yang sangat penting. Tekanan pada lingkungan semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan perubahan iklim. Penurunan kualitas lingkungan hidup sangat berkaitan dengan meningkatnya kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi, yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana menjadi aspek krusial untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Beberapa masalah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan dan ketersediaan RTH publik yang masih kurang optimal. Dimana kualitas kinerja

infrastruktur memiliki capaian sebesar 98,44 per Tahun 2023 dan prosentase RTH publik masih sebesar 18,87 persen;

2. Adanya potensi bencana di Kota Madiun yang memiliki kategori resiko sedang;
3. Kualitas air dan kualitas udara yang masih belum optimal, dimana capaian IKA dan IKU masing -masing sebesar 51,43 dan 87,94; dan
4. Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih belum optimal. Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sanitasi aman sebesar 99,85.

#### **4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

##### **4.1.2.1 Urusan Wajib Dasar**

###### 1) Pendidikan

- Angka Melek Huruf di usia produktif belum 100 %. Angka Melek huruf usia produktif Tahun 2023 sebesar 99,43%.
- Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan. SPM terkait proporsi guru PAUD dengan kualifikasi minimal S1/DIV masih 94,71 dan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B sebanyak 91,03.
- Nilai indeks literasi digital sebesar 3,45 dari nilai maksimum 5.
- Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi. Tahun 2023, persentase penduduk usia produktif yang berpendidikan tinggi sebesar 21,14 % .

###### 2) Kesehatan

- Masih terdapat kasus balita gizi kurang dan stunting. Tahun 2023 jumlah balita dengan status gizi kurang sebanyak 628 balita meningkat dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 536 balita. Untuk balita stunting pada Tahun 2023 sebanyak 324 balita dengan Kecamatan Taman paling banyak kasus balita stunting, yaitu sebanyak 123 balita.
- Masih terdapat ibu hamil KEK dan anemia. Tahun 2022 terdapat sebanyak 474 ibu hamil KEK dan anemia.
- Angka Kematian Ibu dan Bayi belum sesuai target yang ditetapkan, masih terdapat kematian Ibu dan Bayi pada Tahun 2022.

###### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal. Capaian kinerja infrastruktur Tahun 2023 sebesar 98,44.

- Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan
  - Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH publik. Prosentase RTH publik masih sebesar 18,87 %.
  - Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi perlu ditingkatkan.
- 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni. Capaian rumah layak huni Tahun 2023 sebesar 99,72.
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Meskipun capaian kinerja penegakan Perda dan Perkada telah 100%, namun untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, maka perlu dipertahankan.

#### **4.1.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### 1) Ketenagakerjaan

- Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi. TPT Kota Madiun dalam 4 Tahun terakhir di atas TPT Provinsi Jawa Timur. Tahun 2020, TPT Kota Madiun sebesar 8,32 dan TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 5,84. Tahun 2023, TPT Kota Madiun sebesar 5,85 dan TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,88.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan. Dalam 5 Tahun terakhir TPAK Kota Madiun masih di bawah TPAK Provinsi Jawa Timur. Tahun 2019 dan Tahun 2023 TPAK Kota Madiun sebesar 66,86 dan 69,29 dan TPAK Provinsi Jawa Timur sebesar 69,81. dan 72,56.

##### 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang.

##### 3) Pangan

- Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal. Tahun 2023 capaian skor PPH sebesar 96,4.
- Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal. Tahun 2022 tingkat konsumsi makan ikan sebesar 16,9 kg/kapita/Tahun. Tingkat konsumsi ikan minimal 54,5 kg/kapita/Tahun.

##### 4) Lingkungan Hidup

- Kota Madiun masih berpotensi bencana dan termasuk dalam kategori resiko sedang.

- Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal. Capaian IKA dan IKU sebesar 51,43 dan 87,94.
  - Pengelolaan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah. Prosentase sampah yang ditangani dibandingkan produksi sampah sebesar 72,1 %.
  - Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih belum optimal. Prosentase rumah tangga yang memiliki akses Sanitasi aman sebesar 99,85.
- 5) Perhubungan
- Kota Madiun belum memiliki angkutan umum berbasis BTS.
- 6) Penanaman Modal
- Iklim investasi yang berdaya saing masih perlu ditingkatkan. Dengan realisasi investasi Tahun 2019 sebesar 968,7 Milyar dan Tahun 2023 sebesar 230 Milyar
- 7) Kebudayaan
- Pelestarian seni, budaya dan sejarah belum optimal
- 8) Perpustakaan
- Minat Baca Masyarakat masih belum optimal dengan capaian indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 18,44, termasuk kategori sedang.

#### **4.1.2.3 Urusan Pilihan**

- 1) Pariwisata
- Peningkatan kualitas pariwisata daerah sesuai dengan rencana pengembangan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun.
- 2) Pertanian
- Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan. Nilai NTP Kota Madiun berkisar antara 101 - 105 %.
- 3) Perdagangan
- Dalam lima Tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan jasa terhadap PDRB cenderung stagnan, yaitu sebesar 49 %.
  - Jumlah pasar yang sudah berstandar = 0
- 4) Perindustrian
- Kualitas industri kecil belum optimal.

#### **4.1.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) Keuangan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan. Realisasi PAD Tahun 2023 sebesar 264,207 Milyar.

2) Sekretariat Daerah

- Nilai indeks SPBE Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 4,45 dari nilai maksimum 5.

#### **4.2 Isu strategis**

Dalam menentukan arah kebijakan masa depan dibutuhkan perhatian terhadap isu strategis. Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal, sebagaimana ditunjukkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu strategis didasarkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang telah dan akan terjadi, termasuk yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang isu-isu yang menjadi fokus dan prioritas penanganan dalam lima Tahun ke depan hingga berakhirnya periode perencanaan jangka menengah karena dampaknya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat.

Isu-isu strategis adalah isu-isu yang diprioritaskan sedemikian rupa sehingga prospek pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima Tahun sisa pelaksanaan lebih besar dan pasti. Jika isu strategis tidak diperhatikan, maka tujuan dan sasaran akan semakin sulit dicapai, dan jika tidak diantisipasi maka berdampak terhadap kerugian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penetapan isu-isu strategis pembangunan Kota Madiun berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal berupa permasalahan/agenda/aspek yang menjadi isu berpengaruh luas di tingkat internasional, nasional, dan regional. Selain itu, dilakukan analisis terhadap lingkungan internal berupa permasalahan pembangunan yang perlu ditangani selama lima Tahun ke depan. Berikut isu-isu internasional, nasional, regional, dan permasalahan internal yang berdampak besar terhadap pembangunan Kota Madiun.

##### **4.2.1 Isu Internasional**

Megatren global menjadi isu yang penting dalam 20 Tahun ke depan meliputi perubahan iklim, perubahan teknologi terutama digitalisasi, pergeseran demografi, serta perubahan geopolitik dan geoekonomi akan merubah paradigma pembangunan global,

mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta meningkatnya penggunaan sistem keuangan digital. Dari sisi geopolitik dan geoekonomi meliputi eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan seperti kenaikan nilai output negara berkembang yang mencapai persen. Selain itu, demografi global juga akan bergeser yang ditandai dengan jumlah penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat, terutama di kawasan Asia yang mencapai 55 persen.

Disrupsi teknologi semakin menguat dan akan menggantikan 40 persen pekerjaan saat ini. Peran perdagangan internasional akan tumbuh 3,4 persen per Tahun. Fenomena urbanisasi dunia didorong penduduk perkotaan mencapai 65 persen yang berperan terhadap 70 persen PDB. Perkembangan bidang luar angkasa mendorong sektor ekonomi, kelestarian, dan keamanan antariksa.

Keuangan internasional akan mengalami pergeseran dari Dollar AS menjadi *multi currencies*. Selanjutnya, perubahan iklim semakin menantang ditandai dengan peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana. Sementara itu, meningkatnya peran ekonomi Asia dan jumlah penduduk Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam. Jumlah penduduk kelas menengah yang terus tumbuh mencapai lebih dari 90 persen atau 8,8 miliar jumlah penduduk dunia.



**Gambar 4. 1 Megatren Global 2045**  
 Sumber: Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

#### 4.2.2 Isu Nasional

Isu Nasional bersumber dari dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJPN Tahun 2025-2029.

##### 4.2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menjadi pedoman isu strategis pembangunan daerah. Isu Strategis Nasional sesuai dengan RPJPN 2025-2045 meliputi 14 isu yaitu:

**Tabel 4. 1 Isu Strategis Pembangunan Nasional dan Tantangan Pembangunan**

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	a. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai

<b>Isu Strategis Nasional</b>	<b>Tantangan Pembangunan</b>
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;	Belum optimalnya pemanfaatan ekonomi laut
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas;	<p>a. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas</p> <p>b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi</p>
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 2022 masih relatif tertinggal;	<p>a. Kualitas Pendidikan yang masih rendah</p> <p>b. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah</p>
9. Demokratisasi belum optimal	Demokrasi masih terbatas pada hal hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya</li> <li>c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.</li> </ul>
<p>11. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan</li> <li>b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</li> <li>c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</li> <li>d. Tantangan Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi</li> </ul>
<p>12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.</li> <li>b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif</li> <li>c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif</li> <li>d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D</li> <li>e. ASN berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik</li> <li>f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik</li> </ul>

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	<p>g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan Masyarakat</p> <p>h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan Pembangunan</p> <p>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</p> <p>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan Pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.</p> <p>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas</p>
<p>13. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;</p>	<p>a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas</p> <p>b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.</p>
<p>14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah</p>	<p>a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan</p> <p>b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik</p> <p>c. Partisipasi Masyarakat sipil dalam Pembangunan dan demokratisasi belum optimal</p> <p>d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama demokrasi masih terbatas pada hal-</p>

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	<p>hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan</p> <p>e. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan</p> <p>f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar Pembangunan Masyarakat.</p>

Sumber: RPJPN Tahun 2025 - 2045

#### **4.2.2.2 Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029**

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Maka, perencanaan pembangunan daerah wajib memperhatikan rencana pembangunan nasional. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2025-2045, sasaran periode pertama yaitu Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema dan Arah Pembangunan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029:

1. Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif,

digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:** Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:** Memperkuat ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan.



**Gambar 4. 2 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029**  
Sumber: RPJPN Tahun 2025 - 2045

#### 4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, meliputi:

**A. Pemulihan dan Pemanjapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan, serta menjamin tercapainya pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.**

Beberapa Alternatif Strategi Pemulihan Ekonomi diantaranya:

1. Stimulus Ekonomi:

- Penggunaan stimulus ekonomi sebagai bagian dari paket stimulus keuangan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi;
- Stimulus dapat berupa penurunan pajak, bantuan keuangan, atau program pembangunan infrastruktur.

## 2. Meningkatkan Investasi

- Meningkatkan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan teknologi.
- Investasi juga dapat dilakukan dalam proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi.

## 3. Mengembangkan Industri Unggulan

- Mengembangkan industri unggulan seperti farmasi, bioteknologi, dan teknologi informasi.
- Industri-institusi dapat mendapat bantuan keuangan dan dukungan untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas.

## 4. Meningkatkan Konsumsi Dalam Negeri

- Meningkatkan konsumsi domestik dengan memberikan insentif kepada pelanggan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- Program-program penjualan dan promosi dapat dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

## 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Program-program pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja masyarakat.

## 6. Mengembangkan *E-commerce*

- Mengembangkan e-commerce sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan konsumsi dan penjualan.
- *E-commerce* dapat membantu meningkatkan kemampuan konsumen untuk belanja *online* dan mendapatkan produk secara efektif.

## 7. Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, bank, perusahaan, dan masyarakat.

- Koordinasi dan kolaborasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menghadapi situasi pandemi.

#### 8. Mengembangkan Inovasi

- Mengembangkan inovasi dalam berbagai sektor seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan.
- Inovasi dapat membantu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Strategi pemulihan ekonomi haruslah berbasis pada stimulasi ekonomi, meningkatkan investasi, mengembangkan industri unggulan, meningkatkan konsumsi domestik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan e-commerce, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, serta mengembangkan inovasi.

**B. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses jaringan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan kemiskinan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.**

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu adanya strategi penanganan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Berikut beberapa strategi penanganan kemiskinan yang efektif yang dapat diterapkan di Provinsi Jawa Timur:

#### 1. Pengembangan Pekerjaan dan Pengupahan

- Meningkatkan peluang pekerjaan melalui program-program pekerjaan yang kompetitif dan menawarkan upah yang layak.
- Melaksanakan sistem pengupahan yang efektif melalui upaya-upaya untuk mensinergikannya antara Industri, UMKM dan Koperasi tanpa mematikan usaha-usaha kecil yang dirintis masyarakat.

## 2. Pendidikan dan Pelatihan

- Meningkatkan akses pendidikan terhadap masyarakat miskin melalui program-program beasiswa dan bantuan pendidikan.
- Meningkatkan pelatihan kerja melalui program-program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.

## 3. Kesehatan dan Gizi

- Meningkatkan akses kesehatan terhadap masyarakat miskin melalui program-program kesehatan primer dan promotif.
- Meningkatkan kualitas gizi melalui program-program penanggulangan gizi buruk.

## 4. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- Meningkatkan kemampuan UMKM melalui bantuan keuangan, pelatihan, dan teknologi.
- Meningkatkan akses UMKM terhadap pasar domestik dan internasional.

## 5. Program Bantuan Sosial

- Meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Iuran Tunai (BMT).
- Meningkatkan bantuan sosial kepada korban bencana alam, korban konflik, dan korban pandemi.

## 6. Pengembangan Infrastruktur

- Meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah miskin seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
- Meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah miskin dengan memperbaiki infrastruktur transportasi.

## 7. Pengembangan E-Komunikasi

- Meningkatkan akses e-komunikasi di daerah-daerah miskin melalui program-program pemasaran internet dan smartphone.
- Meningkatkan kemampuan e-komunikasi di UMKM melalui program-program digitalisasi.

## 8. Kolaborasi Antar Pihak

- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, LSM, swasta, masyarakat, akademisi, media dan pihak helix lainnya untuk mengatasi kemiskinan.
- Meningkatkan sinergi antar *helix* tersebut untuk meningkatkan pengembangan ekonomi daerah.

**C. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.**

Beberapa Alternatif Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Timur yang Efektif

1. Pendidikan dan Pelatihan

- Meningkatkan akses pendidikan terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan korban bencana.
- Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kompetensi.
- Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang profesional dan memiliki sertifikasi.

2. Peningkatan Mutu Guru

- Meningkatkan kompetensi guru dengan melalui pelatihan dan pengembangan kurikulum yang efektif.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya guru sebagai sumber belajar dengan edukasi dan kampanye.

3. Peningkatan Akses ke Pendidikan

- Meningkatkan akses ke pendidikan dengan melalui pengembangan infrastruktur dan program-program pemerintah.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses pendidikan dengan edukasi dan kampanye.

4. Pengembangan Kurikulum yang Efektif

- Meningkatkan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kurikulum yang efektif dengan edukasi dan kampanye.

5. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana

- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah dan peralatan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarana prasarana pendidikan dengan edukasi dan kampanye.

6. Pengembangan Karakter

- Meningkatkan pengembangan karakter melalui program-program pembinaan karakter dan nilai-nilai sosial.

- Meningkatkan kemampuan kerja melalui karakter seperti integritas, disiplin, dan kesadaran tanggung jawab.
- Meningkatkan akses pengembangan karakter untuk masyarakat miskin dan korban bencana.

#### 7. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Disabilitas

- Meningkatkan akses sumber daya manusia dengan disabilitas melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.
- Meningkatkan kemampuan kerja sumber daya manusia dengan disabilitas melalui pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi.
- Meningkatkan akses pengembangan sumber daya manusia dengan disabilitas untuk masyarakat miskin dan korban bencana.

#### 8. Peningkatan Akses ke Pelayanan Kesehatan

- Meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dengan melalui pengembangan infrastruktur dan program-program pemerintah.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan dengan edukasi dan kampanye.

#### 9. Pencegahan Penyakit

- Meningkatkan program-program pencegahan penyakit, seperti vaksinasi dan promosi kesehatan, untuk mengurangi jumlah kasus penyakit.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit dengan edukasi dan kampanye.

#### 10. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan melalui pengembangan kompetensi tenaga medis dan non-medis.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas layanan kesehatan dengan edukasi dan kampanye.

#### 11. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

- Meningkatkan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem informasi kesehatan dengan edukasi dan kampanye.

## 12. Pengembangan Sistem Pendidikan Kesehatan

- Meningkatkan pengembangan sistem pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan dengan edukasi dan kampanye.

## 13. Kemitraan dan Kolaborasi

- Meningkatkan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, seperti LSM dan korporasi, akademisi, media dan pihak lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk mengembangkan program-program sektor pendidikan dan kesehatan yang efektif.

## 14. Pengawasan, Evaluasi, Literasi dan Kampanye

- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kegiatan sektor pendidikan dan kesehatan dengan melalui program-program monitoring dan evaluasi.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan evaluasi dengan edukasi dan kampanye.

### **D. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi.**

Beberapa Alternatif Strategi Tata Kelola Kepemerintahan/Governansi dan Kepemimpinan yang Efektif untuk Provinsi Jawa Timur.

#### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya.
- Meningkatkan akuntabilitas dengan melalui penggunaan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif.

#### 2. Partisipasi Masyarakat

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui komunikasi dan konsultasi yang aktif.
- pengelolaan kelembagaan melalui program-program partisipatif.

### 3. Pengembangan Profesionalitas

- Meningkatkan profesionalitas pegawai dengan pelatihan dan pengembangan karier yang terencana.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan kelembagaan melalui program-program pengembangan kompetensi.

### 4. Pengembangan Organisasi

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi dengan mengoptimalkan struktur organisasi dan tugas-tugas.
- Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan dengan mengembangkan budaya organisasi yang kuat.

### 5. Kemitraan dan Kolaborasi

- Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan institusi lainnya, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, media, organisasi masyarakat, LSM, BUMN dan stakeholder lainnya.

### 6. Pengembangan Teknologi Informasi

- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi dengan pelatihan yang tepat.

### 7. Kepemimpinan Inspiratif

- Meningkatkan kepemimpinan inspiratif dengan memimpin oleh contoh perilaku yang baik
- Meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya perannya dalam meningkatkan kualitas pemerintahan.

## **E. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan bencana alam dengan mengutamakan keberlanjutan triple bottom line (ekonomi hijau, sosial dan lingkungan)**

Beberapa Alternatif Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana Alam yang Efektif di Jawa Timur

### 1. Penyelamatan dan Pemulihan Lahan Gambut

- Meningkatkan perlindungan dan pemulihan lahan gambut sebagai sumber daya alam yang penting untuk lingkungan hidup.

- Melakukan rehabilitasi lahan gambut yang telah rusak dan mengembangkan program-program reforestasi.

## 2. Pengelolaan Sampah

- Meningkatkan pengelolaan sampah dengan melalui program-program pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan kembali.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dengan edukasi dan kampanye.

## 3. Konservasi Sumber Daya Alam

- Meningkatkan konservasi sumber daya alam, seperti air, tanah, dan hutan, dengan melalui program-program konservasi dan rehabilitasi.
- Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam.

## 4. Pengelolaan Air

- Meningkatkan pengelolaan air dengan melalui program-program pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan air yang efektif.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air dengan edukasi dan kampanye.

## 5. Pengembangan Lingkungan Pedesaan

- Meningkatkan pengembangan lingkungan pedesaan dengan melalui program-program peningkatan infrastruktur, jaringan air, dan sanitasi.
- Melakukan rehabilitasi lingkungan pedesaan yang telah rusak dan mengembangkan program-program peningkatan kesadaran masyarakat.

## 6. Kemitraan dan Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

- Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, seperti LSM, korporasi, perguruan tinggi, media dan pihak lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk mengembangkan program-program lingkungan hidup yang efektif.

#### 7. Penggunaan Teknologi Lingkungan

- Meningkatkan penggunaan teknologi lingkungan, seperti sistem monitoring dan evaluasi lingkungan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lingkungan hidup.
- Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

#### 8. *Early Warning System* (EWS)

- Meningkatkan kemampuan EWS dengan melalui pengembangan teknologi dan infrastruktur yang efektif.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya EWS dengan edukasi dan kampanye.

#### 9. Evakuasi dan Pengungsian

- Meningkatkan keefektifan evakuasi dan pengungsian dengan melalui program- program penyiapan bencana alam.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya evakuasi dan pengungsian dengan edukasi dan kampanye.

#### 10. Penyediaan Sumber Daya

- Meningkatkan penyediaan sumber daya, seperti air, makanan, dan obat-obatan, untuk korban bencana alam.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyediaan sumber daya dengan edukasi dan kampanye.

#### 11. Pembangunan Kawasan Resilien

- Meningkatkan pembangunan kawasan resiliensi dengan melalui program-program peningkatan infrastruktur dan ekosistem.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan kawasan resiliensi dengan edukasi dan kampanye.

#### 12. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana alam dengan melalui program-program monitoring dan evaluasi.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan evaluasi dengan edukasi dan kampanye.

#### **4.2.4 Isu Strategis Kota Madiun**

Berdasarkan isu-isu strategis di level internasional, nasional, Provinsi Jawa Timur, telaah terhadap dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043, permasalahan di Kota Madiun, maka dapat dirumuskan 6 (enam) isu strategis Kota Madiun.

##### **A. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan berkualitas internasional melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi aspek krusial dalam perencanaan pembangunan. Kota Madiun memahami bahwa di era globalisasi, keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas SDM yang mampu bersaing secara internasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan akan difokuskan pada pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan penguasaan IPTEK, termasuk peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga akan ditingkatkan untuk mendukung SDM yang tangguh dan siap bersaing di tingkat global.

Selain itu, penguasaan IPTEK akan menjadi landasan utama untuk menggerakkan sektor industri dan ekonomi Kota Madiun. Melalui peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, penerapan inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, Kota Madiun berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan wirausaha dan industri berbasis IPTEK. Dengan demikian, kualitas SDM yang kompetitif dan berkualitas internasional dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun menuju Tahun 2045. Dalam konteks strategi pengembangan jangka pendek, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan.

Untuk meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK, berikut adalah beberapa alternatif strategi yang bisa diterapkan:

1. Aspek pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kota Madiun dilakukan melalui strategi :

- Mengembangkan dan memperluas program *STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)* di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
- Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru dalam penggunaan teknologi dan metode pengajaran inovatif.
- Mendirikan pusat pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan siswa dan tenaga kerja di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.
- Meningkatkan infrastruktur digital di sekolah dan institusi pendidikan, termasuk komputer, akses internet, dan perangkat lunak.
- Mengembangkan perpustakaan digital yang menyediakan akses ke sumber daya pendidikan berbasis IPTEK.
- Menjalin kerjasama dengan industri untuk menyediakan program magang dan pelatihan kerja bagi siswa dan mahasiswa.
- Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di institusi pendidikan tinggi terkemuka.
- Mengadakan program pertukaran pelajar dengan institusi pendidikan internasional untuk meningkatkan wawasan global.

2. Aspek Kesehatan melalui strategi :

- Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi medis terbaru.
- Sertifikasi Profesional untuk tenaga kesehatan yang diakui secara internasional.
- Meningkatkan penggunaan *telemedicine* untuk menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
- Mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan.
- Menjalin kerjasama dengan institusi riset dan universitas dalam penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- Melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit.

- Mengintegrasikan edukasi kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan kesadaran kesehatan sejak dini.
- Meningkatkan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat berstandar global.
- Meningkatkan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan.

3. Meningkatkan Literasi Digital melalui strategi :

- Menyediakan pelatihan literasi digital untuk siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi.
- Menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya digital untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk *e-learning* dan aplikasi kesehatan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Kota Madiun dapat meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu bersaing secara internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan IPTEK.

**B. Peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**

Kota Madiun menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan produktif untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang muncul meliputi perluasan sektor perdagangan dan jasa, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan promosi pariwisata kota, serta pendorong ekonomi kreatif. Isu utama yang perlu di atasi adalah ketidakmerataan inklusivitas pembangunan ekonomi, di mana sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai. Selain itu, peningkatan produktivitas UMKM memerlukan dukungan dalam hal akses modal, pelatihan, dan strategi pemasaran yang efektif. Pengembangan sektor pariwisata membutuhkan strategi yang terkoordinasi untuk meningkatkan daya tarik dan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan inovatif dan berkelanjutan perlu didorong melalui kebijakan yang mendukung serta insentif yang mendorong inovasi dan kreativitas. Keseluruhan, penyelesaian permasalahan dan isu strategis ini

memerlukan pendekatan holistik dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kota Madiun.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Madiun dalam jangka menengah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

#### 1. Penguatan Infrastruktur Ekonomi

- Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, listrik, dan air untuk mendukung aktivitas ekonomi.
- Memperluas akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh kota untuk mendukung ekonomi digital dan inovasi.
- Meningkatkan sistem transportasi dan logistik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

#### 2. Pengembangan Sektor Unggulan

- *Urban Farming* Berkelanjutan melalui pengembangan sektor pertanian perkotaan dengan praktik berkelanjutan, teknologi modern, dan diversifikasi produk.
- Industri Kreatif dan Pariwisata dengan mendorong pengembangan industri kreatif dan pariwisata untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan lokal.
- Mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan teknologi dengan memberikan insentif dan mendukung inovasi.

#### 3. Dukungan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

- Meningkatkan Akses ke Pembiayaan kreatif bagi UMKM.
- Meningkatkan pelatihan dan bimbingan UMKM dalam manajemen, pemasaran, dan teknologi.
- Meningkatkan fasilitasi UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas melalui pameran, platform e-commerce, dan kerjasama dengan perusahaan besar.

#### 4. Inklusi Ekonomi

- Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas kurang mampu dan kelompok rentan.
- Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dengan memberikan pelatihan, akses ke pembiayaan, dan peluang kerja.

- Pembangunan Berbasis Masyarakat melalui melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan manfaat yang inklusif.

#### 5. Penerapan Teknologi dan Inovasi

- Meningkatkan implementasi inisiatif kota pintar (*smart city*) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup.
- Meningkatkan inkubator bisnis dan pusat inovasi untuk mendukung startup dan usaha baru dalam mengembangkan produk dan layanan inovatif.
- Mendorong kegiatan riset dan pengembangan (RdanD) untuk menciptakan solusi inovatif dalam berbagai sektor.

#### 6. Pembangunan Berkelanjutan

- Menerapkan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang baik untuk memastikan kelestarian sumber daya alam.
- Mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam aktivitas ekonomi dan rumah tangga.
- Mengembangkan infrastruktur hijau seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan air yang ramah lingkungan.

#### 7. Kerjasama dan Kolaborasi

- Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi.
- Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain untuk mengembangkan potensi ekonomi regional dan mengatasi tantangan bersama.
- Membangun hubungan dengan mitra internasional untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan pasar baru.

### **C. Peningkatan kualitas modal sosial dan harmonisasi masyarakat**

Penting untuk memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak sebagai bagian integral dalam mencapai ketahanan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu diberikan perhatian khusus untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan

inklusivitas sehingga semua segmen masyarakat dapat mengalami manfaat pembangunan secara adil.

Modal sosial menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan mengembangkan kolaborasi antara warga, lembaga, dan pemerintah. Upaya ini mencakup penguatan jaringan komunitas, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks budaya berkelanjutan, RPJPD mendorong pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal sambil mendorong inovasi dan kreativitas yang memperkuat identitas kota.

Dalam jangka menengah, beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah

1. Pemberdayaan Komunitas

- Memperkuat Kepemimpinan Komunitas melalui pelatihan kepemimpinan untuk pemimpin komunitas guna meningkatkan keterampilan manajerial dan kemampuan mereka dalam membangun dan memelihara hubungan harmonis.
- Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan melalui inisiatif partisipatif seperti musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan dan konsultasi publik.

2. Promosi Kerukunan dan Toleransi

- Mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya.
- Melakukan kampanye yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan persatuan melalui media sosial, radio, dan acara komunitas.
- Mengadakan festival budaya Tahunan yang menampilkan keragaman budaya lokal untuk mempererat hubungan antar kelompok masyarakat.

3. Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Sosial

- Mengembangkan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas.
- Inkubator Bisnis Sosial untuk mendukung kewirausahaan sosial dan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif.

4. Pembangunan Infrastruktur Sosial
  - Memperluas pusat kegiatan masyarakat di berbagai wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, dan olahraga.
  - Mengembangkan ruang terbuka hijau seperti taman kota dan lapangan olahraga untuk mendorong interaksi sosial dan rekreasi.
5. Penggunaan Teknologi untuk Pemberdayaan Sosial
  - Membangun sistem informasi yang mengintegrasikan data sosial untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program sosial.
  - Meningkatkan pelatihan literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi.
6. Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Positif
  - Meluncurkan kampanye yang mempromosikan nilai-nilai kesopanan, kepedulian, dan solidaritas antar warga.
  - Mengintegrasikan edukasi karakter dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini.
  - Memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial.
  - Meningkatkan jumlah penghargaan untuk inisiatif-inisiatif sosial yang sukses dan inspiratif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

#### **D. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis *Smart dan World Class Government***

Salah satu tantangan utama adalah efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk sistem administrasi publik, kebijakan, dan pelayanan masyarakat yang terkait. Kelemahan dalam bidang ini dapat menghambat efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan inovasi berbasis *smart city* dan pemerintahan kelas dunia membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, yang mungkin terbatas oleh keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi. Tantangan lainnya mencakup keamanan data dan privasi, terutama dalam pengelolaan informasi dan layanan digital yang melibatkan data sensitif masyarakat.

Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan. Namun, upaya untuk memastikan partisipasi yang merata dan inklusif bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis ini sangat penting untuk merancang serta melaksanakan kebijakan dan strategi yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendorong inovasi berbasis smart city dan pemerintahan kelas dunia di Kota Madiun. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

- Meningkatkan pemanfaatan Portal Pemerintahan Terintegrasi yang menyediakan akses ke semua layanan publik secara terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.
- Meluncurkan inisiatif open data untuk memungkinkan publik mengakses data pemerintah secara transparan, mendukung akuntabilitas dan partisipasi warga.
- Meningkatkan dan mengembangkan *dashboard* kinerja pemerintah yang dapat diakses publik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja semua instansi pemerintahan secara *real-time*.

2. Digitalisasi Layanan Publik

- Meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah untuk mendukung digitalisasi layanan publik dan meningkatkan akses internet bagi warga.
- Mengembangkan *data center* pemerintah yang aman dan handal untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan data.
- Mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan pemerintah yang memudahkan warga mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja.
- Mengintegrasikan semua layanan publik dalam satu sistem layanan satu pintu untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan warga.

3. Pengembangan SDM Pemerintahan

- Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai pemerintah dalam teknologi dan manajemen modern melalui

sertifikasi kompetensi dan bimbingan teknis untuk memastikan standar kompetensi dan profesionalisme yang tinggi di kalangan aparatur pemerintah.

- Mengembangkan program kepemimpinan transformasional bagi aparatur yang berfokus pada inovasi, visi strategis, dan kemampuan adaptasi.

#### 4. Partisipasi Publik dan Keterlibatan Warga

- Mengembangkan aplikasi partisipasi publik yang memungkinkan warga memberikan masukan, suara, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- Menyelenggarakan forum konsultasi digital secara rutin untuk mendiskusikan isu-isu penting dengan warga.

#### 5. Inovasi dan Efisiensi Layanan Publik

- Membangun dan meningkatkan inkubator inovasi pemerintahan untuk mengembangkan solusi kreatif dalam layanan publik.
- Meningkatkan kemitraan dengan universitas, media masas, lembaga riset, dan industri untuk mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
- Menggunakan AI dan analitik big data untuk meningkatkan efisiensi, prediksi, dan pengambilan keputusan.
- Menerapkan teknologi IoT untuk memantau dan mengelola infrastruktur kota, seperti transportasi, energi, dan lingkungan.

#### 6. Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan yang Efektif

- Meningkatkan implementasi sistem SIPD untuk perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- Mengembangkan sistem *e-procurement* untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dan bebas dari korupsi.
- Mengembangkan sistem manajemen aset digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah.
- Menerapkan program efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam operasional pemerintahan.

### **E. Peningkatan mutu sarana infrastruktur perkotaan yang modern dan berkelanjutan**

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan di Kota Madiun merupakan tantangan serius dalam mendorong transformasi pembangunan. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kapasitas infrastruktur yang tersedia. Kota ini menghadapi tekanan signifikan terkait kepadatan penduduk, mobilitas, dan kebutuhan akan fasilitas yang lebih modern.

Selain itu, isu strategis yang mendominasi mencakup manajemen limbah perkotaan, keberlanjutan energi, dan pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi. Implementasi infrastruktur yang modern dan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang teliti, kolaborasi lintas sektor, serta investasi yang cerdas untuk menciptakan kota yang tidak hanya maju secara teknologi tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Untuk menyusun strategi peningkatan mutu sarana infrastruktur perkotaan di Kota Madiun yang lebih baik, kita perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah strategi yang lebih terintegrasi dan fokus pada pemanfaatan sumber daya lokal serta kebutuhan spesifik Kota Madiun:

1. Perbaikan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan Terpadu
  - Meningkatkan perbaikan jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan penting serta jalan sekunder di area padat penduduk.
  - Meningkatkan pemanfaatan teknologi pemantauan dan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi.
2. Peningkatan Sistem Drainase dan Penanganan Banjir
  - Meningkatkan kualitas saluran drainase yang ada di area rawan banjir. Integrasikan solusi seperti sumur resapan dan kolam retensi untuk mengelola aliran air hujan.
  - Revitalisasi aliran sungai dan saluran kecil untuk meningkatkan kapasitas drainase dan mengurangi risiko banjir.

3. Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur Ruang Terbuka Hijau
  - Revitalisasi Taman dan Ruang Publik dengan fasilitas baru seperti *jogging track*, area bermain anak, dan ruang berkumpul komunitas dengan mempertimbangkan penambahan tanaman lokal untuk meningkatkan estetika dan manfaat ekologis.
  - Pembangunan Ruang Terbuka Baru di area yang kurang memiliki akses ke ruang hijau.
4. Implementasi Teknologi Ramah Lingkungan dan *Smart City*
  - Mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas cerdas dan pemantauan kualitas udara untuk meningkatkan efisiensi kota
  - Menambahkan Energi Terbarukan dan Hemat Energi salah satunya melalui pemasangan panel surya di gedung-gedung publik dan ganti lampu jalan dengan LED hemat energi.
5. Peningkatan infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Kebersihan terpadu Berbasis Teknologi
  - Membangun fasilitas daur ulang yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti pemisah otomatis, penghancur, dan mesin sortasi berbasis sensor untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang.
  - Meningkatkan penggunaan teknologi Pengolahan Sampah Organik dengan menggunakan teknologi komposting terkontrol dan anaerobik untuk mengolah sampah organik menjadi kompos atau biogas.

#### **F. Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkesinambungan**

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Madiun menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis yang harus ditangani dengan hati-hati. Pertumbuhan perkotaan yang cepat, bersama dengan peningkatan aktivitas industri dan komersial, mengancam kualitas udara dan air. Tingginya tingkat polusi udara, serta peningkatan limbah industri, dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan. Selain itu, urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lahan, mengancam keberlanjutan ekosistem alami, dan mengurangi ruang terbuka hijau. Masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian

utama, mengingat pertumbuhan populasi yang signifikan dapat meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, isu strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Madiun melibatkan perluasan infrastruktur hijau, peningkatan efisiensi pengelolaan limbah, serta penerapan kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan.

Solusi holistik dan terpadu perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini, sejalan dengan komitmen menuju perkembangan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam jangka menengah untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan Sampah

- Efisiensi Pengelolaan Sampah; meningkatkan sistem pengelolaan sampah Kota Madiun dengan melaksanakan program-program pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
- Edukasi dan Kesadaran Publik; meningkatkan kesadaran masyarakat Madiun tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui kampanye edukasi yang inovatif dan program pelatihan di tingkat komunitas.

#### 2. Konservasi Sumber Daya Alam

- Memperkuat upaya konservasi sumber daya alam di Madiun dengan inisiatif yang fokus pada perlindungan air, tanah, dan ruang hijau, serta melaksanakan proyek rehabilitasi ekosistem yang berkelanjutan.
- Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan yang mendukung pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam, dengan melibatkan kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat.

#### 3. Pengelolaan Air

- Optimalisasi Pengelolaan Air di Kota Madiun melalui program efisiensi penggunaan, pengolahan air limbah, dan konservasi yang terintegrasi.
- Menyelenggarakan kampanye edukasi yang mendalam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air

yang berkelanjutan, dengan penekanan pada praktik sehari-hari yang dapat mengurangi pemborosan.

4. Pengembangan Lingkungan Perkotaan

- Memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan di Madiun dengan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, termasuk perbaikan sistem sanitasi dan jaringan air, serta penerapan desain berkelanjutan.
- Melaksanakan proyek rehabilitasi untuk mengatasi area yang rusak dan memperkenalkan program-program kesadaran publik untuk mendukung pemeliharaan lingkungan kota.

5. Kemitraan dan Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

- Meningkatkan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, akademisi, dan media di Kota Madiun untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan melalui kolaborasi yang terarah dan berbasis hasil.
- Mengembangkan dan melaksanakan inisiatif bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan program lingkungan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

6. Penggunaan Teknologi Lingkungan

- Meningkatkan penggunaan teknologi lingkungan di Kota Madiun, seperti sistem monitoring kualitas udara dan air, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan respons terhadap isu lingkungan.
- Mendukung penelitian dan penerapan teknologi baru yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan solusi berkelanjutan di tingkat lokal.

7. Sistem Peringatan Dini (EWS)

- Meningkatkan kapabilitas sistem peringatan dini di Madiun dengan memperkuat infrastruktur dan teknologi yang mendukung deteksi dan respons cepat terhadap potensi risiko lingkungan.
- Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem peringatan dini, serta memfasilitasi pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

#### 4.2.5 Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis Kota Madiun

Dalam konteks ini, keterkaitan antara permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Madiun dengan isu-isu strategis daerah menjadi sangat penting. Isu-isu ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan strategis yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai permasalahan daerah dan bagaimana permasalahan tersebut berkaitan dengan isu-isu strategis daerah menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut mengenai keterkaitan permasalahan daerah dengan isu strategis daerah tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Kota Madiun**

<b>ISU STRATEGIS RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD Tahun 2025 - 2029</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
<b>1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK</b>	Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi minimal S1/DIV.
	Ketersediaan sarana prasarana laboratorium sekolah masih terbatas
	Kualitas literasi siswa perlu ditingkatkan
	Belum optimalnya pemanfaatan internet untuk peningkatan literasi di masyarakat
	Minat Baca Masyarakat masih belum optimal
	Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi.
	Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat.
	Masih terbatasnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi
	Perlu ditingkatkannya kualitas SDM PSKS
	Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana fasilitas penunjang olahraga sesuai standar

	Masih ada Balita Kurang Gizi dan stunting
	Sarana dan prasarana perpustakaan belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan
	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan
	Pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN belum optimal
<b>2. Peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</b>	Kontribusi sektor primer dan sekunder terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan khususnya pasca Covid-19.
	Kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) belum optimal
	Iklim investasi yang berdaya saing masih perlu ditingkatkan
	Belum ada pasar yang sesuai standar
	Kualitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil belum optimal
	Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan
	Ketimpangan pendapatan semakin melebar
	Banyaknya produk industri kecil yang belum terstandardisasi
	Indeks daya saing daerah perlu ditingkatkan
	Fungsi Tera Ulang di Daerah dan Pasar Rakyat belum optimal
	Revitalisasi cagar budaya masih belum maksimal
	Belum ditetapkannya destinasi wisata
	Kurangannya penerapan sistem pertanian modern dalam produksi dan

	produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura
	Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi perlu ditingkatkan
	Kualitas pariwisata daerah masih belum optimal
	Kualitas pengelolaan Pasar Rakyat belum optimal
	Distribusi Barang Pokok dan Penting perlu dioptimalkan
	Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal
	Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan
	Angka Kecukupan Energi (AKE) belum mencapai target 100%
	Luas Lahan terbuka semakin berkurang
<b>3. Peningkatan kualitas modal sosial dan harmonisasi masyarakat</b>	Masih terdapat ibu hamil KEK dan anemia
	Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal
	Angka Kematian Ibu dan Bayi belum sesuai target yang ditetapkan
	Capaian indeks Keluarga Sehat masih perlu ditingkatkan
	Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang
	Masih terdapat masyarakat yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat.
	Masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan
	Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak
	TFR 1,85 terlalu rendah sehingga menyebabkan minus growth perlu upaya mewujudkan penduduk seimbang TFR < 2,1 dan NRR = 1

	Peran organisasi seni budaya masih belum optimal
	Pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara belum optimal
	Masih perlu ditingkatkannya kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan
	Peran FKUB dalam mencegah timbulnya konflik antar umat beragama masih perlu ditingkatkan
	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan
	Pelestarian seni, budaya dan sejarah belum optimal
	Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih belum optimal
	Indeks Ketahanan Daerah masih perlu ditingkatkan
	Kota Madiun masih berpotensi bencana
	Indeks Ketahanan Daerah masih perlu ditingkatkan
	Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan
<b>4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Smart dan World Class Government</b>	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tata kelola pemerintahan
	Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perangkat daerah perlu ditingkatkan
	Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan belum optimal

	Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun belum optimal
	Kualitas Auditor Manajemen Mutu dan Anti Penyipuan masih perlu ditingkatkan
	Inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan
	Peran Satu Data belum optimal
	Sertifikasi lahan milik pemerintah belum optimal
	Kualitas pelayanan masyarakat masih belum optimal
	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD perlu ditingkatkan
	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tata kelola pemerintahan
	Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perangkat daerah perlu ditingkatkan
	Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan belum optimal
	Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun belum optimal
	Kualitas Auditor Manajemen Mutu dan Anti Penyipuan masih perlu ditingkatkan
	Inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan
	Peran Satu Data belum optimal
	Sertifikasi lahan milik pemerintah belum optimal

	Kualitas pelayanan masyarakat masih belum optimal
	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD perlu ditingkatkan
<b>5. Peningkatan mutu sarana infrastruktur perkotaan yang modern dan berkelanjutan</b>	Tingginya penggunaan badan jalan untuk parkir
	Kinerja angkutan umum kurang
	Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis Buy The Service (BTS)
	Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal
	Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal
<b>6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkesinambungan</b>	Kondisi TPA yang sudah hampir penuh
	Lokasi Pembangunan TPS/TPST/TPS3R semakin terbatas
	Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal.
	Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.
	Pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan
	Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH publik
	Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni
	Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih belum optimal
	Indeks Ketahanan Daerah masih perlu ditingkatkan
	Kota Madiun masih berpotensi bencana

Sumber: Hasil Analisa, 2024

## BAB V REKOMENDASI

### 5.1 Sasaran Utama Visi Madiun Maju Mendunia : Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan

Visi Pembangunan Daerah Kota Madiun 2025-2045 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun adalah "Madiun Maju Mendunia: Kota Yang Berinovasi, Berbudaya, Dan Berkelanjutan". Visi ini disusun dengan cermat, dengan mempertimbangkan arah pembangunan nasional, arah pembangunan provinsi Jawa Timur, serta potensi dan tantangan yang dihadapi Kota Madiun. Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Madiun 2025-2045 telah menetapkan beberapa sasaran visi yang secara strategis diselaraskan dengan sasaran visi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta sasaran visi Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Sasaran visi tersebut mencakup indikator-indikator kunci pembangunan daerah, dengan target-target yang jelas dan terukur sampai Tahun 2045 sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut :

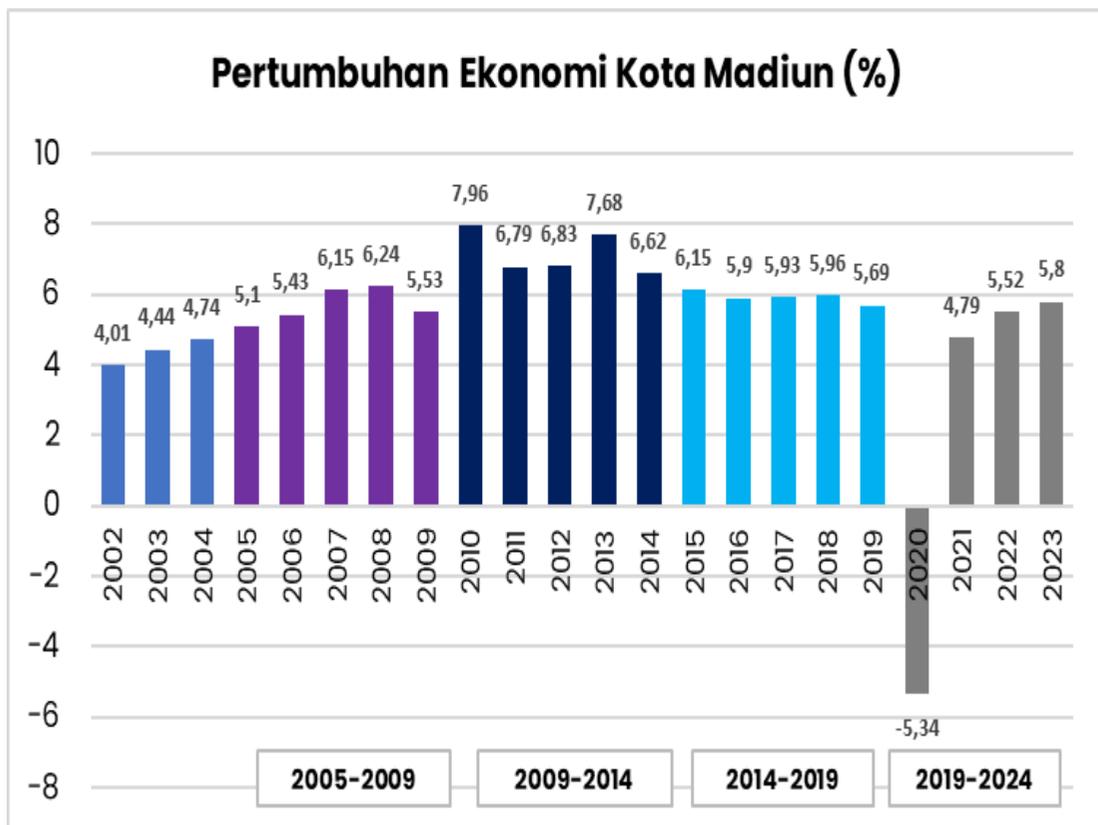
<b>SASARAN VISI RPJPD KOTA MADIUN TAHUN 2025-2029</b>					
<b>Peningkatan Pendapatan per Kapita</b>			<b>Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang</b>		
	Target 2025	Target 2029		Target 2025	Target 2029
PDRB per Kapita (Rp/Juta)	<b>62,99</b>	<b>76,12</b>	Tingkat Kemiskinan (%)	<b>4,55</b>	<b>4,02</b>
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	<b>24,12</b>	<b>24,68</b>	Rasio Gini (Indeks)	<b>0,396</b>	<b>0,359</b>
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	<b>14,56</b>	<b>14,95</b>	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>Kota Madiun Menjadi Kota berdaya Saing Tinggi</b>			<b>Daya Saing SDM dan Peningkatan Produktivitas Daerah</b>		
	Target 2025	Target 2029		Target 2025	Target 2029
Indeks Daya Saing Daerah	<b>3,86</b>	<b>3,91</b>	Indeks Pembangunan Manusia	<b>84,10</b>	<b>84,87</b>
			<b>Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission</b>		
				Target 2025	Target 2029
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	<b>-43,89</b>	<b>-47,89</b>

**Gambar 5. 1 Target sasaran Visi RPJPD Kota Madiun 2025-2029**

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

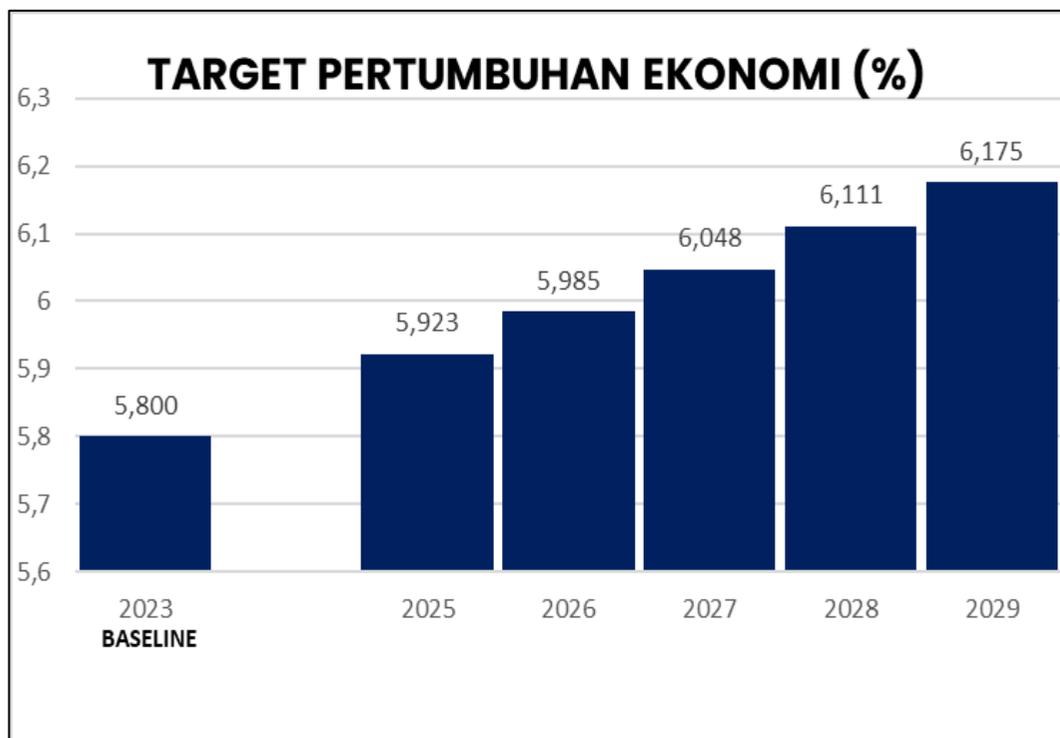
Setiap sasaran visi telah memiliki target per indikator masing-masing dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Beberapa indikator sasaran visi tersebut mencakup PDRB, tingkat kemiskinan, rasio gini, Indeks Daya Saing Daerah, IPM, dan penurunan intensitas emisi GRK. Target-target ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan terukur dalam pencapaian visi pembangunan daerah, memastikan bahwa setiap aspek pembangunan terarah dan dapat dievaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Dalam sasaran visi, terdapat empat indikator yang terkait dengan PDRB, yaitu PDRB Perkapita, Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan, serta proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi. Indikator-indikator ini menggambarkan kesejahteraan ekonomi per individu, peran penting sektor perdagangan dan industri dalam perekonomian, serta kontribusi Kota terhadap perekonomian provinsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun guna memahami dinamika ekonomi lokal dan mengarahkan kebijakan pembangunan yang efektif. Berikut merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun:



**Gambar 5. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 2002-2023**  
Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Pertumbuhan sempat naik pada Tahun 2011 mencapai 6,79% dan akhirnya menurun di Tahun-Tahun berikutnya, hingga jatuh dan mengalami minus di Tahun 2020 sebesar - 5,34%. Jatuhnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga diberlakukannya pembatasan sosial yang menghambat pergerakan perekonomian. Setelah pandemi mulai mereda dan pembatasan sosial dilonggarkan aktivitas ekonomi pun mulai bergerak dan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tumbuh pada Tahun 2022 sebesar 5,52% dan meningkat menjadi 5,8 di Tahun 2023. Lebih lanjut, target pertumbuhan ekonomi Kota Madiun untuk Periode I RPJPD yaitu periode 2025-2029 sebagai berikut:



**Gambar 5. 3 Target pertumbuhan ekonomi Kota Madiun Tahun 2025-2029**

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Target pertumbuhan ekonomi Kota Madiun diproyeksikan mengalami peningkatan dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pada Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,923% dan terus menunjukkan tren positif hingga mencapai 6,175% pada Tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan optimisme terhadap upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif, serta mengindikasikan adanya potensi ekonomi Kota Madiun. Proyeksi ini penting untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai target pembangunan ekonomi yang telah direncanakan.

## 5.2 Perwujudan Kota Madiun Sejahtera 2045 pada Periode Sasi Tahun 2025 - 2029

RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi "Madiun Maju Mendunia: Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan". Pembangunan jangka panjang ini dibagi ke dalam empat periode, dengan periode pertama berlangsung dari Tahun 2025 hingga 2029. Tema untuk periode pertama ini adalah "Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun".

**Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045**

<b>2025-2029 Tahap 1</b>	2030-2034 Tahap 2	2035-2039 Tahap 3	2040-2045 Tahap 4
<b>Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun</b>	Akselerasi Transformasi Kota Madiun	Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global	Perwujudan Kota Madiun Sejahtera

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

**Tabel 5. 2 Sasaran Indikator Makro Daerah pada Periode Sasi Tahun 2025-2029**

<b>Indikator Makro</b>	<b>Baseline 2025</b>	<b>2029</b>
1) Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,92	6,18
2) Indeks Pembangunan Manusia	84,10	84,87
3) Tingkat Kemiskinan (%)	4,55	4,02
4) Gini Ratio	0,396	0,359
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5,17

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Arah kebijakan Kota Madiun pada Tahun 2025-2029 difokuskan pada Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun. Rincian daripada arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

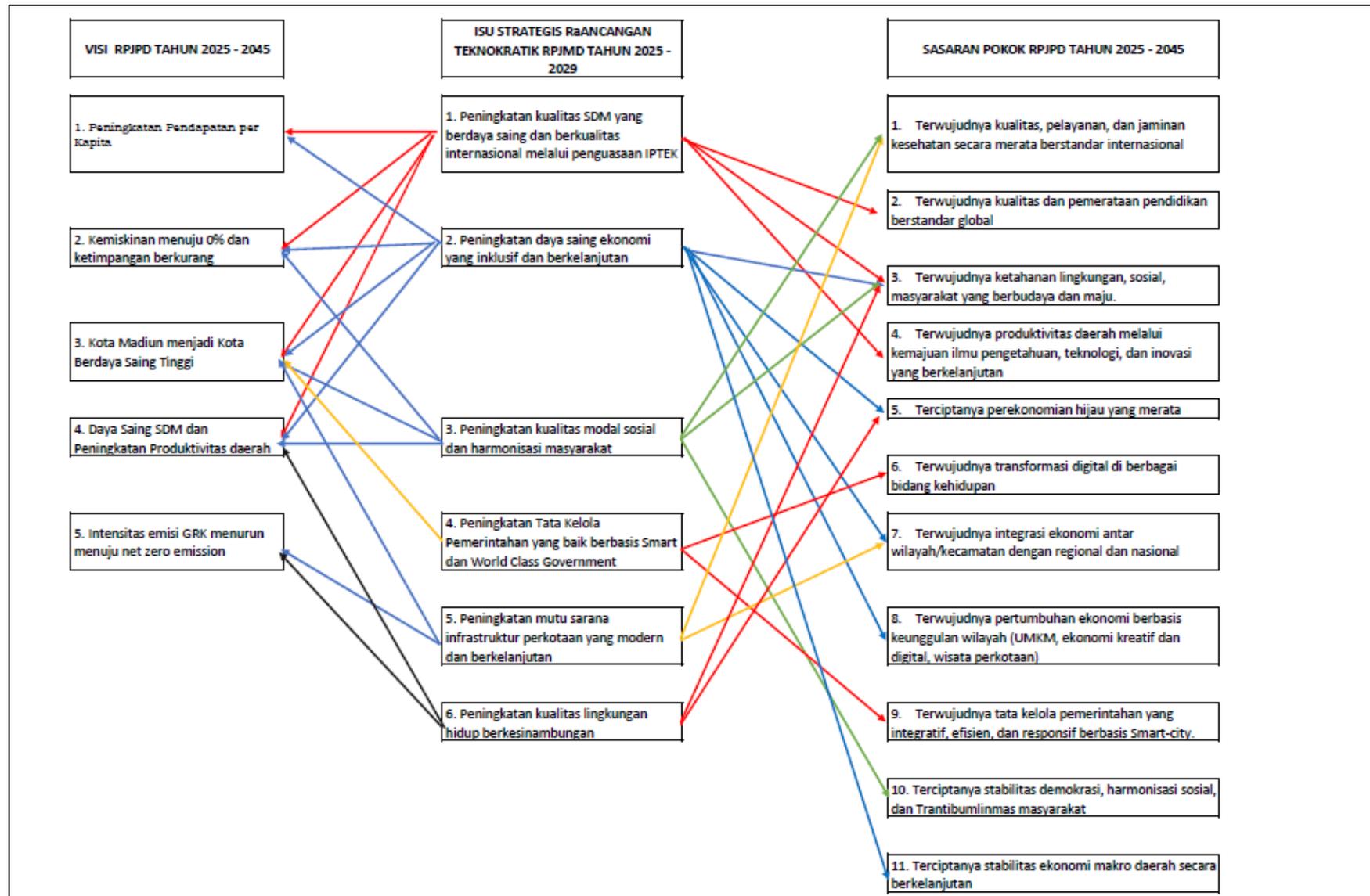
**Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Periode I (2025-2029) RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Isu Strategis Daerah</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			<b>2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Madiun Maju Mendunia: Kota yang Berinovasi,	Mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan Berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global,

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan
			2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)
(1)	(2)	(3)	(4)
Berbudaya, dan Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing global	Internasional melalui penguasaan IPTEK	kapabel, adaptif, sehat, dan produktif.
	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata dan Berkelanjutan	Peningkatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan  Peningkatan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian
		Peningkatan produktivitas daerah yang merata dan berkelanjutan	Peningkatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi
	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata dan Berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata.
	Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas	Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	Peningkatan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat
			Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan
			Peningkatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>world class government</i>	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Smart dan <i>World Class Government</i>	Penguatan transformasi pelayanan publik yang integratif, responsif, dan inovatif berbasis <i>smart-city</i> melalui birokrasi yang efektif dan efisien
Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan	Peningkatan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas yang	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat.	

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan
			2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Trantibumlinmas masyarakat	berkelanjutan pada masyarakat	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata	Peningkatan kualitas Pembangunan yang merata	Peningkatan pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045



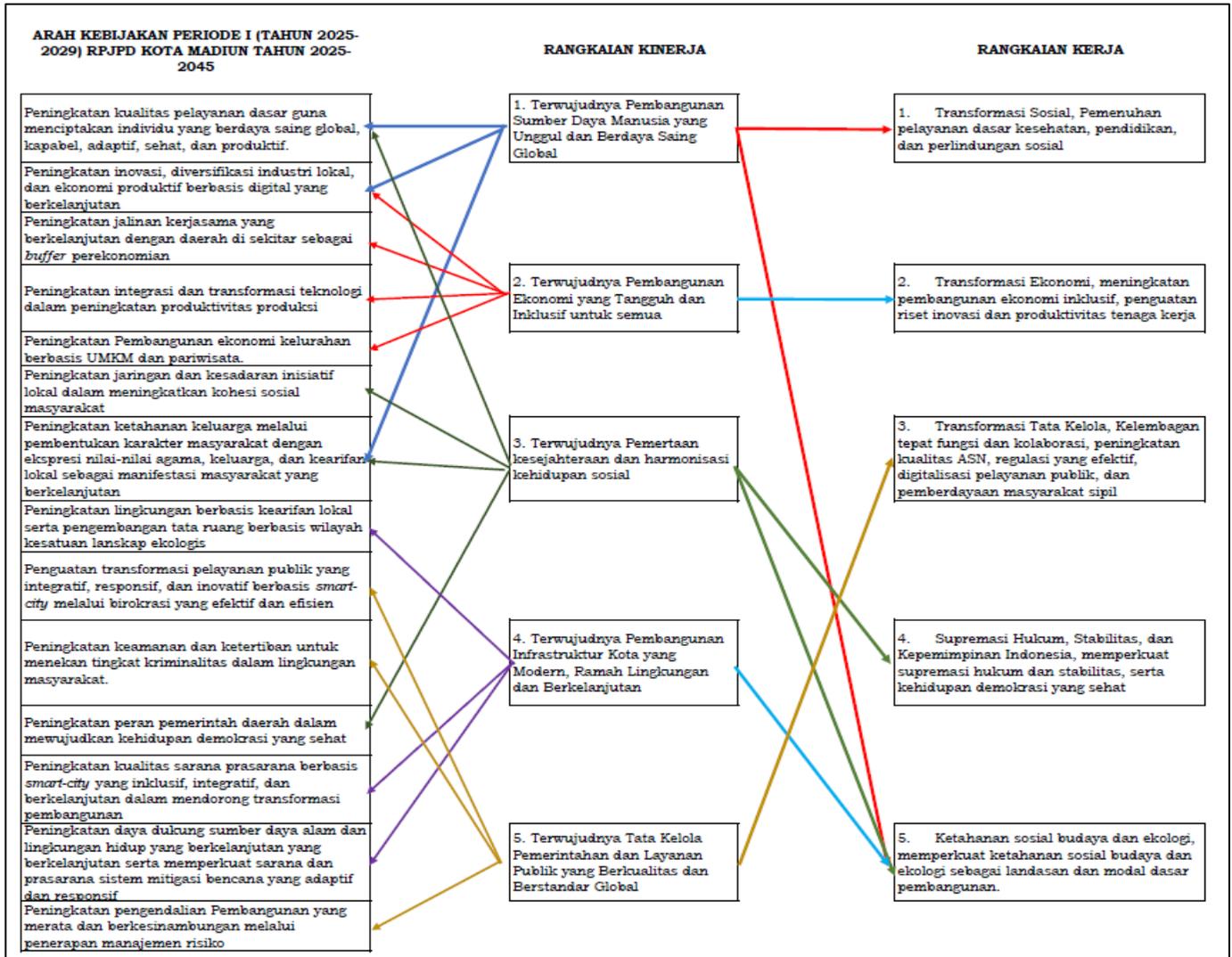
**Gambar 5. 4 Keterkaitan Sasaran Visi, Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dan Isu Strategis**

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Berdasarkan keterkaitan sasaran visi, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045, dan isu strategis Kota Madiun dapat disusun rangkaian kinerja yang sistematis dan terarah. Rangkaian kinerja ini dapat menjadi salah satu bahan penting dalam merumuskan visi. Rangkaian kinerja tersebut:

1. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Global
2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif untuk semua
3. Terwujudnya Pemertaan kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan sosial
4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Modern, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang Berkualitas dan Berstandar Global

Dari rangkaian kinerja tersebut, dan arah kebijakan periode I RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan rangkaian kerja yang menjadi salah satu bahan penting dalam merumuskan misi hingga program prioritas atau unggulan. Adanya rancangan kerja tersebut, setiap langkah pembangunan dapat direncanakan secara matang, memastikan bahwa setiap misi hingga program prioritas memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Berikut merupakan keterkaitan antara arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 periode I Kota Madiun, rangkaian kinerja dan rangkaian kerja Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029:



Gambar 5. 5 Perumusan Rangkaian Kerja

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

### 5.3 Tema dan Arah Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Tema untuk periode 2025-2029 adalah "**Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun**". Tema ini mencerminkan komitmen Kota Madiun untuk membangun dasar yang kokoh guna menghadapi tantangan masa depan sekaligus memanfaatkan peluang dalam transformasi perkotaan. Sebagai wilayah yang terus berkembang, Kota Madiun berada pada titik krusial dalam perjalanannya menuju modernisasi dan keberlanjutan.

Penguatan fondasi transformasi berarti memperkuat berbagai aspek fundamental yang mendukung pembangunan kota, mulai dari infrastruktur yang solid dan sistem pengelolaan yang efisien hingga peningkatan kualitas hidup warganya. Dalam konteks ini, transformasi bukan hanya berarti perubahan fisik atau teknologi, tetapi juga mencakup evolusi dalam cara kita mengelola sumber daya, berinteraksi dengan lingkungan, dan memberdayakan komunitas.

Tema dan Arah Pembangunan berdasarkan kebijakan transformasi dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 5. 4 Transformasi dan Arah Pembangunan Periode I (2025-2029) RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045**

No.	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan 2025 -2029
(1)	(2)	(3)
1	Transformasi Sosial	Pemerataan kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan di seluruh wilayah
		Peningkatan Kualitas dan pemerataan Pendidikan, daya saing dan kompetensi
		Peningkatan ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju yang terpadu dan berbasis satu data
2	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Produktivitas tenaga kerja
		Penerapan ekonomi hijau
		Pemertaaan akses digital
		Peningkatan Integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan)
3	Transformasi Tata Kelola	Manajemen ASN berbasis kompetensi
		Reformasi kelembagaan sesuai fungsi
		Peningkatan pelayanan public dan penyederhanaan birokrasi serta regulasi yang berpotensi menghambat investasi
4	Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan trantibumlinmas Daerah	Peningkatan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat
		Peningkatan stabilitas ekonomi makro daerah
		Peningkatan daya saing iklim investasi yang kondusif
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas
		Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
		Peningkatan lingkungan Hidup Berkualitas
		Peningkatan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		Peningkatan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisa, 2024

## **5.4 Rekomendasi Kebijakan**

Sebagai Periode I dalam RPJPD Tahun 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menitikberatkan pada penguatan fondasi transformasi. Dalam upaya untuk memperkuat fondasi tersebut dan berpedoman pada arah kebijakan dan arah pembangunan di dalam RPJPD Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

### **1. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

- a. Meningkatkan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai buffer perekonomian dan upaya untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga;
- c. Meningkatkan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana berbasis *smart-city* yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan;
- e. Meningkatkan pengendalian pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko;
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi secara merata;

### **2. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial**

#### **A. Penanganan Kemiskinan**

- a. Mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah/kecamatan/kelurahan;
- b. Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis UMKM dan pariwisata;
- c. Meningkatkan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata;
- d. Meningkatkan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata;
- e. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal.

## **B. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
- b. Meningkatkan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Penguatan pengetahuan, kapabilitas, dan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan kearifan local;
- e. Penguatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas tenaga Kesehatan;
- f. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal;
- g. Meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar internasional.

## **3. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan**

- a. Penguatan transformasi pelayanan publik yang integratif, responsif, dan inovatif berbasis smart-city melalui birokrasi yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat;
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- d. Meningkatkan kerjasama lintas wilayah melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- e. Meningkatkan profesionalisme dan anti-korupsi dalam tata kelola pemerintah daerah.

## **4. Rekomendasi Kebijakan Lingkungan Hidup**

- a. Meningkatkan lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
- b. Meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif;

- c. Penguatan kualitas akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, merata, dan baik.

## **5.5 Arah Pembangunan Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043**

Pada periode Tahun 2025-2029, arah pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai serta berwawasan lingkungan untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Proses ini akan mempertimbangkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2023-2043, sehingga arah pembangunan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) Tahun kedua, ketiga dan keempat terdiri atas:

### **A. Perwujudan Struktur Ruang**

Dalam indikasi program perwujudan struktur ruang diarahkan pada perwujudan sistem pusat pelayanan, perwujudan sistem jaringan transportasi, perwujudan sistem jaringan energi, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, perwujudan sistem jaringan sumber daya air, perwujudan infrastruktur perkotaan.

Adapun indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan adalah pemantapan dan pengembangan Pusat, Sub Pusat Pelayanan Kota, serta Pusat Lingkungan, penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk setiap Wilayah Perencanaan (WP) (Manguharjo, Kartoharjo dan Taman), dan pembangunan pusat pertumbuhan baru untuk memperkuat karakteristik wilayah.

Dalam pengembangan jaringan transportasi, sistem jaringan jalan diarahkan untuk pembangunan jalan strategis kota, yakni jalan *Ringroad* Timur, pengaturan parkir *on street* dan pengembangan parkir *off street* pada kawasan perdagangan jasa regional, pemantapan dan pengembangan fungsi terminal tipe A yang sejalan dengan pengembangan angkutan komuter dalam kota,

pengembangan fasilitas *park and ride*, pengembangan jalur bus sekolah, dan pengembangan shelter. Pengembangan sistem jaringan Kereta Api diarahkan untuk pengembangan Kereta Komuter yang melayani mobilitas untuk Kota Madiun dan sekitarnya, dan reaktivasi jalur mati dan pengembangan angkutan komuter.

Upaya untuk mewujudkan sistem jaringan energi, indikasi program jangka menengah diarahkan pada penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga, dan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik. Pengembangan sistem Jaringan Telekomunikasi diarahkan untuk pengembangan jaringan serat optik untuk memperluas cakupan pelayanan kebutuhan jaringan telekomunikasi, pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan BTS bersama. Untuk pengembangan sistem Jaringan Sumber Daya Air, indikasi program diarahkan pada pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi, pembatasan jaringan irigasi air tanah, pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir, dan rencana pembangunan dan pemeliharaan Embung.

Indikasi program dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu pembatasan pemanfaatan sumur bor, pengembangan unit air baku, pengembangan unit produksi, pengembangan jaringan produksi, pengembangan unit distribusi, optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih. Untuk infrastruktur limbah, indikasi program jangka menengah adalah untuk pengembangan IPAL Terpadu dan pengembangan IPLT skala kawasan. Program jangka menengah untuk mewujudkan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi menyediakan tempat penampungan limbah B3 kota yang memadai, dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan limbah B3. Upaya peningkatan Sistem Jaringan Persampahan dilakukan dengan pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *Control Land Fill*, pengembangan TPST di setiap kecamatan, pengembangan TPS 3R pada setiap Kelurahan, pengembangan program Bank Sampah, dan pengelolaan persampahan dengan Prinsip 5R.

Indikasi program untuk pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana dilakukan melalui program pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Sistem Perambuan, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sistem Jaringan Drainase maka indikasi program jangka menengah yang akan dilakukan yaitu pengembangan Sistem Jaringan Terpadu dan Terintegrasi, pengembangan Drainase Berbasis Alam melalui Pengembangan Pons di sekitar wilayah Permukiman, dan pengembangan Sumur Resapan dan Lubang Biopori.

Sistem jaringan lain yang akan dikembangkan dalam waktu jangka menengah adalah Jalur Sepeda, melalui pengembangan jalur sepeda yang menjamin keamanan penggunaannya dan sistem jaringan Pejalan Kaki, melalui pengembangan Jalur Pejalan Kaki untuk menunjang aktivitas utama Kota Madiun.

## **B. Perwujudan Pola Ruang.**

Pola ruang diarahkan pada Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung, Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya, dan Perwujudan Kawasan Strategis Kota. Indikasi program perwujudan Kawasan Lindung diarahkan pada pengendalian dan pemeliharaan badan air, penataan dan pemeliharaan Kawasan sempadan sungai, penataan dan pemeliharaan Kawasan sempadan sekitar mata air, penataan dan pemeliharaan Kawasan sempadan sekitar Embung, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selanjutnya dalam perwujudan Kawasan RIH diarahkan pada pemeliharaan Rimba Kota, Taman Kota, dan Taman Kelurahan. Penyediaan RTIH di tingkat Kota, Kelurahan, Perumahan dan Kawasan Industri.

Pengembangan perwujudan pola ruang dalam perwujudan Perwujudan Kawasan Permukiman, terdapat beberapa program yang mendukung perwujudan Kawasan tersebut. Program tersebut Penataan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan pada Kawasan Perumahan, Pengembangan Kawasan Perumahan secara Vertikal berupa Rumah Susun, Perbaikan Kualitas Perumahan dengan Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Kumuh, Pengembangan Kampung Tematik sebagai Upaya Perbaikan Lingkungan dan Pengembangan Pariwisata Kota Madiun, Penyediaan RTH Publik 20%,

Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Meningkatkan Upaya "Tanggap" terhadap Bencana, dan Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini terhadap Bencana yang Berpotensi Terjadi.

Pengembangan Perwujudan Kawasan Pariwisata, terdapat beberapa program yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Pariwisata, Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), Pengembangan Atraksi Wisata yang Mengakomodir Wisata Unggulan, Pengembangan Kegiatan Festival Wisata, Parade Budaya maupun Gelar Seni Budaya, Pengembangan Kawasan Pariwisata *Peceland*, Pengembangan Kawasan Wisata Belanja dan Kuliner, dan Pengembangan Jalur Wisata pada Lokasi-Lokasi Bersejarah dan Memiliki Nilai Wisata / Penelitian / Pendidikan.

### **C. Perwujudan Kawasan Strategis Kota.**

Kawasan strategis Kota dapat dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, sudut kepentingan sosial dan budaya, serta dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi terdiri dari Kawasan 6 (Enam) Koridor Strategis, PSC (Pahlawan Street Center), Kawasan Proliman dan *Peceland*. Indikasi program diarahkan pada pengembangan sarana prasarana penunjang, penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, dan pengembangan atraksi dan promosi wisata.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu Komplek Kawasan Masjid Nurhidayatulloh-Kuncen, Makam Kuno Kuncen, dan Sendang Kuncen. Program dalam Kawasan tersebut diarahkan pada Pemeliharaan terhadap Bangunan dan Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Cagar Budaya, Promosi dan Kampanye terhadap Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengembangan Wisata Budaya.

Kawasan Industri Nasional Kereta Api (INKA) yang merupakan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi diarahkan menjadi Kawasan Wisata Edukasi, dan integrasi dengan Rute / Jalur Wisata.

## **Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana**

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan *highlight* intervensi umum dan khusus pembangunan wilayah dan sarana prasarana Tahun 2025-2029 berikut ini:

### **Kebijakan Umum**

Arah kebijakan umum akan berfokus pada penguatan fondasi transformasi Kota Madiun.

1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
2. Peningkatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan;
3. Peningkatan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
4. Peningkatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
5. Penguatan transformasi pelayanan publik yang integratif, responsif, dan inovatif berbasis *smart-city melalui birokrasi yang efektif dan efisien*;
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis *smart-city* yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan;
7. Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif;
8. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat; dan
9. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

### **Kebijakan Khusus**

Arah intervensi kebijakan diarahkan untuk pemerataan pembangunan dengan menjaga ketahanan keluarga. Selain itu untuk memperkuat karakter masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial.

1. Peningkatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata.
2. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan.
3. Peningkatan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai buffer perekonomian.
4. Peningkatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi.
5. Peningkatan pengendalian pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko.

## **5.6 Indikasi Program Unggulan**

Pada periode 2025-2029, fokus pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai serta berwawasan lingkungan untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 5. 5 Keterkaitan sasaran strategis, strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas**

<b>TRANSFORMASI</b>	<b>ARAH PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029</b>		<b>RANGKAIAN KERJA</b>	<b>RANGKAIAN KERJA</b>	<b>INDIKASI PROGRAM UNGGULAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>	1	Pemerataan kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan di seluruh wilayah	1. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Global	1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	1	Program peningkatan wajib belajar 13 Tahun
	2	Peningkatan Kualitas dan pemerataan Pendidikan, daya saing dan kompetensi	3. Terwujudnya Pemertaan kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan sosial	3. Peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	2	Program penanganan Stunting
	3	Peningkatan ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju yang terpadu dan berbasis satu data	5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang Berkualitas dan Berstandar Global	4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta kehidupan demokrasi yang sehat	3	Program pengentasan kemiskinan
				5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	4	Program Perluasan Jaminan Sosial
					5	Program pengembangan infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan sanitasi) yang berkualitas dan berkelanjutan
<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>	1	Peningkatan Produktivitas tenaga kerja	2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif untuk semua	2. Meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif, penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	6	Program penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
	2	Penerapan ekonomi hijau	3. Terwujudnya Pemertaan kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan sosial	4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta kehidupan demokrasi yang sehat	7	Program pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, merata, dan baik

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029		RANGKAIAN KERJA	RANGKAIAN KERJA	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN	
1	2		3	4	5	
	3	Pemertaaan akses digital	4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Modern, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	8	Program peningkatan akses dan ketersediaan hunian layak di perkotaan.
	4	Peningkatan Integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan			9	Program penguatan Kota berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan)
	5	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan)			10	Program peningkatan kualitas ekosistem riset dan inovasi
					11	Program pengembangan infrastruktur pariwisata yang integratif berbasis kewilayahan
<b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>	1	Manajemen ASN berbasis kompetensi	5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang Berkualitas dan Berstandar Global	3. Peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	12	Program pengembangan kapabilitas dan kualitas tenaga kerja
	2	Reformasi kelembagaan sesuai fungsi			13	Program peningkatan kerjasama antar daerah sekitar
	3	Peningkatan pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi serta regulasi yang berpotensi menghambat investasi			14	Program pengembangan sarana prasarana infrastruktur transportasi
					15	Program Reformasi Birokrasi
<b>SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA</b>	1	Peningkatan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat	2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif untuk semua	2. Meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif, penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	16	Program peningkatan kapasitas Aparatur Daerah yang adaptif dan responsif
	2	Peningkatan ekonomi makro Daerah inklusif	3. Terwujudnya Pemertaaan kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan sosial	4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta kehidupan demokrasi yang sehat	17	Program penigkatan pelayanan publik

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029		RANGKAIAN KERJA	RANGKAIAN KERJA	INDIKASI PROGRAM UNGGULAN	
1	2		3	4	5	
	3	Peningkatan Daya saing iklim investasi yang kondusif	5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang Berkualitas dan Berstandar Global	5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	18	Program peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan
					19	Program digitalisasi pelayanan pemerintahan
<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>	1	Peningkatan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas	3. Terwujudnya Pemertaan kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan sosial	4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta kehidupan demokrasi yang sehat	20	Program peningkatan stabilitas harga
	2	Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Modern, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	21	Program penguatan pengendalian inflasi
	3	Peningkatan lingkungan Hidup Berkualitas			22	Program peningkatan kapasitas fiskal daerah
	4	Peningkatan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			23	Program penguatan iklim demokrasi yang sehat
	5	Peningkatan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			24	Program peningkatan nilai kebudayaan lokal
					25	Program pengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan berbasis <i>circular economy</i>
					26	Program pengembangan <i>urban farming</i>
					27	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup
					28	Program peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
					29	Program penguatan pemberdayaan pemuda, disabilitas, dan lansia

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun

## **BAB 6 PENUTUP**

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Madiun 2025 - 2029 ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun 2025 - 2045, mengevaluasi kinerja periode sebelumnya, serta menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Madiun untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama kurun waktu 2025 - 2029. dalam pelaksanaan RPJMD Kota Madiun 2025 - 2029 diperlukan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

### **6.1 Pedoman Transisi**

Dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mempertahankan pencapaian sebelumnya, memerlukan integrasi kebijakan di berbagai level baik itu nasional, provinsi maupun Kota Madiun. Setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026, penting untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun sebagai panduan untuk lima Tahun mendatang, yakni pada Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pada periode transisi ini, diperlukan panduan yang kuat untuk menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2026. Panduan ini akan didasarkan pada hasil Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 Kota Madiun, pedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 - 2029, proses perencanaan harus mampu mengakomodasi perubahan yang mungkin terjadi dan menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat Kota Madiun. Langkah ini penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Beberapa langkah penting dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD meliputi:

1. Mengidentifikasi visi misi dan sasaran pokok per periode dalam RPJPD Kota Madiun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Madiun 2025 - 2029.
2. Inventarisasi Program dan Kegiatan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah berjalan pada periode sebelumnya, serta menilai capaian dan hambatannya.
3. Evaluasi Kinerja pembangunan selama periode sebelumnya untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.
4. Penetapan Prioritas: Menetapkan prioritas pembangunan untuk periode 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi aktual Kota Madiun, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan arah kebijakan nasional.
5. Sosialisasi Rancangan terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait RPJMD 2025-2029 untuk memastikan pemahaman dan dukungan yang maksimal.
6. Penguatan Kelembagaan pemerintah daerah agar mampu menjalankan fungsi koordinasi, implementasi, dan pengawasan pembangunan dengan lebih efektif.

Pedoman transisi ini disusun untuk memastikan kelancaran peralihan dari periode pembangunan sebelumnya ke periode 2025-2029. Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029, diperlukan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun wajib melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025 - 2029.
2. Apabila terdapat program dan kegiatan baru yang dianggap penting dan strategis, Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan perubahan RPJMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah Kota Madiun wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahun sebagai penjabaran Tahunan dari RPJMD 2025 - 2029.
4. Pemerintah Kota Madiun wajib melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan RPJMD 2025 - 2029 secara berkala.

## **6.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Madiun 2025-2029 menekankan bahwa rancangan teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan lima Tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pendekatan teknokratik ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks ini, rancangan teknokratik disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Madiun periode 2025-2029. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan diharapkan lebih menyeluruh, sistematis, terstruktur, serta memiliki kejelasan dalam pentahapan Tahunan maupun kejelasan atas tujuan pada akhir periode perencanaan jangka menengah.

Rancangan teknokratik RPJMD ini berfungsi sebagai landasan dalam menyusun rancangan awal RPJMD. Setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, rancangan teknokratik ini akan disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program yang mereka usung untuk menjadi rancangan awal RPJMD Kota Madiun 2025-2029. Integrasi visi dan misi pemimpin terpilih akan memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, menyesuaikan prioritas pembangunan dengan janji politik dan aspirasi yang diutarakan kepada masyarakat selama masa kampanye. Dengan proses penyempurnaan ini, perencanaan pembangunan Kota Madiun dapat menjadi lebih terarah dan terukur. Setiap langkah dalam perencanaan akan memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi teknokratik maupun aspirasi politik, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2025-2029, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Madiun wajib berkomitmen dan terlibat aktif dalam pelaksanaan RPJMD 2025 - 2029.

2. Pemerintah Kota Madiun wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD 2025 - 2029.
3. Pemerintah Kota Madiun perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah disekitarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD 2025 - 2029.
4. Pemerintah Kota Madiun wajib melibatkan peran serta masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan RPJMD 2025 - 2029.